

**ISSN 1693-1351**

# **Esagenang**

**Jurnal Hasil Penelitian Jarahnitra**

**Vol. 5, No. 10 Agustus 2007**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL MANADO  
2007**

# Esagenang

Jurnal Hasil Penelitian Jarahnitra

Vol. 5, No. 10 Agustus 2007. ISSN 1693-1351

## SUSUNAN REDAKSI

**Pelindung** : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film

**Penanggung Jawab**: Kepala Balai Pelestarian Jarahnitra Manado

**Pimpinan Redaksi** : Salmin Djakaria

**Dewan Redaksi** : Magdalena J. Sumarauw

Yoran Lamangida

Joyly R. Rawis

Sri Suharjo

**Sirkulasi** : Vera Mandagi

Lisbeth Putong

Olien Siby

### **Penerbit dan Redaksi :**

Dokumentasi, Informasi dan Publikasi

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado**

Jl. Katamso, Bumi Beringin LingkunganV

Telp. (0431) 855311 Fax. (0431) 864926

Manado



## PENGANTAR REDAKSI

**Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan-Nya Dewan Redaksi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado dapat melaksanakan tugas menerbitkan Jurnal hasil penelitian. Jurnal Esagenang ini terbit setiap 6 bulan sekali yakni bulan Februari dan Agustus. Jurnal kesepuluh Vol. 5, No. 10 Agustus 2007 memuat 5 judul penelitian yaitu :**

**Gorontalo Abad Ke-19 oleh Hasanuddin penelitian tahun 2001; Pengadopsian Lagu-Lagu Rohani Kristen Dalam Masamper oleh Magdalena J. Sumarauw penelitian tahun 2006; Ketahanan Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Maria Tangkilisan dan Joyly Rawis penelitian tahun 2006; Peranan Elite Lokal Dalam Keteraturan Sosial Budaya Masyarakat Bolaang Mongondow oleh Pristiwanto penelitian tahun 2006; Pemekaran Wilayah : Kabupaten Gorontalo-Bolaemo Di Provinsi Gorontalo (Suatu Tinjauan Sejarah) oleh Yoran Lamangida penelitian tahun 2006.**

Kami menyadari bahwa Jurnal ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan jurnal ini. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga diterbitkannya hasil penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.

Manado, Agustus 2007

Redaksi

## SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek kesejarahan, tradisi, kepercayaan, dan kesenian di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan tugas diatas maka melalui tenaga fungsional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado melaksanakan penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna memahami serta menambah khasanah sejarah dan budaya.

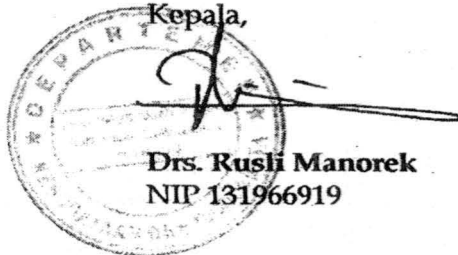
Kami menyadari bahwa terwujudnya usaha ini berkat kerjasama dari berbagai pihak terutama peneliti dan pemerintah daerah di wilayah kerja yang menjadi lokasi penelitian serta para informan. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah membantu usaha penelitian hingga penerbitan jurnal ini kami ucapkan terima kasih. Kami mengharapkan saran dari pembaca demi penyempurnaan penyusunan dalam penerbitan mendatang.

*Mototabian, Mototanoban, bo Mototampiaan  
Somahe Kai Kehage*

*Pakatuan Wo Pakalawiren*

Manado, Agustus 2008

Kepala,



**Drs. Rusli Manorek**  
NIP 131966919

**SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Saya menyambut baik atas diterbitkannya Jurnal Hasil Penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo tahun 2007 yang tercermin dalam sistem sosial, sistem nilai, sistem kepercayaan, lingkungan budaya dan tradisi lisan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Jurnal ini merupakan media publikasi hasil penelitian oleh staf peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo. Jurnal hasil penelitian sejarah dan nilai tradisional Vol. 5. No. 10 Agustus 2007 sebagai langkah maju yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun media informasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi masalah kesejarahan dan kenilaitradisional yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan bangsa.

Akhirnya saya menghargai dan menyambut gembira atas terbitnya jurnal ini, dengan harapan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penelitian lanjutan dan bagi kepentingan masyarakat luas.

Manado, November 2007  
Direktur Tradisi,



**I.G.N. Widja, SH**  
**NIP 130606820**

## DAFTAR ISI

### Susunan Dewan Redaksi

|   |          |
|---|----------|
| Pengantar Redaksi.....  | i        |
| Sambutan Kepala Balai Pelestarian Jarahnitra Manado .....   | ii       |
| Sambutan Direktur Tradisi.....  | iii      |
| Daftar Isi .....  | iv       |
| 1. Gorontalo Abad Ke-19<br>Oleh : Hasanuddin .....  | 1 – 59   |
| 2. Pengadopsian Lagu-Lagu Rohani Kristen Dalam<br>Masamper<br>Oleh : Magdalena J. Sumarauw.....                                 | 60 – 103 |
| 3. Ketahanan Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan<br>Kabupaten Kepulauan Talaud<br>Oleh : Maria Tangkilisan dan Joyly Rawis..... | 104–143  |
| 4. Peranan Elite Lokal Dalam Keteraturan Sosial Budaya<br>Masyarakat Bolaang Mongondow<br>Oleh : Pristiwanto .....              | 144–192  |
| 5. Pemekaran Wilayah : Kabupaten Gorontalo-Bolaemo Di<br>Provinsi Gorontalo (Suatu Tinjauan Sejarah)<br>Oleh : Yoran Lamangida  | 193–237  |

# GORONTALO ABAD KE-19

Hasanuddin

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dasawarsa ini, historiografi Indonesia ditandai beberapa perkembangan penting, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari kuantitatif disaksikan semakin banyaknya bermunculan penulisan karya sejarah, baik itu ditulis sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing. Karya-karya itu dapat merupakan sejarah yang bersifat umum dan dapat pula sejarah lokal. Terlepas dari tingkat kualitasnya yang berbeda-beda, karya-karya sejarah telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi upaya pemahaman yang lebih akurat terhadap sejarah Indonesia secara keseluruhan.

Menarik dikaji, sejarah Indonesia ditinjau dari terbentuknya sebagai suatu negara (*nation-state*) baru terlihat pada awal abad ke-20. Sebelumnya, periode sejarah Indonesia—arti politik—mengacu pada kerajaan-kerajaan tradisional yang pendukungnya berasal dari berbagai identitas suku bangsa yang dominan nasion Indonesia lama mempunyai sejarahnya sendiri.

Sejarah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia secara individu maupun kelompok dengan meninggalkan jejak baik yang berbentuk fisik seperti bangunan-bangunan, naskah-naskah, dan lain-lain atau dapat dilihat dan diraba oleh manusia, maupun yang berbentuk non fisik seperti legenda, mitos, dan dongeng-dongeng yang banyak tersebar di dalam kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut, maka dibutuhkan beberapa sumber, baik berupa dokumen (bukti tertulis) maupun sumber yang harus digali pada sejumlah tokoh yang masih hidup.<sup>1</sup>

Dari penulisan sejarah menunjukkan bahwa pengaruh-pengaruh dari pembawaan masyarakat atau kebudayaan yang menguraikan tentang masa lampunya seperti kerajaan, raja-raja, kerabat kerajaan dan sebagainya tidak terlepas dari proses mitologisasi dengan membuat cerita sebagai mitos yang bertolak dari kepercayaan bahwa apa yang dikonstruksikan sebagai uraian penjelasan adalah realitas dalam arti obyektif.

Sejarah mengenai Gorontalo-Belanda menamakan Huluntalo—masih kurang jelas, hal ini disebabkan kurangnya data pendukung primer dan penulisan tentang

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 96.

sejarah Gorontalo. Beberapa sumber menjelaskan bahwa Gorontalo di bawah pengaruh (*vasal*) Kesultanan Ternate—Baabullah Daud Syah dikenal sebagai “Raja 72 pulau” pada masa puncak kejayaannya—dengan menempatkan pasukannya di Gorontalo.<sup>2</sup>

Kedatangan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) di Utara Pulau Sulawesi—*Noord Celebes*—dan membangun benteng pertahanan di Manado tahun 1658 bertujuan untuk menanggulangi pengaruh Spanyol dan Ternate di daerah tersebut. Hal ini juga membawa pengaruh bagi Gorontalo dengan adanya pengembangan kekuasaan VOC pada tahun 1667 di daerah tersebut termasuk Limboto.<sup>3</sup> Sampai masa pemerintahan Kolonial Belanda mengikat Gorontalo melalui kontrak/perjanjian tanggal 9 Januari 1828 memuat 15 artikel, tanggal 16 Januari 1831 memuat 6 artikel dan tanggal 1 Maret 1838 memuat 6 artikel.<sup>4</sup>

Sejarah Gorontalo sebagai suatu rekonstruksi atau penggambaran bagaimana kehidupan Gorontalo telah mengalami kemajuan atau kemunduran melalui proses sejarah, sehingga tampak wujud atau wajah seperti yang dewasa ini kita hadapi. Justru perkembangan sejarahlah yang mampu menunjukkan bagaimana sistem kemasyarakatan dengan struktur sosial, ekonomi dan politiknya tumbuh dan mencapai perkembangan dengan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di daerah ini. Secara langsung menampilkan interaksi antara berbagai unsur serta saling pengaruh dan saling ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Pendekatan yang mencakup berbagai dimensi ini bertolak dari pengertian bahwa Gorontalo dipandang sebagai suatu kesatuan dimana terjadi interaksi dan jaringan-jaringan terbentuk dengan menghasilkan sistem dan struktur.

Penulisan sejarah yang ingin dicapai dengan memandang setiap perkembangan Gorontalo sebagai suatu kesatuan. Sebagai konsep kesatuan mencakup segala aspek perkembangan sejarah itu di masa lalu. Salah satu konsep kesatuan yang mencakup berbagai unsur dan dimensi, interaksi antara penduduk asli dan pendatang/ pedagang dapat saling mempengaruhi antara dimensi kesatuan itu. Sehubungan dengan ini maka masalah komunikasi sangat penting karena jalur-jalur komunikasilah yang membentuk jaringan antara golongan lapisan sosial. Faktor-faktor dari luar memegang peranan penting melalui hubungan-hubungan pelayaran dan perdagangan, baik datang dari Nusantara maupun luar Nusantara dengan menciptakan komunikasi sosial dan menimbulkan aliran besar kultural yang

<sup>2</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 130; Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 57; B.J. Haga. 1931. *De Lima-pahalaä (Gorontalo): Volksordering, adatrecht en bestuurspolitiek*. Deel. LXXI. Bandoeng: A.C Nix & Co., hlm. 35-36.

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 99.

<sup>4</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.5. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, hlm. 374-379.

membawa ideologi, sistem kepercayaan, sistem politik dan berbagai unsur kebudayaan lainnya seperti adat istiadat, kesenian, kesusastraan dan sebagainya. Hubungan interaksi antarunit terjadi lewat komunikasi, mulai dari hubungan perkawinan, perang, diplomasi sampai pada pelayaran dan perdagangan. Dari jaringan komunikasi itu timbullah proses integrasi di antara daerah-daerah dan unsur-unsur sosialnya. Dengan perkembangan pusat-pusat kekuasaan pada waktu tertentu, perjalanan sejarah Gorontalo secara jelas menunjukkan kecenderungan ke arah integrasi progresif yang sudah barang tentu proses tersebut mengalami pasang surut.

Tujuan penulisan pada periode abad ke-19, karena periode ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Di samping itu tulisan sejarah Gorontalo pada pasca masa Kolonial Belanda telah banyak ditulis—khususnya peranan dan perjuangan Nani Wartabone. Persoalan ini melandasi penulisan untuk menggambarkan kembali sejarah Gorontalo pada masa Kolonial Belanda. Beberapa sejarawan seperti Sartono Kartodirdjo—banyak meneliti tentang gerakan sosial—menyatakan bahwa pada masa Kolonial Belanda khususnya abad ke-19 merupakan periode pergolakan sosial, hal ini dapat dilihat disertasinya "*The Peasants Revolt Banten in 1888*" (Pemberontakan Petani Banten tahun 1888). Demikian pula A.B. Lapien dalam disertasinya tentang kawasan laut Sulawesi abad ke-19 berjudul "*Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*", menyatakan bahwa dalam periode abad ke-19 sangat erat kaitannya dengan keadaan sekarang. Sebab perluasan daerah kekuasaan Hindia-Belanda, selanjutnya membentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memperoleh bentuk daerah otonomi pada periode tersebut.

Sampai sekarang historiografi Indonesia masih kurang mengkaji kerajaan-kerajaan tradisional dalam kerangka permasalahan di atas. Dilihat dari proses perkembangan sejarah Indonesia, maka penting untuk mengkaji Gorontalo yang juga dapat memberi arti dalam wawasan kesejarahan kerajaan tradisional di Nusantara.

## 1.2. Tujuan Penulisan

Kerajaan Gorontalo mempunyai makna dalam arti yang luas mencakup semua aktifitas ke dalam federasi lima kerajaan (*Limo lo pahalaa*) yaitu Gorontalo (Hulontalo), Limboto (Limoeto), Bone-Suwawa-Bintauna, Atinggola (Andagile), dan Bolango kemudian digantikan kedudukannya oleh Boalemo (Baolemo).<sup>5</sup> Bagian lain hubungan komunikasi serta peranan pendatang/pedagang dari Nusantara dan luar Nusantara membentuk dan mengembangkannya menjadi komunitas perkampungan/pemukiman Bugis, Arab, Belanda, Cina, dan sebagainya.

Penulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengapa Gorontalo sebagai

<sup>5</sup> G.W.C Baron van Hoevel. 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", *De Assistant-Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J. Brill, hlm. 4.

kerajaan yang memiliki akar sejarah dan peranan dominan dalam percaturan politik, ekonomi, dan sosial pada federasi *Limo lo pahalaa* mengalami kemerosotan sampai dihapuskannya kedudukan raja. Perlu dipahami bahwa federasi ini bersama-sama berpedoman pada agama dan adat istiadat, di samping itu juga pada kepentingan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan militernya. Bagaimana sistem kemasyarakatan dengan struktur sosial dan politiknya yang berubah-ubah akibat kebijakan pemerintah kolonial. Bagaimana peranan kemaritiman Gorontalo dalam pelayaran dan perdagangan serta hubungannya dengan Nusantara. Meskipun tidak semua peristiwa tercantum dalam tulisan ini, namun dalam penulisan yang ingin dicapai adalah :

- a. Sebagai metode pelengkap untuk memperluas bahan-bahan dokumen, sehingga rekonstruksi tentang peristiwa sejarah Gorontalo menjadi lebih luas dimensinya.
- b. Mengungkap sejauh mungkin kemajuan dan kemunduran Gorontalo. Hasil yang diharapkan dari pengungkapan tersebut adalah bertambahnya pemahaman mengenai proses-proses yang melandasi maju mundurnya suatu kerajaan di Nusantara. Diharapkan dapat membantu mengingatkan kembali proses perjalanan sejarah Gorontalo
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pelengkap atau bahan pembanding terhadap studi tentang sejarah Gorontalo dan dapat menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan masa akan datang.

### 1.3. Ruang Lingkup

Gorontalo mempunyai makna dalam arti yang luas mencakup aktivitas kerajaan serta pengaruh Kolonial Belanda di masa lampau, dan menyangkut pula kegiatan-kegiatan sosial ekonomi daerah. Dalam sejarahnya, perubahan dipandang sebagai hal yang bersifat terus menerus dan saling berhubungan. Melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks dan saling berkaitan, raja dan pembesar kerajaan bersama-sama dengan indi-vidu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dipandang telah memberikan sumbangan pada usaha perubahan-perubahan di lingkungan mereka, baik di dalam maupun di luar kerajaan.

Permasalahan yang muncul dalam penulisan kesejarahan sangat banyak dan kompleks, sehingga memerlukan telaah sejarah yang lebih kritis agar kompleksitasnya yang terkandung dapat diungkapkan secara lebih jelas. Permasalahan-permasalahan yang muncul dapat disederhanakan sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap mewakili dari totalitas permasalahan yang ada di dalamnya, maka penulisan ini memaparkan pokok permasalahan Gorontalo yang merupakan salah satu kerajaan tradisional di Indonesia.



#### 1.4. Metode Penulisan

Landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan merekonstruksikannya menjadi suatu sejarah yang utuh.<sup>6</sup> Suatu penulisan kesejarahan akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan apabila menggunakan beberapa metode yang ditentukan oleh pokok permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci atas permasalahan yang dibahas. Penelitian sejarah sebagai pertanggungjawaban saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga penulisan sejarah sebagai peristiwa dapat dikisahkan.

Dalam rangkaian penulisan sejarah Gorontalo, maka dipakai metode kerja dalam mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan masalah di atas, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dengan demikian kegiatan ini dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

##### A) Tahap Persiapan

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, melakukan persiapan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Gorontalo pada masa lalu yaitu: mulai dari pemilihan judul dan aspek-aspek lain seperti menentukan jadwal penelitian, pengumpulan data, serta penyusunan laporan.

Dalam kegiatan tersebut ada empat tahap yang digunakan yaitu melakukan pencarian terhadap jejak-jejak yang ditinggalkan, meneliti jejak-jejak peninggalan Gorontalo secara kritis, berusaha untuk membayangkan mengenai bentuk dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif dari peristiwa masa lampau itu hingga sesuai jejak-jejaknya dengan imajinasi ilmiah.<sup>7</sup>

##### B) Tahap Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan fakta-fakta sejarah ada dua cara yang digunakan yaitu melalui sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu upaya pencarian, pengumpulan dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan erat dengan Gorontalo pada masa lalu, sedangkan sumber lisan dapat diperoleh melalui kisah-kisah atau cerita-cerita yang terdapat di kalangan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua peristiwa sejarah yang berbentuk tulisan itu dapat memberikan keterangan secara jelas mengenai peristiwa sejarah tersebut.

##### C) Tahap Analisa Data

Sumber-sumber menyangkut Gorontalo pada masa lampau berupa data, fakta atau keterangan yang berhubungan dengan pokok masalah dikumpulkan, baik

<sup>6</sup> William H. Frederick & Soeri Soeroto (peny.). 1984. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, hlm. 13. Untuk keterangan tentang pemahaman sejarah Indonesia, lihat keseluruhan Taufik Abdullah & Abdurrahman Surjomiharjo. 1985. "Arah gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia", dalam *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: YIIS, Leknas LIPI & Gramedia.

<sup>7</sup> Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, hlm. 35.

sumber primer maupun sumber sekunder. Setelah itu dilakukan analisa mengenai sumber primer dan sumber sekunder. Sebab titik tolak karya sejarah adalah mengenal penggunaan sumber, baik primer maupun sekunder.<sup>8</sup> Selain itu Frederick menambahkan bahwa landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Sumber itu dapat berupa arsip, laporan-laporan, dokumen ataupun surat-surat pribadi. Sumber-sumber itu dipelajari kemudian dipertimbangkan, mana yang sesuai dan berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>9</sup> Pada tingkat teoritis menggunakan metode kritis-historis, data-data historis dipilih dan disusun sebagai gambaran sejarah melalui proses, sehingga menghasilkan bentuk yang kita hadapi sekarang.

Hasil sumber diseleksi dan dianalisis untuk mendapatkan fakta yang dipercaya dan keabsahannya dapat terjamin. Data dan keterangan yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara itu selanjutnya dikritik. Langkah-langkah ini dilakukan mengingat bahwa setiap keterangan yang ada tidak luput dari arti subyektif yang dikemukakan penutur atau informan. Setelah itu dilakukan penghubungan dan menerangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penulisan yang dikaji, sehingga dapat menjadi sebuah kisah sejarah.<sup>10</sup> Dengan Demikian akan terbangun suatu rekonstruksi atau penyusunan kembali sejarah yang utuh. Dalam penelitian sejarah ini memakai *deskripsi analitik*, dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagian untuk memahami proses kemajuan dan kemunduran Gorontalo. Bertolak dari metode yang dipakai diatas, maka penulisan ini dapat memberikan titik terang kepada permasalahan. Dengan sendirinya dapat memberikan sebuah pengertian tentang penelitian kesejarahan tersebut sebagai suatu proses, sehingga keadaan Gorontalo pada masa lampau dapat digambarkan/dimunculkan kembali.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Louis Gottshalk. 1986. *Mengeri Sejarah*. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press, hlm. 35-40.

<sup>9</sup> William H. Frederick & Soeri Soeroto, (peny.). *op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 18-19.

<sup>11</sup> Taufik Abdullah. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 5.

## II. KEDUDUKAN GORONTALO

### 2.1. Pertumbuhan dan Pengaruh Kerajaan Gorontalo

Hulontalo<sup>12</sup> (Gorontalo) merupakan kerajaan yang tidak dapat dipisahkan atau bagian dari kedudukan kerajaan-kerajaan tertua yang pernah ada di daerah Gorontalo. Kerajaan-kerajaan tertua yang pernah berkuasa di daerah ini telah menampilkan berbagai interaksi serta saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah itu berdasarkan awal berdirinya adalah Wadda letaknya berada di kaki Gunung Tilongkabila, pada pemerintahan pertama di bawah kekuasaan Raja Buniaguguto;<sup>13</sup> Suwawa letaknya di dataran tinggi Bangio kaki Gunung Tilongkabila di bawah kekuasaan Raja Ayudugia; Limutu (Limboto) yang pusat kerajaannya terletak di Lintalo sebelah Barat Danau Limboto; Hulontalo (Gorontalo) merupakan kerajaan yang dibentuk dari persekutuan 17 *linula* di bawah kekuasaan Raja Wadipalapa atau Ilahudu; Bolango pada awalnya di bawah pengaruh Kerajaan Gorontalo, kemudian mengalami perkembangan dengan membentuk kerajaan sendiri; Atinggola (Andagile) dibentuk pada tahun 1557; dan Boalemo yang berpusat di Talamuta juga dibawah pengaruh Gorontalo, pada tahun 1790 membentuk kekuasaan sendiri.

Dalam tradisi masyarakat Gorontalo (*oral tradition*) dinyatakan asal mula kerajaannya kembali pada proses pembentukkan dari persekutuan 17 rumpun komunitas kecil yang disebut *linula*. Dalam kelompok *linula* dipimpin seorang *olongia*, kemudian berintegrasi ke dalam satu kerajaan (*lipu Hulontalo*) di bawah kekuasaan Raja Wadipalapa atau Ilahudu sekitar tahun 1385.<sup>14</sup> Setelah menjadi raja diberi gelar *Latanrang papang la to Wadda* (pelindung Kerajaan Wadda).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Istilah kata Hulontalo berasal dari Huluntulangi, kemudian mengalami proses perubahan menjadi Hulontalangi artinya lembah yang mulia terletak di selatan pegunungan Tilongkabila. Sejak kedatangan Belanda di daerah ini, perkataan Hulontalo berubah disebabkan sulit diucapkan bagi Belanda sehingga diubah menjadi Gorontalo. Awal mula yang mendiami daerah itu adalah Humongghulo didampingi istrinya Lijaningo dan tiga orang anaknya beserta para pengikutnya. Lihat M.H Lipoeto. 1947. *Sedjarah Gorontalo, Doea Lima Pohalaa*, V. Gorontalo: Volks Drukkerij, hlm. 13-14. Sedangkan menurut tradisi lisan lainnya, proses terbentuknya penduduk lokal Gorontalo dimulai Yadi Pulu Milato di Gunung Buliohuto. Dalam perjalanannya ke Gunung Tilongkabila bertemu dengan seorang wanita yang diberi nama Yadi Pulu Ilato dan mengawininya. Mereka dikaruniai empat orang anak yaitu Matolodula, Tolangohula, Tumuhulawa, dan Tinelo Bulio. Perkembangan kehidupan selanjutnya kemudian berpisah dan mencari daerah-daerah baru di sekitar pegunungan tersebut. Baca secara keseluruhan S.R. Nur. 23 Januari 1992. *Ikilale Lo Bate Walu* (Ikrar Delapan Kepala Adat) Kerajaan-Kerajaan Gorontalo. Ujung Pandang: tanpa penerbit. Pada prinsipnya tradisi lisan yang ada pada masyarakat Gorontalo mempunyai kemiripan yang bermuara pada terbentuknya Kerajaan-kerajaan di daerah Gorontalo.

<sup>13</sup> Menurut letaknya kerajaan ini terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa Kerajaan Wadda atau Wadeng terletak di Gunung Buliohuto kemudian pindah ke Gunung Tilongkabila. Adapula yang mengatakan letaknya di selatan Sungai Bone dimana terdapat Kampung Padengo (sekarang Kecamatan Kabilia). Lihat S. R. Nur. 1990. "Tei Telingade Woli Lawe To Wulito Lo Hulontalo", dalam Matulada et al., (ed.). *Sawerigading Folktales Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, hlm. 566.

<sup>14</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 5. Lihat juga M.H Lipoeto, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>15</sup> Gelar *Latanrang Papang La To Wadda* digunakan oleh Raja Wadeng, kemudian gelar ini diberikan juga kepada Raja Wadipalapa atau Ilahudu oleh dewan kerajaan (*Wolihi Patoo Data*), pemberian gelar ini dilakukan karena Ilahudu masih keturunan dari Raja Wadda. Ayahnya bernama Humolangi dan ibunya putri Bulaidaa masih saudara Mooduto yang menjabat sebagai Raja Wadda. Lihat *Ibid*. Lihat juga S.R. Nur, *op.cit.*, hlm. 566.

Adapun 17 *linula* tersebut adalah *Linula Hungginaa* sebagai *olongia* adalah Lihawa; *Linula* Lupoyo sebagai *olongia* adalah PeI; *Linula* Billinggata sebagai *olongia* adalah Leg; *Linula* Wuwabu (Uwabu) sebagai *olongia* Wahimolungo; *Linula* Biawao sebagai *olongia* Wakohuludu; *Linula* Padengo sebagai *olongia* Palangge; *Linula* Huangobotu sebagai *olongia* Darangi; *Linula* Tapa sebagai *olongia* Dielohiyodaa; *Linula* Lawuwono sebagai *olongia* Bunggehulawa; *Linula* Tuto sebagai *olongia* Tilopalangi; *Linula* Dumati sebagai *olongia* Buata; *Linula* Ilotedia sebagai *olongia* Tanaa; *Linula* Patonggo sebagai *olongia* Ngobotu; *Linula* Panggulo sebagai *olongia* Hungginyalo; *Linula* Huangobotu sebagai *olongia* Lealini; *Linula* Tamboo sebagai *olongia* Dailinibotu; dan *Linula* Hulontalangi sebagai *olongia* Wadipalapa (Ilahudu).<sup>16</sup> Ketujuh belas *linula* tersebut diatas yang termasuk dalam kelompok *linula* besar dan mempunyai peranan politik utama dalam pembentukan Kerajaan Gorontalo yaitu *Linula* Hungginaa, Lupoyo, Billinggata dan Wuwabu (Uwabu). Sehingga keempat *olongia* dari *linula* tersebut memegang peranan penting dalam birokrasi kerajaan.<sup>17</sup>

Pembentukan Kerajaan Gorontalo di bawah kekuasaan Wadipalapa atau Ilahudu mengalami perkembangan politik dalam kerajaan. Pada masa pemerintahannya, telah memperkuat supremasi kekuasaannya dengan menjalankan proses integrasi eksternal yaitu mengadakan ekspansi sampai ke Teluk Tomini.

Menurut tradisi lisan masyarakat Gorontalo dinyatakan bahwa Sawerigading beserta pengiringnya (Kerajaan Luwu) berkunjung ke Bayolamilate (Padengo) dengan menggunakan perahu. Setibanya di daerah tersebut bertemu dengan putri Rawe (saudara dekatnya) yang telah menikah dengan Raja Hulontalangi. Kemudian bersama-sama dengan Raja Hulontalangi mengadakan ekspansi ke negeri-negeri di sekitar Teluk Tomini. Setelah menaklukan, kemudian membagi setiap daerah-daerah taklukannya. Untuk Hulontalangi menawan orang-orang yang memakai senjata kelewang, sedangkan Sawerigading menawan orang-orang yang memakai keris. Setibanya rombongan di Gorontalo, Sawerigading melanjutkan pelayarannya ke Negeri Cina.<sup>18</sup>

Sekitar abad ke-15, Gorontalo mengadakan hubungan kerjasama dengan Limboto, sehingga dalam struktur birokrasi kedua kerajaan mempunyai kesamaan sampai pada hubungan ikatan keluarga yang lebih erat. Hubungan ini diperkuat dengan adanya perkawinan Raja Wolanga dengan Ratu Moliye dari Limboto.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> A.H. Nusi. 1979. *Gambaran Singkat Tentang Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo, Serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo*. Gorontalo: Pemda Kotamadya Gorontalo, hlm.3.

<sup>17</sup> B.J. Haga, *op.cit.*, hlm. 5

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid. 1990. "Silsilah Sawerigading Menurut Sebuah Lontara' Panguriseng di Wajo" dalam Matulada et al., (ed.). *Sawerigading Folktales Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, hlm. 263-264. Lihat juga S.R Nur, *op.cit.*, hlm. 566-567.

<sup>19</sup> Walaupun telah dilakukan ikatan perkawinan bagi kedua penguasa kerajaan tersebut, pada intinya dalam pelaksanaan kerajaan masing-masing memegang kekuasaan di kerajaannya, sehingga tidak terdapat lembaga kerajaan dwitunggal.

Hasil perkawinannya dikarunia seorang putra bernama Polamolo. Setelah beranjak dewasa, kedua penguasa kerajaan Gorontalo-Limboto melakukan ekspansi di Teluk Tomini. Sehingga pucuk pemerintahan atas Gorontalo-Limboto diserahkan kepada Polamolo.<sup>20</sup> Dalam ekspansinya, Raja Wolanga melengkapi angkatan lautnya dengan bertolak dari Teluk Gorontalo menyusuri pantai barat. Sedangkan Ratu Moliye bertolak dari muara sungai Paguyaman sampai kepulauan Togian, kemudian kembali ke daratan Pulau Sulawesi di daerah Tanjung Api. Dari daerah ini mereka melanjutkan pelayaran ke arah barat dan bertemu dengan Raja Wolanga di daerah Sausu, dan kedua rombongan kembali ke Gorontalo dengan membawa rampasan perang dan para budak.<sup>21</sup> Beberapa lama kemudian terjadi pertentangan yang panjang—sekitar 2 abad—dan meningkat menjadi peperangan antara Gorontalo dan Limboto. Perselisihan disebabkan terbunuhnya Raja Polamolo oleh para pembesar Limboto, kepalanya dikuburkan di Gorontalo dan badannya di Limboto.<sup>22</sup>

Tahun 1562 perselisihan antara Gorontalo dengan Limboto mulai mereda, pada masa itu Gorontalo dibawah kekuasaan *Olongia To Tilayo* Amai dan *Olongia To Huliyaliya* Tuliyaabu. Raja Amai merupakan peletak dasar Islamisasi di Gorontalo setelah memperistrikan Owutango putri Raja Palasa Ogomonjolo (Kumojolo) dari Siyendeng, Tomini—memeluk agama Islam dari pengaruh Ternate—punya pertalian darah dengan Raja-raja Ternate. Bersama-sama dengan delapan raja-raja kecil dari Palasa membangun mesjid di Hunto. Ia juga mengembangkan prinsip adat dan kebiasaan pada masyarakat dalam *Saraa topa-topango to adati* artinya syarah bertumpu pada adat.<sup>23</sup> Pada tahun 1589 Raja Amai digantikan oleh putranya

<sup>20</sup> Adanya penyerahan kekuasaan atas kedua kerajaan tersebut, maka Polamolo menjadi raja yang pertama memerintah pada kedua kerajaan itu dengan nama *Olongia Mobalanga*, artinya raja yang secara bergantian selama tujuh hari berkedudukan di Gorontalo dan tujuh hari sesudahnya berkedudukan di Limboto. Sehingga pemerintahan ini kemudian dikenal dengan nama dwi tunggal kerajaan. Dalam menalangan pemerintahannya kemudian membawa dampak timbulnya konflik antara Gorontalo dengan Limboto.

<sup>21</sup> Pertemuan Raja Wolanga beserta pengikutnya dengan Ratu Moliye bersama pengikutnya di daerah Sausu, kemudian disepakati sebagai dasar pengaturan perbatasan antara Gorontalo dengan Limboto dalam proses persekutuan Gorontalo-Limboto. Lihat J. Bastiaans. 1996. "Persekutuan Limboto dan Gorontalo", dalam Taufik Abdullah (ed.). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 215-216.

<sup>22</sup> Permasalahan ini mulai timbul sewaktu Polamolo memerintahkan orang-orang Limboto membangun sebuah pondok di daerah Dehuwalolo yang berbatasan dengan Gorontalo-Limboto. Pada saat Polamolo dan para pembesar kerajaan berangkat ke Limboto —untuk melanjutkan pemerintahannya selama tujuh hari—di tengah perjalanan sekitar muara Sungai Nangolobunggallo di Danau Limboto, terlihat asap dari tempat orang-orang Limboto yang sedang menebang kayu untuk pembangunan pondok tersebut. Kemudian Polamolo menanyakan kepada para *olongia* yang menyertainya tentang asap tersebut. Para *olongia* mengatakan bahwa orang-orang Limboto sedang menebang dan menyeret kayu untuk pembuatan pondok di Dehuwalolo. Mendengar perkataan para *olongia*, Polamolo kemudian diam dan hal ini ditanggapi oleh para pembesar Limboto sebagai suatu penghinaan kepada pihak Limboto. *Olongia* Dunita dan Hungayo tersinggung dengan mengatakan bahwa Limboto adalah negeri dari ibunya yang dihina sebagai negeri yang gelap dan hitam oleh raja. Sedangkan negeri ayahnya (Gorontalo) disanjung-sanjung oleh raja. Dalam peristiwa ini kemudian Raja Polamolo dibunuh oleh para pembesar Limboto. Lihat *Ibid.*, hlm. 219-220. Lihat juga B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>23</sup> Kedelapan raja-raja kecil dari Palasa itu adalah Raja Tamalate, Raja Lemboo, Raja Siendeng, Raja Hulangato, Raja Siduan, Raja Sipayo, Raja Songinti dan Raja Bunuyo bertugas mendampingi Owutango ke Gorontalo dan membantu Raja Amai membimbing masyarakat dan merancang adat istiadat yang berpedoman pada Islam. Sedangkan Mesjid di Hunto sekarang dikenal pula dengan nama Mesjid Sultan Amai yang terletak Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan. Lihat Ibrahim Polontalo. 1 Agustus 1998. "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Gorontalo", *Makalah*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo, hlm. 9-12. Lihat juga J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 220.

Motolodulahu sebagai Raja Udik (*Olongia To Tilayo*). Semasa pemerintahannya telah mengembangkan proses Islamisasi pada masyarakat Gorontalo.<sup>24</sup>

Setelah kekuasaan Motolodulahu berakhir, Pongoliwu menggantikan kekuasaan ayahnya sebagai *Olongia To Tilayo*, sedangkan ibunya Wulatileni—putri Tuliya—sebagai *Olongia To Huliya*, konflik antara Gorontalo dengan Limboto kembali pecah. Dalam menghadapi penyerangan Gorontalo, Limboto dibawahi kekuasaan Dulapo (*Olongia To Huliya*) mengutus putranya Tilahunga ke Ternate untuk meminta bantuan kepada Sultan Baabullah Daud Syah, tetapi usahanya mendapat penolakan dari Raja Ternate. Setelah Tilahunga menggantikan kekuasaan ayahnya di Limboto, kemudian kembali meminta bantuan Ternate dengan mengutus Detubiya (putra *Olongia To Tilayo* dari Limboto Humonggilo) bersama Ju Mu'min (putri Raja Ternate), usaha ini kemudian berhasil mendatangkan bantuan dari Ternate.<sup>25</sup>

Kedatangan pasukan Ternate menambah kekuatan Limboto dan menyerang ke Gorontalo. Dalam peperangan tersebut Gorontalo berhasil ditaklukkan dengan menawan Poheleo (putri Matodulahu-Wulatileni), kemudian diasingkan ke Ternate. Di pengasingannya, ia menikah dengan Raja Ju Mangopa kemudian meninggal di Ternate, sehingga dikenal sebagai Ju Balu. Setelah mendengar kabar Wulatileni mangkat, Poheleo menghadap raja untuk kembali ke Gorontalo. Setibanya di Gorontalo menggantikan kedudukan ibunya sebagai Raja Hilir.<sup>26</sup>

Sementara itu hegemoni Kerajaan Ternate dibawah kekuasaan Sultan Baabullah Daud Syah mencapai puncak kejayaannya setelah ekspansi dan mencapai batas-batas di utara termasuk Gorontalo dan Limboto dan di sebelah barat Sulawesi. Kejayaannya dikenal sebagai raja 72 pulau, karena wilayah kekuasaannya mencakup 72 pulau dan mengakui suzerainitasnya. Setiap wilayah tersebut menempatkan pasukannya, Gorontalo dan Limboto ditempatkan 10.000 tenaga pasukan. Ekspansi Ternate kemudian terbentur pada kekuasaan Gowa (Makassar).<sup>27</sup>

Pada masa pemerintahan Poheleo telah menyusun kekuatan untuk menyerang Limboto. Mengingat besarnya pengaruh Ternate di Gorontalo terutama Limboto, Poheleo kemudian meminta bantuan Kerajaan Gowa—juga mengadakan berbagai ekspansi di bagian Timur dan menjadi ancaman bagi Ternate—dengan mengutus Bumolo<sup>28</sup> sebagai *hohuhu* (patih) ke Gowa. Pada 1627, Gowa dibawah

<sup>24</sup> Raja Udik menguasai bagian Utara wilayah Kerajaan Gorontalo, sedangkan Raja Hilir berkuasa bagian Selatan Kerajaan Gorontalo. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kerajaan Gorontalo terdapat dua raja yang berkuasa dengan membaginya ke dalam wilayah Utara dan Selatan.

<sup>25</sup> Hubungan pertalian keluarga yang erat antara Ternate dengan Gorontalo dan Limboto, terjadi pada perkawinan Raja Amai dengan putri Raja Kumojolo—dari ibunya adalah keturunan Raja-raja Palasa dari Siyendeng—yang punya pertalian darah dengan Raja-raja Ternate. Sedangkan Limboto pada masa *Olongia To Tilayo* adalah Homonggilo pernah membantu Ternate dalam perang saudara. Kemudian mengawini Ju Mu'min (saudara Raja Ternate) dan memeluk agama Islam yang kemudian menyebarkannya di Limboto. Lihat J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 220-221.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>27</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 57. Lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 130.

<sup>28</sup> Bumolo keberatan atas tugas yang diperintahkan Poheleo, sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan *khabidaa* (penghulu utama) bernama Eyato guna mendamaikan ke dalam suatu persekutuan Gorontalo-Limboto. Adanya ancaman Poheleo yang tidak menyetujui perkawinannya dengan Ti Duhula (cucu Motolodulahu) jika tidak menjalankan tugas itu. Lihat J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 222.



kekuasaan I Manngarangi Daeng Manrabbia, Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna mengirim ekspedisinya ke Gorontalo. Kedatangan ekspedisi Gowa memperuncing perselisihan antara Gorontalo-Limboto dan peperangan kembali pecah, Gorontalo dengan bantuan Gowa dan Limboto mendapat dukungan Ternate, namun Limboto berhasil ditaklukkan dengan menawan 2 putri dan seorang putra Ratu Limboto (Ratu Momiyo) yaitu Ntobango dan Tiliaya serta Pomontolo. Kedua putri Ratu Limboto ditawan ke Gowa didampingi 5 *bate* (pemangku adat) yaitu Mopatu Langolo, Mopatu Hulita, Mopatu Taniyo, Mopatu Wulilo dan Mopatu Biheto, sedangkan Pomontolo ditawan ke Manguju—kemungkinan daerah dimaksud Mamuju—dibawah kekuasaan Mandar.<sup>29</sup>

Dalam tawanan Gowa, karena banyak membantu Gowa akhirnya kedua putri Limboto dibebaskan sultan dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan Limboto dari kekuasaan Gorontalo. Diiringi armada laut yang cukup besar, kedua putri Limboto bersama para pembesar Gowa tiba di Tolinggula. Kedatangannya disambut para utusan Limboto diantaranya *Hohuhu* Popa dan *Wuleya lu lipu* Pomalo. Untuk menghindari peperangan dengan Gorontalo, Popa dan Pomalo membujuk para pembesar Gowa kembali ke daerahnya. Hal ini mendapat penolakan dari pembesar Gowa karena mereka belum menyelesaikan tugasnya untuk mengembalikan kekuasaan Limboto atas Gorontalo. Berita kedatangan armada laut Gowa sampai di Gorontalo, Bumolo memerintahkan *Khatibidaā* Eyato membawa dua gantang emas, untuk membujuk para pembesar Gowa untuk tidak menyerang ke Gorontalo. Eyato berhasil menemui Popa dan Pomalo serta utusan Gowa, dengan berjanji bahwa Gorontalo akan mengembalikan kekuasaan Limboto. Para pembesar Gowa menyetujui dan Eyato memberikan hadiah emas sebelum mereka kembali ke Gowa.<sup>30</sup> Sedangkan Pomontolo dalam penawanannya di Manguju beberapa lama kemudian berhasil dikembalikan ke Limboto.<sup>31</sup>

Perkembangan politik dalam pemerintahan Gorontalo turut menentukan kesudahan konfrontasi Gorontalo dengan Limboto. *Khatibidaā* Eyato dibantu Bumolo menghadap Raja Gorontalo serta para pembesar kerajaan untuk mengadakan perdamaian dan persekutuan dengan Limboto. Rencana ini mendapat persetujuan dari kedua penguasa kerajaan (Poheleo To Huliyaia dan Moliye To Tiliaya). Dalam peristiwa itu Eyato diangkat sebagai *Hohuhu* Lupoyo dan Bumolo sebagai *Hohuhu* Hungilo.<sup>32</sup>

Prinsip persaudaraan dalam suatu persukutuan diwujudkan melalui

<sup>29</sup> B.J. Haga, *op.cit.*, hlm. 35-36. lihat J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 222. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>30</sup> J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 223-224. Dikatakan pada tahun 1634 Raja Gowa mengirim armada lautnya dengan kekuatan 2.000 orang untuk menyerang Gorontalo. Hal ini juga dilakukan akibat adanya pemblokiran Kompeni Belanda terhadap perahu-perahu Makassar yang berdagang lada di Maluku. Lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>31</sup> Dalam buku harian Raja Gowa-Tallo dikatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 1638 Mandar menyerahkan orang-orang Gorontalo kepada Raja Gowa.

<sup>32</sup> J. Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 225.

perundingan (*lodudula*). Raja Pomontolo (menggantikan kedudukan saudaranya Ratu Moliye To Tiliaya) bersama dengan *Hohuhu* Popa dan *Wulea lo lipu* Pomalo serta para pembesar Kerajaan Limboto menghadap Raja Gorontalo untuk merundingkan isi dari persekutuan itu. Selama tujuh hari kedua pembesar kerajaan mengadakan pertemuan dan mengangkat ikrar yaitu: *Hiduloa hidulitu, mopayu wuudu lipu, mojanji didu motipu, hidulitu hiduloa, dunggolo demobua* artinya duduk teratur, berlaku kehormatan negeri, berjanji tiada lagi putus ujungnya, beraturan duduk, mudah-mudahan tiada bercerai. Setelah pengucapan ikrar, Pomontolo bersama para pembesar kerajaan kembali ke Limboto. Sementara itu Raja Gorontalo memerintahkan Eyato bersama para pembesar kerajaan di antaranya *Bohuhu* Male dan *Wulea lo lipu* Uwabu ke Limboto dalam rangka kunjungan balasan atas kedatangan para pembesar Limboto. Selama tujuh hari Eyato di Limboto melakukan pertemuan dan berhasil disepakati suatu perjanjian persekutuan, untuk menguatkannya dilaksanakan sumpah adat menggunakan lemak kerbau.<sup>33</sup>

Adapun isi perjanjian persekutuan kerajaan Gorontalo-Limboto adalah: Kedua kerajaan tidak akan melakukan tindakan kekerasan dan tidak akan saling menfitnah; jika permasalahan menyangkut kedua kerajaan, maka perlu diadakan perundingan bersama untuk menyelesaikannya; setiap perundingan diikutsertakan raja, *jogugu*, *kapitan laut*, dan salah seorang *wulea lo lipu* dari negeri lain; rencana besar dikerjakan secara bersama-sama; utusan dari luar kerajaan harus diterima oleh pembesar kedua kerajaan; jika ada pemberontakan, maka kerajaan yang bersangkutan yang menyelesaikannya. Jika usaha ini gagal maka kedua kerajaan akan maju bersama-sama; Kedua kerajaan meminta upeti dari rakyat atau penduduk daerah taklukannya; dan wilayah di Teluk Tomini yang takluk kepada kedua kerajaan diambil batas mulai daerah Sausu. Sausu-Masabuku-Tamalate masuk pengaruh Gorontalo, sedangkan Sausu-Pulau Tongian dan Nyuala masuk pengaruh Limboto.<sup>34</sup>

Terbentuknya perjanjian persekutuan Gorontalo-Limboto merupakan akhir dari perselisihan kedua kerajaan dengan rentang waktu yang panjang. Pengaruh persekutuan itu juga merupakan jalan terpenting dalam mengembangkan kekuasaannya. Sebagai kerajaan yang berpengaruh atas kerajaan-kerajaan sekitarnya, persekutuan kemudian berkembang menjadi *Loudulluwa limo lo pahalaa* artinya dua kerajaan—Gorontalo-Limboto—mempersatukannya ke dalam lima kerajaan setelah masuknya Kerajaan Bone, Bolongo dan Atinggola. Sehingga lima kerajaan itu secara bersama berpedoman pada agama dan adat istiadat, juga dalam kepentingan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan militernya.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 227-230. Setelah kembali dari penawanannya di Manguju, Pomontolo diangkat menjadi Raja Suwawa dengan mengawini Mbui Ulu dan dikaruniai empat orang anak yaitu Kasiyati, Bahuntea, Duwoi dan Mbui Momudu. Lihat juga S.R. Nur, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 212-215. Persekutuan Gorontalo-Limboto menjadi peletak dasar terbentuknya persekutuan *Limo lo pahalaa* (lima kerajaan berserikat) setelah masuknya Kerajaan Suwawa, Bolongo dan Atinggola. Lihat juga B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 1-2.



## 2.2. Hirarki dalam Kerajaan

Mengamati munculnya kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara, pada prinsipnya kekuasaan kerajaan menunjukkan ciri-ciri kekuasaan yang berbeda-beda. Konsep kekuasaan raja di lingkungan kebudayaan Jawa menunjukkan bahwa pribadi raja adalah sakral dan penuh kharisma. Dalam *Surat Niti Sastra* dikatakan raja adalah unsur mutlak untuk menjamin ketertiban dalam suatu masyarakatnya, di samping itu kedudukan raja ada di atas hukum. Dalam ajaran *Wulan Reh* dinyatakan bahwa kedudukan raja dikehendaki Tuhan untuk berkuasa di seluruh negerinya, sehingga apabila tidak mengindahkan perintahnya berarti mengabaikan perintah Tuhan. Bahkan dalam *Surat Manu* dicantumkan raja adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat dan dianggap sebagai dewa berwujud manusia. Juga prinsip kerajaan yang berakar pada tradisi kuno ialah *wahyu* atau *pulung* digambarkan sebagai segumpal sinar yang pada orang menerimanya, seperti yang terjadi pada masa Ken Arok dan Panembahan Senopati. Di Sulawesi Selatan genealogi kerajaan-kerajaan Bugis/Makassar seperti Gowa, Luwu dan Bone kembali kepada raja pertama yang turun dari langit sebagai *Tomanurung* dan oleh rakyat diangkat menjadi raja. Sedangkan genealogi kerajaan Melayu seperti Aceh, Siak, Palembang, Sungai Raja, Palalawan dan Pontianak dihubungkan dengan negeri Arab—Hadrilmaut bin Syihab—sebagai asal nenek moyangnya.<sup>35</sup> Kesemua otoritasnya bersifat kharismatis yang mendapat legitimasi untuk menjalankan kekuasaan serta kepemimpinannya dalam menduduki tahta kerajaan.

Proses terbentuknya Kerajaan Gorontalo berawal dari kekuasaan rakyat yang menyatu ke dalam bentuk *linula* didasarkan pada hubungan antar keturunan.<sup>36</sup> Sehingga raja diangkat melalui proses pemilihan dari 17 pemimpin *linula* atau *olongia*. Proses pengangkatan raja dilakukan melalui ikrar (*tujai*): *Huta-huta loito-eja* (tanah-tanah ini diperuntukkan bagi tuanku); *Taluhu-taluhu-ituja* (air-air diperuntukkan bagi tuanku); *Dupato-dupato-tuja* (angin diperuntukkan bagi tuanku); *Tulu-tulu luja* (api diperuntukkan bagi tuanku), *Tawu-tawuloi tuja* (rakyat diperuntukkan bagi tuanku); dan pengaruh Raja Eyato ditambahkan *Bai tuja dila poluli hilawo* (bagi tuanku tidak diperbolehkan menyalahgunakannya). Para *bate* berikrar kepada raja tentang pemberhentiannya—bilamana raja berkelakuan tidak baik—dengan gerakan memisahkan kedua belah tangannya pada saat menghaturkan sembah.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 46-48.

<sup>36</sup> B.J. Haga, *op.cit.*, hlm. 4. Pembentukan *linula* berasal dari keluarga batih (*ngalaa*) yang proses kehidupannya di dalam sebuah rumah besar atau *laihe*, sehingga dari *laihe* muncul sistem kepemimpinan yang dipegang oleh seorang anggota tertua, berwisawa dan berpengalaman serta menjamin keamanan setiap *ngalaa*. Kemudian kelompok-kelompok *laihe* berkembang dan membentuk satu komunitas masyarakat yang disebut *lemboa*. Dalam *lemboa* terdapat kepemimpinan yang disebut juga *bantalo* yang dipilih melalui proses karena tertua, mempunyai kecakapan, kewibawaan dan menjadi teladan dari setiap kelompok masyarakat *lemboa*. Dari beberapa *lemboa* inilah yang mempunyai ikatan keluarga yang sama kemudian membentuk satu-kesatuan sosial yang lebih besar disebut *linula* dibawah kepemimpinan seorang *olongia*.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Dalam mengatur kerajaan terdapat 3 lembaga menjadi tiang dalam kegiatan pemerintahan yaitu:

- a. *Buatula Bantayo*, bertugas membuat peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Lembaga ini dipimpin oleh para *bate*.
- b. *Buatula Bubato*, bertugas menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh *Buatula Bantayo* serta membawahi setiap kegiatan kerajaan. Lembaga ini dipegang langsung oleh raja.
- c. *Buatula Bala*, bertugas mengamankan kerajaan, lembaga ini dikepalai oleh seorang *apitalau* (kapitan laut).<sup>38</sup>

Kedudukan ketiga lembaga kerajaan tersebut saling keterkaitan. Dalam pengambilan suatu kebijakan, dilakukan dengan pertemuan untuk merumuskan berbagai peraturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan kerajaan. Pertemuan ketiga lembaga kerajaan ini disebut *Buatula Totolu*. Dapat dikatakan bahwa raja (*olongia lo lipu*) berkedudukan sebagai penguasa tertinggi tidak bersifat mutlak dalam pengambilan keputusan atau otoritas kerajaan tidak berpusat kepada raja.

Perkembangan sistim politik berjalan bersama dengan masuknya pengaruh Ternate dan Islamisasi (abad ke-16) membawa polarisasi politik yang cukup besar bagi Gorontalo, sehingga struktur pemerintahan serta hirarki kerajaan menjadi lebih kompleks. Jabatan *patila* atau mangkubumi diganti dengan *jogugu* yang tetap bertugas mendampingi raja dalam mengatur urusan pemerintahan. Jabatan *wulea lo lipu* atau *kapitan laut* diubah menjadi *marsaoleh* yang juga tetap bertugas sebagai panglima perang kerajaan. Di tingkat kelompok masyarakat terdapat *kimalaka* (setingkat *ayahanda* atau kepala desa sekarang) dan tingkat paling bawah dikepalai oleh *taudaa* (setingkat kepala dusun sekarang).<sup>39</sup>

Sementara itu ketiga lembaga kerajaan—*Buatula Bantayo*, *Buatula Bubato* dan *Buatula Bala*—dileburkan ke dalam dua lembaga yaitu *Buatula Bantayo* dan *Buatula Saraa*. Penyatuan *Buatula Bubato* dan *Buatula Bala* ke dalam *Buatula Saraa* dimaksudkan pemerintahan dan keamanan kerajaan disatukan dengan menambah kegiatan urusan agama di dalam satu lembaga. Sehingga pelaksanaan keagamaan terletak di dalam satu kepemimpinan disebut *kadli* yang bertugas menjalankan hukum agama. Tujuan lembaga ini agar kegiatan pemerintahan dan kehidupan keagamaan dalam masyarakat dapat berjalan bersama-sama. Dengan bersatunya pemerintahan dan agama, maka muncullah istilah “*Adati hula-hula to saraá, saraá hula-hula to kurnani*” (adat bersendika syara, syara bersendikan kitabullah).

Sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam hirarki kerajaan, maka dibentuk dewan kerajaan (*Bantayo Poboide*)<sup>40</sup> bertugas mengangkat dan

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>40</sup> Anggota *Bantayo Poboide* terdiri dari para tetua masyarakat (*monggopangola*) dan para tokoh masyarakat (*tulai-bala*), yang kesemuanya diangkat melalui para wakil masyarakat *limula*. Di kerajaan-kerajaan Indonesia Timur seperti Buton, Bima, Dompou, Sanggar dan Sumbawa juga terdapat dewan kerajaan yang disebut *Hadat*. Mempunyai tugas dan fungsi hampir sama dengan dewan kerajaan Gorontalo.

memberhentikan raja. Sehingga masa kekuasaan raja tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu, melainkan dari kesetiannya menjalankan peraturan yang ditetapkan dalam norma-norma hukum, agama dan adat istiadat.

Peran *Bantayo Poboide* sangat besar dan penting dalam kelangsungan kerajaan dengan merumuskan dan menetapkan peraturan kerajaan, agama dan adat istiadat bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu menjadi kontrol dalam kekuasaan raja, sehingga raja tidak mempunyai hak mutlak dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam arti kedudukan raja dicapai dengan melakukan usaha atau perjuangan (*achievement status*), bukan kedudukan yang telah digariskan/diturunkan (*ascribed status*). Sehingga skala sistem politik serta format kerajaan sering menjadi faktor penentu dari struktur kekuasaan yang dibangun di dalamnya.

### III. KOLONIAL BELANDA-KERAJAAN GORONTALO

#### 3.1. Politik Kolonial Belanda

Schubungan dengan merosotnya kekuasaan Gowa dan Ternate yang diakibatkan ikatan kontrak/perjanjian dengan VOC. Penetapan kontrak dengan Gowa dan Ternate pada intinya menguntungkan pihak VOC, sehingga berhasil mengikat kedua kerajaan itu dan memperluas kepentingan politiknya menguasai negeri-negeri di sekitar kerajaan tersebut. Berangkat dari peristiwa inilah VOC menempatkan Gubernurnya untuk mengatur dan memerintah atas negeri-negeri di bawah pengaruh Gowa dan Ternate.<sup>41</sup> Runtuhnya kekuasaan Ternate dan Gowa menjadikan seluruh hak kekuasaannya atas daerah-daerah sekitarnya terlepas dan dibawah pengaruh VOC. Akibat perubahan-perubahan tersebut menyebabkan Gorontalo dan Limboto termasuk dalam pengawasan VOC.

Kedatangan VOC melalui Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge tahun 1677 di kawasan Nusa Utara Sulawesi—sebagai negeri-negeri di bawah pengaruh Gowa dan terutama Ternate—ingin menguasai daerah tersebut sebagai bagian dari penaklukkannya atas Gowa dan Ternate. Guna memperkuat kekuasaannya, VOC aktif melakukan ekspansi melalui kontrak atau perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di belahan Nusa Utara Sulawesi.<sup>42</sup> Untuk melaksanakan kepentingan politiknya,

<sup>41</sup> Setelah merosotnya Kerajaan Ternate tahun 1650 akibat perpecahan di dalam kerajaan yang menyebabkan Raja Mandarsyah diturunkan tahtanya dalam suatu kudeta, kemudian Mandarsyah meminta perlindungan kepada VOC untuk mengembalikan tahtanya, mengakibatkan terjadinya konflik antara Kerajaan Ternate dengan VOC yang berkepanjangan dan pada akhirnya VOC berhasil menguasai Kerajaan Ternate pada tahun 1673. Lihat M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 96-97. Serta ditandatangani perjanjian Bungaya 18 Nopember 1667, orang-orang Makassar banyak meninggalkan negerinya dan menuju ke daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Gowa termasuk Gorontalo dan Limboto pada tahun 1634. Lihat juga Andi Zainal Abidin. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni, hlm. 56-57. Perjanjian Bungaya bagi orang Belanda menyebutnya *Het Bongaais Vedrag* dan Makassar menamakannya *Cappaya ri Bungaya* ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin atas nama Kerajaan Gowa dan Speelman atas nama Kompeni Belanda. Perjanjian tersebut membawa Kerajaan Gowa dalam suasana peralihan yang sangat mencemaskan.

<sup>42</sup> M.C Riklefs, *op.cit.*, hlm. 99.

VOC mengadakan penetrasi atas hegemoni Gowa dan Ternate. Sehingga pada bulan September 1677, Gubernur Maluku Padtbrugge mengunjungi Gorontalo.<sup>43</sup>

Bersamaan dengan ikatan perjanjian antara VOC dengan Gorontalo dan Limboto pada tahun 1681 yang isinya memuat tentang persetujuan bahwa Ternate telah menyerahkan semua haknya atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC, dan raja serta pembesar Gorontalo tunduk kepada peraturan VOC. Walaupun telah disepakati persetujuan tersebut, VOC menjalankan sistem pemerintahan tak langsung akibat kekuasaan raja telah berakar pada masyarakat. Sehingga pemerintahan kerajaan masih di bawah kekuasaan mutlak pada raja, dan jika VOC mengurus kepentingannya di Gorontalo sepengetahuan dari kerajaan.<sup>44</sup>

Hubungan ini berlanjut dengan rentang waktu yang panjang. VOC secara perlahan menggeser kedudukan raja dengan memperoleh hak politik untuk mengatur kekuasaannya di Gorontalo. Hal ini menjadi embrio pembentukan koloni pemerintahan Belanda dengan membawa akibat sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Gorontalo.

Setelah penyerahan kekuasaan VOC, maka Pemerintah Belanda melakukan perubahan dalam usaha menjalankan kepentingannya, terutama sistem feodal dari pengaruh VOC. Pada 14 Juni 1824 Gorontalo dipisahkan dari wilayah Karesidenan Ternate dan dimasukkan dalam Karesidenan Menado. Walaupun demikian Karesidenan Menado termasuk dalam pengawasan *Gouverneur* yang berkedudukan di Kepulauan Maluku.<sup>45</sup> Menurut susunan tatanegara Hindia Belanda, *afdeeling* Manado dibagi ke dalam 4 bagian yaitu Minahasa; negeri-negeri utara dan barat; negeri-negeri di tepi pantai selatan Teluk Tomini; dan Kepulauan Sangihe dan Talaud. Residennya berkedudukan di Manado, sedangkan pembantunya terdiri seorang *gezaghebber* berkedudukan di Gorontalo dan 3 orang *opziener* berkedudukan di Amurang, Kema dan Tondano.<sup>46</sup>

Setelah menguasai kepentingan politiknya, Pemerintah Belanda mengikat Gorontalo dengan mengadakan hubungan yang ditetapkan pada *contract* atau perjanjian, baik pernyataan panjang (*lange verklaring*) maupun pernyataan pendek (*korte verklaring*) yang mengarah kepada kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas Gorontalo. Perjanjian-perjanjian itu ditetapkan pada 9 Januari 1828 memuat

<sup>43</sup> Guna menghadapi kemungkinan anti VOC (*neerlandophobia*) dan lebih memperkuat politiknya pada negeri-negeri yang di bawah pengaruh Ternate dan Gowa. Kemudian VOC mengutus Gubernur Maluku Padtbrugge mengunjungi Nusa Utara Sulawesi. Pada tanggal 16 Agustus 1677, rombongan Padtbrugge bertolak dari Ternate dengan kapal "*De Vliegende Sween*" dan tiba di Manado 2 September 1677. Kemudian melanjutkan pelayarannya ke Kaidipan, pada tanggal 21 September 1677 dengan menggunakan dua buah korra-korra tiba di Bobading Teluk Kwandang. Dari tempat ini mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui garis aliran sungai ke Limboto dan Gorontalo. Lihat J Bastiaans, *op.cit.*, hlm. 203-204. Lihat juga B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>44</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 8-9.

<sup>45</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *Indisch Staatsblad*, No. 28 a.

<sup>46</sup> Hal ini disebabkan sejarah *afdeeling* Manado dalam politik dan perdagangannya lebih banyak bergantung pada Ternate dibandingkan daerah-daerah bagian yang lain di Sulawesi. Warisan sejarah ini dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun pemerintahannya di wilayah ini. Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 354-355.

15 pasal.<sup>47</sup> Kontrak kembali diperbaharui pada tanggal 16 Januari 1831 memuat 6 pasal.<sup>48</sup> Perjanjian itu dipertegas kembali pada tanggal 1 Maret 1838 yang juga memuat 6 pasal.<sup>49</sup> Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya memuat kepentingan-kepentingan Pemerintah Belanda dengan berhasilnya memperluas kepentingan politiknya di Gorontalo. Mengenai hubungan perjanjian Gorontalo dan Pemerintah Belanda dapat dilihat di bawah ini :

Perjanjian 9 Januari 1828

#### Pasal 1

Raja dan para pembesar Kerajaan Gorontalo mengakui kekuasaan tertinggi Pemerintah Belanda atas Kerajaan Gorontalo dan negeri-negeri di bawah kekuasaan kerajaan, dan menyanggupi ketaatan atas penundukkan Pemerintah Belanda kepada Kerajaan Gorontalo dengan memegang keistimewaan perlindungan.

#### Pasal 2

Raja dan para pembesar Kerajaan Gorontalo wajib menjalankan janji, bahwa tidak mengadakan ikatan kerjasama dengan negeri-negeri Eropa, yang sebelumnya dapat mengadakan ikatan kerjasama. Juga tidak diperkenankan melakukan surat-menyurat baik langsung maupun tidak langsung. Kerajaan Gorontalo dapat mengadakan hubungan dengan negeri-negeri Eropa atas sepengetahuan Pemerintah Belanda.

#### Pasal 3

Raja Gorontalo dapat mengadakan hubungan persahabatan atau persekutuan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Jika terjadi perpecahan pada Kerajaan Gorontalo dengan kerajaan-kerajaan lainnya, maka Pemerintah Belanda akan mendamaikannya. Jika terjadi perlawanan rakyat atau penyerangan dengan menggunakan kapal, maka Pemerintah Belanda tidak akan membantu.

#### Pasal 4

Raja dan pembesar kerajaan mengakui Pemerintah Belanda atas pemilihan

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 374-377.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 377-378.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 378-379. Selain Kerajaan Gorontalo, perjanjian-perjanjian itu juga diterapkan pada kerajaan-kerajaan dalam federasi *Limo lo pahalaa* lainnya. Mengenai hubungan perjanjian Kerajaan Limboto dengan Pemerintah Belanda disepakati pada tanggal 9 Januari 1828, 16 Januari 1831, dan 27 Agustus 1836 yang memuat 6 pasal. Sedangkan Kerajaan Bolango dengan Pemerintah Belanda disepakati pada tanggal 7 Februari 1829 memuat 19 pasal, 1 Maret 1838 memuat 4 pasal, dan 22 Juli 1843. Begitupula kerajaan gabungan Bone-Bintauna-Suwawa dengan Pemerintah Belanda disepakati pada tanggal 9 Januari 1828, 20 Februari 1831, dan 1 Maret 1838 memuat 4 pasal. Bagi Kerajaan Bualemo di bawah *vazal* Kerajaan Limboto, setelah tahun 1838 berdiri sendiri atas perintah Gubernur Maluku telah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 9 Januari 1828, 30 Januari 1831, dan perjanjian-perjanjian itu kemudian diperbaharui tanggal 10 Maret 1848. Sedangkan hubungan Kerajaan Atinggola melalui perjanjian dengan Pemerintah Belanda disepakati pada tanggal 19 Maret 1842 yang memuat 18 pasal. Periksa *Ibid.*, hlm. 379-390. Jika diamati tentang jadal perjanjian-perjanjian dengan Pemerintah Belanda yang sebagian besar dilakukan pada awal tahun 1828 & 1831 dengan kerajaan dalam federasi *Limo lo pahalaa*. Kecenderungan terjadi bahwa Pemerintah Belanda memperkuat kekuasaan politik kolonialnya dengan mengikat pemerintahan pribumi demi kepentingan ekonominya, terutama emas yang sangat laku di pasaran Eropa. Hal ini dilakukan juga hampir di seluruh jajahannya, karena dalam Negeri Belanda sendiri telah mengalami kemunduran ekonomi.

dan pengangkatan Raja Gorontalo, begitupula pada pengangkatan *jogugu, kapitan laut, wulea lo lipu* diperbolehkan tanpa persetujuan Pemerintah Belanda.

#### Pasal 5

Kerajaan Gorontalo membawahi pribumi, tetapi dalam kerajaan masuk di dalam kekuasaan pengadilan Pemerintahan Belanda.

#### Pasal 6

Penduduk sipil dan Islam di bawah kekuasaan raja, sedangkan pada pengadilan tinggi kerajaan menangani masalah-masalah kejahatan kecil, seperti pencurian, perkelahian dan yang mengganggu ketertiban kota. Sedangkan pada kejahatan tingkat besar, seperti pembunuhan, pembakaran, perompakan, pemberontakan, perlawanan terhadap Pemerintah Belanda, dan sebagainya yang menimbulkan gangguan besar, maka penyelesaiannya dilakukan oleh raja dan pembesar kerajaan serta *residen* atau *assisten residen* serta penyelesaiannya di bawah koordinasi *residen* atau *assisten residen*.

#### Pasal 7

Raja Gorontalo berjanji akan memerintahkan penduduk untuk memberikan bantuan kepada kapal-kapal yang mengalami kecelakaan atau karam, baik kapal Pemerintah Belanda maupun kapal pribumi. Juga mengamankan muatan kapal tersebut.

#### Pasal 8

Raja serta pembesar Kerajaan Gorontalo berjanji bersama-sama dengan Raja Limboto, Attingola, Bolango, Bintauna, Bone, Suwawa dan Bualemo akan memberikan bantuan pekerja dan bahan bangunan atas perbaikan benteng, bangunan dan gudang Pemerintah Belanda.

#### Pasal 9

Raja serta pembesar Kerajaan Gorontalo menyerahkan emas setiap tahunnya, yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali sebesar 700 real dengan kadar 19 karat<sup>50</sup> dapat juga diserahkan  $\frac{1}{3}$  dalam bentuk uang,  $\frac{1}{3}$  dalam bentuk kain, dan  $\frac{1}{3}$  dalam bentuk logam. Penyerahan ini berlaku pada tanggal 1 Januari, sedangkan daerah penghasil emas penyerahan dilakukan pada akhir bulan Desember yang akan datang. Untuk tahun 1829-1830 penyerahan emas dilakukan 3 bulan sekali, mulai pada tanggal 1 Januari sampai batas akhir bulan Desember setiap tahunnya.

#### Pasal 10

Pemerintah Belanda mengizinkan kepada raja dan penduduk Gorontalo menyerahkan 700 real dalam bentuk emas, sedangkan penghasilan lainnya bebas untuk diperdagangkan.

#### Pasal 11

Keuntungan hasil kopi diserahkan ke dalam  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Pemerintah Belanda, penyerahan hasil kopi juga diberlakukan dalam bentuk uang. Setiap

<sup>50</sup> 1 real = f16.



tahunnya penentuan harga kopi dilakukan oleh Pemerintah Belanda, untuk tahun 1828 harga kopi sebesar *f* 16 perpikul 125 lt.

Pelaksanaan penentuan harga kopi bagi Pemerintah Belanda untuk mendapatkan kopi yang lebih berkualitas dengan *f* 12 perpikul 125 lt. Demikian juga diketahui raja dan pembesar Kerajaan Gorontalo sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintah Belanda dalam menentukan pajak bagi daerah yang berproduksi.

#### Pasal 12

Penduduk Gorontalo tidak diperkenankan meninggal-kan negerinya untuk berdagang, apabila belum memiliki izin dari raja yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari *Residen* Gorontalo.

#### Pasal 13

Raja bersama dengan pembesar kerajaan dan kepala bawahan memperhatikan kegiatan penduduk yang tidak taat dan patuh pada Pemerintah Belanda, dan perlu diambil tindakan penyelesaian.

#### Pasal 14

Raja dan pembesar Kerajaan Gorontalo berjanji akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tercela bagi penduduk yang belum membayar pajak, jika hal ini tidak dilakukan maka akan diadakan denda dan hutang. Jika tidak mampu melakukan pembayaran akan bertentangan dengan hukum dengan menuntut melunaskannya sampai dijadikan budak. Kebiasaan tercela penduduk di bawah perlindungan kepala dan kerajaan mendukungnya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan perselisihan dengan Pemerintah Belanda.

#### Pasal 15

Raja dan pembesar Kerajaan Gorontalo mengizinkan kepada rakyat Bone, Bintauna, Suwawa, dan Bualemo untuk menambang emas di Molosifat, di bawah pengawasan Kerajaan Gorontalo dengan perhitungan hasil emas guna keperluan izin menggali.

### Perjanjian 16 Januari 1831

#### Pasal 1

Raja dan pembesar kerajaan menjanjikan kedua kalinya, selama 5 tahun yang akan datang dan berikutnya pada setiap tahunnya tanpa pengecualian menyerahkan 700 ons emas kepada Pemerintah Belanda.

#### Pasal 2

Raja dan pembesar kerajaan menjanjikan akan menyerahkannya selama 2 kali angsuran pertahun, terhitung tanggal 1 Juni dan 1 Desember yang keseluruhan penyelesaiannya diserahkan pada tanggal 1 Desember 1835.

#### Pasal 3

Pada tahun 1828 melalui persetujuan raja dan pembesar kerajaan atas bantuan

sebesar 719  $\frac{1}{4}$  ons emas, menjanjikan batas akhir 5 tahun, juga melalui penyerahan 700 ons emas pertahun tanpa kelalaian dalam pembayaran.

#### Pasal 4

Raja dan pembesar kerajaan akan melunasi penyerahan emas sebanyak 700 ons pertahun, jikalau tambang emas daerah Bombula, Paguat dan Molosifat berproduksi.

#### Pasal 5

Melalui raja dan pembesar kerajaan akan menyerahkan emas atau *f* 16 tembaga per ons, dengan mengutamakan pembayaran dimuka dan harus menyerahkannya pertahun.

#### Pasal 6

Raja dan pembesar kerajaan menyerahkan diatas 700 ons melalui penggalian tambang emas, maka selebihnya hasil produksi dapat melalui persetujuan dagang.

Perjanjian 1 Maret 1838

#### Pasal 1

Raja dan pembesar Kerajaan Gorontalo berjanji dan menepatinya untuk menyelesaikan kedua perjanjian diatas. Kecuali dalam pasal 3 persetujuan tersebut akibat adanya kemerosotan sehingga dibawah ini dilakukan perubahan.

#### Pasal 2

Dalam perjanjian sesudahnya yang setiap tahunnya dilakukan penyerahan 700 real bagi tambang emas Paguat, Bombula, Molosifat, Ankaulu serta Sumalata—muncul persetujuan penyerahan emas yang mendesak—melalui Kerajaan Gorontalo sebesar 100 ons setiap tahunnya. Tetapi penyerahan yang belum dilunasi sebesar 1.474  $\frac{30}{36}$  real emas yang dihasilkan tahun lalu juga diselesaikan.

#### Pasal 3

Bantuan 100 ons emas dari Paguat, berbeda dengan kampung yang telah lama berdiri dengan sekian jumlah penduduk, melalui perjanjian penyerahan 700 real setiap tahunnya hanya dibagi kepada Gorontalo dan kepala kampung.

#### Pasal 4

Pada pasal 2 tersebut diatas kurang tercapai oleh karena melalui penduduk Paguat telah diserahkan 100 real, juga sebelumnya telah diserahkan dari kerajaan sebesar 700 ons pertahun.

#### Pasal 5

Raja bersama *jogugu*, *kapitan laut* dan *marsaoleh* melalui Pemerintah Belanda menyelesaikan seluruh kekacauan penyerahan emas, sehingga diharapkan tiada lagi kepala kampung yang dirugikan, dan kesemua penyelesaian tersebut harus sepengetahuan *gezaghebber* (penguasa sipil).

#### Pasal 6

Perjanjian ini dibuat akhir bulan Pebruari dan pelaksanaan persetujuan dimulai pada tanggal 1 Maret 1838, yang memegang kedudukan tetap kembali berlaku.



Gorontalo dan Limboto sebagai kerajaan berpengaruh dalam pembentukan gabungan kerajaan-kerajaan disekitarnya kemudian dikenal dengan persekutuan *Loudullosimo lo pohalaa* (dua kerajaan bersekutu dan mengembangkannya ke dalam 5 kerajaan setelah masuknya Kerajaan Bone, Bolango dan Atinggola), serta bersama-sama berpedoman kepada sendi-sendi adat istiadat dan agama,<sup>51</sup> maka Gorontalo-Limboto mempunyai kedudukan politik sangat penting terhadap Bone, Bolango dan Atinggola. Berdasarkan konsep politik pemerintah kerajaan itu, kemudian dikeluarkan *staatblad* tahun 1824 No. 28a, maka pada 2 Nopember 1833 Pemerintah Belanda menempatkan *gezaghebber* yang wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas di Gorontalo, tetapi juga Limboto, Bone-Bintauna-Suwawa, Atinggola, dan Bolango.<sup>52</sup>

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Gorontalo, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat *Gouvernement Radja*. Dengan demikian terdapat 2 raja yaitu *Gouvernement Radja* bertugas mengurus berbagai kepentingan Pemerintah Belanda dan *Negorij Radja* mempunyai kekuasaan atas segala urusan penduduk pribumi dan menarik setiap pajak pribumi. Dalam melaksanakan tugasnya Raja Gorontalo (*Negorij Radja*) dibantu 2 *jogugu* masing-masing bertugas sebagai patih atau pembantu kerajaan; 2 *kapitan laut*, seorang bertugas menjaga keamanan pantai dan seorang lagi bertugas menjaga keamanan di dalam kerajaan; 4 *marsaoleh* yang mempunyai wewenang sebagai dewan perwakilan rakyat, juga memilih raja dan kepala-kepala kampung; 30 *wulea lo lipu* atau kepala kampung bertugas melaksanakan semua perintah raja; dan 40 pembesar kerajaan atau *bate*.<sup>53</sup>

Pada pelaksanaan pemerintahan pribumi, raja dan para pembesar kerajaan tidak menjalankan penarikan pajak emas dari tambang-tambang emas kepada Pemerintah Belanda. Sehingga pada tanggal 12 September 1849, Pemerintah Belanda kembali membuat perjanjian diantaranya memuat tentang penyerahan emas agar segera diselesaikan, penyerahan itu dapat digantikan melalui pembayaran uang sebesar f 20.505. Pelaksanaan pembayaran disepakati bahwa Pemerintah Belanda akan memberikan 10% kepada raja, *jogugu* dan kepala bawahannya.<sup>54</sup>

Perkembangan politik Hindia Belanda yang diikuti dengan peningkatan penghasilan kawasan Gorontalo, pada tahun 1856 Pemerintah Belanda meningkatkan status pemerintahannya dengan menempatkan *assisten residen* yang dijabat pertama kali oleh Van Baak menggantikan kedudukan *gezaghebber*. Dalam menjalankan pemerintahannya, Van Baak membagi kawasan Gorontalo ke dalam 5 swapraja yaitu Gorontalo, Limboto, Bone, Boalemo dan Attinggola. Di bawah

<sup>51</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 4. Lihat juga B.J. Haga, *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>52</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 373. Untuk keterangan selanjutnya tahun 1862 Negeri Bolango dihapuskan dan Negeri Bualemo menggantikan kedudukannya di dalam *Lima lo pohalaa*. Lihat B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 17. Sehingga setelah tahun tersebut Bolango jarang lagi disebut dalam lintasan sejarah.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 374.

<sup>54</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 9. Mengenai besarnya pembayaran pajak bagi Limboto sebesar f 5.005, Bone f 2.045, Bualemo f 1.220, Attinggola f 210 dan Bolango f 415. Lihat *Ibid.*, hlm. 54.

swapraja terdapat 12 distrik, khusus swapraja Gorontalo terbagi dalam 5 distrik yaitu distrik Kota, Paguat, Telaga, Tapa dan Kabila. Sebagai akibat adanya perubahan dalam susunan pemerintahan, maka dalam pemerintahan pribumi juga mengalami perubahan. Dalam strukturnya terdiri dari seorang raja, 2 *jogugu*, 2 *kapitan laut*, 4 *wulea lo lipu*, 20 *wala apulus*, dan sekitar 100 *olongia* dan *taudaa*.<sup>55</sup> Perubahan politik pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Belanda ternyata sebagai dasar keinginannya untuk membentuk pemerintahan langsung di Gorontalo.

Jabatan *marsaoleh* dikembalikan dan disatukan ke dalam *wulea lo lipu*—sebelumnya bertugas sebagai perantara raja dengan kepala-kepala kampung, diangkat sebagai kepala distrik yang masing-masing mendapatkan wilayah kekuasaan *wulea lo lipu* atas persetujuan *assisten residen* dan bertempat tinggal di ibukota. Dengan demikian *wulea lo lipu* Hoginaä disatukan ke dalam Distrik Kota, *wulea lo lipu* Wuwabu (Uwabu) ke Distrik Kabila, *wulea lo lipu* Lupojo ke Distrik Tapa, *wulea lo lipu* Billinggata ke Distrik Telaga.<sup>56</sup>

Walaupun peralihan pemerintahan *wulea lo lipu* dijabat ke dalam distrik, tetapi kekuasaan raja tetap berpengaruh kuat dalam pemerintahan pribumi. Raja masih mendapat legitimasi dari rakyat dengan dukungan dari para *bate* atau pemangku adat. Penempatan *wulea lo lipu* sebagai kepala distrik diharapkan dapat bertugas sebagai perantara Pemerintah Belanda dengan kerajaan, yang sebelumnya dijabat seorang raja dalam struktur pemerintah pribumi.

Pada 1864, Pemerintah Belanda kembali merubah struktur pemerintahan swapraja Gorontalo, sebelumnya terdapat 5 distrik kemudian dirampingkan menjadi 3 distrik yaitu Kota, Telaga dan Tapa.<sup>57</sup> Perubahan ini dimaksudkan sebagai bagian dari tujuan politik Pemerintah Belanda melalui *assisten residennya* untuk tidak lagi berhubungan dengan raja, dan berusaha memperkecil kekuasaan raja dengan menanamkan kekuasaannya kepada distrik yang telah dibentuknya dengan tujuan dapat mengatur pemerintahan langsung di kawasan Gorontalo.

Sebagai akibat dari kekuasaan Pemerintah Belanda menerapkan politik pemerintahannya guna menggeser kekuasaan raja, serta adanya sistim wajib kerja dan pajak atau pungutan yang ditarik dari rakyat menyebabkan timbulnya perlawanan rakyat. Konflik itu akhirnya pecah pada tahun 1869-1873 yang kemudian dikenal dengan “Perang Panipi”. Perlawanan ini dipimpin Panipi sebagai aksi protes atas kekuasaan Belanda di Gorontalo. Dalam perlawanannya, Panipi berhasil menyerang Belanda, bahkan basis pertahanan di Benteng Otanaha dikuasai—sehingga masyarakat

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Untuk keterangan distrik bagi Swapraja Limboto terbagi dalam Distrik Kwandang, Batudaa, Tibawa, dan Paguyaman. Sedangkan Swapraja Bone terdiri dari Distrik Bone, Suwawa dan Bintauna. Lihat *Ibid.*, hlm. 40. Lihat juga N. Graafland. 1987. *Minahasa, Negeri, Rakyat dan Budayanya*. Jakarta: Lembaga Perpustakaan Dokumentasi & Informasi, hlm. 21.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

menyebutnya *Bentengi li Panipi*-, walaupun kemudian hari perlawanan Panipi dapat dilumpuhkan oleh Belanda dengan rentang waktu yang panjang.<sup>58</sup>

Setelah berhasil memadamkan perlawanan Panipi selama 4 tahun, Pemerintah Belanda kembali memperkokoh kedudukannya dengan menanamkan kekuasaannya pada distrik dan menempatkan seorang *kadli* dan 4 imam. Penempatan ini ternyata disesuaikan dengan pemerintahan pribumi yang juga mempunyai seorang *kadli* dan 4 imam.<sup>59</sup> Pengangkatan dilakukan oleh Pemerintah Belanda agar kekuasaan distrik semakin kuat, dan dapat menimbulkan dualisme kekuasaan dalam pemerintahan pribumi. Pendekatan dijalankan Pemerintah Belanda dengan mengangkat *kadli* dan imam di distrik, karena masyarakat Gorontalo dengan struktur sosialnya mempunyai kecenderungan pada keselarasan antara adat dan agama.

Adanya perubahan distrik dalam pemerintahan dan kegiatan agama dalam masyarakat menyebabkan kekuasaan raja semakin kecil. Pengangkatan para kepala distrik—yang diambil dari keluarga raja atau pembesar kerajaan—bertanggung jawab langsung pada *assisten residen* dengan memberikan laporan setiap tahunnya, menyebabkan kekuasaan raja semakin surut. Akhirnya pemerintahan berada di bawah para kepala distrik, kemudian berkembang menjadi kepala wilayah mempunyai otonomi sendiri untuk memerintah—kecenderungan terbentuknya raja-raja kecil—di bawah kekuasaan *wulea lo lipu*. Keadaan ini terus berlangsung sampai pada tahun 1889 dan berhasil membentuk pemerintahan langsung di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda.<sup>60</sup>

Sejak tahun 1889 terjadi perubahan besar pada masyarakat Gorontalo. Kekuasaan atas raja secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah Belanda, keputusan ini berdasarkan pada Lembaran Negara Tahun 1889 No. 94 dan No. 256.<sup>61</sup> Setelah dihapuskannya kekuasaan raja, maka pemerintahan pribumi berada di bawah kekuasaan kepala distrik (*marsaoleh*). Sehingga kepala distrik langsung di bawah kekuasaan *assisten residen* yang dijabat oleh G.W.W.C Baron van Hoevel.

Sebagai akibat dari penghapusan kekuasaan raja atas pribumi, maka kawasan Gorontalo yang berstatus *onderafdeeling* ditingkatkan menjadi *afdeeling* meliputi wilayah *Limo lo pahalaa* yang langsung di bawah (*reckhtstreeks bestuur*) kekuasaan *assisten residen*. *Afdeeling* Gorontalo dibagi dalam 2 kontrolir

<sup>58</sup> Konflik terhadap Belanda dengan munculnya pimpinan dari kalangan pribumi mampu menggerakkan rakyat untuk mengadakan perlawanan. Sehingga mobilisasi dapat dibentuk dengan adanya semangat loyalitas yang dapat memperkuat perjuangannya melawan Belanda. Juga adanya kepentingan sosial dalam hal penarikan pajak dan pengerahan wajib kerja (*rodi*) ikut membentuk solidaritas kelompok semakin kuat. Faktor-faktor ini dengan berbagai kepentingan saling memperkuat serta mempertajam pertentangan ikut mendorong timbulnya konflik dengan Belanda.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 13. Pada masa itu kekuasaan kerajaan telah mengalami kemerosotan, bahkan pada kerajaan-kerajaan di sekitar Gorontalo sebagian sudah tidak diberlakukan lagi.

(*onderafdeeling*) yaitu Gorontalo dan Limboto, sedangkan *onderafdeeling* Gorontalo ditingkatkan dalam 7 distrik yaitu Kota, Telaga, Kabila, Tapa, Bone termasuk Suwawa dan Bintauna, Bualemo dan Paguat,<sup>62</sup> yang setiap kepala distrik masih dijabat oleh *wulea lo lipu*.

Sejak dibentuknya pemerintahan Gorontalo sebagai daerah *afdeeling*, berbagai perubahan peraturan pemerintahan dilakukan dikenal dengan "Peraturan Scherer"<sup>63</sup>. Dalam peraturan itu diterapkan berbagai kegiatan pemerintahan *afdeeling* dikepalai oleh para kepala distrik (*marsaoleh*), serta mengatur kegiatan pamong desa, pertanian, pajak, wajib-kerja (*verplichte diensten*) juga membentuk *weeskamer* (balai yang mengurus harta peninggalan dan warisan pribumi). Pembentukan peraturan tersebut ditetapkan Pemerintah Belanda bersama dengan para pembesar *Limo lo pohalaa* dan dijadikan dasar undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1889 untuk pelaksanaan pemerintahan langsung. Selain itu ditetapkan pula peraturan tentang pungutan dan pekerjaan yang tidak wajib dengan diganti penyerahan wajib (*verplichte leveranties*) berupa uang kepala. Pajak kepala diadakan dengan maksud untuk menggantikan penyerahan emas, yang kemudian meluas dengan memungut pajak pendapatan bagi setiap keluarga (batih) sebesar *f* 5 pertahun atau pasir emas. Sehingga bujang, janda dan orang-orang tertentu dikenakan pajak yang sebelumnya dibebaskan.<sup>64</sup> Dengan sistim baru itu diharapkan rakyat akan lebih giat menanam dan menghasilkan kopi, coklat dan hasil hutan lainnya berupa damar dan rotan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan pemasaran dan peningkatan produksi ekspor.

Dalam pelaksanaan "Peraturan Scherer" juga mengalami permasalahan terutama menyangkut keuangan atas pemberian upah bagi para pamong praja pribumi termasuk para kepala distrik. Sebagai akibat dari permasalahan itu, maka para kepala distrik menerima besarnya upah berdasarkan hasil pendapatan yang diterima dalam wilayah pemerintahannya. Sehingga penerimaan upah bagi kepala distrik bervariasi antara *f*65 sampai *f*200 perbulan. Demikian pula kepala *onderdistrict* menerima upah antara *f*40 sampai *f*50 perbulan. Mengenai kepala kampung atau *taudaa* pembayaran upah ditetapkan pada Lembaran Negara Tahun 1889 No. 96 dan No. 250 bahwa bagi kepala kampung dibayar dalam 15 hari dinas kerja atau ½ bulan dalam setahun. Peraturan ini juga didasarkan pada penghasilan yang dapat diperoleh

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 40. Lihat juga G.W.W.C Baron van Hoevel. *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>63</sup> G.A. Scherer adalah seorang asisten residen Gorontalo, setelah menjabat asisten residen kemudian dipromosikan sebagai Residen Sumatra Timur. Sedangkan kedudukannya digantikan G.W.W.C Baron Van Hoevel. Pada tahun 1886 Scherer mengadakan pembaharuan dengan membuat berbagai peraturan bertujuan mengadakan perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan masyarakat pada masa itu sangat memecahkan, sehingga banyak penduduk meninggalkan dunyanya dan mendirikan pemukiman di daerah pegunungan.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

melalui rakyat walaupun sangat minim.<sup>65</sup> Kepala kampung biasanya membawahi kurang lebih 30 kapala dapulu (kepala dusun). Dalam hasil pemungutan pajak bagi taudaa memperoleh 6% dan kapala dapulu memperoleh 4% dari hasil keseluruhan jumlah pajak yang dipungut dalam wilayahnya.<sup>66</sup>

Mengenai pemberian upah pegawai pemerintah kolonial dan para kepala pribumi dalam Afdeeling Gorontalo dapat diketahui berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri No. 4938, tanggal 29 Agustus 1887 melalui Direktur Pemerintahan Dalam Negeri Kuneman. Pemberian upah para pegawai *afdeeling* meliputi *assisten residen* menerima upah sebesar f. 600 perbulan; 2 orang *controleur*/pengawas—Gorontalo dan Limboto—masing-masing f. 300 perbulan; seorang pembantu *controleur* f. 225 perbulan. Bagi pegawai jurutulis digaji f. 1.500 pertahun; 3 jurutulis pribumi digaji masing-masing f. 25 perbulan; dan 14 penjaga masing-masing digaji f 10 perbulan. Mengenai biaya perjalanan disediakan f2.400 pertahun dan sewa rumah bagi 2 *controleur* sebesar f. 1.200 pertahun. Untuk upah para kepala pribumi terdapat perbedaan besar dibandingkan upah pegawai pemerintah kolonial. Khusus 11 *marsoleh* (kepala distrik) secara keseluruhan digaji sebesar f. 20.000 pertahun, sedangkan 9 *walaapulu* (*onderdistrik*) sebesar f. 4.680 pertahun. Untuk 11 jurutulis pribumi masing-masing digaji sebesar f. 25 perbulan, dan 31 penjaga digaji sebesar f. 10 perbulan. Pada bagian *jogugu* dan *kapitan laut* diberikan gaji sebagai pengganti kerugian atas hilangnya penghasilan yang masing-masing diberikan antara f. 600-1.200 pertahun, sedangkan kedua *walaapulu* yang akan diberhentikan digaji sebesar f. 2.400 pertahun.<sup>67</sup>

Dalam pelaksanaan peraturan pemerintahan, khususnya masalah tindak pidana bagi rakyat tetap di bawah pengadilan pribumi, sedangkan perkara-perkara yang sifatnya lebih besar diselesaikan melalui Dewan Kerajaan Gorontalo. Bagi tindak pidana yang berlangsung dalam wilayah *assisten residen* Gorontalo, tetapi di luar daerah *Limo lo pahalaa*, maka diserahkan pada pengadilan Pemerintah Belanda dan pelaksanaannya melalui Majelis Besar Gorontalo berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1889 No. 95.<sup>68</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan pengajaran pada *afdeeling* Gorontalo juga mendapat perhatian Pemerintah Belanda. Dalam menghadapi masalah pengajaran telah didirikan 78 sekolah rakyat; 13 sekolah gubernemen klas 2 yang diperuntukkan bagi rakyat kebanyakan tanpa pelajaran bahasa Belanda; 2 sekolah lanjutan; 2 sekolah *schakel* (penghubung); 1 sekolah gadis (*meisjesschool*); 2 HIS; 1 HCS; 1 ELS (*Europese Lagere Scholen*) atau sekolah dasar Eropa; dan 1 khusus sekolah

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 61. Lihat juga G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 89-103.

<sup>68</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 14-15.

swasta Cina.<sup>69</sup> Sejak dihapuskannya sekolah pangreh praja (*hoofdenschool*) pada tahun 1872 di Tondano, kemudian diubah menjadi sekolah guru (*kweekschool*),<sup>70</sup> memberi pengaruh dibukanya sekolah guru pribumi di Gorontalo.<sup>71</sup> Para pengajar banyak mendapat pengaruh dari Minahasa dan mengalami perkembangan, walaupun tenaga pengajar pertama didatangkan dari Sumatera.<sup>72</sup>

Berbagai pelaksanaan peraturan pemerintahan yang diterapkan Pemerintah Belanda, tetap mempertahankan kekuasaan pribumi yang “status quo” dengan pernyataan bahwa lembaga tradisional perlu dihormati dan rakyat masih perlu diperintah oleh kepala-kepalanya sendiri—*marσαoleh*—sudah barang tentu mendapat persetujuan dari rakyat, dibanding diperintah langsung oleh Belanda. Di pandang penting bahwa para *marσαoleh* perlu menunjukkan kesetiannya kepada Pemerintah Belanda. Meskipun prinsip pewarisan dapat diberlakukan, tetapi kenyataannya terdapat kontradiksi antara prinsip Gubernemen—Pemerintah Belanda—dengan keadaan kehidupan masyarakat. Sehingga masa bagian akhir abad ke-19 birokrasi Pemerintah Belanda belum sepenuhnya berjalan, hal ini dilandasi timbulnya dualisme yang ada menonjolkan bentuk-bentuk tradisional, semi feodal dan semi modern.

### 3.2. Struktur Sosial

Dalam struktur sosial feodalistis, raja dan keluarganya berada pada tingkat teratas dalam piramida masyarakat serta merupakan tokoh yang menjadi panutan utama baik di dalam kalangannya sendiri, maupun bagi golongan-golongan masyarakat di luarnya. Di samping raja tingkat teratas menduduki kekuasaan pribumi, dibantu para pembesar kerajaan diantaranya *jogugu* bertugas membantu pemerintahan kerajaan, *kapitan laut* bertugas mengamankan wilayah dalam kerajaan dan pantai, *wulea lo lipu* kemudian dileburkan ke dalam *marσαoleh* bertugas mengepalai pemerintahan setiap wilayah yang dibantu oleh *walaapulu*, *olongia*, *taudaa* dan *kapala dapulu*.

Disamping itu terdapat para *bate* dibantu oleh para *wuhu* bertugas menetapkan adat istiadat. Sedangkan kadli, imam dan *syaradaa*—kaum alim ulama—bertugas mengurus masalah-masalah hukum Islam pada masyarakat. Walaupun tidak mempunyai kekuasaan politik, tetapi mereka sangat berpengaruh dalam masyarakat. Tingkatan yang paling bawah dengan jumlahnya paling besar adalah rakyat yang terbagi dalam berbagai tingkatan, kelompok dan golongan.

Untuk memahami perubahan struktur sosial masyarakat perlu dibentangkan politik Kolonial Belanda yang melakukan reaksi dengan memperkuat kedudukan

<sup>69</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 21. Ada kecenderungan Haga menghitung sekolah rakyat secara keseluruhannya, baik yang didirikan pemerintahan Kolonial Belanda maupun kaum pribumi.

<sup>70</sup> Sartono Kartodirdjo, jil. 1., *op.cit.*, hlm. 355.

<sup>71</sup> N Graafland, *op.cit.*, h.n. 518.

<sup>72</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 21.



pemerintahannya dan membagi wilayah Gorontalo ke dalam bentuk distrik. Hal ini dilandasi sesuai dengan prinsip politiknya membatasi kekuasaan raja dengan mengangkat *marsaoleh* sebagai kepala distrik yang dipandang—memilih para keluarga raja dan pembesar kerajaan—telah mengakar kekuasaannya pada masyarakat. Sebagai akibat politik Kolonial Belanda kedudukan raja mengalami kemerosotan setelah peraturan tentang tidak digantikannya kedudukan para kepala pribumi (raja, *jogugu* dan *kapitan laut*) sampai pada titik kulminasi dengan dikeluarkannya keputusan pada Lembaran Negara Tahun 1889 No. 94 dan No. 256 tentang penghapusan kedudukan raja atas pribumi. Walaupun demikian dalam konteks pemerintahan, lembaga-lembaga tradisional yang telah dibentuk masih diperlukan dalam merumuskan peraturan-peraturan pemerintahan.

Runtuhnya kekuasaan raja menyebabkan para *marsaoleh* sebagai kepala distrik tampil menggantikan kekuasaan pemerintahan atas pribumi yang bertanggung jawab langsung pada *assisten residen*. Dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh para *walaapulu*, *taudaa* dan *kapala dapulu*, serta *kadli*, imam dan *syaradaa*. Semua elite birokrasi pribumi itu menjalankan perintah *assisten residen* serta mengatur kehidupan rakyat sebagai *abdi*.

Dalam lingkungan distrik dimana kehidupan rakyat terutama masih pada tingkat subsistensinya serta ekonominya belum sepenuhnya terbuka, hubungan masyarakat masih bersifat komunal, solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan (bersifat emosional). Diferensiasi dan spesialisasi masih rendah, warga distrik pada umumnya adalah petani, maka dalam homogenitas seperti itu berkembanglah sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem tolong-menolong atau lazim secara umum disebut gotong royong. Berdasarkan ikatan ini banyak usaha rakyat tidak memerlukan upah, tenaga dapat dikerahkan menurut prinsip pertukaran. Sehingga tenaga sebagai modal belum bebas dari tradisi yang berlaku di distrik.

Kedudukan *marsaoleh* yang sangat strategis dengan memegang peranan rangkap, mempunyai kedudukan sebagai penguasa teratas di daerahnya (distrik), berperan sebagai perantara antara Pemerintah Belanda dan rakyat, suatu kedudukan yang menambah kekuasaan politiknya. Para *marsaoleh* di distriknya mempunyai tanah kedudukan serta hak memungut pajak hasil produksi dan mengerahkan tenaga rakyat untuk berbagai keperluan jabatan dan rumah tangganya. Beras, jagung, kelapa dan keperluan sehari-hari lainnya dipungut dari rakyat dengan cuma-cuma atau dengan harga rendah, begitupula pengerahan tenaga kerja dilakukan menurut kehendaknya tanpa campur tangan sedikitpun dari pihak *asisten residen* atau kontrolir. Sehingga *marsaoleh* menguasai waktu, pekerjaan dan sebagian milik rakyat bawahan dengan cara sebebas-bebasnya. Pungutan dan pelayanan (*diensten*) semakin besar memang sangat kuat, tetapi amat wajar apabila untuk menambah kewibawaannya.

Di pandang dari sudut rakyat sendiri, kewibawaan penguasa lokal—*marsaoleh, walaapulu, taudaa* dan *kapala dapulu*—sangat besar, sehingga tidak mengherankan rakyat patuh dan hormat atas berbagai perintahnya. Hubungan timbal balik antara penguasa pribumi dan rakyat sangat dekat. Dalam tradisi masyarakat berlaku seperti upacara/seremoni harus dihadiri para penguasa pribumi. Setiap upacara mengundang *marsaoleh, walaapulu, taudaa* dan *kapala dapulu*, jika mereka belum datang maka acara tersebut belum dapat dilangsungkan. Suatu kebanggaan pula bagi masyarakat setempat apabila para penguasa pribumi menghadiri berbagai seremoni yang telah diadakan oleh rakyat. Sehingga cerminan hubungan timbal balik dapat berjalan dengan sendirinya, penguasa pribumi dapat memperkuat kewibawaannya di mata rakyat, sedangkan di sisi lain pendekatan penguasa pribumi pada rakyat menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat, untuk itu sangat wajar *marsaoleh* menunjukkan kebesarannya dengan mempunyai pengikut yang cukup banyak. Sehingga menimbulkan moral dan etos kerja bagi *marsaoleh* dalam menjalankan kekuasaannya.

### 3.3. Penduduk dan Pola Pemukiman

Berbagai kategori penduduk mendiami daerah Gorontalo, pertama sebagai penduduk asli hidup mengelompok dalam unit-unit kecil (*linula*) dalam satu kesatuan sosial ekonomi, pemukiman mereka menyebar dan menetap di sekitar pegunungan Buliohuto dan Tilongkabila,<sup>73</sup> sekitar Danau Limboto serta daerah-daerah perbukitan. Adanya para imigran dan pedagang yang datang dari Ternate, Makassar dan Bugis, kemudian Cina, Eropa—terutama Belanda—dan Minahasa memberikan nuansa tersendiri atas pembentukan dan perkembangan Gorontalo. Sehingga adanya berbagai suku bangsa dapat membawa aspek sosial yang penting. Perkenalan antarsuku bangsa—oleh para pendatang—memberi kemungkinan terbukanya komunikasi dalam pertukaran berbagai pengalaman di daerahnya.

Kolonisasi orang-orang Bugis/Makassar di Gorontalo tidak terlepas setelah disepakatinya perjanjian Bungaya, menyebabkan terjadinya imigran dalam skala besar di daerah itu. Sehingga para imigran Bugis/Makassar meninggalkan negerinya dan menuju ke daerah-daerah yang pernah di bawah pengaruhnya termasuk Gorontalo.<sup>74</sup> Bermula dari imigran orang Bone membentuk perkampungan serta mengembangkannya dalam kerajaan kecil—nama sesuai daerah asalnya—dan masuknya pengaruh politik kolonial diubah ke dalam distrik, mereka mendiami sekitar sungai Bone dan pantai Bone. Laporan Rosenberg menyatakan bahwa

<sup>73</sup> Lihat secara keseluruhan S.R. Nur. 23 Januari 1992. *Ikilale Lo Bate Walu* (Ikrar Delapan Kepala Adat) Kerajaan-Kerajaan Gorontalo. Ujung Pandang: tanpa penerbit. Baca juga M.H. Lipocto. 1947. *Sedjarah Gorontalo, Doea Lima Pohalaa*, V. Gorontalo: Volks Drukkerij.

<sup>74</sup> Andi Zainal Abidin, *op. cit.*, hlm. 56-57. Orang-orang Bugis/Makassar yang menyebar ke berbagai Nusantara sampai Asia Tenggara membangun pola pemukiman yang kemudian banyak bermunculan perkampungan Bugis/Makassar di kawasan itu.



terdapat 5 kampung yang dihuni orang Bone.<sup>75</sup> Sedangkan kolonisasi orang Cina membangun pemukiman di sekitar muara sungai Bolango sebagai daerah perdagangan. Bagi orang Belanda menetap di pusat kota dengan membentuk kompleks pemukiman sendiri dengan pos pengamanan, yang letaknya tidak jauh dari perkantoran *assisten residen*.

Penduduk *afdeeling* Gorontalo secara keseluruhan berjumlah 186.000 jiwa.<sup>76</sup> Khusus pengetahuan komposisi penduduk Gorontalo hanya dapat diketahui dari keterangan Van Baak berjumlah sekitar 40.000 jiwa.<sup>77</sup> G.W.W.C. Baron van Hoevell memberikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sedangkan H. Ph. Th. Witkamp berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Adapun gambaran terperinci mengenai jumlah penduduk dan luas wilayah Gorontalo tertera di bawah ini :

#### Jumlah Penduduk Gorontalo Tahun 1889

| Distrik                     | Laki-Laki | Perempuan | Anak-Anak | Jumlah |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Kota                        | 3.506     | 5.803     | 8.553     | 17.862 |
| Telaga                      | 2.927     | 4.454     | 7.601     | 14.982 |
| Kabila                      | 1.581     | 2.297     | 4.516     | 8.394  |
| Tapa                        | 1.670     | 2.128     | 4.679     | 8.477  |
| Bone (Soewawa dan Bintaona) | 1.330     | 1.906     | 3.217     | 6.453  |
| Baoelemo                    | 693       | 887       | 1.543     | 3.123  |
| Pagoeat                     | 804       | 352       | 802       | 1.958  |
| Jumlah                      | 12.511    | 17.827    | 30.911    | 61.249 |

Sumber : G.W.W.C. Baron van Hoevell. *De Assiten-Residentie Gorontalo, Onder Rechtstreeksch Bestuur is Gebracht*. Leiden, E.J. Brill, 1891, hlm. 10

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa Dalam Distrik Kota Tahun 1889

| Suku Bangsa | Laki-Laki | Perempuan | Anak-Anak | Jumlah |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Eropa       | 23        | 16        | 32        | 71     |
| Cina        | 123       | -         | 123       | 246    |
| Arab        | 18        | -         | 14        | 32     |
| Bugis       | 30        | 12        | 21        | 63     |
| Minahasa    | 65        | 60        | 141       | 266    |
| Jumlah      | 259       | 88        | 331       | 678    |

Sumber : G.W.W.C. Baron van Hoevell. *De Assiten-Residentie Gorontalo, Onder Rechtstreeksch Bestuur is Gebracht*. Leiden, E.J. Brill, 1891, hlm. 10

<sup>75</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 17-18.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

## Jumlah Penduduk dan Wilayah Gorontalo Tahun 1897

| Distrik  | Luas (km <sup>2</sup> ) | Penduduk | Kedudukan    |
|----------|-------------------------|----------|--------------|
| Kota     | 58                      | 20.690   | Gorontalo    |
| Telaga   | 102                     | 17.370   | Hoelawa      |
| Kabila   | 255                     | 9.730    | Padeboeobo   |
| Tapa     | 165                     | 9.830    | Taloemopatoc |
| Bone     | 2.081                   | 7.490    | Boebo        |
| Boalemoe | 645                     | 3.630    | Tilamoeta    |
| Pagoeat  | 3.709                   | 2.270    | Pentadoe     |
| Jumlah   | 7.015                   | 71.010   |              |

Sumber : H. Ph. Th. Witkamp. *Handleiding: Kaart van Noord-Celebes*. J.H. De Buss, 1898, hlm. 11.

Angka-angka tersebut memang suatu perkiraan karena belum diadakannya sensus penduduk baik oleh Kerajaan Gorontalo maupun Pemerintah Belanda dalam kurun waktu itu. Tetapi berbagai laporan dari para pembesar Kolonial Belanda dapat digunakan sehingga, menghasilkan cerminan dari jumlah penduduk tersebut di atas.

Masalah penduduk sudah tentu berkaitan erat dengan pemukiman. Lingkungan alam mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola pemukiman. Di samping hubungan melalui maritim sebagai lalu lintas komunikasi, juga pola aliran sungai Bone dan Bolango memberikan kecenderungan penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai sarana lalu lintas utama. Peranan dan fungsi pantai maupun sungai yang semakin besar menarik penduduk Gorontalo mulai mengembangkan pemukiman ke arah tersebut. Pada mulanya bersifat memanjang dan mengelompok sesuai dengan kemudahan yang tersedia oleh alam, artinya bahwa pemilihan lokasi pemukiman tidak disertai dengan usaha penaklukan alam lebih dahulu. Dengan demikian, lokasi pemukiman berpola mengelompok padat dan memanjang mengikuti alur sungai dan pesisir pantai. Pola ini juga terdapat pada pengembangan pemukiman penduduk di daerah pertemuan Sungai Bone dan Bolango yang dibangun tempat pemukiman (*fondachi*) dan membentuk perkampungan Bugis dan Cina.

Bagian pertemuan sungai tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi penghuninya, setiap tahunnya sering dilanda banjir besar. Hal ini menyebabkan orang-orang Bugis dan Cina mengungsi ke daerah-daerah pinggiran kampung yang dihuni orang-orang Minahasa. Berbagai akibat yang ditimbulkan bencana itu, menyebabkan Kota Gorontalo sangat rawan terhadap kesehatan penduduk. Pada tahun 1883-1884 sebagian besar penduduk terserang penyakit cacar, dan tahun 1885-1886 terjangkit penyakit kolera.<sup>78</sup> Munculnya wabah kolera terhadap

<sup>78</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 11.

penduduk sangat mengancam dan mencemaskan kehidupan penduduk dengan menelan korban 4.000 jiwa, di antaranya terdapat 600 jiwa laki-laki yang produktif, tetapi hal itu tidak mengurangi aktifitas sehari-hari penduduk.<sup>79</sup>

Bentuk bangunan rumah, pada umumnya sangat sederhana dengan menggunakan bahan bambu dan atap dari bahan daun kelapa (*dungobolango*). Bentuk bangunan rumah itu biasa disebut *bele talilo* dan *bele wawuho* juga mempunyai dinding terbuat dari bambu (*tolotahu*). Bagi golongan masyarakat menengah, bangunan rumah terbuat dari bahan batang kelapa, dan untuk golongan atas pada umumnya telah menggunakan bahan dari kayu dalam pembangunan rumah. Dari berbagai bentuk bangunan rumah merupakan sebagai cerminan untuk membedakan stratifikasi sosial dengan menunjukkan status penghuninya.

Arsitektur rumah pada umumnya berbentuk limas adalah rumah panggung terdiri dari ruang serambi depan (*hihibata*) berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak, pada serambi depan agak ke dalam (*huhulowa*) berfungsi sebagai tempat untuk bersantai anggota keluarga kadangkala digunakan untuk menerima tamu. Untuk kamar induk yaitu bangunan yang terdiri dari ruang tamu dan sering digunakan pada saat melangsungkan seremoni keluarga, dan ruang untuk tidur (*huwali*). Ruang bagian belakang terdapat dapur (*depula*) dan tempat cuci piring. Sedangkan bagian bawah rumah (*walungobele*) berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan hewan piaraan. Pada umumnya setiap rumah mempunyai gudang (*handaleya*) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan rumah tangga dan hasil-hasil panen seperti beras, jagung dan sebagainya. Gudang itu kadangkala letaknya di belakang rumah dekat dengan ruang dapur dan adapa di bangun tersendiri di luar rumah.

Masuknya para pendatang dan Kolonial Belanda membawa pengaruh besar dalam bentuk bangunan, sehingga arsitektur rumah banyak dibangun semi permanen, dibagian bawah dibangun dari bahan batu bata, sedangkan pada bagian atas masih menggunakan batang kelapa atau bahan dari kayu.

## IV. PELAYARAN DAN PERDAGANGAN

### 4.1. Sistem Pelayaran

Sejak berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil terpecah yang letaknya di Nusantara secara ekonomis dan kultural, juga sewaktu-waktu secara politis telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Adanya komunikasi dan lalu lintas antara kepulauan di Nusantara itu sudah tentu dimungkinkan oleh penduduknya yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang lebih baik walaupun menggunakan kapal-kapal cadik hanya mampu mengembangkan hubungan pelayaran di kepulauan Nusantara, padahal

<sup>79</sup> B. J. Haga, *op.cit.*, hlm. 73.

kepulauan-kepulauan itu dipisahkan oleh laut yang cukup luas.

Ditemukannya sistem angin di kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai daerah musim barat dan timur memberikan kemungkinan pengembangan jalur pelayaran barat dan timur secara teratur. Musim barat dan musim timur sangat menentukan perkembangan jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Faktor ini turut menentukan munculnya kota-kota pelabuhan serta pusat-pusat kerajaan dan juga faktor adanya komoditi hasil perdagangan yang diminati/laku dipasaran menimbulkan jalur perdagangan semakin ramai di kota pelabuhan dan pusat-pusat kerajaan tradisional di Nusantara.<sup>80</sup>

Dengan asumsi bahwa para pedagang pribumi dan asing (Eropa, Arab dan Cina) datang ke Gorontalo membeli hasil tambang, hutan dan pertanian untuk dipasarkan ke Singapura dan negeri-negeri Eropa lainnya.<sup>81</sup> Sebagai tempat pertemuan (*rendezvous*) perdagangan di berbagai penjuru—baik melalui maritim maupun melalui sungai—menyebabkan Gorontalo berkembang sebagai pasar komoditi penting seperti emas, hasil hutan dan hasil bumi lainnya.

Pada abad ke-19, pelayaran dan perdagangan sangat menentukan kebijakan Pemerintah Belanda dalam usahanya untuk mensukseskan eksplorasi di Nusantara. Bahkan salah satu tugas terpenting yang dihadapinya adalah mengatur perdagangan dan pelayaran dalam dan luar Nusantara untuk kepentingannya. Kebijakan politik Pemerintah Belanda dalam pelayaran adalah untuk melindungi kapal-kapal pengusaha Belanda dalam persaingannya dengan kapal-kapal Eropa lainnya terutama Inggris, sehingga kapal-kapal milik pengusaha Belanda ini mendominasi pelayaran dalam Nusantara termasuk di Gorontalo.

#### 4.2. Kegiatan Perdagangan

Letak geografis yang strategis berdekatan dengan Ternate—sebagai pusat perdagangan rempah-rempah—menguntungkan pelabuhan Gorontalo menjadi daerah transit jalur pelayaran. Jalur inilah yang merupakan jalan atau kemudahan terpenting untuk menyelenggarakan transportasi dan komunikasi. Dalam perdagangan tersebut yang paling menarik dan utama adalah emas, sehingga menarik perhatian VOC untuk mendirikan kantor dagang (*factory*) dan sekaligus mendirikan gudang penyimpanan barang (*pakhuis*) pada tahun 1705. Kemudian membawa unsur-unsur baru yang mengubah keadaan politik dan ekonomi Gorontalo.

Secara geografis pelabuhan Gorontalo merupakan tempat pertemuan antara

<sup>80</sup> Sartono Kartodirdjo, jil. 1., *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>81</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 19. Lihat juga B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 50. Mengenai Singapura berkembang sebagai pelabuhan besar setelah jatuhnya Malaka pada tahun 1511. Singapura menjadi pelabuhan bebas sejak tahun 1819, bukan saja bertindak sebagai penarik sebagian besar perdagangan di Nusantara, melainkan juga bertindak sebagai katalisator yang memacu kegiatan perdagangan.

laut, sungai dan darat, sehingga fungsi utamanya adalah untuk memindahkan muatan dari laut, sungai dan darat. Di lihat dari faktor ekologi pelabuhan itu merupakan tempat penting bagi setiap kapal. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlabuhnya setiap kapal, tetapi lebih luas lagi adalah sebagai tempat dimana setiap kapal dapat berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin dan arus kuat. Selain itu pelabuhan juga digunakan sebagai tempat untuk mengisi persediaan dan barang.<sup>82</sup> Sehingga pelabuhan Gorontalo mempunyai daya tarik bagi pedagang luar, dalam arti menjadi pasar hasil-hasil komoditi perdagangan dan tersedianya bahan makanan untuk konsumsi awak kapal. Jenis-jenis kapal yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo antara lain kapal paduakang, *schoener* (kapal layar cepat), panlarij, bolotto, djulong-djulong, korra-korra, tjamberoe, rohere, galai dan sebagainya.<sup>83</sup>

Berbagai komoditi perdagangan dihasilkan Gorontalo seperti emas, kopra, kapas, sagu, tabak, gula aren, damar dan rotan. Komoditi lainnya seperti coklat, kopi, malam dan getah kulit kayu (mangkudu) untuk pembuatan pernis dan cat, semuanya diekspor dalam jumlah kecil.<sup>84</sup> Komoditi perdagangan ini dipasarkan ke Eropa, India-Inggris, Cina dan Makassar.<sup>85</sup> Sedangkan komoditi lainnya seperti kuda, kerbau, sapi, kambing dan domba hanya dipasarkan di sekitar negeri Gorontalo.

Perdagangan dalam negeri terdapat media perantara antara pedagang dalam jual-beli setiap keperluannya, para pedagang perantara ini dipegang oleh orang Cina dan kaum pribumi. Walaupun sistem jual-beli barang dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar barang, tetapi adapula yang dilakukan dengan menggunakan alat penukar konvensional atau mata uang.

Volume perdagangan Gorontalo secara keseluruhan dicapai pada tahun 1856 untuk import sebesar f9.862, sedangkan ekspor dihasilkan f25.004. Pada tahun 1886 terjadi peningkatan baik ekspor maupun import, bagi hasil ekspor sebesar f1.359.667 dan import sebesar f1.382.312.<sup>86</sup> Melalui komoditi hasil pertanian, pada tahun 1872 untuk ekspor coklat sebanyak 2.117 pikul dengan harga penjualan sebesar f105.850, untuk kopi dicapai 630 pikul dengan penghasilan sebesar f18.900, sedangkan import beras sebanyak 120 pikul dengan harga f740. Mengenai pengiriman komoditi hasil hutan jenis damar sebanyak 13.765 pikul dengan harga f68.825 dan rotan dihasilkan 5.900 pikul harga f32.450. Pada tahun 1886 terjadi penurunan yang tajam untuk komoditi coklat dan kopi, sedangkan beras mengalami lonjakan yang cukup besar.

---

<sup>82</sup> Sartono Kartodirdjo. Jil. 1., *op.cit.*, hlm. 4. Pelabuhan dan pasar dibangun dan dikembangkan oleh Raja Botutihe pada masa pemerintahannya sekitar pertengahan abad ke-18.

<sup>83</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip-arsip Gorontalo 1810-1865*.

<sup>84</sup> B.J. Haga, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 50. Dalam perdagangan Makassar, hasil-hasil komoditi yang telah dikumpulkan kemudian dipasarkan kembali ke Singapura.

<sup>86</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 19.

Pengiriman komoditi coklat 1.185 pikul dengan harga f 47.400, kopi 203 pikul dengan harga f 3.460. Untuk import beras mencapai 20.804 pikul dengan harga sebesar f 104.021.<sup>87</sup> Pada tahun 1889 eksport komoditi kopra sebesar 11.853 pikul.<sup>88</sup>

Pada tahun 1888 daerah Gorontalo terdapat kerbau sebanyak 4.353 ekor, sapi 831 ekor dan kuda 5.380 ekor.<sup>89</sup> Pada umumnya hewan-hewan itu dipasarkan di daerah Minahasa dan Manado, digunakan masyarakat Minahasa dan Manado untuk membantu kegiatannya sebagai daerah agraris dan pebukitan. Kuda digunakan sebagai alat pengangkutan barang<sup>90</sup> dan kerbau digunakan menarik bajak di sawah.<sup>91</sup>

Berpangkal pada penggalan kesejarahan yang telah dipaparkan dapat menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan merupakan kegiatan menguntungkan bagi pengembangan dan kemajuan Gorontalo. Letak geografis yang strategis sebagai daerah transito pusat perdagangan dan tersedianya tanah yang subur menghasilkan komoditi perdagangan yang dapat menarik para pendatang/pedagang ke Gorontalo. Penduduk yang menetap dan membangun perkampungan di kawasan ini memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan usaha perdagangannya dengan cara memanfaatkan jaringan pelayaran dan perdagangan.

## V. PENUTUP

Berbagai hubungan antarunit terjadi lewat komunikasi baik melalui Kerajaan Luwu (Sawerigading), Limboto, Ternate, Gowa juga pada pembentukan federasi *Limo lo Pahalaa* sampai pada VOC yang kemudian dilanjutkan pemerintahan Kolonial Belanda. Hubungan ini berlangsung mulai dari perkawinan, perang, diplomasi, sampai pada pelayaran dan perdagangan. Terbentuknya jaringan komunikasi itu menimbulkan proses integrasi di antara daerah-daerah dengan unsur-unsur sosialnya. Perkembangan pusat kekuasaan dalam perjalanan sejarah sosial ekonomi Gorontalo secara jelas menunjukkan kecenderungan ke arah integrasi progresif yang sudah tentu proses tersebut mengalami pasang surut. Faktor-faktor dari luar melalui hubungan komunikasi menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi kultural yang membawa ideologi, sistem kepercayaan, sistem politik dan berbagai unsur kebudayaan lainnya.

Runtuhnya VOC sebagai kekuatan ekonomi dan politik dengan pengalihan tanggung jawab kepada pemerintahan Kolonial Belanda, membawa akibat sosial, ekonomi dan politik yang besar. Fenomena sosial, ekonomi dan politik Kolonial Belanda mewarnai aspek kehidupan masyarakat Gorontalo. Melalui ekspansi halus

<sup>87</sup> B.J Haga, *op.cit.*, hlm. 50-51.

<sup>88</sup> G.W.W.C Baron van Hoevel, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>90</sup> N Graafland, *op.cit.*, hlm. 37, 334.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 42.



mengadakan hubungan dengan Kerajaan Gorontalo yang mengikat pada perjanjian-perjanjian atau kontrak guna lebih memperkuat kekuasaan politiknya di kawasan Gorontalo. Kekuasaan pribumi yang dipegang oleh raja telah mengalami berbagai pergeseran kekuasaan atas pemerintahan pribumi akibat campur tangan Kolonial Belanda dengan menetapkan pemerintahannya melalui *marsaoleh* sebagai kepala distrik dalam pemerintahan pribumi. Perkembangan politik itu mencapai titik puncaknya setelah dikeluarkannya Lembaran Negara Tahun 1889 No. 94 dan No. 256 tentang dihapuskannya kekuasaan raja, sehingga Pemerintah Belanda melaksanakan pemerintahan langsung atas politik kekuasaannya. Hal ini menyebabkan timbulnya kontradiksi antara Pemerintahan Belanda dengan lembaga-lembaga tradisional yang masih dipatuhi oleh rakyat. Sehingga perubahan mendasar di bidang sosial, ekonomi maupun politik dan budaya merubah sudut pandang mengenai kejadian di akhir abad ke-19.

Pada akhirnya menimbulkan kekuasaan pemerintahan pribumi berada *status quo*, tetapi lembaga tradisional masih dipertahankan guna membantu dalam pemerintahan Belanda. Kedudukan *marsaoleh* yang strategis dengan memegang peranan rangkap, mempunyai kedudukan sebagai penguasa teratas di daerahnya (distrik), juga berperan sebagai perantara antara Kolonial Belanda dan rakyat. Suatu kedudukan yang menambah kekuasaan politiknya. Para *marsaoleh* di distriknya mempunyai tanah kedudukan serta hak memungut pajak hasil produksi dan mengerahkan tenaga rakyat untuk berbagai keperluan jabatan dan rumah tangganya. Sehingga *marsaoleh* menguasai waktu, pekerjaan dan sebagian milik rakyat bawahan dengan cara sebebaskan-bebasnya. Pungutan dan pelayanan (*diensten*) semakin besar dibebankan kepada rakyat untuk memperkuat kewibawaannya.

Lagipula yang menarik dalam persamaan kekuasaan dan kecenderungan sosial dalam menghadapi pengaruh Kolonial Belanda, adanya perlawanan rakyat "Perang Panipi" atas kekuasaan Belanda dalam struktur kekuasaan feodalistis yang berakibat tidak hanya terjadinya perbedaan ideologi, tetapi juga kepentingan sosial dan loyalitas kepada tradisi ikut mendorong timbulnya perlawanan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & Abdurrahman Surjomiharjo. 1985. "Arah gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia", dalam *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: YIIS, Leknas LIPI & Gramedia.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumi.

- \_\_\_\_\_. 1990. "Silsilah Sawerigading Menurut Sebuah Lontara Panguriseng di Wajo", dalam Matulada et al., (ed.) *Sawerigading Folktale Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Indisch Staatsblad*. No. 28 a.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip-arsip Gorontalo 1810-1865*.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Bastiaans, J. 1996. "Persekutuan Limbotto dan Gorontalo", dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederick, William H & Soeri Soeroto (peny.). 1984. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES
- Gottshalk, Louis. 1986. *Mengeri Sejarah*. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.
- Graafland, N. 1987. *Minahasa Negeri, Rakyat dan Budayanya*. Jakarta: Lembaga Perpustakaan Dokumentasi & Informasi.
- Haga, B.J. 1931. *De Lima-pahalaä (Gorontalo): Volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek*. Deel LXXI. Bandoeng: A.C Nix & Co.
- Hoevell, G.W.W.C Baron van. 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", *De Assistant-Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J Brill.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lapian, A.B. 1997. "Laut, Pasar dan Komunikasi Budaya" dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Leirissa, R.Z. et al. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Leur, J.C van. 1960. *Indonesian Trade and Society*. 2. Bandung: Sumur Bandung.
- Lipoeto, M.H. 1947. *Sedjarah Gorontalo, Doea Lima Pohalaa*, Jilid V. Gorontalo: Volks Drukkerij.

- Notosusanto, Nugroho. 1978. Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer. Jakarta: Yayasan Idayu.*
- Nur, S.R. 1990. "Tei Telingade Woli Lawe To Wulito Lo Hulontalo" dalam Matulada et al., (ed.). *Sawerigading Folktales Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 23 Januari 1992. *Ikilale Lo Bate Walu* (Ikrar Delapan Kepala Adat) Kerajaan-Kerajaan Gorontalo. Ujung Pandang: tanpa penerbit.
- Nusi, A.H. 1979. *Gambaran Singkat Tentang Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo, Serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo*. Gorontalo: Pemda Kotamadya Gorontalo.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Polontalo, Ibrahim. 1 Agustus 1998. "Masuk dan berkembangnya Agama Islam Di Gorontalo", *Makalah*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo.
- Ricklefs, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudjana, T.D. 1995/1996. "Pelabuhan Cirebon Dahulu dan Sekarang", dalam *Makalah Diskusi Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Witkamp, H.Ph.Th. 1898. *Handleiding: Kaart Van Noord-Celebes*. J.H. De Buss.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

*Persekutuan Gorontalo-Limboto  
12 Sahban 1084 H (Nopember 1673)*

“Bismi’Ilahi ‘I-rahmani ‘I-rahimi

Ini hikayat suatu surat perjanjian dan perkataan dan persembahan negeri Limbotto dan negeri Gorontalo makan lemak kerbau, negeri Gorontalo dan negeri Limbotto. Dan jikalau negeri Limbotto aniaya kepada negeri Gorontalo, maka dilihatnya suda kecil negeri Gorontalo atau tinggal lagi ruma sebuah atau dua buah atau sepulu orang atau dua pulu orang, jika tiada lagi dirinya kepada kebesaran negerinya dan kepada kerajaan negerinya dan ketinggianya dan adatnya dan hukum negerinya dan bicaranya atau diapitnya oleh negeri Limbotto negeri Gorontalo. Maka jikalau ada yang demikian itu kepada negeri Limbotto maka lulu lantak menjadi seperti laut dan abu kapur dan hancur seperti kerbau yang dipersembahkan itu.

Maka jikalau tiada perbuatan negeri atau kehendak negeri maka hendak raja sendirinya atau jogugu atau kehendak wulea atau kehendak anak-anak raja atau kehendak orang besar-besar, maka ada kehendaknya atau perbuatannya yang demikian itu pula lulu lantak menjadi seperti lemak kerbau-kerbau yang disembahkan.

Dan seperkara lagi janjinya negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo; dan barang siapa orang dalam negeri Limbotto dan dalam negeri Gorontalo hendak menceraikan negeri Gorontalo dengan negeri Limbotto itu pun lulu lantak menjadi seperti kapur dan hancur seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu.

Maka kemudian daripada itu maka jikalau ada kepada negeri Gorontalo aniaya kepada negeri Limbotto maka dilihat suda kecil negeri Limbotto atau tinggal sebuah ruma atau dua buah atau sepulu orang atau dua pulu orang, maka tiada lagi dirinya kebesaran negerinya atau kerajaan negerinya dan ketinggianya dan adat negerinya dan bicaranya atau diapitnya oleh negeri Gorontalo negeri Limbotto. Maka jikalau ada yang demikian itu kepada negeri Gorontalo maka lulu lantak menjadi seperti laut dan abu dan kapur dan hancur seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu. Maka jikalau tiada kehendak negeri atau perbuatan negeri Gorontalo maka kehendak raja atau kehendak jogugu atau kehendak wulea lu lipu atau kehendak anak raja atau kehendak orang besar dalam negeri Gorontalo itu pun negerinya lulu lantak menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan.

Dan seperkara lagi perjanjian negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo dan barang siapa orang dalam negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo, itu pun lulu lantak menjadi seperti kapur dan hancur seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu.

Dan seperkara lagi perjanjian negeri Gorontalo dan negeri Limbotto. Jikalau ada perbuatan negeri Gorontalo kepada negeri Limbotto yang lain atau barang negeri yang lain atau orang yang lain atau perbuatan yang jahat, menjadi berbuat fitna kepada orang lain maka tiada dengan hukumannya dan tiada bicaranya dan tiada adilnya maka negeri Gorontalo negeri Limbotto tiada mau bersama-sama dengan negeri Limbotto negeri Gorontalo. Jikalau ada perbuatan yang demikian itu maka negeri Gorontalo juga yang kena sembah itu yaini

lulu lantak menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu. Dan jikalau ada kepada negeri Limbotto aniaya atau berbuat fitnah kepada negeri yang lain atau barang negeri yang lain atau orang negeri yang lain maka negeri Gorontalo tidak mau bersama-sama dengan negeri Limbotto. Jikalau berbuat yang demikian itu maka negeri Limbotto juga kena semba lulu menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu.

Dan seperkara lagi perjanjian negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo. Jikalau ada kesukaran dalam negeri Limbotto maka tiada boleh dibicarakannya atau dibaikinya maka ada perbuatan demikian itu, maka negeri Gorontalo menolong kepada negeri Limbotto membicarakan atau membaiki bersama-sama dengan negeri Limbotto. Dan jikalau ada kepada negeri Gorontalo barang kesukaran dalam negeri Gorontalo yang demikian maka tiada bole dibicarakan atau dibaikinya oleh negeri Gorontalo. Maka negeri Limbotto menolong kepada negeri Gorontalo membicarakan atau membaiki bersama-sama dengan negeri Gorontalo.

Dan seperkara lagi; jikalau ada dalam negeri Limbotto orang yang dihukumkan atau orang yang didendahi atau yang dirapang atau orang yang sala, maka tiada bole dihukumkan dan tiada boleh didendahnya dan tiada bole salahkan oleh negeri Limbotto. Maka Raja Gorontalo tolong kepada negeri Limbotto bersama-sama menghukumkan dipedihkan dan merampangkan dan menyalahkan. Dan jikalau ada hasilnya dibagi tiga bagi; di negeri Gorontalo, dua bagi sebagai negeri Limbotto.

Dan seperkara lagi; jikalau negeri Limbotto ada orang yang dibicarakan maka Raja Gorontalo atau jogugu atau hukum atau Kapitan laut atau wulca lulipu atau wulaapulu duduk bersama-sama dengan negeri Limbotto menghukumkan. Maka ada hasilnya itu pun dibagi, negeri Limbotto diberinya banyak pun baik sedikit pun baik diberikannya kepada orang itu tiada mengapa. Dan jikalau ada kepada negeri Gorontalo yang demikian itu maka negeri Limbotto pun demikian juga.

Dan seperkara lagi perjanjian. Jikalau ada kehendak negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo atau berbuat kota negeri Gorontalo itu atau negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo tulung di Limbotto dan Limbotto tulung di Gorontalo.

Seperkara lagi; jikalau ada utusan negeri besar atau utusan saudara kita itu pun bersama-sama menerima Gorontalo dengan Limbotto. Jikalau ada yang di Gorontalo negeri Limbotto pergi di Gorontalo, jikalau datang dari Limbotto negeri Gorontalo kemari di Limbotto.

Dan seperkara lagi perjanjian negeri Gorontalo dengan negeri Limbotto; jikalau ada ra'yat negeri Limbotto tiada mau lagi bantuan kepada negeri Limbotto maka Raja Limbotto keluar sendiri mengalahkan ra'yat yang tiada mau bantuan itu. Jikalau bole dibelakan atau menyembah, sudahlah dan jikalau keras tiada menyembah maka negeri Gorontalo tulung kepada negeri Limbotto bersama-sama mengala dengan negeri Limbotto. Dan jikalau alah negeri itu maka setengah lari atau setengah dibunu atau setengah ditawan, dan yang lari itu ra'yat Raja Limbotto juga dengan tahannya dengan negeri juga, maka menyembah melainkan tawanan dan rampasan itu dibahagi oleh negeri Gorontalo dengan negeri Limbotto; kepada Gorontalo dua bagi kepada Limbotto sebagi.

Dan seperkara lagi; jikalau oleh negeri itu maka ada ditawan semuanya maka ke negeri Gorontalo dengan negeri Limbotto bakira-bakira. Jikalau dipulangkan kepada negerinya itulah yang jadi juga negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo dan jikalau memberi upetinya kepada negeri Gorontalo dua bagi, kepada negeri Limbotto sebagi.

Dan jikalau ada yang demikian itu kepada negeri Gorontalo pun demikian juga.

Dan seperkara lagi perjanjian: jikalau Raja Gorontalo dengan Raja Limbotto menyuruh pada ra'yat Raja Limbotto dengan Raja Gorontalo minta upetinya atau barang orang yang disuruh atau anak raja-raja atau wulea lulipu atau orang besar-besar maka hubaya-hubaya jangan minta lebihkan atau dikurangkan hingga yang disuruhkan itu engkau minta jikalau ada yang diberinya jangan dikurang lebihkan; jikalau mengurangi atau melebihi didendah.

Dan seperkara lagi perjanjian; negeri Gorontalo belayar sendirinya atau orang yang besar-besar atau anak raja atau haraba orang pergi di Tomini atau suruhkan Raja Gorontalo atau suruhkan jogugu atau suruhkan wulea lulipu atau suruhkan kapitan laut atau berbuat aniaya atau berbuat fitna kepada Gorontalo dengan Limbotto maka negeri Limbotto dikatanya kepada ra'yat Raja Gorontalo atau ra'yat Raja Limbotto katanya Gorontalo yang baik negeri Limbotto yang jahat itulah orang yang dikutuki Allah lulu lantak menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan. Dan jikalau ada kepada negeri Limbotto perbuatan yang demikian itu pun lulu lantak menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan.

Dan seperkara lagi perjanjian negeri Gorontalo negeri Limbotto kepada ra'yat Raja Limbotto dengan Raja Gorontalo; maka ra'yat Raja Gorontalo Tamalate dan hingga Sausu Masabuku dengan negeri Limbotto dan ra'yat Raja Limbotto hingga Togiani nyuala dan hingga Sausu Masabuku dengan Raja Gorontalo kepada negeri Sausu. Dan demikian lagi perjanjian negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo terdengar kepada segala isi tuju petala langit dan isi tuju petala bumi dan sekalian isi surga dan naraka dan barang siapa mengubahkan perjanjian itu negeri Limbotto atau negeri Gorontalo menjadi *kafir na'udhu bi'llahi minha fi nari djahannama* dan negerinya binasa menjadi seperti laut atau kapur atau menjadi seperti lemak kerbau yang dipersembahkan itu dan seperti sabda Allah ta'ala dalam Alqur'an *wa'd al-karim la jataghajjru*, artinya janji yang mahamulia tiada berubah-ubah dan lagi sabda Allah ta'ala *inna-llaha lajuhghlifu l-mi'ada* (Alqur'an 3:7, 13:31) artinya bahwasannya Allah taalah itu tiada sekali-kali menyalahkan janji dan negeri Limbotto dengan negeri Gorontalo pun demikian juga tiada mengubahkan perjanjian. Dan Surat Hidrah Nabi Muhammad: *Tammam al-kalam al-halk wa'l-kamal firman Allah ta-ala wallahi billahi tallahi* demi Allah demi kalam Allah demi Rasul Allah. Seribu delapan puluh empat tahun pada dua belas hari bulan Sa'ban pada hari Sabtu dan dimulai pada waktu dluha disudahinya kepada waktu lohor.

## Lampiran 2

*Hubungan antara Raja Gorontalo dengan Pemerintah Belanda*

*Kontrakt van 9 Januarij 1828*

### *Artikel 1*

De Radja's en Rijksgrooten van Gorontalo, erkennen de oppermagt van het Nederladsch Gouvernement over het rijk van Gorontalo en onderhoorigheden, en belooven aan derzelve autoriteit eene volokomende gehoorzaamheid en onderwerping, waartegen het Nederladsch Gouvernement zich verbindt het rijk van Gorontalo onder deszelfs bijzondere bescherming te nemen.



## Artikel 2

De Radja's en Rijks grooten van Gorontalo verbinden zich onder de plegtigste belofte, dat door hun geene verbonden met eenige andere Europesche of Inlandsche mogendheid, hoe ook genaamd, zullen worden gemaakt of aangegaan, en dat die, welke bevoorrens mogten hebben bestaan, als ganschelijk vernietigd en van geene waarde zullen worden aangemerkt, gelijk ook geene correspondentie, direct of indirect, hetzijn in geschrifte of anderzins zal morgen worden gehouden met personen, in dienst van dezelve, noch met eenige der Inlandsche vorsten, prinsen of volken, welke in oppositie tegen het Nederladsch Gouvernement zijn of in verbond staan met andere Europesche mogendheden, zullende degene, die bevonden zal worden zulke verbodene correspondentie te hebben gehouden, zonder aanzien van persoon of rang, aan het Nederladsch Gouvernement moeten worden overgeleverd.

## Artikel 3

De Radja's van Gorontalo beloven in eene gestadige vriendschap met naburige rijkjes te zullen leven en ingeval er oneenigheden tusschen het Gorontaalsche rijk en eenige der andere staten mogten ontstaan, zulks ter eerste instantie met de redenen van het verschil ter kennis van het Nederladsch Gouvernement te zullen brengen; ten einde hetzelfde daarin, naar billijkheid kan beslissen, zullende in geene geval gewapend volk of gearmeerde vaartuigen eenige vijandelijke beweging mogen maken of uitgerust worden, dan allen op speciale order van het gezegd Gouvernement.

## Artikel 4

De Radja's en Rijks grooten van Gorontalo erkennen het regt van het Nederladsch Gouvernement in de verkiezing en aanstelling van opvolgers tot het radjaschap van Gorontalo, bij voorkomende vacatures, gelijk ook, dat geene der eerste ambtenaren van staat, voerende de titulatures van Djoegoegoe, Kapitein Laut en Walejalolipo, zullen mogen ontzet of aangesteld worden, zonder voorafgaande toestemming en goedvinden van het Gouvernement.

## Artikel 5

Het gezag de Radja's van Gorontalo zal zich alleen uitstrekken over de natureele onderdanen van het Gorontaalsche rijk, doch geenzins of andere natien, die onmiddelijk onder de jurisdictie van het Nederladsch gezag behooren.

## Artikel 6

In alle civiele zaken, zal naar 's lands costumen en de Mohamedaansche wetten door de radja's in hun geregtschof, worden uitspraak gedaan. Hetzelfde geregtschof zal ook kennis nemen van alle geringe misdaden als diefstallen, straatschenderijen, ligte verwondingen en diergelijk; wanneer zware misdaden als moord doodslag, zware verwondingen, brandstichting, zeeroof, muiterij, verzetting tegen 's Gouvernementsgezag enz. zullen worden gepleegd, zullen de schuldigen worden terecht gesteld voor eenen rijksraad, bestaande uit de radja's en rijks grooten, onder voorzitting van den resident of asistent resident, overeenkomstig een hieromtrent nader vast te stellen reglement.

## Artikel 7

De Radja's van Gorontalo verbinden zich, hunne onderdanen de strikste bevelen te zullen geven, om alle vereischte hulp te verleenen aan de schepen of vaartuigen van het Nederladsch Gouvernement of deszelfs onderdanen, welke in zeenood geraken of schipbreuk mogen komen te lijden aan eenig gedeelte der kusten en stranden onder het Gorontaalsche

rijk, zullende aan de zoodanigen alle mogelijke assistentie tot redding van het schip en lading moeten geboden, waarvoor zij naar billijkheid zullen worden beloond.

#### *Artikel 8*

De Radja's en Rijksgrootten van Gorontalo verbinden zich gezamenlijk met de Radja's van Limboto, Attingola, Bolango, Bintaena, Bone, Soewawa en Boalemo, om het noodige tot reparatie van het Gouvernements fort te Gorontalo en de daarin staande gebouwen en pakhuizen, voor niets te verschaffen, in zoo verre zulks me de aldaar te verkrijgen houtwerken en materialen, mitgaders arbeidslieden, geschieden kan, zullende het ijzer, spijkers en andere aldaar niet voortgebracht wordende benoodigheden, Gouvernementswege verstrekt worden.

#### *Artikel 9*

De Radja's en Rijksgrootten van Gorontalo verbinden zich, om 'sjaarlijks aan het Nederladsch Gouvernement te leveren, zoo vele realen stofgoud, als telkens om de drie jaren, met gemeen overleg, zal worden bepaald, voor de drie eerstkomende jaren zal deze quantiteit moeten bedragen 700 realen van niet minder dan 19 karaten gehalte, tegen *f* 16 het reaal in gewigt, betaalbaar 1/3 in lijnwaden en 1/3 in ijzer. Deze levering zal gerekend worden te zijn ingegaan op 1e Januarij jl. dan uithoofde de goudmijnen alsnog in geene behoorlijkeorde zijn, voor dit jaar op onbepaalde tijden mogen plaast vinden, met dien verstande echter, dat het geheele bedrag voor ultimo December aanstaande zal moeten zijn geleverd; voor de jaren 1829 en 1830 zal den leverantie geschieden in termijnen van drie maanden, ingaande met 1e Januarij en eindigende met ultimo December van ieder jaar.

#### *Artikel 10*

Het Nederladsch Gouvernement vergunt daarentegen aan de Radja's en ingezetenen van Gorontalo om met het meerdere dan voorz. 700 realen in hunne mijnen gegraven wordende stofgoud, zoomede met de overige voortbrengsels van het Gorontaalsche grondgebied naar goedvinden te mogen handelen.

#### *Artikel 11*

Van de te Gorontalo voortgebracht wordende koffij, zal echter een zuiver vierde gedeelte ten voordeele van het Gouvernement worden geleverd; deze levering zal kunnen geschieden, hetzij in koffij den wel in geld, volgens eenen jaarlijks door het Gouvernement te bepalen prijs; deze prijs zal voor het jaar 1828 bedragen *f* 16 voor iedere pikol van 125 lt.

De leveranchiers, welke hunne koffij geheel aan het Gouvernement verkiezen af te staan, zullen daarvoor erlangen, indien dezelve van eene goede qualiteit is, *f* 12 per pikol van 125 lt. Insgelijks kennen de Radja's en Rijksgrootten van Gorontalo het Gouvernement de volkomende bevoegdheid toe, om op de overige producten van het land eene billijke belasting te stellen, ter vergoeding der verpligte leverancie van dezelve, bij vroege contracten bepaald, welke bij deze wordt opgegeven.

#### *Artikel 12*

De natureele onderdanen van het Gorontalsche rijk zullen niet naar willekeur vermogen het rijk te verlaten en tot de naburige landen, zooals die van Limbotto, of anderen over te gaan, noch die van Limbotto, en de andere rijkjes naar Gorontalo; zullende de radja's en rijksgrootten verpligt wezen, alle de zoodanige overgelopen onderdanen

wederom te doen uitleveren; de Gorontaalsche onderdanen zich naar elders ten handel willende begeven, zullen daartoe permissie van hunne radja's moeten hebben, alvorens van den Resident van Gorontalo de vereischte passen te kunnen erlangen.

#### *Artikel 13*

Even zoodanig als de Radja's gehouden zijn hunne onderhoorigen met een goed voorbeeld voor te gaan, en in alle billijkheid naar te wetten en 's lands goede costumen, te besturen, zijn de rijks grooten en mindere bewijzen, en derzelve orders te gehoorzamen, in zoo verre dezelve strekken tot welzijn van land en volk en niet aanloopen tegen de belangen van het Nederladsch Gouvernement, zullende de onwilligen en ongehoorzamen in dezen van hunne posten ontzet en naar bevinding van zaken gestraft worden.

#### *Artikel 14*

De Radja's en Rijks grooten verbinden zich en belooven plegtiglijk, om het voormaals in zwang geweest zijnde misbruik, om vrije lieden en goede onderdanen van het Gorontaalsche rijk, zoo door voorschietingen van geld of goederen en berekening van hooge interessen op dezelve, als het onbillijk opleggen van geldboeten en schulden en bij onvermogen van aan dusdanige onwettige prententie en eischen te kunnen voldoen, tot eene soort van altoos durende slavernij tot in hun geslacht te verwijzen, niet meer te dulden, maar die ingeslovene misbruiken krachtadig tegen te gaan en ganschelijk af te schaffen, gelijk ook niet meer toe te laten, dat min vermogende hoofden begeven, waardoor dezelve zich op eene allezins anwettige wijze aan hunne verplichtingen als onderdanen van het rijk komen te onttrekken en langzamerhand alleen ten bijzondere diensten van gemelde hoofden staan, hetwelk niet dan tot nadeel van het Gorontaalsche rijk strekt en strijdig is met de goede oogmerken van het Nederladsch Gouvernement.

#### *Artikel 15*

De Radja's en Rijks grooten van Gorontalo vergunnen aan het volk van Bone, Bintaena, Soewawa en Boalemo, om in de goudmoijnen van Molesipat of eenige andere onder het gebied van Gorontalo gelogen, voor hun eigen rekening te mogen graven.

### *Hubungan antara Raja Gorontalo Dengan Pemerintah Belanda*

#### *Kontract van 16 Januarij 1831*

##### *Artikel 1*

De Koningen en Rijks grooten belooven andermaal, om gedurende den tijd van de vijf eerstkomende en achtereen volgende jaren's jaarlijks zonder de minste exceptie of tegenkanting, te zullen leveren aan het Nederladsch Gouvernement 700 oncen zwaarte stofgoud.

##### *Artikel 2*

De Koningen en Rijks grooten verbinden zich, om voorz. hoeveelheid te zullen leveren in twee termijnen's jaars en wel op 1 Junij en 1 December van ieder jaar, eindigende alzoo de laatste termijnen van levering op 1e December 1835.

##### *Artikel 3*

Dat vermits zedert de in den jare 1828 aangegane overeenkomst door de Radja's en Rijks grooten minder als derzelve contingent, is geleverd 719  $\frac{1}{4}$  oncen stofgoud, zoo dezelve deze minderheid binnen den tijd van de eerst te verloopenen vijf jaren, boven de door hun angenommen 700 oncen 's jaars, zonder verzuim te zullen suppleren.

#### *Artikel 4*

De Konningen en Rijksgrooten zullen geen ander goud in voldoening van de door hun aangenomen hoeveelheid van 700 oncen 's jaars mogen leveren, als van de mijnen Bomboela, Pagoat en Molesipat.

#### *Artikel 5*

Voor het door de radja's en rijksgrooten te leveren stofgoud zullen dezelve f 16 koper het once genieten, en des verkiezende een voorschot of de helft van hetgeen zij verplicht zijn 's jaars op te brengen kunnen erlangen.

#### *Artikel 6*

De Koningen en Rijksgrooten zullen met meerdere de voor 700 oncen in hunne mijnen gegraven wordende stofgoud, zoomede met de overige voortbrengsels van het Gorontaalsch gebied, naar goedvinden mogen handelen.

### *Hubungan antara Raja Gorontalo dengan Pemerintah Belanda*

#### *Kontract van 1 Maart 1838*

#### *Artikel 1*

De Radja's en Rijksgrooten van Gorontalo beloven plegtig al de punten, voorkomnde inde beide hierboven gemelde contracten, te zullen naleven, even als of dezelve in dezen waren geinsereerd, met uitzondering van artikel 3 van de tweede overeenkomst, hetwelk komt te vervallen, als wordende daaraan hieronder eene andere wijziging gegeven.

#### *Artikel 2*

Boven en behalve de aangenomene jaarlijksche leverantie van 700 realen uit de mijnen van Pagoat en die in den omtrek daarvan gelegen zijn, als Bomboela, Molesipat, Ankahoeloe en andere/ zullende geen Sumalatta's goud worden aangenomen, dan wanneer daartoe dringende redenen bestaan/, zal door het rijkje van Gorontalo 's jaarlijks 100 oncen worden geleverd, ter afdoening van de nog achterstallige 1474 30/36 realen stofgoud, op de levering van vorige jaren.

#### *Artikel 3*

Gemelde 100 oncen zullen gevonden worden uit het contingent der op Paguat van onderscheidene kampongs gevestigde lieden, hetgeen thans ook zoovel bedraagt, terwijl gecontracteerde jaarlijksche leverantie van 700 realen zal verdeeld worden onder de op Gorontalo zelve en andere onderhoorige landen, woonachtige onderdanen.

#### *Artikel 4*

Zoodra de in artikel 2 voormelde achterstand zal zijn aangezuiverd, zullen de door Paguats volk gegraven wordende 100 realen, weder als te voren in het contongent van het rijk á 700 oncen 's jaars, ingedeeld worden.

#### *Artikel 5*

Even als de radja's djoegoegoes en kapiteins laut, zullen ook de marsoelies door het Gouvernement worden gekozen en zullen, om alle verwarring der goud-leverancie voor te komen, geene kampongshoofden worden aangesteld of afgezet, dan met voorkennis van den civielen gezaghebber.

#### *Artikel 6*

Het laatst vorig contract zal continueren tot en met ultimo Februarij jl. en deze overeenkomst gerekend worden eenen aanvang te hebben genomen, met den 1en dezer van de maand Maart en stand te zullen houden tot wederopzeggings toe.

In 1839 werden de functie van Gouvernement radja Van Gorontalo bekleed door Hassan Honoarfa.

# PENGADOPSIAN LAGU-LAGU ROHANI KRISTEN DALAM MASAMPER

Magdalena J. Sumarauw

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keanekeragaman suku bangsa dengan budaya dalam masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu diperhatikan agar dapat terpelihara dan dilestarikan. Karena setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai budaya dimaksud nyata dalam keseluruhan gagasan tindakan dan hasil karya warga masyarakat yang melahirkannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990:186) bahwa ada tiga wujud pokok kebudayaan yaitu komplek dari ide-ide (*ideas*), komplek dari aktivitas atau tindakan berpola (beraktivitas) dan hasil dari karya manusia itu sendiri (*artefacts*). Dijelaskan pula bahwa kebudayaan ini mencakup berbagai aspek seperti: cara hidup manusia, pengakuan sosial yang dibutuhkan individu dari kelompok, cara bertingkah laku, dan serangkaian orientasi hidup.

Tak ubahnya dengan masyarakat lainnya, komunitas di daerah Sangihe dan Talaud juga memiliki budayanya sendiri yang merupakan cerminan atau wahana dari gagasan-gagasannya. Salah satu di antaranya terwujud dalam bentuk kesenian rakyat. Kesenian rakyat dapat berbentuk tarian, musik, lagu dan lain-lain. Pada saat ini masalah kesenian khususnya yang tradisional sedang menjalani gejolak yang disebabkan adanya kemajuan pengetahuan masyarakat pendukung/pemangkunya sehingga dalam memandangnya pun mengalami perubahan. Budaya lokal semakin terdesak bila berhadapan dengan budaya baru atau modern. Tak heran kalau generasi muda lebih menghargai hasil karya budaya modern dibanding dengan budaya lama. Walaupun ada kecenderungan kesenian tradisional mengalami grafik menurun namun ada sebagian yang masih tetap bertahan. Hal ini terjadi karena ada orientasi pengembangan kebudayaan itu sendiri oleh masyarakatnya dengan cara memadukan unsur-unsur baru di dalamnya atau dengan kata lain dapat menyesuaikan diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasidi (2000:12) bahwa kalau mau tetap eksis maka harus berani berkorban. Hal ini dilakukan guna dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang sudah semakin maju.

Salah satu bentuk kesenian yang dimiliki warga etnis Sangihe dan Talaud adalah masamper. Bentuk kesenian masamper ini dilakoni dengan cara nyanyi dan



tari bersama yang dilakukan pada kegiatan masyarakat tertentu seperti dalam acara pesta perkawinan, kedukaan dan acara lainnya. Dalam suasana kegiatan tersebut lagu-lagu rohani atau yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan warga terkait dengan keagamaan merupakan jenis lagu yang diungkapkan dalam masamper seperti lagu-lagu rohani Kristen.

Sebagai wahana ungkapan batin warga masyarakat yang diekspresikan lewat lagu-lagu secara berbalasan, maka hal ini mendorong mereka untuk menguasai banyak syair lagu. Penguasaan syair-syair lagu terjadi melalui ciptaan syair lagu sendiri oleh warga yang bersangkutan, namun dapat pula diangkat/diambil dari syair-syair yang lain. Dengan demikian pengadopsian syair lagu yang cocok dengan suasana batin warga bersangkutan dapat terjadi. Kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa banyak lagu-lagu Kristen yang diadopsi penggunaannya dalam kegiatan kesenian masamper.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat adalah:

- Apakah yang menyebabkan atau mengapa sehingga terjadi pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen dalam masamper?
- Dari manakah lagu-lagu rohani Kristen diadopsi dalam masamper?
- Bagaimana wujud teks lagu-lagu yang diadopsi?
- Bagaimana proses pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen?

## 1.3. Tujuan

Tujuan diadakan penelitian yang menyangkut dengan masalah kesenian daerah sebagaimana permasalahan yang diangkat adalah:

- Untuk mengetahui dan membuktikan sejauh mana kesenian daerah masamper dalam menggunakan lagu-lagu rohani Kristen.
- Untuk mengungkapkan proses pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen dalam kesenian tersebut.

## 1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan kesenian daerah, juga akan menambah bahan bacaan serta wawasan untuk pengembangan ilmu dalam bidang kesenian daerah.

## 1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penelitian ini difokuskan pada masalah pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen dalam kesenian masamper oleh masyarakat pelaku seni dimaksud. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya diarahkan pada daerah pemukiman etnis Sangihe Talaud secara umum sebagai pendukung budaya seni

masamper dan lebih khusus dibatasi pada salah satu lokasi desa/kelurahan yang ada di wilayah Sangihe Talaud.

#### 1.6. Metode

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan agar dapat memperoleh data dan informasi yang lengkap. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap obyek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode dalam pengumpulan data yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka ditempuh dengan cara mencari buku-buku, artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian sehingga dapat membantu penggarapan analisis. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Laporan penelitian akan dijabarkan secara deskriptif analisis.

#### 1.7. Kerangka Pemikiran

Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu. Karena kebudayaan itu pada dasarnya menunjuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi cara-cara bertingkah laku, kepercayaan, sikap dan juga hasil kegiatan manusia lainnya yang khas. Dalam kenyataannya kebudayaan itu tidak bersifat statis dan malah berkembang serta dapat berubah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungannya. Pada umumnya kebudayaan dapat dikatakan mempunyai sifat adaptif karena kebudayaan itu melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisik biologis maupun pada lingkungan sosialnya.

Kesenian merupakan satu di antara cabang dari kebudayaan yang turut ikut aktif mewarnai tumbuh kembangnya kebudayaan etnis Sangihe dan Talaud. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa salah satu unsur kebudayaan manusia adalah kesenian. Kesenian itu menurut beliau terbagi pula dalam beberapa jenis seperti: seni musik, seni tari, seni ukir/pahat, seni lukis, seni sastra dan lainnya (Koentjaraningrat, 1992). Kesenian masamper etnis Sangihe Talaud dikategorikan sebagai perpaduan antara seni suara/nyanyi yang juga berhubungan erat dengan seni sastra melalui syair-syair lagu yang kemudian dikembangkan dengan seni tari. Keberadaan kesenian masamper ini termasuk pula dalam cabang seni pertunjukan yang dilakoni oleh para pelaku seni untuk dinikmati banyak orang bahkan sudah menjadi atraksi hiburan yang dilombakan. Masamper sebagai seni pertunjukan dipandang sebagai inovasi budaya komunitas Sangihe dan Talaud karena di dalamnya memadukan unsur-unsur seni tradisional dan menyerap unsur-unsur yang dibawa oleh peradaban baru (M.E.

Tangkilisan, dkk: 2004). R.M. Soedarsono menyatakan bahwa seni pertunjukan selain merupakan presentasi estetis (tontonan) juga memiliki fungsi sosial lainnya sebagai penggugah solidaritas sosial dan pembangunan integritas sosial (Soedarsono, 1999).

Umar Kayam mengungkapkan bahwa seni pertunjukan itu lahir dari masyarakat dan ditonton oleh masyarakat. Artinya ia lahir dan dikembangkan di tengah, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang tidak bisa tidak dipengaruhi oleh sistem-sistem yang ada seperti sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, sistem sosial dan lain sebagainya (Gelar, Vo. 2 No. 1:IV).

Tinunghi Iverdixon (1995) juga mengungkapkan bahwa masamper merupakan ekspresi spontan kapan dan dimana saja, dimana seseorang atau beberapa orang berkeinginan berkomunikasi dengan kosmis di luarnya untuk mendapatkan *spiritual power* guna menghadapi keadaan-keadaan tertentu baik yang menyenangkan dan yang menyedihkan.

## II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 2.1. Lokasi dan Lingkungan Alam

Suku bangsa Sangihe-Talaud adalah salah satu suku yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara dan mendiami gugusan kepulauan Sangihe-Talaud, yang dikenal dengan sebutan Kepulauan Nusa Utara. Daerah Kepulauan Sangihe-Talaud saat ini telah dimekarkan dan menjadi dua wilayah administratif daerah tingkat II/ kabupaten yaitu Kabupaten Sangihe di bagian selatan dan Kabupaten Talaud di bagian utara. Kedua kabupaten ini atau kepulauan Sangihe-Talaud terletak antara 124°58' sampai 127°22' Bujur Timur dan 2°00' sampai 54°06' Lintang Utara, dengan batas geografis yakni:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Mindanau
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Gugusan Kepulauan Sangihe Talaud terdiri atas 77 pulau dengan luas wilayah daratan sekitar 2.263,95 km<sup>2</sup> dan luas lautan 44.000 km<sup>2</sup>. dari 77 pulau ayng ada terdapat beberapa pulau yang belum dihuni penduduk. Sebagai daerah yang telah dimekarkan, maka untuk Kabupaten Sangihe pusat pemerintahannya di Tahuna. Sedangkan Kabupaten Talaud pusat pemerintahannya di Melonguane. Waktu tempuh menuju daerah dari Manado (ibukota Provinsi Sulawesi Utara) dengan menggunakan angkutan laut (kapal) masing-masing adalah ke Sangihe (Tahuna) sekitar 9-10 jam dan ke Talaud (Melonguane) sekitar 16-18 jam.

Keadaan alam daerah Kepulauan Sangihe Talaud merupakan daerah berbukit-bukit dan bergunung yang dibatasi oleh sungai besar dan kecil. Dataran rendahnya di pinggiran pantai menjadi tempat bermukimnya penduduk. Di daerah ini terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif seperti gunung Karangetang dan Gunung Awu. Terapat juga danau-danau yang merupakan kepundan gunung berapi seperti Danau Mahena, Danau Kapetu, Danau Mahalehe dan lainnya. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu antara 22° C pada malam hari sampai 34° C pada siang hari. Angin selatan (kering) bertiup pada bulan Juli sampai Oktober, sementara angin barat (basah) bertiup pada bulan Januari sampai Maret.

Bila angin selatan bertiup maka akan menyebabkan adanya musim kemarau. Sebaliknya bila angin barat bertiup akan disertai dengan banyak turun hujan. Dalam tahun berjalan rata-rata curah hujan di daerah ini adalah 3.228 mm sampai 3.924 mm.

Adanya pergantian musim hujan dan kemarau yang relatif terjadi secara berimbang di sepanjang tahun memungkinkan tanah jenis latosol di daerah ini ditumbuhi banyak pepohonan yang digunakan masyarakat untuk membuat rumah dan peralatan rumah tangga lainnya. Demikian pula flora lainnya tumbuh baik seperti kelapa, pala, cengkih, rumbia dan tanaman buah-buahan seperti durian, langsung, mangga dan lain-lain. Komoditi pertanian rakyat lainnya yang diusahakan adalah padi ladang dan sawah, jagung, kedelai, dan jenis kacang-kacangan lainnya (kacang tanah, kacang hijau). Adapun fauna di Sangihe Talaud adalah jenis binatang melata seperti ular, kadal, biawak. Untuk jenis binatang menyusui seperti kus-kus, babi hutan, babi, musang, tikus dan anjing. Selain itu terdapat pula binatang jenis unggas seperti burung kakatua, nuri dan lainnya.

## 2.2. Kependudukan

Sebagian besar suku bangsa yang mendiami daerah Kepulauan Sangihe Talud ini adalah orang Sangihe dan orang Talaud (suku bangsa asli), juga telah datang dan bercampur dari suku bangsa lain seperti suku bangsa Gorontalo, Minahasa, Ternate, Ambon, Jawa dan lain-lain (suku-suku bangsa di wilayah Indonesia). Selain itu terdapat pula penduduk warga negara asing (WNA) yang umumnya berasal dari Cina. Mereka bergaul dan berinteraksi dengan baik sebagai warga masyarakat di Kepulauan Sangihe-Talaud ini melalui wadah keagamaan (Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha) melalui pendidikan di sekolah dan melalui profesi atau mata pencaharian (pegawai negeri sipil, pegawai swasta, petani, pedagang, sopir, tukang, nelayan dan lainnya) dan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada.

## 2.3. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Sangihe Talaud mengenal prinsip keturunan bilateral yakni hubungan kekerabatan yang ditentukan baik oleh pihak laki-laki maupun pihak

perempuan atau adanya hubungan famili yang disebabkan oleh hubungan darah atau perkawinan. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi setiap individu bergaul sama eratnya dengan kedua kerabat pihak laki-laki maupun perempuan. Setiap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan/pernikahan sah akan mewarisi nama keluarga (*marga/fam*) ayahnya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan tanpa suatu pernikahan akan mewarisi nama keluarga ibunya dan tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kecuali bila anak tersebut diadopsi, maka ia akan memperoleh nama keluarga dari orang yang mengadopsinya sekaligus dengan pembagian harta/warisan.

Telah dikemukakan bahwa orang Sangihe-Talaud mempunyai nama *marga/fam* (*familie-naam*) yang berasal dari nama keluarga ayah. Hal ini tidaklah berhubungan dengan prinsip patrilineal yang hanya mengharuskan menjalin kekerabatan yang erat dengan keluarga ayah. Namun kebiasaan menggunakan nama keluarga (*fam/marga*) ini diduga dibiasakan oleh para penginjil dari Belanda atau lainnya yang datang membawa dan menyebarluaskan agama Kristen (Nasrani) di Kepulauan Sangihe Talaud. Pemberian nama keluarga ini pada awalnya digunakan dalam pembaptisan dan catatan sipil. Sementara soal warisan etnis Sangihe Talaud menganut prinsip parental yaitu pembagian warisan diberikan secara merata kepada semua anak laki-laki maupun perempuan.

Prinsip perkawinan bagi masyarakat etnis Sangihe Talaud adalah *exogami* atau kawin di luar ikatan keluarga. Prinsip ini dijaga ketat karena pantangan bagi mereka bila ada yang kawin masih dalam ikatan hubungan keluarga. Pantangan dimaksud adalah dapat membawa malapetaka bagi kedua pengantin atau keturunan mereka karena masih dianggap sedarah. Larangan kawin antar keluarga ini berlaku baik bagi keluarga pihak ibu juga keluarga pihak ayah. Namun ada pengecualian perkawinan keluarga dapat dilakukan apabila hubungan keluarga sudah pada tahap keturunan tingkat ke lima (*pulung su laede*) atau sepupu kelima kali. Bagi mereka ikatan keluarga (kerabat) adalah mereka yang tergolong pada saudara sepupu satu kali, sepupu kelima kali sudah dianggap jauh dan dikatakan di luar lingkaran kekerabatan.

Di Sangihe dan Talaud terdapat dua kelompok bahasa yaitu kelompok bahasa sangir/Sangihe dan kelompok bahasa Talaud. Bahasa Talaud dipahami oleh etnis Talaud sementara bahasa Sangir/Sangihe terdiri atas beberapa dialek berdasarkan letak geografis wilayah kepulauan. Kelompok bahasa Sangihe terbagi atas Sangir besar, Siau dan Tagulandang. Sedangkan bahasa Sangihe besar terdiri atas dialek Manganitu, Tamako, Tabukan Utara, Tabukan Selatan, Kendar dan Tahuna.

Bahasa Siau dibedakan atas dialek Ulu dan dialek Sawang. Demikian pula dengan dialek wilayah Pulau Tagulandang. Dalam kelompok bahasa Sangihe unsur pembeda antara satu dialek dengan dialek lainnya ialah fonem akhir kata dan morfem (Bawole, 1977:6). Khusus untuk dialek lokal yang membedakan satu dialek dengan dialek yang lainnya adalah lagu atau intonasi. Namun demikian diantara kedua suku bangsa asli ini (Sangihe dan Talaud) yang berbahasa berbeda mereka dapat

berbaur dan saling memahami keberadaannya karena masih juga terdapat sedikit persamaan pengertian. Penggunaan bahasa daerah Sangihe Talaud oleh masyarakat di daerah ini terjadi diantara keluarga, kenalan dan sahabat, di akntor dan dimana saja. Namun masih ada masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia terutama mereka sebagai penduduk pendatang dan anak-anak muda yang sering keluar daerah. Juga dapat ditemui di tempat-tempat umum seperti pasar.

Sistem kepercayaan masyarakat sebelum masuknya agama Kristen dan Islam di Kepulauan Sangihe Talaud dikenal kepercayaan kepada dewa (Duata atau Ruata) yang disebut Ghenggonalangi yaitu dewa tertinggi, Maha Kuasa (dewa alam semesta). Sekarang ini sebutan duata atau ruata bagi orang Sangihe Talaud tidak lagi berarti dewa tetapi dipakai sebagai terjemahan dari kata Allah; pencipta dan penguasa alam semesta. Selain Ghenggonalangi dalam kepercayaan lama ada juga dewa-dewa lain yang menguasai laut, gunung, dan sebagainya. Dewa-dewa ini dahulu dipuji masyarakat melalui upacara-upacara tertentu karena hal tersebut dapat memberikan dorongan hidup atau harapan hidup bagi orang yang mempercayainya. Namun dengan masuknya agama Kristen secara bertahap telah membawa perubahan sehingga upacara-upacara pemujaan hampir tak terlihat lagi. Bagi masyarakat pemeluk agama Kristen mereka menyembah Ghenggonalangi yang diarahkan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sementara bagi kaum muslim (agama Islam) menyembah kepada Allah melalui nabi Muhammad SAW. Demikian juga umat Hindu dan Budha menyembah Yang Maha Kuasa sesuai ajaran agamanya.

Sistem gotong royong dalam masyarakat etnis Sangihe Talaud dikenal dengan sebutan '*palose*' (*mapalose*) bagi etnis Sangihe, sementara bagi etnis Talaud disebut '*ma'aliu*'. Kegiatan gotong royong ini merupakan satu bentuk kerja sama secara bergantian atau silih berganti. Pada awalnya sistem gotong royong ini dilakukan pada kegiatan bercocok tanam atau di bidang pertanian. Namun dalam perkembangannya sistem gotong royong tersebut terjadi pula dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti dalam kegiatan mendirikan rumah, pesta perkawinan, acara kematian dan syukuran/hajatan lainnya. Anggota dalam kegiatan '*mapalose*' atau '*maaliu*' ada yang dibentuk secara umum dan ada juga secara berkelompok. Secara umum adalah melibatkan seluruh anggota masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa atau *opolao* bersama perangkatnya. Dalam pembentukan kelompok dipengaruhi oleh beberapa alasan antara lain ada ikatan keluarga, tempat tinggal yang berdekatan, lokasi perkebunan yang berdekatan dan lain sebagainya. Jumlah anggota dalam satu kelompok umumnya bervariasi. Ada yang jumlah anggota hanya 7 orang (keluarga) dan ada yang lebih hingga mencapai puluhan orang (keluarga). Hal ini tergantung dari sistem kerja dan waktu pelaksanaan (bidang pertanian). Di samping kegiatan *mapalose* dan *maaliu* terdapat juga kegiatan kerja sama yang disebut '*maneke*', '*manabba*' dan '*kakalumpang*'. '*Maneke*' adalah sistem penerahan tenaga kerja secara gotong royong dalam kegiatan menangkap



ikan. 'Manabba' adalah kegiatan gotong royong dalam berburu babi hutan. 'Kakalumpang' adalah kegiatan tolong menolong dalam usaha membuat minyak kelapa. Selain kegiatan gotong royong tersebut khusus dalam acara duka dikenal dengan sebutan '*mattampungnga*', '*mahumpuge*' atau '*madarumatingnga*'. Bentuk tolong menolong ini berlaku apabila ada kematian salah satu anggota keluarga. Secara spontanitas para tetangga, kerabat, masyarakat desa datang ke rumah duka dengan membawa bahan-bahan makanan yang akan dimasak seperti beras, minyak kelapa, telur, ikan, sayur-sayur dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan dimasak secara gotong royong oleh ibu-ibu, bapak-bapak dan para muda-mudi.

Mereka bekerja secara bergantian mulai dari hari pertama kematian sampai beberapa hari kemudian, untuk melayani keluarga yang berduka juga para tamu yang datang dari desa lain atau dari tempat yang jauh. Biasanya pada malam hari ketika jenazah belum dikuburkan dan juga pada ketiga sesudah kematian, warga masyarakat ini menghibur keluarga dengan menyanyikan lagu-lagu rohani dalam kegiatan *masamper*.

#### 2.4. Sekilas Tentang Kesenian *Masamper*

Mengenai sejarah keberadaan kesenian *masamper* belum ada yang dapat memastikan dengan jelas sejak kapan kesenian ini muncul. Namun menurut masyarakat setempat etnis Sangihe dan Talaud mengungkapkan bahwa *masamper* sudah ada sejak adanya penduduk Sangir (memang ada perkembangannya kemudian *masamper* lebih dikenal oleh etnis Sangir/Sangihe). Pada waktu itu orang mengenalnya dengan sebutan *mengantare*, *kantari* (bahasa asli Sangir) yang artinya kegiatan menyanyi. Kemudian dalam perkembangannya sampai sekarang disebut *masamper*. Kata *masamper* oleh para ahli linguistik mengungkapkan terjadi dari kata *zang* (bahasa Belanda) yang berarti nyanyian. Hal ini dilihat kaitannya dengan kata Sangir yang berarti penyanyi (Paul Nebath, 1995:21).

Informasi lain juga mengungkapkan bahwa *masamper* berasal dari bahasa Portugis yaitu dari kata *zyangfeer* yang berarti kelompok penyanyi. Kegiatan kelompok penyanyi ini dilakukan untuk membangun persekutuan dalam rangka penyebaran Injil di kalangan umat Katolik oleh para misionaris Portugis. Beberapa tahun kemudian setelah VOC masuk ke tanah Sangihe Talaud, maka peranan Portugis yang menyebarkan agama Katolik diganti oleh para penginjil (*zending*) yang menyebarkan agama Protestan. Dalam bahasa Belanda kelompok nyanyi disebut *zangvere*. Tujuan para *zending* ketika itu adalah untuk melatih dan mengajar jemaat memuji Allah sang pencipta alam semesta melalui lagu-lagu yang diajarkan. Karena agak sulit mengucapkan kata *zangvere* oleh masyarakat/jemaat etnis Sangihe Talaud sehingga kata ini terucap *samper/sampri* yang kemudian berkembang menjadi *masampere* (bahasa Sangir) dan lebih dipersingkat menjadi *masamper* (mendapat pengaruh dialek Manado).

Kehadiran zangvere (masamper) mendapat tanggapan sangat baik dari warga jemaat karena menyanyi bagi orang Sangihe Talaud merupakan hal yang selalu diikutsertakan dalam aktivitas sehari-hari terutama dalam mengungkapkan pemujaan kepada sang pencipta. Hal ini sejalan dengan apa yang diartikan oleh para ahli linguistik bahwa "*Sangir*" berarti penyanyi. Demikian pula syair lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh masyarakat Sangihe Talaud banyak kali dihubungkan dengan keberadaan lingkungan bahari. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena penduduk Sangihe Talaud bermukim di pulau-pulau (daerah kepulauan). Oleh karena kehidupan masyarakat berorientasi dan dibangun spirit budaya bahari, maka semboyan yang dipegang dan didukung oleh masyarakat Sangir ini pun bernuansa bahari (kelautan) yakni "*Somahe Kai Kehage*" (kebanggaan menghadapi tantangan). Semboyan tersebut memotivasi mereka untuk bangkit dan bersemangat dalam menghadapi tantangan. Demikian halnya dengan syair lagu rohani pun ada yang diciptakan dan diangkat dengan ungkapan yang bernuansa lingkungan kebaharian seperti syair lagu yang berjudul *Mageng Seng Memodoa*.

Kegemaran menyanyi pada masyarakat Sangihe Talaud menyebar luas dalam aktivitas hidup mereka. Sebagai warga jemaat yang memeluk agama Kristen, mereka terdorong untuk mempelajari lagu-lagu yang bernuansa kristiani. Lagu-lagu ini dinyanyikan pada kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan (kematian, HUT, pernikahan, dan lain-lain). Masyarakat mengekspresikan perasaan mereka/pribadi atau kelompok melalui lagu-lagu yang dinyanyikan dan dilakukan secara berbalas-balasan sambil menunjuk siapa yang akan mendapat giliran menyanyi berikutnya. Itulah sebabnya seni masamper uini ada juga yang menyebutnya 'tunjuke' (menunjuk) atau 'mebawalase' (berbalasan).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa masamper/ 'tunjuke' pada awalnya mulai dilaksanakan dalam acara kematian sebagai usaha masyarakat untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal mana pada acara kematian seluruh kerabat, handai tolan dan lainnya datang berkumpul sambil memberi bantuan baik materiil maupun bantuan lainnya termasuk usaha untuk menghibur keluarga yang berduka. Kegiatan masamper tersebut biasanya dilakukan pada malam hari ketika beberapa orang sedang membuat peti jenazah hingga selesai dan pada malam-malam penghiburan di hari berikutnya. Kegiatan menyanyi bersama dilakukan sampai pada subuh/menjelang matahari terbit. Hal ini dimaksudkan selain untuk menghibur keluarga, juga ada tradisi kepercayaan masyarakat bahwa pantangan bagi jenazah/orang yang baru meninggal untuk dibiarkan sendiri tanpa ada yang menemani. Karena roh-roh halus akan datang mengganggu dan meminta korban lainnya atau pula petaka (seperti sakit yang sulit disembuhkan). Untuk itu, kaum karabat, tetangga, ada juga keluarga sambil menghilangkan rasa ngantuk ketika menjaga jenazah mereka bernyanyi secara berbalasan. Kegiatan bernyanyi sambil berbalasan ini dilakukan juga pada malam penghiburan lain sesudah kematian yang mereka

sebut acara tiga malam, tujuh malam, empat puluh malam bahkan ada yang sampai pada peringatan satu tahun.

Melihat bahwa kegiatan memberikan hiburan kepada keluarga yang berduka sangat bermanfaat maka masyarakat etnis Sangir memandang kegiatan serupa perlu juga dikembangkan dalam acara-acara lainnya. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya kegiatan masamper tidak terbatas lagi pada acara duka tetapi dilakukan juga dalam acara atau suasana suka cita seperti syukuran, HUT, perkawinan, naik rumah baru bahkan dalam acara-acara lainnya. Kegiatan bernyanyi ini juga dilakukan. Lebih luas lagi termasuk dalam aktifitas masyarakat lainnya antara lain dalam membangun rumah, mengerjakan kebun yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka bernyanyi berbalasan sambil mengerjakan pekerjaannya.

Pada kegiatan masyarakat seperti acara duka dan lainnya, pelaksanaan masamper atau nyanyi berbalasan ini biasanya digelar setelah ibadah selesai, ketika menunggu keluarga menyajikan minuman dan kue. Bila keluarga menyiapkan makanan lengkap maka kegiatan bernyanyi bersama ini dilakukan setelah acara makan. Mengenai syair lagu yang dinyanyikan biasanya disesuaikan dengan acara dimaksud yang diawali dengan syair penyembahan kepada Tuhan Sang Pencipta. Bernyanyi bersama/secara bergantian ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan biasanya akan berakhir sampai subuh. Namun demikian disediakan juga waktu istirahat dimana pada saat itu keluarga akan menyajikan kembali makanan ringan kue dan minuman hangat. Demikian pula lancar dan ramainya kegiatan masamper ini ditentukan oleh para pesertanya terutama kepada pimpinan-pimpinan kelompok (bila dibentuk kelompok) atau perorangan yang banyak menguasai bermacam lagu dengan syair yang mengandung makna yang disesuaikan dan cocok dengan lagu yang dimintakan.

Dalam perkembangan sekitar tahun 1970-an masamper mengalami perubahan menjadi seni pertunjukan yang mulai dilombakan. Sebagai seni pertunjukan yang dilombakan maka terjadi perubahan dalam berbagai segi yakni pada syair lagu, penampilan berpakaian (kostum) juga dari segi waktu, tempat dan pola penyajiannya. Pada awalnya masamper dinyanyikan secara duduk dan santai, namun kini telah diekspresikan dengan gerakan tari yang disesuaikan dengan makna dan isi lagu yang dinyanyikan. Keterangan yang diperoleh mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa jenis masamper antara lain: masamper sabuah, masamper pergelaran/pertunjukan dan masamper perlombaan.

#### A) *Masamper Sabuah*

Disebut dengan masamper sabuah karena tempat penyelenggaraannya di halaman yang dibuat tenda (*sabuah*) di depan atau di samping rumah juga di lapangan luas sesuai dengan rencana besar kecilnya tenda yang dibuat dan tergantung banyaknya undangan atau keluarga dan kerabat yang akan hadir. Hal

ini dilakukan agar para undangan atau masyarakat yang akan hadir dapat tertampung semuanya dan terlindung di bawah tenda bilamana hujan. Masamper sabuah dapat dilaksanakan dalam acara duka maupun suka. Dahulu para peserta yang ikut dalam kegiatan ini tidak diperkenankan berdiri, semuanya duduk di tempat yang sudah disiapkan. Mereka bernyanyi berbalasan sambil duduk, namun kini sudah ada yang berdiri berdasarkan kelompok yang mendapat giliran bernyanyi dan mulai diikuti dengan gerakan-gerakan tari yang diciptakan sendiri sesuai yang diminta pemimpin kelompok. Pada saat kegiatan masamper akan dimulai maka sebelumnya dibentuk kelompok dengan jumlah orang dalam satu kelompok tergantung dari banyaknya orang yang hadir. Kelompok ini terbentuk secara spontan karena biasanya mereka yang duduk berdekatan membentuk satu kelompok. Setiap kelompok menunjuk seorang pemimpin. Dia yang akan mengkoordinir kelompoknya dalam tugas memilih lagu yang akan dinyanyikan. Karena itu, pemimpin kelompok yang ditunjuk biasanya adalah orang yang mengetahui banyak perbendaharaan lagu.

Dalam masamper sabuah mempunyai aturan antara lain: (1) Lagu-lagu yang telah dinyanyikan tidak boleh dinyanyikan lagi oleh semua kelompok. Bila hal itu terjadi (dinyanyikan lagi) maka dinyatakan hangus dan kalah karena dianggap pemimpin kurang menguasai lagu. (2) Lagu yang dinyanyikan harus dibalas oleh peserta/kelompok berikutnya dengan syair lagu yang maknanya berhubungan dengan syair lagu sebelumnya (semacam berbalas pantun). (3) peserta yang kalah secara sportif menerima ganjaran sesuai kesepakatan yang dibuat bersama.

Waktu pelaksanaan masamper sabuah biasanya dilakukan setelah pelaksanaan ibadah selesai yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Bilamana masamper sabuah tidak dibuat kelompok maka ada satu orang yang akan memulakan kegiatan ini dengan mengangkat satu lagu dan dinyanyikan bersama-sama. Sementara itu beliau mengelilingi dengan mengikuti irama lagu sambil tangannya menunjuk kepada para peserta. Kepada peserta yang terakhir ditunjuk seiring dengan berakhirnya lagu maka dialah yang akan melanjutkan mengangkat lagu berikutnya. Demikian yang akan terjadi selanjutnya, namun bilamana peserta yang ditunjuk tidak dapat mengangkat lagu baru (yang belum dinyanyikan) atau menyanyikan lagu yang telah dinyanyikan maka beliau dinyatakan hangus/kalah dan siap menerima ganjaran. Kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan waktu yang ditentukan selesai (biasanya sampai waktu subuh). Khusus dalam acara sukacita, orang yang mengangkat lagu memegang setangkai bunga dan menunjuk kepada para peserta dengan bunga di tangannya. Seperti dalam acara perkawinan maka yang mengawali kegiatan ini adalah kedua pengantin sambil memegang masing-masing setangkai bunga. Mereka menunjuk kepada para pemuda dan pemudi yang hadir, dan bagi yang ditunjuk terakhir (seiring dengan usainya lagu yang dinyanyikan) akan menggantikan dan melanjutkan kegiatan ini dengan

mengangkat lagu berikutnya. Demikian seterusnya secara bergantian sampai ada yang dinyatakan hangus/kalah.

Adapun lagu yang dinyanyikan semalam suntuk ini terbagi dalam beberapa kategori disesuaikan dengan waktu yaitu:

- Sekitar jam 09.00 atau 10.00 malam (sesudah pelaksanaan ibadah) lagu-lagu yang dinyanyikan bernuansa rohani dan atau lagu yang bertemakan pertemuan.
- Setelah jam 12.00 malam, lagu-lagu yang dinyanyikan bertemakan perjuangan dan percintaan.
- Setelah jam 02.00 atau 03.00 hingga menjelang subuh/pagi lagu-lagu yang dinyanyikan bertemakan penyerahan, penyesalan dan akhirnya perpisahan.

Kelanjutan jalannya masamper tergantung dari penguasaan perbendaharaan lagu baik peserta maupun pemimpin kelompok yang akan membuat acara dimaksud berjalan dengan baik dan meriah, apalagi mulai dilakoni dengan gerakan tarian mengikuti lagu-lagu yang diangkat/ dinyanyikan. Kenyataan sekarang memperlihatkan bahwa para peserta masamper tidak seperti dahulu yang mengangkat lagu sesuai lagu yang seirama seperti membalas pantun. Kini yang nampak bahwa bila diangkat lagu rohani sebelumnya, maka akan dibalas juga dengan lagu rohani walaupun iramanya berbeda. Demikian juga dengan lagu-lagu yang bertemakan percintaan dan lainnya. Keterbatasan dalam hal penguasaan lagu apalagi lagu-lagu dalam bahasa daerah dan lagu-lagu lama menjadi faktor utama perubahan kegiatan masamper dimaksud. Masamper yang ada sekarang ini adalah masamper kreasi baru yang dilakukan dan diperindah dengan gerakan. Masyarakat kini mengenalnya dengan sebutan masamper “pato-pato”

#### *B) Masamper Pergelaran/Pertunjukan*

Sesuai dengan namanya masamper pertunjukan/ pergelaran maka kegiatan bermasamper akan dilaksanakan bila ada yang menginginkan kehadiran kesenian daerah untuk dipergelarkan. Biasanya masamper ini akan digelar pada acara-acara hari raya nasional dan atau keagamaan (gerejawi). Hal yang ditonjolkan dalam masamper ini bukan hanya jenis lagu yang dinyanyikan tetapi juga keharmonisan suara, kesekarsan gerak dan ekspresi yang menjiwai pesan/makna lagu yang dibawakan. Untuk itu peserta yang akan mengambil bagian dalam pergelaran ini adalah mereka yang dipilih. Mereka harus menguasai lagu serta memiliki vokal yang baik berdasarkan pembagian jenis suara seperti sopran, alto, tenor, bas dan lainnya. Para peserta ini juga merupakan pilihan sesuai permintaan apakah campuran tua dan muda, orang muda saja, orang tua saja atau anak-anak. Dalam masamper pergelaran ini peserta akan tampil dengan kostum yang seragam dan menarik. Dan diharapkan dalam pergelaran ini para penonton akan merasa senang dan terhibur. Unsur-unsur budaya juga akan ditampilkan dalam pergelaran ini melalui judul-judul lagu berbahasa daerah dan kostum yang mereka gunakan

(biasanya mengambil model pakaian adat). Masamper pertunjukan/pergelaran tidak berbeda jauh dengan masamper yang dilombakan atau dipertandingkan.

### *C) Masamper Perlombaan*

Masamper perlombaan mempunyai kriteria dan persyaratan yang diatur oleh panitia pelaksana yang akan mengadakan perlombaan ini. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud biasanya mencakup beberapa hal seperti lagu-lagu yang dibawakan harus sesuai dengan permintaan, jumlah peserta dibatasi dalam satu kelompok. Biasanya dalam masamper perlombaan akan ditentukan pula peserta dalam satu kelompok; apakah seluruh peserta pria saja, wanita saja, campuran pria dan wanita, dewasa atau anak-anak. Demikian juga keserasian pakaian/kostum yang digunakan menjadi salah satu penilaian dalam perlombaan, selain keharmonisan suara dan gerak yang ditampilkan. Dalam masamper perlombaan ditentukan pula waktu/lamanya setiap kelompok yang akan memperagakan kesenian ini.

Adapun jenis lagu yang dipertandingkan mengikuti permintaan panitia pelaksana. Biasanya berdasarkan tema yang diurutkan seperti antara lain:

- lagu yang bertemakan sejarah atau silsilah
- lagu yang bertemakan pertemuan
- lagu yang bertemakan percintaan
- lagu yang bertemakan peperangan/perjuangan
- lagu yang bertemakan perpisahan dan lainnya.

Dalam masamper perlombaan ini akan dinilai oleh tim penilai sehingga akan diperoleh siapa/kelompok mana yang akan menjadi pemenang. Sementara dalam masamper pergelaran tidak ada tim penilai yang akan menentukan mana yang terbaik. Selanjutnya dalam masamper sabuah semua peserta akan menjadi penilai dan menentukan siapa yang kalah atau hangus. Peserta yang kalah dan hangus dalam masamper sabuah biasanya disebabkan oleh kurangnya penguasaan lagu (yang tidak dapat dinyanyikan berulang). Untuk itu semua pesertanya harus saling memperhatikan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan.

## **III. PENGADOPSIAN LAGU-LAGU ROHANI KRISTEN DALAM MASAMPER**

Kesenian masamper sebagai salah satu bentuk budaya yang dimiliki masyarakat Sangehe dan Talaud mengalami proses perkembangan sesuai dengan sifat elastis dan dinamisnya suatu kebudayaan. Hal ini terjadi seiring dengan kemajuan masyarakatnya yang mengalami berbagai perubahan dalam rangka penyesuaian diri. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh S. Budisantoso (Kebudayaan Tahun IV 19983/1984) bahwa perkembangan kebudayaan dapat



berlangsung karena pengaruh dari dalam (*internal forces*) seperti pergantian generasi dan penambahan penduduk sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan. Juga oleh kekuatan dari luar (*eksternal forces*) seperti kontak-kontak dengan budaya asing/luar sehingga menimbulkan rangsangan ke arah pembaharuan (*stimulus difusion*). Namun demikian kesenian masamper dalam proses perkembangannya di tengah-tengah masyarakat pendukungnya masih tetap menunjukkan unsur tradisional yaitu nilai religius (nilai spiritual) yang terkandung di dalamnya. Nilai luhur dimaksud nyata dalam dan melalui syair-syair lagu yang dinyanyikan sebagai wujud ungkapan perasaan yakni pujian dan sembah terutama kepada Sang Pencipta dan penguasa yaitu Tuhan atau yang disebut 'Ghenggona Langi Duatang'. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa masamper memiliki fungsi sebagai salah satu sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan

Telah dijelaskan bahwa masamper merupakan suatu bentuk kesenian rakyat yang pada awalnya hanya berupa menyanyi bersama dan saling berbalasan, kemudian berkembang dan dipadukan dengan gerakan tari yang mengiringi setiap lagu, bahkan sudah masuk dalam ajang perlombaan. Sebagai suatu bentuk budaya yang mengalami proses perubahan dan perkembangan tentu kesenian ini memiliki berbagai pengaruh baik melalui perkembangan masyarakatnya juga pengaruh unsur budaya luar yang dibawa oleh peradaban baru. Masyarakat etnis Sangihe dan Talaud yang melahirkan dan memiliki seni budaya ini terkait erat dengan keberadaan mereka sebagai insan manusia yang mengakui bahwa dalam hidup ini ada yang lebih berkuasa yaitu Sang Pencipta alam semesta. Untuk itu, melalui bernyanyi bersama mereka mengungkapkan pemujaan kepada Sang Pencipta dalam berbagai bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari lewat lagu-lagu pujian. Syair-syair lagu yang dinyanyikan sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan Sang Pencipta 'Ghenggona Langi' sekaligus merupakan permohonan agar dalam menjalani hidup diberikan berkat kekuatan dan hiburan di kala mengalami berbagai tantangan, cobaan dan lainnya. Termasuk juga dalam mereka mengelola segala ciptaan Tuhan di dunia ini bagi kelangsungan hidup manusia. Iverdixon Tinungki mengungkapkan bahwa 'masampere' merupakan ekspresi pembebasan yang berlangsung spontan, kapan dan dimana saja, dimana seseorang atau beberapa orang berkeinginan berkomunikasi dengan kosmos di luarnya untuk mendapatkan spiritual power guna menghadapi keadaan-keadaan tertentu baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan (Masampere dan Eksistensialisme, 1995).

Melihat sejarah keberadaan masamper tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan masamper pada dasarnya merupakan pengakuan untuk mendapat spiritual power yang diungkapkan lewat syair lagu yang bernafaskan rohani. Hal ini lebih berkembang sejalan dengan perubahan kultur masyarakat yang mengenal peradaban baru yang dibawa oleh Missi Zending Belanda (NZG) sebagai upaya Kristenisasi etnis Sangihe dan Talaud. Itulah sebabnya shingga syair lagu rohani Kristen banyak

digunakan masyarakat dalam aktivitas hidup mereka terutama ketika berkumpul dan bernyanyi bersama, demikian juga yang diekspresikan masyarakat ketika dalam kegiatan masamper. Proses pengadopsian lagu-lagu rohani Protestan dalam kegiatan masamper berawal dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam persekutuan beribadah bersama. Oleh karena kegiatan bernyanyi berbalasan ini menuntut setiap peserta memiliki perbendaharaan lagu maka lagu-lagu yang dinyanyikan diangkat dari berbagai sumber.

Lagu yang diangkat/digunakan sesuai dengan irama dan lingkungan/syair lagunya, namun ada juga hanya mengangkat iramanya saja dengan syair lagu yang diciptakan sendiri. Dengan demikian iramanya seperti yang ada di buku nyanyian tapi syair kata-katanya berbeda. Selain itu ada pula yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sangihe dan atau sebaliknya yaitu syair lagu bahasa daerah Sangihe diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Penelusuran lagu-lagu rohani Kristen dalam masamper akan dilihat secara umum dalam arti penggunaannya dalam kegiatan masamper yang dilakukan masyarakat luas baik dalam peristiwa suka maupun duka, juga terkait dengan syair-syair lagu yang berbahasa Sangihe maupun bahasa Indonesia atau yang dipengaruhi dengan dialek Manado. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis lagu yang diciptakan sendiri atau yang diangkat dari kidung-kidung rohani gerejawi dan kidung rohani populer. Dari penuturan beberapa informan menjelaskan bahwa penggunaan lagu-lagu rohani Kristen yang berasal dari buku kumpulan nyanyian gereja seperti Mazmur, Dua Sahabat Lama, Kesukaan Kristen, Nafiri Perat dan lainnya merupakan lagu-lagu yang sering dinyanyikan dalam kegiatan masamper. Hal ini terkait karena mayoritas masyarakat pendukung kebudayaan ini adalah anggota gereja/umat Kristen, hasil dari misi pekabaran Injil yang menggunakan lagu-lagu tersebut dalam pertemuan peribadatan rutin mereka. Namun demikian ada juga lagu-lagu yang dibawakan merupakan lagu-lagu lama ciptaan para leluhur mereka (umumnya dalam bahasa daerah Sangihe dan Talaud). Dalam perkembangan selanjutnya (sesuai data yang diperoleh) banyak lagu rohani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Sangihe yang juga digunakan dalam kegiatan bermasamper seperti yang dialihbahasakan dan dikumpulkan oleh Bapak Edelman Sentinuwo.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen dalam masamper diangkat dari berbagai sumber dengan teknik dan atau cara yang bervariasi yakni diangkat untuk syair dan iramanya, iramanya saja dengan syair yang diciptakan sendiri dan syair lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, demikian pula sebaliknya. Berikut ini akan dipaparkan lagu-lagu rohani Kristen yang ada dan diadopsi dalam masamper melalui tiga bagian yakni:

- lagu-lagu rohani Kristen dalam bahasa daerah yang diciptakan sendiri
- lagu-lagu rohani Kristen yang diambil dari buku nyanyian gerejani
- lagu-lagu rohani Kristen Populer (tidak diangkat dari buku nyanyian gereja)

### 3.1. Lagu-lagu Rohani Kristen Dalam Bahasa Daerah Yang Diciptakan Sendiri

Jenis lagu-lagu rohani Kristen yang digunakan dalam kegiatan masamper ini yang merupakan hasil ciptaan dan gubahan etnis Sangehe dan Talaud yang dapat dikumpulkan adalah jenis lagu yang masih ada pengarangnya/penciptanya, namun ada juga lagu-lagu lama yang sudah tidak diketahui lagi pengarangnya. Jenis lagu ini ada yang berbahasa daerah lokal Sangehe dan Talaud, dan ada pula yang berbahasa Indonesia. Lagu-lagu yang berbahasa Indonesia umumnya dapat dikategorikan lagu-lagu baru dalam arti ciptaan tahun 1970-an sampai tahun 200-an. Berikut ini contoh-contoh deskripsi lagu yang diciptakan sendiri etnis Sangehe Talaud yang masih diketahui pengarangnya dan yang tidak diketahui lagi penciptanya.

A) *I Ghenggona Langi. (Kakendage Tamalailang)*

*I Ghenggona Langi. Duatang Saruluang*

*Lulahiwa lambung Marineda bihingan*

*Smatang Isie pangangumabalerang*

*Kekndage Tamalailang*

*Reff: Boe mahundingang mahi msenggetang*

*Mndolong buntuang nusang tulumang*

*Mawu Pinedigang tamenanentang*

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangehe.

B) *Daluasku Natinalung*

*Doluasku natinalung suenumang ipedaramae,*

*Ladat supungutulung*

*Kapiane nmatiku lawo*

*Reff: Duikengkon semba, duikengkon semba,*

*Smba si Ghenggona, semba si Gehenggona*

*Si Ghenggona Langi,*

*Kanandung llo ringangu hebi*

*Pedalo arenge malondo.*

*Mawu Pinedigang tamenanentang*

Sumber : Buku Kantari Berang Sangehe, E. Sentinuwo.

C) *Kere Wulurang Sembua*

*Liuwalane Wulurang, Mebatu Berang Kanarang*

*O, Mawu mambeng Putulung, Bou Dorado Matelang*

*Reff: Kebi-Kebi-Kebi-Kebi Senggighilang*

*Kere Wulurang Sembua*

*Darodo Matelang Sughak Mapia*

*Maka daluase naung*

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangehe.

D) *Salaku Sala Sompakang*

*Salaku Sala Sompakang*

*Topo-topo Ba Wengi naung*

*Ala Sela u Komolang  
Bening Dario Maghurang  
Makoa Tialang Pedalahiborang  
Suapa Tempong Pesasombang  
Dario Meghurang Mang Suhiborang  
Reff: Mededorong-Mededorong Sumata  
    Alamatu naeka tentung sikami natampung  
    Ene eng Liumbengi Kendage Bou rasj  
    Oh Mawu Ruata Lagi*

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangihe.

**E) O, Ruata Lamang Matalentu**

*O, Ruata lamang matalentu,  
Tulungko ellang sidutu,  
Geliko Roka'u penentiro  
Sia su Kanandung ello  
Tentanurewe ellang'u  
Tentanurewe ellang'u  
Abe wala ellang  
Sesare su Kandung ella  
    Geliko Si sia ellang'u naung pande  
    O, Mawu, O, Ruata  
    Geliko si sia ellang'u naung ponde  
    O, Mawu Ruata puengu tatalentu.*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sintinuwo.

**F) Mawu Yesus Matalentu**

*Mawu Yesus matalentu  
No'u sorga seng limintu  
Sarang dunia masusah  
Nenalude dosa  
Reff: Mang dudalairo naseku sukedo  
    Diandire pinekakere  
    Ta' melandangkere*

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Sangihe.

**G) Pertemuan Orang Beriman**

Syair Lagu: St. Bawias  
*Di dalam rumah Tuhan  
Terbitlah tiang pengharapan  
Membawa sukacita  
Bagi orang yang beriman  
KasihNya yang abadi  
Menjadi alat pemersatu*

Bagi orang yang percaya  
Dijanjikan Slamatnya

*Reff:* Kesukaan dan Kegemaran  
Bagi umat setia padaNya  
Rasa Bahagia terangkatlah  
Di dalam pertemuan  
Marilah siah marilah Hai saudaraku  
Di dalam Yesus kita bersatu  
Bangkitlah sioh bangkitlah, di tengah Perhimpun ini  
Kasih Tuhan mengalir, laksana air kehidupan  
Senantiasa menyertai kita  
Hingga kesudahan alam.

H) *Dudalum Pasiang*

Syair Lagu: Z. Takasihaeng

*Dudalum Pasiang Suralungu naung,  
Su dunia, Mededalalaghi  
Kamagang tamasuku  
Makakendung I l ongonang  
Sala Su mangi  
Ilo Kasiang pekapuraneng  
Sembeng kerene Sutaumata  
Dunia ini tumba penumpangeng  
Ledo Su Sorga takonsangapa*

I) *Bersukacita*

Syair lagu: A. Laodini

Selaksana kumbang  
Merindukan taman bunga-bunga  
Begitu, Begitulah hati kami sekawan  
Datang sambut keramaian  
Bersukacita semalam ini kita sekalian  
Beramai-ramailah di tempat ini  
Sobat-sobat dan kenalan  
Kami ucapkan salam sejahtera  
Bagi kita semua  
Semoga bahagia, jauh mara bahaya  
Tuhan lindungi kami  
Singkirkan kuasa kegelapan  
Yang merintang pertemuan ini.

J) *Karaloko Mawu*

Syair lagu: Lahema

*Karaloko Mawu Lae mambengdingang*

*Tumole Oakelu mebatu dingangu  
Ellang mambeng paningang, O', Obe tentangu  
Ellang mambeng paringang, O, Obe tentangu  
Pengahako Mawu Sarang daleng mapia  
Buna suanunu sutampia taninu  
Sorganu masaria lohendiandimu  
Sorganu masaria lohendiandimu*

### 3.2 Lagu-lagu Rohani Kristen Yang Diambil Dari Buku Nyanyian Gerejani

Penggunaan syair lagu dalam kegiatan masamper bukan hanya melalui lagu-lagu ciptaan sendiri baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, namun juga digunakan lagu-lagu yang diambil dari buku nyanyi gereja. Buku nyanyian gereja yang digunakan seperti Dua Sahabat Lama (DSL), Nyanyian Kemenangan Iman (NKI), Kesukaan Kristen (KSK), Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB), Tahlil, Nafiri Perak, Johann de Neerblendel (JDN). Berikut ini contoh deskripsi lagu-lagu yang diangkat dari buku-buku nyanyian gereja.

#### A) *Intan dan Permata*

(Dua Sahabat Lama No. 156)

Engkau cari intankah  
Guna tajuk almaseh  
Ingat dalam limbahan  
Ada intan yang permai  
    Intan-intan dan permata  
    Jiwa-jiwa Tuhanmu  
    Biar cari lalu bawa  
    Guna tajuk Sultanmu  
*Mageng Seng Memadoa  
Mageng Seng Memadoa  
Injil Pela Su mona  
Abe ghaghang mawihua  
O Yesus atohema  
    Asalu peniti dolong  
    Pakapiawe onganeng  
    Bawahasi Kairorong  
    Pundalang Kaliomaneng*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sentinuwo.

#### B) *Ajaib Anugerah Yesus*

(Nyanyian Kemenangan Iman No. 229)

Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus  
Lidahku tak berkata betapa indahnya  
Bebanku dihilangkan jwaku terlepas



Ajaiblah keslamatan anugerah Tuhan

Ajaiblah anugerah Tuhan,  
AnugerahNya Yesus  
Lebih dalam dari laut besar,  
Laut yang besar  
Anugerah, anugerahNya  
Yang sempurna bagiku  
Yang menutupi segnap celaku  
Jauh besarlah dari dosaku  
Besarkan nama Yesus  
Yang terindah puji Hu

Sombo Tuwo Katamang

*Sombo tuwo katamang, ta kurang eapa  
Sulimang Duata lamang takonsang eapa  
Sentinia mangambang patiku umate  
Pia kalaambang ore salamate*

*Lukade satia mambang tawe mapaporong  
Datung kawawantuge pamanggilang dorong  
Subasi Ghenggona menahiangkung Padoma  
Tatarimakase i sesemba  
Su Mawu I Riatang Semba  
Dalo sengkapedalo Areng E I Malondo*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sentinuwo.

C) *Kendati Hidupku Tentram*

(Nyanyikanlah Kidung Baru No. 195)

Kendati hidupku tentram dan senang  
Dan walau derita penuh  
Engkau mengajarku bersaksi tegas  
Slamatlah, slamatlah jiwaku  
Slamatlah jiwaku  
Slamatlah slamatlah jiwaku

Nawengke Dalo Adate

*Tinalung na wengke dalo adate  
Mawu pungu salamate  
Kendagu ruata si kita taumata  
Nakoa untung si kau sia  
Pedalo si sie pedalo si sie  
Pedalo, pedalo si sie*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sentinuwo.

D) *Hai Musafir Mau Kemana*

(Kidung Jemaat No. 269)

Hai musafir, mau kemana

Kau arahkan langkahmu?  
Kami ikut titah Raja  
Dan berjalan tak lesu  
Lewat gunung dan dataran  
Arah kami ke istana  
Arah kami ke istana  
Kota aja yang kudus  
Arah kami ke istana  
Kota Raja yang kudus

Solong Apa I Kamene

*Solong apa I kamene  
Mahundingang kerene  
Limania pekakai  
Mata solong tarai  
Liu wulude, liu walane  
Tawe otonge, tawe lengane  
Mengkai matulide, Mengkai matulide  
Tawe otonge tawe lengane  
Mengkai matulide*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sentinuwo.

E) *Bila Topan Kras Melanda Hidupmu*  
(Kidung Jemaat No. 439)

Bila topan kras melanda hidupmu  
Bila putus asa dan letih lesu  
Berkat Tuhan satu-satu hitunglah  
Kau niscaya kagum oleh kasihNya  
Berkat Tuhan, mari hitunglah  
Kau kan kagum oleh kasihNya  
Berkat Tuhan, mari hitunglah  
Kau niscaya kagum oleh kasihNya

Lighareng Kukerong Bulaeng

*Su liwuaeng mekekahaghiang  
Kere apeng dame sarung tuliang  
Kakelaiko rala su sellaeng  
Kai Lighareng kukerong bulaeng  
Mawu Yesus kai atohema  
Kabaru Injil kere padoma  
Nangkodane Ruata Iamang  
Roh Suci netalahinong panumang*

Sumber : Kumpulan Lagu Rohani Bahasa Daerah Sangihe.

F) *Harap Akan Tuhan*

(Kidung Jemaat No. 445)

Harap akan Tuhan, hai jiwaku  
Dia perlindungan dalam susahmu  
Jangan resah, tabah berserah  
Kar'na habis malam pagi merekah  
Dalam derita dan kemelut  
Tuhan yang setia, penolongmu

Susah Kasaria

*Susa kasaria su Mawuku  
Seng neliung ia bou rosaku  
Metatahang haghing papahang  
Mawuku simangi su Getsemani  
Mawu megogho makiambang  
Ku kahioro su Mawu lamang*

Sumber : Kumpulan Lagu Rohani Bahasa Daerah Sangihe.

G) *Salib Tuhan/Nun Di Bukit Yang Jauh*

(Johan De Neer Bundel No. 836 atau NKB No. 83)

Atas bukit yang jauh ada salib ku tahu  
Tanda hina dan dosa segnap  
Salib itu harta intan dan permata  
Kasih Tuhan sempurna tetap  
Biar aku peluk salibNya  
Hingga Tuhan klak datang segra  
Ganti salib klak Yesus bri sesudah prang  
Mahkotanya kekal dan senang

Su Wongkong Joljuta

*Su wongkong Joljuta, Ahusu Ruata  
Seng negganape karakine  
Dahane timedo, netengong papate,  
Kebi dosa seng niampungang  
Ene masasuri sunaung  
Tamaliwuhe su endumang  
Mawu Ruataku matalentu telentu  
Neliueng ia marosa*

Sumber : Bukeu Kantari Berang Sangihe, E. Sentinuwo.

H) *Sekarang Bri Syukur/Sekarang Bersyukur*

(Tahlil No. 78 atau Kidung Jemaat 287 b)

Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan  
Sempurna dan besar segala karya Tuhan  
Di-briNya kitapun anugrah dan berkat  
yang tak terbilang trus, semula dan tetap

Iawi Adate

*Iawi adate, su tengon kasusi-Nu  
Natode kendagu Nanalude ellangu  
Su hiwang nanentung Sarang ello ini  
O Mawu Kendagu Mang tamalaih*

Sumber : Kumpulan Lagu Rohani Bahasa Daerah Sangihe.

1) *Sambut Panggilan*

(Kesukaan Kristen No. 58)

Baik bangun dan bersedia  
Berjaga dan nantilah  
Sepri jam mu yang setia  
Merindukan waktunya  
Panggilanmu yang mulai  
Sekarang tlah hampirlah  
Lengkapkan dirimu segra  
Sebentar bri jawab  
Supaya jangan adalah  
Halangan dan sebab

*Reff: Jaga dan nanti, tukarlah peri  
Sedia hari, hidup yang bersih  
Buang dan ganti  
Perangai yang keji*

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani.

J) *Haraplah*

(Kesukaan Kristen No. 38)

Harap saja pada Allah  
Sandar pada Tuhan yang El-Hak  
Firman Hua Tiada salah  
Asal kau percaya bertetap  
Yang berharap trus selalu  
Dan percaya Tuhannya  
Tiada ia akan malu  
Hanya akhirnya megah

*Ia tiap waktu mau menolonglah  
Sapu air mata lenyaplah sesal*

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

K) *Maju dan Berperang*

(Kesukaan Kristen No. 63)

Pegang tangan jangan bercerai  
Schatilah tetap teguh  
Sama-sama iring Al-Masch

Mukhalis yang Panglimamu  
Laskar Yesus jangan takut dan gentar  
Maju saja dengan gah  
Meski musuh banyak dan besar  
Sekali harus tewaslah  
*Reff:* Hai maju dengan segra  
Kendati prang payahlah  
Melawan dan rombaklah  
Segala bentengnya

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani.

*L) Yesus Yang Ajaib*

(Nafiri Perak No. 1.5)

Yesus Hu yang ajaib Raja dan Imam  
Meninggalkan sorga untuk selamatku  
Dan tebus jiwaku dengan darahNya  
Skarang selamatlah ku puji namaNya

*Reff:* Yesus Hu yang ajaib kuberhutanglah  
Ku berhutang jiwa pada engkau  
Biar spanjang hari ku memuji trus  
Rajaku dan Nabi Imam yang kudus

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

*M) Cuma Ada Satu*

(Nafiri Perak No. 1.49)

Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu  
Tengah ribut susah, ombak menderu  
Siapakah yang sempat hiburan teman  
Siapa yang mau rapat tanggung setialah

*Reff:* Cuma ada satu yang setialah  
Yakni Yesus sobat yang benar kekal  
Ia tiap waktu mau menolonglah  
Sapu air mata lenyaplah sesal

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

*N) Pada Mu Ku Datang*

(Nafiri Perak No. 1.68)

Dari Belunggu kras dan teguh  
padaMu Hu kudatanglah  
tlah terlepas merdeka penuh  
ya Hu, ku datanglah  
dalam lemah ku jadi tegap

kuat segar, ya oleh rohMu  
miskin ku beri ku kaya tetap  
hidupku milikMu

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani.

O) *Penghibur Tlah Datang*

(Nyanyian Kemenangan Iman No. 30)

Tersiar kabar trang, keliling alam grang  
Tempat hati debar, ditindih susah brat  
Saudara bergemar, bersoraklah benar  
Penghibur datanglah

Reff: Penghibur datanglah, Penghibur datanglah  
Roh dari sorgalah karunia BapaHu  
Maklumkanlah jua, pada manusia  
Penghibur datanglah

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani.

P) *Berkat Yang Tuhan Beri*

(Nyanyian Kemenangan Iman No. 87)

Berkat yang tentu Tuhan memb'ri  
Harap mulai kami nyanyi  
Sucikan kami oleh darah  
Waris selamat ditebus Allah

Reff: Kami masyhurkan, kami nyanyi  
Kasihnya Yesus pada kami  
Kami masyhurkan, kami nyanyi  
Kasihnya Yesus pada kami

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

Q) *Tuhan Pelihara*

(Nyanyian Kemenangan Iman No. 216)

Jangan takut kesusahan  
Tuhan pliharakan  
Pada Tuhan ada lindungan  
Tuhan pliharakan

Reff: Tetapkan hatimu  
Tentu Tuhan pliharakan  
Pliharakan dikau  
Sepanjang umurmu

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

R) *Sandar Pada Tuhan*

(Dua Sahabat Lama No. 170)

Betapa baik dan senang



Bersandar padaMu  
Di dalam gnap percobaan  
Kau ada izatku

*Reff:* Srahkan Dia susahmu g'nap  
Srahkan Dia susahmu g'nap  
Srahkan Dia susahmu g'nap  
Ia jaga 'kan dikau tetap

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

S) *Jangan Kamu Takut*

(Dua Sahabat Lama No. 173)

Jangan kamu takut Aku adalah  
Itu Tuhan janji biar ingatlah  
Itupun bri hiburan kalau tak senang  
Lagipun bri kuat bila engaku masuk p'rang

*Reff:* Hai tidak pernah  
Hai tidak pernah  
Klak Ia tinggalkan dikau  
Bahkan tiada pernah

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

T) *Taburlah*

(Dua Sahabat Lama No. 181)

Yang menabur dengan tangis  
Sambil harap Tuhan Hu  
Mengetam klak dengan sorak  
Selamat yang kekal penuh

*Reff:* Embun surga pun mendiris  
Matahari membenas  
Hingga sarat tagkai pulur  
Jadi masalah lekas

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

U) *Ingat Dalam Susah*

(Mazmur dan Nyanyian Rohani No. 135)

Ingat dalam susah dan dibala  
Jangan putus asa Tuhan adalah  
Jangan gentar, Allahmu Besar  
Nanti waktu siang, engkau bergemar  
Toufan sengsara ananti teduh  
Kau dipelihara Pelindungmu

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

V) *Segala Benua*

(Mazmur dan Nyanyian Rohani No. 144)

Segala benua dan langit penuh  
Dengan bunyi nama yang sangat merdu  
Penghiburan orang berhati penat  
Pengharapan orang yang sudah sesat  
Nama itu, suci kudus  
Siapa belum mengenal; penebus

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

W) *Serikat Persaudaraan*

(Mazmur dan Nyanyian Rohani No. 189)

Serikat pesaudaraan berdirilah teguh  
Sempurnakan persatuan  
Di dalam Tuhanmu  
Bersama-sama majulah  
Dikuatkan iman  
Berdamai sejahtera  
Dengan pengasihannya  
Serikatmu tetap tegu di atas alasan  
Yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman  
Dan satu juga baptisan dan Bapa satulah  
Yang olehmu sekalian dipuji disembah

Sumber : Kumpulan Kidung-kidung Rohani

3.2. Lagu-lagu Rohani Kristen Populer (tidak diangkat dari buku nyanyian gereja)

Yang dimaksudkan dalam lagu-lagu rohani Kristen populer adalah jenia lagu-lagu yang dikenal lewat media elektronik seperti kaset-kaset rekaman, dan lainnya. Adapun syair lagunya diciptakan oleh siapa saja yang pada umumnya untuk dikomersilkan dan dijual ke masyarakat umum. Di dalamnya terdapat variasi lagu serta bunyi iramanya yang menarik. Perkembangan dalam kegiatan bermasamper kini para pelakornya juga menggunakan lagu-lagu rohani populer tersebut. Dengan demikian pengadopsian lagu-lagu dalam kegiatan masamper bukan hanya diangkat dari buku-buku nyanyian gereja dan karya-karya mereka sendiri tetapi juga terbuka dan dilengkapi dengan lagu-lagu baru yang ada dimedia elektronik tersebut. Berikut ini contoh lagu-lagu yang diangkat dari kaset rekaman dan lainnya.

A) *Aku Hendak Memasyhurkan*

Aku hendak memasyhurkan  
Kasih Tuhan yang kudus  
Yang olehNya Tuhan janji  
Sobatku yang penebus  
Reff: Nyanyilah menyanyilah

Dan Puji Yesus  
Dan serahkan-serahkan hidupku  
Agar kami hidup dan dilepaskan  
Dari kutuk-kutuk neraka, Haleluyah

B) *Yesus Raja Salam*

KasihNya disitulah, disitu tempat yang senang  
Ke tempat pengharapanku, bahkan kota  
Bahkan kota bentengku  
Dan perteduhanku jiwaku  
Jiwaku yang amat senang  
Reff: Di sanalah di sanalah Yesus Raja Salam  
Yang menjadi yang panglima di dalam Elkafi  
Dialah dialah yang membri dan mahkota gemar  
Bagi orang yang menang

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

C) *Dia Yang Kuasa*

Dalam hidup ini banyak sekali cobaan  
Sebab itulah hai temanku  
Jangan kau lupakan  
Bekerjalah dan berdoa dan berharaplah  
Kepada Tuhan saja  
Serahkanlah bebanmu  
Hanya kepadaNya ada pertolongan  
Baik dalam suka ataupun duka  
Tetapkan hatimu bersandar padaNya  
Jangan, jangan berlayar sendiri  
Di tengah gelombang kau akan tenggelam  
Siapa yang dapat menolong  
Siapa yang dapat menolong dirimu  
Kalau-kalau bukan Dia Yang Kuasa  
O... siapa lagi

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

D) *Puji Hua*

Bagi Tuhan Hua  
Patut kita persembahkan  
Hormat syukur dan limpah  
Karna murahNya pun nyatalah jua  
Bagi kita semua  
Pujilah pujilah Hua  
Pujilah akan Hua senantiasa

Besarkan namaNya makhluk semua

Karna murahNya juga

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

E) *Yesus Persandaranku*

Yesus sahajalah Persandaranku

Bahkan kota benteng perteduhan

Menghalau segra-lah kesusahan

Mendatangkanlah hal kegemaran

Teristimewa berkemuliaan

Ya Tuhan serwa sekalian alam

Intan mustika dalam hidupku

Hiburan susah sio permataku

Reff: Manusia-manusia mengira-ngira jalan

Mengaturkan jejak saja Tuhan

Hangat seperti bara digenggam

Bernantilah walahualam

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

F) *Tuhan Pandu Jalan Hidupku*

Tuhan pimpin aku hingga ajalku

Biar masa dewasa aku nyanyilah

Bri syukur hormat dan pujian

Reff: Tuhanku saja pandu jalan hidupku

Jadilah menjadi sulu perjalananku

Jangan berdebat hai teman dan sahabat

Janganlah gemetar didalam hidup berbahagia

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

} 2x

G) *Riang Besar Hatiku*

Riang besar hatiku rasanya

Tidaklah hlang bersegra

Ingat-ingatlah pengasih

Tuhan Allahku tiap dewasa

Tiap dewasa senantiasa dirasa

Nikmat Tuhan nikmat Tuhan

Skarang dimaklumkan dan dipujikan

Haleluyah-haleluyah

Mubaraklah namaMu

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

} 2x

H) *Yesus Sobat Setia*

Yesus Sobat yang setia

Sobat yang setialah

Sobat itu membi obat  
Pada hati gelisah  
Dalam dunia dalam susah  
Engkau setialah  
*Reff:* Masyurlah namaNya  
Terpancar sini sana  
Baiklah hatiNya tiadalah bandingnya  
Yang rasa sakitlah sangat dukacita  
Datang dengan seg'ra yang sakit diobatNya

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

1) *Hai Puji Injil*

Ya Tuhan yang kudus berita penebus  
NamaMu kesukaanku dan kerinduanku  
Engkaulah, engkaulah pandu hidupku  
Di dalam dunia  
Naikkan-naikkan s'gala pujian  
Panjatkan padaNya  
Curahkan-curahkan kemenangan  
Haramkan kegelapan  
Nyatakan-nyatakan kasih Allah  
Kepada manusia  
Berita-berita penghiburan  
Jauhkan ketakutan Hilang-hilangkan  
Hilang kebimbangan harap  
Harapkan ketenangan  
Allah Bapa, Allah Bapa Hua, Allah Bapa  
Cinta benar cinta-cinta benar  
Sungguh cinta-cinta benar  
Hai puji hai puji Injil yang berkuasa  
Serta beramailah serta beramailah 2x  
Skarang ini, s'karang ini cinta slamanya

Sumber : Lagu-lagu Rohani Masamper

2) *Terpujilah Yesus*

Terpujilah Yesus Raja Salam, murahNya, sayagNya,  
Bagi seg'nap isi alam  
Serani, Yahudi, Kafir, Islam,  
Semuanya dapatlah rezeki yang berkelimpahan  
Sorak nyanyilah Haleluya mubaraklah  
Serta mulia semayam di dalam sorga  
Di tempat yang ketinggian  
Turun menjelma manusia  
Di dalam tempat yang terhina  
Yang meninggalkan singgasana  
Karena sayang jiwa manusia

*Reff:* Syukur, sykur disembahkan  
Pujian naik, hormat dilimpahkan  
Bagi-Mu Tuhan El-Jabar,  
Kekal namaMu yang El-Hak

Sumber : Kumpulan Lagu-lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangihe.

**K) Kabar Kegemaran**

Kabar kegemaran Pohon penghiburan,  
Dari sorga turun ke dunia  
Kabar kegemaran Pohon penghiburan,  
Dari sorga turun ke dunia  
MurahNya dinyatakan, kasihNya pun dicurahkan 2x  
Hai manusia-manusia sio  
Di dalam dunia dalam dunia aduh  
Mendapat sentosa dan luput dari dosa 2 x

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangihe.

**L) Terpujilah Hu**

Terpujilah Hu Allah puji Haleluya,  
MurahNya limpahNya bagi jita semua  
Hai bangsa manusia di dalam dunia,  
Karena limpah kasihNya bagi kita semua

*Reff:* Ia yang memimpin kita  
Dari tahun yang lalu ke tahun baru  
Itu tanda kasihNya  
Allah rahmani  
Sorga yang tertinggi  
Bapa El-Kafi  
Sungguh besar dan rahmani

Sumber : Kumpulan Lagu Masamper, Diknas Kab. Kepulauan Sangihe.

**M) Ya Allah Bapa di Sorga**

Ya Allah Bapa di sorga, berkuasa alam semesta  
NamaNya pun disucikan, kerajaanNya dimuliakan

*Reff:* Kehendak Tuhan jadilah,  
Seperti di dalam sorga  
Demikian pun atas bumi,  
Setempat pinjaman kami  
Jangan ajar kami pada percobaan,  
Ampunilah kesalahan  
Kar'na milik Tuhan,  
Besar kemuliaan dan sampai kekal  
Amin, Amin.



## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian baba sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seni budaya masamper (tunjuke, mebawalose) oleh masyarakat etnis Sangihe Talaud merupakan seni budaya yang tidak terlepas dari unsur-unsur kebudayaan yang universal. Kehidupan masyarakat etnis Sangihe Talaud secara umum terlihat bahwa aspek religi atau sistem keyakinan/kepercayaan mempunyai arti yang sangat penting dan memberi pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Lahirnya seni pertunjukan masamper merupakan salah satu wujud pemujaan terhadap apa yang dipercayai dan disembah oleh masyarakat yang dianggap mempunyai kekuatan yang luar biasa di luar dari kekuatan dan kemampuan yang ada pada manusia. Mereka menyadari adanya kekuatan Ghenggona Langi Duatang sebagai Allah pencipta langit, bumi dan isinya. Kesadaran ini diaplikasikan dalam wujud budaya masamper yang dilakukan masyarakat sebagai sarana memuji dan memuliakan Tuhan dan sekaligus digunakan sebagai tempat pelayanan pemberitaan Firman Tuhan melalui lagu-lagu pujian rohani. Pertunjukan masamper mengandung nilai-nilai spiritual religius yang perwujudannya tertuang dalam lagu-lagu yang mengedepankan tentang kebenaran dan kebaikan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Melalui lagu-lagu yang dinyanyikan umumnya berisikan titipan pesan yang perlu dihayati dan dilakukan dalam setiap aktivitas hidup baik kepada para pelaku seni maupun para pendengar atau penonton yang ada. Sebagai budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur, hal ini mendorong masyarakat etnis Sangihe Talaud untuk tetap memelihara dan mengembangkannya.

Seiring dengan adanya kemajuan masyarakat sebagai pemangku, pendukung budaya tersebut, maka mau tidak mau hasil budaya atau bentuk kesenian harus dapat menyesuaikan dengan kemajuan dan perubahan masyarakatnya agar tetap bisa bertahan. Hal ini terjadi dalam kegiatan masamper yang walaupun mengalami perkembangan dan perubahan dari aslinya (pola penyajian dan gerakan tari-tarian), namun nilai yang ada masih tetap dipertahankan. Untuk itu, dalam setiap pertunjukan masamper senantiasa diawali dengan lagu-lagu pujian rohani kemudian akan dilanjutkan dengan lagu umum lainnya (terutama pada bentuk masamper sabuah).

Bagi para pelaku seni dalam kegiatan masamper dituntut memiliki perbendaharaan lagu yang cukup banyak, agar dapat melantunkan/ membawakan lagu-lagu sesuai dengan persyaratan yang ada. Jalannya kegiatan masamper akan hidup dan berlangsung baik apabila lagu-lagu yang dibawakan secara berbalasan ini berisikan syair yang maknanya (berhubungan dengan lagu sebelumnya), oleh karena itu para pelaku seni ini harus menguasai banyak jenis lagu.

Terjadinya pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen dalam kegiatan masamper disebabkan karena terbatasnya penguasaan lagu-lagu rohani ciptaan lokal (dari etnis Sangihe Talaud) baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Untuk itu, dengan adanya buku-buku kumpulan lagu gereja yang sering dinyanyikan dalam ibadah jemaat di gereja maupun persekutuan-persekutuan keluarga memudahkan mereka menguasai lebih banyak lagu. Adapun lagu-lagu rohani yang diadopsi dalam masamper berasal dari berbagai sumber terutama buku-buku nyanyian gereja yang digunakan untuk penyebaran agama Kristen seperti Dua Sahabat Lama (DSL), Kesukaan Kristen (KSK), Nafiri Perak (Naper), Mazmur dan Nyanyian Rohani (MNR) dan lainnya, juga melalui nyanyian pujian rohani umum (berisikan pesan dan nasehat sesuai ajaran Kristen) seperti dalam kaset rekaman. Proses pengadopsian lagu-lagu rohani Kristen melalui buku-buku nyanyian gereja dilakukan dengan berbagai cara yaitu ada lagu yang diangkat utuh syair dan iramanya, iramanya saja yang dipadukan dengan syair lagu ciptaan sendiri dan atau syair lagu yang dialihbahasakan ke dalam bahasa daerah.

#### 4.2 Saran

Seni pertunjukan masamper sebagai produk budaya yang telah lama ada dan diwariskan oleh etnis Sangihe Talaud ini diharapkan dapat dilestarikan. Untuk itu perlu adanya upaya dari para pelaku seni dan masyarakat pendukung budaya ini untuk mengembangkan kreativitas agar pertunjukan ini lebih menarik, namun tidak meninggalkan warna dan sifatnya yang dominan yaitu penanaman nilai moral yang religius. Kreasi dan kreativitas dalam penciptaan lagu-lagu perlu dikembangkan karena seni budaya ini membutuhkan banyak penguasaan lagu yang harus dimiliki para pelaku seni. Demikian juga dengan gerakan tari yang diapresiasi dalam masamper terutama dalam masamper sabuah yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budhisantoso, S., 1983/1984. "Arti Pentingnya Sejarah Masyarakat Dalam Pembinaan Budaya Bangsa" *Kebudayaan Tahun IV*.
- Kasidi H.P., 2000. "Pengembangan Pagelaran Wayang di Yogyakarta Pada Masa Kini". *Peragaan, Ceramah dan Diskusi Wayang Kancil*, 11 Maret 2000.
- Kayam, Umar, 2002. "Seni Pertunjukan dan Sistem Kekuasaan" dalam *Gelar Vol. 2 No. 1 Oktober 2002*.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.
- Maria, E.T., dkk., 2004. *Fungsi Sosial Masamper Sebagai Seni Pertunjukan Rakyat Sangihe dan Talaud*. Proyek PKD Sulawesi Utara, BKSNT Manado.
- Nebath, Paul, dkk., 1995. *Memahami Kegiatan Masamper Pada Masyarakat Sangir Dalam Era Globalisasi*. Fakultas Sastra Unsrat Manado.
- Priskila, 1994. *Lagu-lagu Rohani Masamper Sangihe Talaud*. PT. Stora Adiswara (Kaset Rekaman).
- Sentinuwo Edelman, 2004. *Buku Kantori Berang Sangihe (Naskah)*.
- Soedarsono, R.M., 1999. *Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Kumpulan Lagu Masamper*. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Tinungki, Iverdixon, 1995. "Masampere dan Eksistensialisme" *Harian Manado Post*, Kliping Budaya BKSNT Manado.
- Yenny Jhon, 2000. *Kumpulan Kidung-kidung Rohani*. Cetakan ke 12 Pustaka Mulia Manado (Buku Saku).

# KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Maria Tangkilisan  
Joyly Rawis

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di wilayah Indonesia terdapat beberapa daerah berbatasan dengan negara lain. Di sebelah Timur Indonesia bertetangga dengan Papua Nugini, di sebelah Selatan dengan Australia, di sebelah Barat antara lain dengan Singapura, Malaysia, di sebelah Utara Brunei Darussalam dan Filipina.

Khusus di daerah Sulawesi Utara tepatnya dengan daerah Kepulauan Sangihe dan kepulauan Talaud, berbatasan dengan negara Filipina bagian Selatan terutama dengan pulau besar Mindanao dan pulau-pulau kecil Filipina seperti Balut dan Sarangany. Daerah Sangihe dan Talaud secara geografis sudah berdekatan jaraknya terutama pulau Marore dengan Balut hanya 40 mil laut, pulau Miangas dengan St. Agustin hanya 60 mil laut. Sedangkan membandingkan jaraknya dengan ibukota propinsi Sulawesi Utara Manado ke Marore 260 mil atau ke Tahuna 75 mil laut dan dari Miangas ke Manado 274 mil laut.

Keadaan geografis kedua negara ini, fakta memberi peluang bagi interaksi (*outward looking*) alamiah diantara masyarakat kepulauan Sangihe dan Talaud dengan masyarakat di bagian Selatan Filipina. Suatu kenyataan, interaksi masyarakat kepulauan Talaud banyak tergantung hayat hidupnya pada masyarakat dan wilayah-wilayah di perbatasan Selatan Filipina.

Sudah menjadi gejala umum dimana-mana, daerah perbatasan antar negara merupakan “kawasan-rawan” dalam artian keamanan dan pertahanan. Dikatakan rawan keamanan dan pertahanan karena sebagai daerah perbatasan antar dua negara menghadapi permasalahan batas wilayah (laut), terjadinya pencurian/penangkapan ikan ilegal, selain itu pula sebagai daerah perbatasan biasa disebut sebagai daerah terisolasi/tertinggal dalam pembangunan kurang mendapat perhatian.

Menyadari bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan daerah kepulauan dimana pulau-pulaunya terpisah jauh dengan ibukota kabupaten seperti pulau-pulau yang ada di wilayah Nanusa terutama pulau Miangas adalah yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, maka perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena berbagai ancaman bisa saja terjadi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi.

Ancaman tersebut dapat saja datang dari luar maupun dari dalam. Sumber ancamanpun beragam, dapat saja diakibatkan karena pemahaman ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Memahami gejala-gejala yang menjadi ancaman pada masyarakat daerah perbatasan khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi masyarakat daerah perbatasan dalam mempertahankan budayanya.

Konsep ketahanan kebudayaan yang diangkat di sini mengacu pada rumusan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, tentang konsep sosial sebagai suatu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan nasional.

## 1.2. Permasalahan

Penelitian yang diberi judul “Ketahanan Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud” dimaksud untuk melihat strategi masyarakat perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mempertahankan budayanya. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana bentuk/pola budaya setempat (asli) dan pola budaya apa yang berbaaur dengan budaya luar.
- Bagaimana strategi masyarakat perbatasan mempertahankan budayanya terutama di era otonomisasi ini ?

## 1.3. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penulisan ini sedapatnya untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas. Selain itu memberikan informasi berbagai aktivitas hidup masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat dari adanya kontak budaya dengan masyarakat luar serta bagaimana strategi masyarakat dalam mempertahankan budaya sebagai warisan leluhur.

## 1.4. Ruang Lingkup

Negara Indonesia memiliki beberapa daerah yang berbatasan dengan negara lain, salah satunya adalah di Ibukota Propinsi sulawesi Utara yang memiliki dua daerah kabupaten yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Diantara dua kabuten tersebut yang menjadi daerah penelitian adalah kabupaten kepulauanTalaud.

Adapun ruang lingkup kajian adalah masyarakat suku bangsa Talaud dengan melibat strategi masyarakat dalam menangkal budaya yang masuk serta perubahan-perubahan yang terjadi.

### 1.5. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa cara antara lain:

#### 1. Studi kepustakaan

Berbagai data dan informasi tentang kehidupan masyarakat Suku Bangsa Talaud dipelajari dari berbagai sumber tertulis, memberikan wawasan bagi peneliti.

#### 2. Survey

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. hal ini selanjutnya dideskripsikan hingga dapat menggambarkan kehidupan masyarakat tersebut.

#### 3. Wawancara

Melakukan wawancara bebas dengan para pemimpin adat, tokoh agama, pemerintah dan warga masyarakat. Dari mereka memperoleh masukan dan keterangan tentang bagaimana strategi masyarakat dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi mereka, yang pada akhirnya semua keterangan tersebut digunakan dalam penulisan laporan penelitian.

## II. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

### 2.1. Letak, Kondisi Geografis, Transportasi

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral Propinsi Sulawesi Utara yang beribukota di Melonguane. Secara historis Kabupaten Kepulauan Talaud pada mulanya merupakan bagian kabupaten Sangihe Talaud. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan UU No 8 Tahun 2002, tentang pemekaran kabupaten, maka Kabupaten Sangihe Talaud dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Sangihe yang beribukota di Tahuna dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang beribukota di Melonguane.

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daerah bahari dengan sebagian besar wilayahnya adalah laut. Adapun luas wilayah lautnya sekitar 19.000 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah daratan sekitar 1.251,02 Km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah daratan tersebut terbagi atas 3 pulau besar dan satu gugus kepulauan. Masing-masing pulau besar tersebut adalah pulau Karakelang (78,06 persen), pulau Salibabu (7,84 persen) pulau Kabaruan (9,24 persen). Adapun keadaan geografis wilayah ini sebagaimana diperoleh dari dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud terletak antara 4° 01' 00" Lintang Utara dan 126° 40' 00" Bujur Timur dengan batas-batas geografis sebagai berikut :

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Sebelah Utara dengan   | : Negara Filipina              |
| Sebelah Timur dengan   | : Laut Pasifik dan Laut Maluku |
| Sebelah Selatan dengan | : Kabupaten Sangihe            |
| Sebelah Barat dengan   | : Laut Sulawesi                |

Jarak Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Utara 243 mil laut, dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut (kapal motor) dengan waktu kurang lebih 13 jam, apabila menggunakan pesawat menggunakan waktu kurang lebih 45 menit. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten kepulauan Talaud sebagai berikut:

Tabel 1. Jarak Antara Ibukota Kabupaten Dengan Wilayah Kecamatan

| <i>Dari Ibu Kota Kabupaten</i> | <i>Ibu Kota Kecamatan</i> | <i>Jarak Mil laut/km</i> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Melonguane ke:                 | Kecamatan Mangaran        | 9 Mil laut               |
|                                | Kecamatan Lirung          | 6 Mil laut               |
|                                | Kecamatan Beo             | 15 km                    |
|                                | Kecamatan Rainis          | 27 km                    |
|                                | Kecamatan Nanusa          | 54 Mil laut              |
|                                | Kecamatan Gemeh           | 43 km                    |
|                                | Kecamatan Essang          | 30 km                    |

Tidak seperti pulau-pulau lain di Kabupaten Sangihe, hampir setiap pulau memiliki gunung berapi yang rawan dengan musibah gempa akibat gunung meletus, daerah kepulauan Talaud hanya memiliki satu buah gunung yaitu gunung Piapi yang tingginya kurang lebih 864 meter terdapat di Kecamatan Rainis. Sebagaimana informasi yang diperoleh gunung tersebut belum pernah mengeluarkan lahar panas atau tidak berbahaya. Namun bukan berarti daerah kepulauan Talaud bebas dengan musibah atau tidak mengalami bencana, melihat kondisi geografisnya yang merupakan daerah kepulauan yang berada di bibir pasifik, sehingga daerah ini rawan bencana laut. Wilayah ini rentan dihantam badai anak taifun dari wilayah bagian utara (*Filipina dan wilayah Pasific di Utara*). Penduduk di daerah ini mengenal angin puting beliung yang sering “mengamuk” terutama yang merasakannya mereka yang berada di pulau-pulau kecil seperti di Wilayah Kepulauan Nanusa dan Miangas.

Iklim di daerah ini dipengaruhi oleh angin Muson pada bulan Juli sampai dengan bulan September biasanya musim kemarau sedangkan pada bulan September sampai dengan Nopember dikenal dengan musim penghujan. Pada musim tersebut menurut masyarakat angin agak kencang atau masyarakat mengenalnya dengan angin barat sehingga masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil apabila akan mengadakan perjalanan menggunakan perahu motor akan menyesuaikan dengan keadaan kondisi alam. Pada bulan Desember sampai dengan awal bulan April dikenal dengan musim pancaroba dan bulan April sampai dengan bulan Juni dikenal dengan musim teduh artinya tidak ada gelombang laut yang mengamuk. Pada musim ini paling baik mengadakan pelayaran terutama di pulau-pulau Miangas dan Wilayah Kepulauan Nanusa.



## 2.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan data tahun 2004 berjumlah 78.815 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2003, 76.474 jiwa dengan demikian hanya dalam kurun waktu satu tahun mengalami kenaikan sebesar 3.06 persen.

Ratio jenis kelamin penduduk Kabupaten kepulauan Talaud sebesar 105,6 hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Namun keadaan ini tidak terjadi pada semua kecamatan, tetapi ada beberapa kecamatan memiliki ratio jenis kelamin penduduk berada di bawah 100, yaitu kecamatan Melonguane dan Nanusa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel I di bawah ini.

Tabel 2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Di Kabupaten Kepulauan Talaud

| No | Kecamatan     | Laki-Laki     | Perempuan     | Jumlah        | SEX ratio    |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | Kabaruan      | 4768          | 4649          | 9417          | 102.6        |
| 2  | Lirung        | 8666          | 8628          | 17094         | 100.9        |
| 3  | Melonguane    | 5441          | 5705          | 11146         | 95.4         |
| 4  | Beo           | 6241          | 5949          | 12190         | 104.9        |
| 5  | Rainis        | 7004          | 6434          | 13438         | 108.9        |
| 6  | Essang        | 3462          | 2188          | 5650          | 158.2        |
| 7  | Gemeh         | 2876          | 2718          | 5594          | 105.8        |
| 8  | Nanusa        | 2028          | 2058          | 4086          | 98.5         |
|    | <i>Jumlah</i> | <i>40.486</i> | <i>38.329</i> | <i>78.815</i> | <i>105.6</i> |

Sumber: Talaud dalam angka 2005

Persebaran penduduk di delapan kecamatan terlihat bervariasi, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lirung yaitu 17.294 jiwa atau sekitar 21,94 persen dari jumlah penduduk kabupaten dan memiliki tingkat kepadatan sebesar 176 orang perkilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten kepulauan Talaud adalah 63 jiwa perkilometer persegi. Pulau Karakelang dimana terdapat Ibukota Kabupaten dan merupakan pulau terluas, penduduk yang mendiami sekitar 60,93 persen dari total penduduk dengan tingkat kepadatan 49,17 orang perkilometer persegi. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk jelas ada ketimpangan. Kecamatan Lirung yang memiliki luas 98,07 km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk paling tinggi dan tingkat kepadatan tertinggi dibanding dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Beo yang memiliki luas secara total terbesar di Kabupaten kepulauan Talaud yaitu sekitar 279,65 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 12,190 jiwa, tingkat kepadatan hanya 44 orang perkilometer.

Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berstatus kepala keluarga berjumlah 31.237 kepala keluarga. Apabila dibandingkan dengan tahun

2003 jumlah kepala keluarga sebanyak 20.698 kepala keluarga, berarti dalam setahun mengalami kenaikan 3,04 persen, dibandingkan dengan jumlah rumah tangga tahun 2003 dengan jumlah 20.698 KK dan tahun 2004 akhir meningkat menjadi 21.327 KK. Dengan demikian rata-rata pada tahun 2004 anggota keluarga adalah 3.70 orang dan anggota keluarga menurut kecamatan bervariasi antara 3.21 orang hingga 4.14 orang.

Tabel 3. Banyaknya KK, Penduduk & Penduduk/KK Kabupaten kepulauan talaud

| No | Kecamatan          | KK            | Penduduk      | Penduduk/KK |
|----|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | Kabaruan           | 2703          | 9417          | 3.48        |
| 2  | Lirung             | 4681          | 17294         | 3.69        |
| 3  | Melongguane        | 2691          | 11146         | 4.14        |
| 4  | Beo                | 3286          | 12190         | 3.71        |
| 5  | Rainis             | 3495          | 13438         | 3.84        |
| 6  | Essang             | 1758          | 5650          | 3.21        |
| 7  | Gemeh              | 1543          | 5594          | 3.63        |
| 8  | Nanusa             | 1170          | 4086          | 3.49        |
|    | <i>Jumlah 2004</i> | <i>21.327</i> | <i>78.815</i> | <i>3.70</i> |
|    | <i>Jumlah 2003</i> | <i>20.698</i> | <i>76.474</i> | <i>3.69</i> |

Sumber : Talaud Dalam Angka 2005

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diperlukan bagi setiap suku bangsa, salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat yakni dengan berusaha menyediakan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pendidik dalam hal ini guru yang memadai.

Sebagai kabupaten yang baru hal ini sangat menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah yang dimulai dengan dibangunnya berbagai fasilitas pendidikan berupa gedung-gedung sekolah, penambahan dan peningkatan tenaga-tenaga pelajar mulai dari tingkat TK sampai tingkat SLTA. Untuk jelasnya sarana-sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana Pendidikan Gedung Sekolah TK, SD, SLTP & SLTA Kabupaten Kepulauan Talaud

| No | Kecamatan     | TK        | SD        | SLTP      | SLTA     |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1  | Kabaruan      | 12        | 18        | 2         | -        |
| 2  | Lirung        | 11        | 18        | 4         | 1        |
| 3  | Melongguane   | 8         | 11        | 3         | 2        |
| 4  | Beo           | 9         | 18        | 4         | 1        |
| 5  | Rainis        | 11        | 22        | 5         | -        |
| 6  | Essang        | 9         | 6         | 5         | -        |
| 7  | Gemeh         | 4         | 10        | 1         | -        |
| 8  | Nanusa        | 6         | 8         | 2         | -        |
|    | <i>Jumlah</i> | <i>70</i> | <i>93</i> | <i>26</i> | <i>4</i> |

Sumber : Talaud Dalam Angka 2005

Sebagaimana data yang ada pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada semua kecamatan telah memiliki bangunan/gedung sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama baik yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah maupun oleh yayasan-yayasan atau swasta. Hal ini merupakan langkah awal pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia. Walaupun sarana yang ada pada tiap kecamatan umumnya masih terbatas pada tingkat SLTP. Sedangkan untuk tingkat SLTA masih sangat kurang karena belum semua kecamatan memiliki sarana pendidikan SLTA. Dengan demikian siswa-siswa SLTP yang ada di kepulauan Talaud apabila hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA akan memilih lokasi SLTA yang ada di tiga kecamatan tersebut. Demikian halnya para siswa yang akan melanjutkan pendidikan S1 akan ke keluar daerah seperti ke Ibukota Propinsi Sulawesi Utara (Manado) atau ke Ibukota lainnya, karena belum tersedianya perguruan tinggi di Kabupaten kepulauan Talaud.

### 2.3. Transportasi

Mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten kepulauan, maka transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk menghubungkan penduduk dan hasil kegiatannya, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Jalur pelayaran yang menghubungkan antar pulau di kabupaten ini, umumnya dilayani oleh kapal motor milik swasta. di samping itu pula dilayani oleh kapal perintis.

Interaksi kegiatan secara internal di Kabupaten kepulauan Talaud saat ini yang "relatif cukup tinggi" yaitu antara Lirung dengan Ibukota Melongguane dan antara beo dan Melongguane. Lirung sebagai pusat perdagangan yang berdasarkan sejarahnya memang telah berkembang sejak dahulu (bahkan bendera merah putih menurut cerita dikibarkan pertama kali di Litung yaitu stadion Lirung untuk daerah Talaud pada tahun 1933). Demikian halnya untuk Kecamatan Melongguane (kecamatan tersendiri) saat ini desa Melongguane menjadi Ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud. Atas dasar hal tersebut maka banyak pegawai pemerintah kabupaten kepulauan Talaud tinggal di Lirung dan bekerja di Melongguane. Sampai saat ini untuk kegiatan perdagangan di Lirung masih lebih tinggi dari Melongguane.

Beo juga merupakan salah satu pusat perdagangan yang relatif cukup berkembang di Talaud, khususnya untuk pulau Karakelang bagian tengah dan bagian utara. Atas dasar tersebut intensitas pergerakan melalui darat yang cukup tinggi di pulau Karakelang yaitu antara Beo dengan Melongguane (melalui darat dapat ditempuh selama 1,5 -2 jam). Setelah itu intensitas yang relatif tinggi antara Beo dengan kecamatan Rainis yang dapat ditempuh melalui darat sekitar 1 jam. Antara Beo dengan kecamatan Essang dan dengan Gemeh saat ini belum ada kendaraan umum yang melayani karena kondisi jalan yang sangat buruk dan ada beberapa jembatan yang belum ada.

Di samping itu pula, untuk hubungan Mangaran, Lirung, Melongguane

dan Beo, juga dilayani oleh kapal motor milik swasta yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan laut yang ada pada pusat-pusat pemukiman (ibukota kecamatan) ini dengan route dari Manado. Untuk hubungan antara pusat-pusat pemukiman lainnya seperti Gemeh, Karatung, Nanusa (Marampit), Miangas dilayani oleh kapal perintis dengan route dari pelabuhan Bitung sebulan sekali.

Untuk hubungan eksternal, interaksi kabupaten ini dengan daerah lainnya (pusat-pusat kegiatan daerah sekitarnya) utamanya yaitu Tahuna, Manado, Bitung, dan dengan Philipina Selatan yaitu dengan Davao dan General Santos (walaupun hubungannya kecil.

Interaksi Kabupaten kepulauan Talaud dengan daerah-daerah yang disebutkan di atas dapat dilakukan melalui udara dengan route Manado-Melongguane PP dan route Manado-Tahuna- Melongguane PP dengan pelayaran seminggu dua kali.

#### 2.4. Pariwisata

Salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud menurut pemerintah daerah setempat adalah pengembangan pariwisata. Pada kenyataannya hingga saat ini pariwisata di Talaud belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, karena berbagai faktor yang melatar belakangnya, antara lain belum tersedianya fasilitas yang memadai dalam menunjang pengembangan kepariwisataan dan masih kurangnya publikasi tentang objek-objek wisata yang ada.

Berbagai objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah : Kecamatan Melonguane:

Desa Kiama terdapat objek wisata goa batu kapal

Desa Mala terdapat objek wisata goa paniki

Desa Bawombaru terdapat objek wisata batu legenda

Kecamatan Beo :

Pulau Nusa terdapat objek wisata pasir putih, wisata pantai

Desa Torokan terdapat objek wisata goa totambatu

Desa Bulude terdapat objek wisata goa lengane

Kecamatan Gemeh :

Desa Taturan terdapat objek wisata goa masare

Desa Arangkaa terdapat objek wisata goa mane'e, patung larenggam

Kecamatan Rainis :

Desa Ammat terdapat objek wisata hutan tropis

Desa Kuma terdapat objek wisata hutan tropis dan burung kas Talaud

Desa Apan terdapat objek wisata burung kas Talaud

Desa Rainis terdapat objek wisata goa wetta

Desa Pulutan terdapat objek wisata rangka batu ular

Desa Bantane terdapat objek wisata hutan tropis dan burung kas Talaud.

#### Kecamatan Lirung :

Pulau Sara terdapat objek wisata pasir putih, terumbu karang

Desa Musi terdapat objek wisata goa wui du anne

#### Kecamatan Kabaruan :

Desa Damau terdapat objek wisata goa arandangan

Desa Bulude terdapat objek wisata goa arandangan

#### Kecamatan Nanusa :

Pulau Garat terdapat objek wisata pasir putih

Pulau Intata terdapat objek wisata penangkapan ikan secara tradisional  
"MANE'E"

Pulau Malo terdapat objek wisata pasir putih, terumbu karang,

Desa Marampit terdapat objek wisata goa wui u wentenan.

Pengembangan wisata yang saat ini menjadi aset daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia maupun luar negeri yang sangat menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tradisi masyarakat yang ada di Kecamatan Nanusa pulau Intata. Kecamatan Nanusa yang berbatasan langsung dengan negara Filipin memiliki jumlah penduduk 78.815 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 21.327 KK pada umumnya mempunyai mata pencaharian hidup sebagai petani dan nelayan. Wilayah kecamatan Nanusa dengan Ibukotanya Karatung lebih dikenal dengan sebutan Kepulauan Nanusa karena terdiri atas 8 buah pulau, 4 buah pulau diantaranya tidak berpenghuni dan 4 buah pulau berpenghuni pada umumnya dihuni oleh komunitas Talaud dan sebagian kecil dari etnis lain. Empat buah pulau yang berpenghuni tersebut terdapat 6 desa.

Sebagai komunitas yang berdomisili di daerah pinggiran pantai, menangkap ikan menjadi salah satu kebiasaan atau kegemaran mereka ketika selesai mengerjakan ladang. Mereka memiliki keunikan tersendiri dalam hal menangkap ikan. Tradisi menangkap ikan bersama dikenal dengan sebutan "Mane'e". Kebiasaan ini dilakukan pada setiap tahun biasanya jatuh pada bulan Mei atau Juni dan telah berlangsung sejak dahulu sampai saat ini, sehingga pemerintah kabupaten berupaya mengangkat tradisi ini menjadi salah satu objek wisata. Lokasi "Mane'e" yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah daerah terdapat di desa Kakorotan. Lokasi ini telah menjadi lokasi nasional.

#### 2.5. Kehidupan Sosial Budaya

Walaupun masyarakat kabupaten kepulauan Talaud dewasa ini telah menjadi masyarakat yang multi etnik karena terjadi perkawinan campur dengan etnik di luar etnik Talaud serta semakin banyaknya warga masyarakat dari etnik luar yang menempati wilayah ini dengan berbagai kepentingannya, namun bukan berarti telah mengubah

tradisi asli masyarakat setempat. Hingga kini tradisi masyarakat setempat masih ditemui baik yang berkaitan dengan daur hidup (Life cycle) dan agama, serta tradisi-tradisi yang telah menjadi irama kehidupan yang diwariskan dari para nenek moyang mereka.

Berbagai upacara, baik yang berkaitan dengan daur kehidupan (life cycle) dan aktifitas mata pencaharian hidup dan berbagai macam upacara lainnya, masih dipraktekkan oleh penduduk setempat. Upacara perkawinan merupakan salah satu upacara yang hingga kini masih dilaksanakan. Proses perkawinan melalui sejumlah tahap mulai dari melamar hingga tiba pada pelaksanaan perkawinan. Tahap-tahap pelaksanaan upacara perkawinan hingga kini masih dilaksanakan walaupun ada yang sudah mengalami perubahan. Tahap-tahap pada upacara tersebut: Ina'a atau peminangan dari pihak keluarga pria terhadap keluarga wanita, janji peminangan yang mensahkan kedua pasangan telah terikat dalam pertunangan atau telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak (onokka). Setelah mendapatkan kesepakatan dilanjutkan dengan menyampaikan harta/mas kawin yang akan diberikan. Selanjutnya upacara perkawinan "waassu wisara dan adom wisara".

Dari tahap-tahap yang disebutkan yang utama adalah menelusuri silsilah atau penurunan silsilah dari kedua calon dan mengkaji apakah kedua calon masih memiliki hubungan antara keluarga. Penurunan silsilah ini berlaku apabila kedua calon masih terikat seetnis Talaud. Penurunan silsilah merupakan hal yang harus dilakukan karena menyangkut "sumbang" (dosa). Merupakan tabu apabila terjadi perkawinan masih dalam kerabat "pulung su hiwa" hingga "pulung su wisi". Menurut kepercayaan kawin masih dalam kerabat pulung su wisi akan membawa malapetaka bagi keturunan kelak.

Aspek budaya lain pada penduduk di Talaud yang sampai saat ini masih dapat ditemui yakni berbagai upacara di seputar mata pencaharian hidup seperti "malintukku halele" dalam bidang pertanian serta upacara "Manee" yakni menangkap ikan secara masal di laut, di samping itu pula berbagai tradisi yang menjadi corak kehidupan masyarakat yaitu kebiasaan memberlakukan masa pantang atau "cha". masa-pantang "cha", diberlakukan baik di darat maupun di laut. Eha merupakan suatu masa yang ditentukan oleh warga setelah panen kelapa, pala, tidak diperbolehkan untuk memetik buah lagi selama kurun waktu yang ditentukan. Demikian halnya dengan eha dalam penangkapan ikan.

### III. STRATEGI MASYARAKAT DALAM KETAHANAN BUDAYA

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Utara, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina, di samping Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara historis kedua daerah perbatasan pernah menjalin hubungan satu dengan lainnya. Dapatlah



dikatakan diantara mereka pernah terjadi kontak budaya.

Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud telah banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat berlangsungnya kontak antar-masyarakat dan antar-budaya yang mengakibatkan terbawanya pengaruh budaya asing terhadap budaya setempat. Gejala seperti ini bukan hanya terjadi pada masyarakat dan kebudayaan kabupaten kepulauan Talaud, karena sesungguhnya dinamika masyarakat dan kebudayaan adalah merupakan hakekat dari kebudayaan itu sendiri yang tidak pernah stagnan pada satu titik.

Namun betapapun derasnya arus perubahan yang melanda suatu kebudayaan, tetapi senantiasa terdapat unsur-unsur tertentu didalam kebudayaan tersebut yang relatif statis. Artinya perubahan yang terjadi pada unsur tersebut tidaklah semudah dan seintensif perubahan yang terjadi pada unsur lainnya. Unsur yang tidak gampang berubah itu, biasanya berkenaan dengan sistem nilai budaya yang bersifat abstrak, dan merupakan inti dari kebudayaan. Adapun unsur yang lebih gampang berubah, biasanya berkenaan dengan wujud-wujud kebudayaan yang lebih bersifat manifes, seperti sistem sosial, atau pola perilaku masyarakat, dan hasil-hasilnya yang lazim disebut kebudayaan materi.

Sudah menjadi gejala umum dimana-mana, daerah perbatasan antar negara merupakan "kawasan-rawan" dalam artian keamanan dan pertahanan. Dikatakan rawan keamanan dan pertahanan karena sebagai daerah perbatasan antar dua negara menghadapi permasalahan batas wilayah (laut), terjadinya pencurian/penangkapan ikan ilegal, selain itu pula sebagai daerah perbatasan biasa disebut sebagai daerah terisolasi/tertinggal dalam pembangunan kurang mendapat perhatian.

Kaitannya dengan penelitian ini sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud dalam upaya melestarikan budayanya, adalah bersifat dinamis dan terbuka, ini berarti masyarakat setempat siap menerima pengaruh luar sepanjang tidak merusak nilai budaya yang telah ada sejalan dengan perkembangan zaman.

Pada dewasa ini, masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud yang baru dimekarkan 4 tahun, sebagaimana undang-undang nomor 8 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten kepulauan Talaud terpisah dengan kabupaten induk Sangihe Talaud dahulu, telah memunculkan semangat otonomisasi dan proses desentralisasi yang kuat, telah membawa suasana baru dan kompleks bagi penduduk yang dikenal dengan sebutan Nusa Utara.

Kabupaten yang memiliki perbatasan dengan negara (Filipin), sering disebut daerah terisolasi/tertinggal. Keterisolasian/ketertinggalan daerah perbatasan ini merupakan warisan historis penjajah. Ketika kawasan ini belum dijajah oleh Spanyol, Amerika Serikat (Filipina) dan Belanda (Indonesia, dan pada masa berjayanya kepemimpinan komunitas lokal; kawasan daerah ini terhubung dalam jaringan niaga laut Sulawesi dan Mindanao. Paparan historis menyajikan informasi tentang



kawasan ini awalnya dikenal dengan sebutan Zona Ternate kemudian Zona Sulu. Jaringan perniagaan tersebut terputus dengan adanya perjanjian perdamaian munster pada tahun 1684. Spanyol menguasai Filipina, Belanda menguasai Nusantara. Keterisolasian geografis dan faktor cuaca alam dijadikan alasan untuk melemahkan “tradisi-maritim lokal” yang lambat laun melemah setelah pemerintah Hindia Belanda memonopoli jaringan pelayaran dengan KPM. Disusul pula dengan ketidakmampuan pelayaran rakyat dimasa-masa awal Republik hingga Era Orde Baru.

Keterisolasian geografis dapat dilihat dalam dua lingkup jaringan, yakni pada arus pelayaran utama yang menghubungkan pelabuhan ibukota kabupaten/kecamatan dengan ibukota propinsi dan pada tataran hububgan antara ibukota kabupaten/kecamatan dengan pulau-pulau/daerah terpencil atau *remote area*. Dampak dari keterisolasian kawasan ini menyebabkan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan daerah. ketertinggalan daerah-daerah terpencil (*remote area*) sebagai akibat cara pandang pembangunan yang tertumpu pada pembangunan daratan-luas (*mainland*) dan pusat-pusat ibukota mengabaikan kenyataan daerah yang memiliki pulau-pulau kecil yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum dimekarkan menjadi satu Ibukota kabupaten, perkembangan pembangunan sampai dengan tahun 2002 daerah ini sangat terkebelakang karena pada umumnya pembangunan fisik berupa gedung-gedung fasilitas pemerintah maupun swasta terpusat pada ibukota kabupaten yakni Tahuna, sehingga muncul dikhotomi “pusat – pinggiran” (*center-periphery*)(Ulaen ).

Akhir-akhir ini semenjak munculnya isu kesejagadan (globalisasi), muncul kesadaran betapa pentingnya arti kawasan perbatasan, tidak hanya sebatas persoalan keamanan dan pertahanan saja, namun dalam arti yang lebih luas.

Setelah beralih status sebagai ibukota kabupaten, tentunya hal ini harus ditunjang dengan berbagai macam bangunan-bangunan fasilitas perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Sehingga sejak tahun 2002, bermunculanlah gedung-gedung perkantoran di daerah ini. Disamping itu daerah kepulauan yang dahulunya sepi dari masyarakat luar, kini harus menerima kehadiran dari berbagai macam latar belakang masyarakat dengan beragam etnis, yang datang dengan berbagai kepentingan. Selain itu pula daerah ini tidak pernah sepi dari kunjungan para pejabat tinggi baik dari pusat maupun propinsi.

Jika pada masa lalu sebelum menjadi ibukota kabupaten, kebisingan akibat kendaraan beroda dua maupun roda empat belum begitu terasa, maka setelah beralih status ibukota kabupaten gangguan kebisingan maupun gangguan keamanan kendaraan dijalan mulai terasa pada daerah-daerah tertentu khususnya ibukota kabupaten kepulauan yaitu melongnguane, ibukota-ibukota kecamatan seperti Lirung, Beo, Rainis, Salibabu, walaupun belum seramai ibukota lainnya.

Konsekuensi dari menjadi daerah ibukota kabupaten, maka tanah-tanah

perkebunan/hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan kini berubah menjadi lokasi bangunan gedung-gedung baik milik pemerintah, swasta, perorangan. Tanpa disadari bahwa hal ini membawa dampak dinamika dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kabupaten kepulauan Talaud.

Masuknya para pendatang dari daerah lain membawa berbagai macam dampak baik dampak positif maupun negatif bagi perkembangan budaya setempat. Tak dapat disangkal beralih statusnya sebagai ibukota kabupaten jelas membawa perubahan dalam banyak hal terutama pola tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu terjadi dapat saja karena adanya kontak-kontak budaya dengan budaya luar. Kontak dengan kebudayaan luar akan membawa pengaruh besar bagi dinamika kebudayaan. Kontak-kontak dengan budaya luar itu bukan merupakan gejala baru dalam sejarah kebudayaan manusia tetapi sudah berlangsung sejak awal kehidupan manusia. Bahkan kontak dan pengaruh budaya luar diikuti dengan tukar-menukar kebudayaan itu mempercepat perubahan dinamika kebudayaan dan masyarakat. Seperti halnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mempermudah hubungan dengan budaya luar dan mempercepat proses perubahan kebudayaan.

Melalui uraian di atas maka akan dilihat bagaimana strategi masyarakat setempat dalam mempertahankan budaya mereka yang akan dilihat melalui dari 7 unsur kebudayaan secara universal dari Koentjaraningrat adalah: Sistem mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, sistem religi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, sistem teknologi perlengkapan (Koentjaraningrat, 1992 : 7). namun yang akan dipaparkan hanya beberapa dari 7 unsur kebudayaan yang universal tersebut.

### 3.1. Mata Pencaharian Hidup

Masyarakat kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pulau-pulau kecil yang pada umumnya memiliki mata pencaharian hidup ganda yakni sebagai petani merangkap nelayan dan sebagian kecil tukang. Fenomena ini tampaknya bersifat umum disetiap pulau yang ada. Dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga, mereka berkebun menanam pisang, ubi kayu, bete (talas), sayur-sayuran dan padi ladang. Untuk kebutuhan protein hewani mereka menjadi nelayan sambilan yakni menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Hasil tanaman tahunan seperti kelapa dan pala umumnya digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan primer lainnya.

Pertanian tanaman tahunan pada awalnya terdiri dari kelapa dan pala, nanti mulai akhir dekade 1960-an hingga 1970-an masyarakat mulai menanam cengkeh. Hal ini mungkin terpengaruh dengan masa keemasan petani cengkeh di daerah

Minahasa. Akhirnya sebagian besar lahan yang dahulunya digunakan untuk tanaman padi ladang, sekarang umumnya telah ditanami tanaman tahunan. Akibatnya sudah semakin jarang terlihat petani menanam petani ladang karena lahan untuk itu semakin sempit. Jika sebelumnya hasil padi ladang dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat, maka yang terjadi setelah periode ini adalah ketergantungan penduduk pada pasokan beras dari luar daerah. konsekuensinya, untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat membeli di toko atau warung yakni beras yang didatangkan dari luar daerah, maklum pertanian sawah belum lama diintroduksi dan hanya terbatas di beberapa di pulau karakelang.

Faktor lain yang mendorong petani mengalihfungsikan ladang yang ditanami padi menjadi lahan tanaman keras terutama cengkeh dan pala juga karena kehadiran “depot logistik” atau “dolog” yang mendistribusi penjualan beras pada era pemerintah orde baru. Kehadiran depot logistik terutama di Ibukota kabupaten maupun di ibukota kecamatan dikandung maksud untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras. Tanpa disadari, juga telah mempercepat proses alih-fungsi lahan dari ladang ke perkebunan.

Berkurangnya ladang perladangan tidak hanya menandai peralihan dari ekonomi subsisten dan memasuki ekonomi pasar, melainkan juga turut membawa pengaruh terhadap tradisi hidup yang telah lama dijalani masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mata pencaharian hidup masyarakat sebagai petani terutama petani ladang dijalankan menurut kognisi dan pengetahuan lokal masyarakat. Berbagai upacara ritual terkait dengan pertanian inipun pada saat ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan semakin berkurang, padahal dari aspek agama yang dianut oleh masyarakat tidak bertentangan, karena pada awalnya upacara ritual seputaran kegiatan pertanian telah diadopsi dan dijalankan sebagai bagian dari agama dan acara gerejawi.

Kegiatan ritual seputar mata pencaharian hidup terutama dalam bidang pertanian antara lain : *Malintukku halele* (menurunkan pedang), *Malintukku Wualan* (menurunkan benih atau bibit), *Sawakka atau Manawakka* (doa syukur panen). *Malintukku Halele* merupakan upacara adat yang biasanya dilakukan pada saat persiapan pembukaan lahan. Upacara ini telah mengikuti tata cara gerejawi dengan doa yang disampaikan bukan lagi pada para dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuatan, tetapi disampaikan kepada Tuhan Allah sebagai sang pencipta. Doa yang biasanya di bawakan dalam bahasa daerah talaud antara lain berbunyi “*kami penduduk seisi rumah dan sekampung, sekarang memberitahukan kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan bahwa mulai hari ini kami akan membuka kebun ladang padi. Pedang dan tamako sekarang akan kami turunkan dan gunakan untuk membuka kebun. Kami memohon kepada Tuhan, agar mata pedang dan tamako hanyalah tajam pada kayu-kayuan, namun tumpul pada yang menggunakannya.*” Ini adalah doa kepada sang pencipta agar selalu melindungi tubuh dan nyawa para petani.

Sesudah upacara dan pada saat panen diadakan upacara panen yaitu berupa doa sawakka atau manawakka. berbagai upacara yang dilaksanakan mulai pada saat membuka lahan sampai pada saat panen dipimpin oleh pemimpin adat. Kegiatan ini memiliki makna agar masyarakat jauh dari konflik. Adanya kegiatan bersama yang dibimbing oleh pemimpin adat menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa terkontrol dalam kondisi kebersamaan.

Sebagaimana dikatakan bahwa setelah lahan padi semakin terbatas, tidak banyak lagi masyarakat yang menekuni kegiatan ini sehingga semakin berkurang upacara adat tersebut mulai pada dekade 1980-an. Bahkan ketika menjadi daerah ibukota kabupaten diikuti pula dengan pemekaran wilayah kecamatan dan desa, sehingga sampai ke pulau-pulau kecil hadir bangunan-bangunan baik pemerintah maupun swasta ditambah lagi dengan penambahan jaringan jalan yang menjadikan lahan perkebunan menyempit.

Konsekuensi masyarakat mengalami dua sisi pergeseran yang saling terkait yakni mata pencaharian dan interpretasi terhadap aspek budaya pertanian. Selain dua faktor tersebut, pengetahuan lokal masyarakat yang berhubungan dengan aktifitas musim-musim penanaman, berbagai jenis-jenis tanaman penanda kesuburan tanah, serta praktek pembasmian hama dengan menggunakan jenis tanaman yang akrab lingkungan saat ini semakin terabaikan.

Pada awalnya, umumnya kepala keluarga berprofesi ganda (petani, nelayan, tukang) walaupun sebagai nelayan hanya merupakan pekerjaan sampingan. Dalam kondisi seperti ini, semangat gotong royong yang tampak dalam bentuk *Ma'aliu* (di Minahasa Mapalus) masih sangat efektif. Ketika lahan pertanian semakin sempit, sebagai dampak dari penambahan penduduk dan dengan adanya fasilitas-fasilitas penunjang pembangunan seperti pembangunan-pembangunan perkantoran, munculnya jaringan jalan ditambah lagi dengan adanya serta sistem budel dan nilai jual hasil pertanian yang melemah harga pala dan kopra semakin anjlok, maka terjadi proses pemiskinan terselubung yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada saat ini meskipun mata pencaharian sebagai petani masih dominan, namun telah terjadi spesialisasi dan semakin kurang profesi ganda. Saat ini semakin beragam bidang informal yang dikembangkan secara spesialis oleh masyarakat misalnya nelayan, tukang, pedagang, tibo-tibo, tukang ojek dan pegawai (PNS dan swasta) dan lain-lain.

Kondisi seperti ini mengakibatkan pada beberapa daerah seperti ibukota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatan, upacara seputar aktifitas pertanian tidak nampak lagi. Namun sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa responden mengatakan bahwa upacara seputar aktifitas pertanian, telah diselaraskan dengan kondisi masyarakat yang semakin majemuk dan spesialis. Pada beberapa tahun terakhir, upacara *Malintukku Halele*, *Malintukku Wualan* dan

*Manawakka* telah dihidupkan kembali dengan interpretasi baru sesuai dengan kondisi jaman, dengan tanpa mengubah nilai dan spirit kebersamaan dan budaya pertanian serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga upacara ini tetap relevan di zaman modern ini.

Upacara ini, merupakan kebijakan pemerintah dan para tokoh adat, agama dan masyarakat dalam rangka melestarikan budaya yang pernah ada. Pelaksanaan upacara disesuaikan dengan musim bercocok tanam. Hadir dalam pelaksanaan upacara ini adalah para petani, pegawai, buruh, pedagang, tibo-tibo dan lain-lain. Upacara tersebut dilaksanakan sebagai suatu simbol akan memulai pekerjaan dalam semua aspek bidang kehidupan, yang ditandai dengan perohonan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua pekerja diberi kekuatan, kesihatan dan berkat.

Sebelum hari "H" pelaksanaan upacara, pemerintah, para tokoh adat dan agama mengadakan musyawarah untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Penentuan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan musim menanam. Pelaksanaan kegiatan ini telah diatur sedemikian rupa agar berjalan dengan baik, maka biasanya dibentuk panitia pelaksana yang diambil dari semua unsur dalam hal ini unsur pemerintah, para tokoh adat, tokoh agama dan ada pula unsur masyarakat.

Panitia yang terbentuk, menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pelaksanaan dan semua yang terkait dengan upacara. Tempat upacara dapat saja di halaman terbuka/lapangan atau gedung /aula yang luas. Dengan adanya upacara ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud masih mempertahankan budaya yang ada walaupun telah mengalami perubahan, namun tidak menghilangkan nilai tradisional yang lama yaitu sebagai rasa syukur sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam hal akan memulai pekerjaan.

Pada beberapa desa di pulau-pulau kecil seperti di Kakorotan, Miangas dan lain-lain, upacara seputaran aktifitas pertanian, hingga kini masih tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya, baik dalam bentuk perorangan/milik keluarga maupun milik komunal. Pelaku upacara adalah pemimpin adat yaitu *Ratumbamua* yang sampai saat ini masih memiliki fungsi seperti dahulu. Tokoh agama dalam atawai pendeta, guru agama dalam pelaksanaan upacara tersebut mengambil bagian sebagai pemimpin doa. Doa permohonan kepada Tuhan Allah Penguasa untuk melindungi para pekerja dari malapetaka dan memohon berkat dari hasil pertanian yang dikerjakan. Doa yang disampaikan oleh para tokoh agama dibawakan dalam bahasa daerah Talaud. Dengan demikian agama dan tradisi pada masyarakat Suku Bangsa Talaud berjalan seirama.

Peranan pemimpin adat dalam kehidupan religi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud sangat nampak dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan religi atau kepercayaan. Seperti halnya nampak dalam berbagai upacara seperti, upacara perkawinan (Waassu Wissara, Adom Wissara). Pemimpin adat bergerak seirama dengan para tokoh agama (pendeta, pastor). Pemimpin adat



melakukan aktivitas sebagaimana ketentuan adat. Dalam hal ini, upacara perkawinan ditempuh dengan mengikuti tahap-tahap sebagaimana tradisi yang berlaku dan ini adalah tanggungjawab para pemimpin adat.

Tokoh agama mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah peneguhan nikah dari kedua pengantin ditempat ibadah (gereja). Keharmonisan antara pemimpin adat dan tokoh agama nampak dalam bentuk kerjasama saling menunjang dan melengkapi dengan demikian apa yang dilakokan oleh kedua tokoh ini, setidaknya memberi suatu peringatan kepada warga untuk mengikuti aturan sebagaimana yang berlaku menurut tradisi dan agama.

Dari hasil pengamatan peneliti, di Ibukota Kabupaten yakni Melonguane dan beberapa Ibukota Kecamatan yang ada di pulau karakelang dan pulau Salibabu, saat ini banyak tumbuh lapangan kerja baru bagi penduduk desa setempat. Sektor kerja yang muncul adalah usaha sewa menyewa rumah atau kontrak kamar, warung/ rumah makan, warung/toko barang kelontong yang melayani kebutuhan sehari-hari, tukang ojek, tukang sol sepatu, tukang jahit pekerja jasa dan pekerja yang lain.

Munculnya usaha sewa menyewa kamar/rumah ini serta tukang ojek, semula tidak dikenal dikalangan penduduk setempat. Umumnya rumah-rumah penduduk hanya dihuni oleh keluarga inti yang terdiri atas suami-istri, sejumlah anak atau kerabat. Namun sejak menjadi pusat ibukota kabupaten, banyak pendatang yang membutuhkan perumahan maka usaha kost, kontrak rumah atau sewa bulanan menjadi bisnis yang menguntungkan. Walaupun pada saat ini memang unsur sosialnya masih lebih besar.

Dari sejumlah responden mengatakan bahwa mereka merasa lebih beruntung sejak desa mereka menjadi daerah ibukota. Keuntungan finansial yang mereka peroleh dapat menambah penghasilan bagi keluarga dan seberapa manfaat dari bisnis tersebut, telah dapat digunakan oleh mereka untuk membiayai anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Perubahan mata pencaharian hidup tersebut merupakan suatu cara dari masyarakat dalam mensiasati hidup yang semakin kompotitif tersebut.

Dipihak lain, manfaat dari bisnis rumah kost dan kontrak rumah selain menambah penghasilan keluarga, juga manfaat sosial yakni bertambahnya hubungan mereka dengan para pendatang. Bukan hanya antara pribadi pemilik rumah dan yang kost rumah tetapi juga diperluas dengan kerabat si pendatang yang datang ke daerah tersebut. Dengan demikian membuka dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh penduduk setempat dengan kehadiran para pendatang.

Perubahan dari kondisi lama masyarakat Talaud yang dahulunya sebagai masyarakat yang homogen dalam arti yang lebih banyak adalah penduduk asli. saat ini menjadi masyarakat yang majemuk. Kehadiran para pendatang ini membawa perubahan bukan hanya positif tetapi juga negatif. Perubahan tersebut

bukan hanya pada mata pencaharian hidup tetapi tata nilai dan perilaku kehidupan masyarakat. Sekalipun memang kehadiran para pendatang pada umumnya hanya berhubungan dengan masalah kerja, namun hal itu sedikit banyak mempengaruhi tata pergaulan dan nilai budaya setempat dan institusi sosial yang ada.

Konsep masyarakat majemuk pada awalnya dipopulerkan oleh ahli ekonomi J.S. Furnival (1967) di dalam kaitannya mengenai dampak pemerintahan kolonial di Burma dan Indonesia. Sebelumnya istilah ini telah dikembangkan oleh M.G. Smith di dalam kajiannya di Kepulauan Karibia, dimana kelompok-kelompok etnik yang berbeda-beda "berbaur tapi tidak larut" (mix but do not combine). Dominasi politik oleh satu suku bangsa dan pengarahan kelompok-kelompok yang berbeda terlibat di dalam satu sistem ekonomi bersama, di mana masing-masing menempati suatu posisi khusus dalam pembagian kerja (division of labour) adalah hal-hal yang memelihara masyarakat majemuk dalam keseimbangan. (Wacana Antropologi, volume 2 No.4., 1999).

Hadirnya berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten ini, menyebabkan mereka hidup secara berdampingan dengan masyarakat lain. Oleh karena di antara mereka ada perasaan saling membutuhkan, maka mereka perlu mengadakan hubungan satu sama lain sehingga terbentuk kerjasama. Kerjasama ini didasari karena adanya persamaan kepentingan di antara mereka. Kepentingan-kepentingan yang didasarkan adanya interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok memunculkan rasa kebersamaan dan menciptakan integrasi sosial yang mengarah pada kehidupan yang harmonis dan damai.

Menurut Surjomihardjo, dkk (1984) dalam mengutip Kinball Young, mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah kunci kehidupan bersama, tanpa ada interaksi, tidak mungkin ada kehidupan sosial dan kehidupan kelompok. Interaksi terjalin dalam berbagai aktivitas salah satunya adalah mata pencaharian hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa selain faktor perkawinan, kehadiran para pendatang berhubungan erat dengan mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup yang ada beraneka ragam (Pegawai negeri, Swasta, pengusaha, pedagang, dan berbagai macam bentuk mata pencaharian sesuai profesi; tukang jahit, sol sepatu dan sebagainya). Aktifitas mata pencaharian hidup ini tidak mungkin dilakukan seorang diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mempunyai hubungan jaringan dengan orang lain.

Sebagaimana wawancara dengan seorang bapak (53 tahun) yang berasal dari daerah Gorontalo yang bertempat tinggal di kompleks pasar Lirung, beliau mengatakan "*saya datang di Talaud kira-kira sudah 18 tahun dengan bekerja sebagai pedagang kecil menjual sepatu dan pakaian. Agar jualan dapat laris, saya perlu mencari pembeli., karena itu saya berupaya mencari kenalan orang-orang Talaud dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan*



terutama kegiatan oleh raga dan juga mengikuti kerjabakti serta mengikuti seputaran aktifitas budaya bila diperlukan. Dengan melakukan ini saya mendapat banyak kenalan dan masyarakat Talaud telah menganggap saya sebagai sahabat dan saudara. Karena itu saya tidak ragu kembali ke Gorontalo dan membawa isteri serta anak. Saat ini kami telah menetap di Talaud.

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa melalui pekerjaan (mata pencaharian) dapat terjalin interaksi selain mengutamakan kepentingan kerja, juga kepentingan sosial. Sehingga tercipta hubungan yang baik dari pendatang dan penduduk setempat. Dalam hal inipun penduduk setempat terbuka dengan kehadiran pendatang bahkan memperkenalkan budaya yang ada dan turut mengikutsertakan kaum pendatang mengambil bagian dalam aktivitas budaya setempat.

Pengaruh positif dari kehadiran para pendatang disatu pihak dapat dikatakan lebih meningkatkan etos kerja masyarakat. Walaupun memang etos kerja tersebut juga muncul berkaitan dengan makin tingginya kebutuhan hidup, dan juga daya saing diantara sesama. Bagi penduduk Talaud, memang etos kerja itu sejak dahulu sudah ada dalam jiwa masyarakat sesuai dengan ajaran agama kristen. Dalam ajaran agama kristen, bekerja adalah kewajiban setiap manusia. dalam Alkitab diajarkan agar seseorang giat bekerja untuk memperoleh penghasilan yang baik demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Di samping itu Alkitab juga mengajarkan agar umatnya mampu memilah pekerjaan yang baik sesuai petunjuk-petunjuk yang telah digariskan dalam firman Tuhan. Hal ini memacu kesadaran masyarakat bahwa bekerja merupakan kegiatan yang mutlak untuk menyambung hidup yang berimbas pada latar belakang perekonomian masyarakat.

Dengan adanya berbagai lapangan pekerjaan dibarengi dengan upaya kerja keras, maka pendapatan masyarakat semakin meningkat. Memang masih ditemukan anggota keluarga yang berlatar belakang ekonomi yang kurang memadai, tetapi pada hakekatnya mereka telah memiliki etos kerja yang tinggi namun terbentur pada kendala keterbatasan lahan, perekonomian, dan keterbatasan pendidikan.

Perubahan tingkah laku secara individual yang nampak adalah dikalangan mereka yang beralih pekerjaan dari sektor pertanian kesektor jasa seperti menjadi buruh angkut, tukang ojek, pelayan restoran dan sebagainya. Perubahan tata nilai yang lama berusaha ditinggalkan untuk memasuki tata nilai/pola kehidupan yang baru yang sementara dijalani. Proses transisi dari yang lama ke yang baru ada kalanya melahirkan berbagai gejala sosial kadang-kadang aneh dan sulit dimengerti.

Munculnya jiwa konsumerisme yang merupakan aspek negatif yang melanda sebagian besar masyarakat terutama dikalangan kaum wanita. Gejala ini sebagai akibat hadirnya para pedagang kelontong dari luar daerah yang menjajakan barang dagangannya mulai dari peralatan dapur, peralatan rumah tangga, sampai pada alat-alat elektronik, yang dijajakan oleh para abang-abang kredit yang rajin keluar masuk kampung. Belum lagi pemakaian kosmetika dan pakaian dengan berbagai

ala model yang menjamur yang tadinya hanya dikenal oleh kaum-kaum tertentu. Pengenalan akan produk-produk baru tersebut merukan hal yang baru dan unik telah menjadi gejala sosial saat ini. Kenyataan yang ada, masyarakat yang biasanya dengan gaya hidup pedesaan dengan segala kesederhanaan mulai beralih pada gaya hidup perkotaan yang belum mapan sehingga terkesan aneh.

Peralihan dari mata pencaharian hidup petani kelapa yang hanya mendapatkan hasil setiap tri wulan sekali ketika selesai mengerjakan kopra, beralih pada pekerjaan yang memudahkan mendapatkan uang pada setiap saat, seperti tukang ojek buruh dan sebagainya. Manakala masyarakat tergiur dengan pola hidup yang konsumerisme, akan membawa pada ketidak mampuan untuk meyiapkan masa depan anak-anak melanjutkan pendidikan atau berorientasi pada pemikiran masa depan.

### 3.2. Sistem Kemasyarakatan

#### A) Sistem Kekeperabatan

Sebagai akibat darah suatu perkawinan maka akan terbentuk suatu kelompok kerabat yang disebut keluarga batih atau keluarga inti. Suatu keluarga batih terdiri atas seorang suami, seorang istri dan sejumlah anak-anak yang belum kawin. Adapun kelompok kekerabatan pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud disebut ruaganna.

Adapun prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat talaud adalah prinsip keturunan bilateral, yang garis keturunannya menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Artinya setiap anggota keluarga termasuk dalam hubungan kerabat baik dari kerabat ayah maupun kerabat pihak ibu. Walaupun garis keturunan mengikuti garis keturunan pihak laki-laki dalam hal ini pemberian nama belakang (marga) mengikuti garis keturunan ayah.

Selain kelompok kerabat sebagai kelompok keluarga kecil, masyarakat Talaud juga mengenal sistem kekerabatan keluarga luas. Kelompok kekerabatan keluarga luas ini diperhitungkan menurut garis keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang biasa disebut "*ruanganna*". *Ruanganna* ini terdiri atas beberapa rumpun keluarga batih dalam hal ini 5 hingga 8 keluarga batih.

Dahulu ruanganna atau kelompok kekerabatan keluarga luas ini menempati rumah satu rumah besar. Di antara penghuni rumah besar laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan terjadi kawin mawin. Karena itu para anak muda yang hendak mencari pasangan hidup harus memilih pasangannya di luar rumah besar atau ruanganna. Perkawinan di antara sesama rumah besar atau ruanganna dianggap panas dan dipercayai dapat membawa malapetaka bagi kelangsungan keluarga bahkan bagi masyarakat umumnya.

Saat ini, masing-masing keluarga batih telah menempati rumah sendiri sedangkan rumah besar yang dihuni oleh beberapa anggota kelompok kekerabatan

tidak ditemui lagi pada masyarakat Talaud. namun bukan berarti tradisi kawin di antara penghuni rumah besar atau kawin se ruangnya masih tetap dipertahankan walaupun tidak seketat dahulu. Dewasa ini perkawinan ideal menurut adat suku bangsa Talaud adalah kawin di luar anggota kerabat (famili), yang diupayakan sampai pada garis keturunan "*pulungsuhiwa*", atau pada tingkat keempat dengan mengikuti garis keturunan kebawah.

Untuk mencegah tidak terjadinya perkawinan diantara se *ruangnya* atau masih rumpun keluarga, maka hingga kini menjadi salah satu faktor penting dalam hal perkawinan adalah menuturkan silsilah. Tradisi menuturkan silsilah dari kedua pihak yang akan kawin ini sangatlah penting, untuk mengetahui pangkal hubungan kekerabatan kedua pihak. Apabila hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak yang akan menikah telah diketahui dan ternyata di antara mereka telah melewati batas *pulungsuhiwa* maka perkawinanpun dapat dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap yang ditentukan.

Hingga saat ini, tradisi dalam perkawinan dengan mengikuti tahap demi tahap dalam perkawinan masih tetap dipertahankan walaupun telah mengalami perubahan dari yang dahulu. Bilamana perkawinan sudah selesai dengan berbagai upacara, biasanya suami isteri masih menempati rumah tinggal bersama dengan orang tua mereka dalam hal ini pada umumnya orang tua pihak perempuan. Apabila mereka mulai mapan pasangan keluarga baru cenderung memisahkan diri dengan orang tua mereka dan mengurus rumah tangga lebih mandiri.

Walaupun dikatakan keluarga besar yan terdiri atas beberapa keluarga batih menempati rumah besar telah menghilang, namun kekerabatan dari keluarga besar tersebut masih tetap nampak dalam berbagai aktivitas seperti perkawinan, kematian dan berbagai macam upacara-upacara lainnya.

Pada setiap upacara seperti pada pelaksanaan pesta perkawinan, masyarakat suku bangsa Talaud masih tetap mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dari para leluhur mereka. Hal ini nampak dalam beberapa tahap upacara yang masih tetap dilakukan hingga kini. Seperti halnya tradisi penuturan silsilah dari kedua belah pihak calon mempelai.

Menelusuri/mengkaji silsilah dari kedua calon mempelai tersebut adalah suatu ketentuan adat yang berlaku dari dahulu hingga saat ini. mengkaji/menelusuri silsilah ini sebagai suatu sarana kontrol sosial dalam masyarakat agar tidak terjadi perkawinan antar *ruangnya* dan melanggar adat istiadat yang telah diwariskan sejak dahulu. Menelusuri silsilah ini hanya dapat dilakukan oleh pemimpin adat dalam hal ini para *ratumbanua*, *inangnguanua* dan *timadu ruangnya* atau kepala-kepala suku. Sehingga seorang pemimpin adat mutlak harus memiliki pengetahuan yang luas tentang silsilah atau keturunan dari warga yang dipimpinnnya.

Dapatlah dikatakan sampai saat ini peran pemimpin adat masih berpengaruh, karena oleh arga masyarakat masih dipercaya dan menjadi panutan. Seperti halnya

dalam upacara perkawinan, pemimpin adat masih berperan mengambil keputusan yang mau tidak mau harus diikuti oleh masyarakat, karena sesuai dengan aturan atau norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Dapatlah dikatakan dalam perkawinan masyarakat suku bangsa Talaud masih memiliki hukum adat yang mengatur dan hingga kini masih berlaku. Yang jelas hukum adat masih ada sebagai hukum yang hidup dikalangan masyarakat walaupun tidak tertulis namun tersirat dan menjadi nilai yang tinggi sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa disadari bahwa hukum adat ini merupakan nilai-nilai yang telah menjadi pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, sehingga budaya masyarakat setempat masih dapat bertahan.

### B) *Kepemimpinan*

Irama kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, memang tampaknya khas. Selain mengikuti tatanan formal, yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mereka juga memiliki tatanan kehidupan yang mengacu pada adat dan agama setempat. ketiga sistem ini berjalan seiring mengatur gerak kehidupan masyarakat setempat.

Tatanan formal yang ada di Kabupaten kepulauan Talaud yaitu yang dikategorikan sebagai pemimpin formal yakni pegawai pemerintah, baik pusat, kecamatan dan desa. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan perangkatnya. mereka memiliki tugas administratif dan program pemerintah. Sedangkan tatanan agama adalah mereka yang tergolong sebagai pemimpin agama seperti pendeta, guru agama atau yang menjadi toko-toko agama. Tatanan adat yaitu para pemimpin adat yang dikenal dengan sebutan para *Ratumbanua*, *Inangnguwamua*, *Timadu Ruanganna* atau kepala-kepala suku.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan ini dikenal dengan pemimpin tiga serangkai (tri partit). Tujuan utama mereka adalah membawa kehidupan masyarakat agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Apabila dicermati, pemimpin adat atau pemimpin informal memiliki peranan yang cukup besar di kabupaten kepulauan Talaud. Peranan adat sangatlah besar dalam menata struktur kemasyarakatan dan kepatuhan terhadap adat. Dengan demikian kedudukan pemimpin adat sangatlah penting, mengingat hampir keseluruhan aktifitas dalam masyarakat melibatkan pemimpin adat. Status pemimpin adat tersebut diperoleh melalui garis keturunan dan umumnya kaum pria.

Hal yang paling penting bagi pemimpin adat, adalah membawa masyarakat hidup damai, harmonis dan sejahtera satu dengan yang lain. Berbagai upacara yang dilakukan dalam masyarakat selalu dituntun oleh para pemimpin adat. Setiap bentuk upacara dilakukan dalam bentuk kebersamaan. Karena dengan adanya perasaan kebersamaan inilah mendorong mereka melakukan berbagai upacara.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud bersifat terbuka terhadap para pendatang dan menyambut baik setiap program

pembangunan sejauh tidak membawa pengaruh yang bertentangan dengan adat dan agama. Oleh karena itu setiap program yang datang baik dari pihak pemerintah maupun pihak lain selalu diselaraskan dengan tiga serangkai kepemimpinan tadi (tripartit) yakni adat, agama dan pemerintah mengingat ketiganya mempunyai peranan saling mendukung.

Pemerintah, gereja dan adat merupakan tiga tatanan kekuasaan yang ada pada masyarakat kepulauan Talaud. Meskipun memang batas kekuasaan dan kewenangan diantara mereka berbeda-beda, tetapi dalam mengemban misi pembangunan ketiganya saling mendukung.

Dalam aktifitas yang berkaitan dengan keberadaan menjaga kelestarian tradisi budaya setempat, peranan pemimpin adat dalam hal ini para ratumbanua, inangnguanua dan timadu ruanggana atau kepala-kepala suku sangatlah besar dan berarti. Sejak dahulu masyarakat tidaklah melakukan aktifitas sendiri terutama menyangkut seputaran berbagai upacara yang dilakukan. Karena yang berkaitan dengan keberadaan hubungan dengan para leluhur mereka, para pemimpin adatlah yang berwenang dan dianggap memiliki kemampuan. Masyarakat memang tidak dapat menjalin hubungan vertikal dengan para leluhurnya. Secara adat masyarakat mengakui para pemimpin adat yang memiliki kemampuan dan yang berwenang melakukan hal tersebut. Dengan demikian segala sesuatu harus sepengetahuan pemimpin adat. Dalam hal ini peran ketua adat dapatlah dikatakan sebagai mediator antara masyarakat kepulauan Talaud dengan para leluhur.

Pada prinsipnya, segala aktivitas warga masyarakat diharapkan mendapat berkah dari para leluhur mereka. Oleh karena itu mereka akan datang kepada pemimpin adat ketika akan melaksanakan aktivitas penting dalam hidupnya seperti aktivitas seputaran mata pencaharian hidup, membangun rumah, memulai suatu pekerjaan, menyelenggarakan hayatan dan lain-lain.

Ketika penduduk kepulauan Talaud dibaptis menjadi kristen atau memeluk agama kristen, tradisi upacara yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk penghormatan pada para leluhur, mengalami pergeseran yakni masyarakat percaya akan adanya satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan demikian setiap bentuk upacara yang dilakukan, semuanya untuk menghormati dan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan.

Walaupun pemujaan terhadap para leluhur telah diganti dengan pemujaan terhadap Tuhan sang pencipta, namun hingga kini pemimpin adat dalam hal ini ratumbanua dan inangnguanua tetap menjalankan peran mereka dalam berbagai aktivitas yang berlaku. masyarakatpun masih tetap menghormati dan mempercayai para pemimpin adat mereka, sehingga setiap aktivitas yang akan dimulai selalu sepengetahuan para pemimpin adat.

Penduduk setempat mengaktualisasikan berbagai upacara tersebut dalam bentuk gotong royong atau lebih dikenal dengan "*Maaliu*". Gotong royong atau



*Maaliu*, merupakan manifestasi kerjasama dalam mencapai satu tujuan. Dikatakan bahwa upacara sebagai aktualisasi bentuk gotong royong, karena dalam melaksanakan upacara tidak mungkin dilakukan sendirian, sehingga muncul sistem gotong royong dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, dalam upacara masyarakat setempat dapat menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan pada saat melakukan upacara.

Salah satu upacara yang hingga kini masih dilestarikan bahkan telah menjadi aset pariwisata yaitu upacara "*Manee*" atau upacara penangkapan ikan secara masal atau bersama. Upacara *Manee* masih dilakukan pada beberapa tempat di kabupaten kepulauan Talaud.

### 3.3. Kesenian

Salah satu unsur budaya yang menonjol dalam masyarakat adalah bidang kesenian. Hal ini dapat dimengerti karena kesenian selalu ada dalam setiap komunitas budaya. Kesenian merupakan salah satu tindakan budaya dari manusia dalam rangka mengekspresikan kedalaman jiwa manusia akan suatu hal yang berkaitan dengan etika dan estetika, sesuatu yang penuh makna dan keindahan.

Kesenian yang ada pada masyarakat suku bangsa Talaud pada dasarnya merupakan kesenian tradisional, walaupun pada kenyataan yang ada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan karena disana sini telah diberi variasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan ada beberapa kesenian yang telah diadopsi dari budaya luar. Secara garis besar ada beberapa klasifikasi kesenian yang hidup dalam masyarakat Talaud. Kesenian-kesenian tersebut adalah:

- Kesenian yang bernafaskan agama
- Kesenian dalam bentuk pekerjaan seputaran mata pencaharian hidup
- Kesenian tradisional dalam bentuk hiburan

Kesenian yang bernafaskan agama dalam hal ini agama kristen berkembang cukup baik. Menyanyi atau berkidung merupakan unsur kesenian-gereja yang juga diperkenalkan oleh pekabaran Injil. Kesenian ini berkembang cukup pesat dan paling menonjol karena adanya tradisi serupa dalam budaya orang Sangihe dan Talaud pra-kristen, terutama sasambo (Ulaen, 1996). Para misionaris dan pekabar injil dengan giat mengajarkan berbagai lagu gerejani, baik yang berbahasa Belanda maupun yang berbahasa Melayu dan bahasa daerah.

Pada awalnya pengajaran teatang kidung rohani tersebut hanya untuk digunakan dalam kegiatan upacara-upacara keagamaan. Selanjutnya kidung gerejani ini berkembang penggunaannya tidak lagi sebatas upacara keagamaan semata. Hingga saat ini berbagai peristiwa baik suka seperti Hari ulang Tahun, Perkawinan, kematian dan sebagainya. Pada setiap selesai upacara keagamaan seperti ibadah, masih dilanjutkan dengan acara menyanyi. dari kegiatan menyanyi ini hingga tumbuh dan berkembang tradisi "*Masamper*".

Masamper berasal dari bahasa Portugis dari kata *Zyangfeer* yang berarti kelompok penyanyi. Dengan masuknya VOC di Sangihe dan Talaud, maka peranan Portugis mulai melemah dan diganti dengan protestan. Terlebih setelah masuknya Zending (para peninjil) yang membawa nuansa baru dikalangan gereja termasuk pelayanan musiknya. Mereka membentuk kelompok nyanyi (paduan suara) sebagaimana yang dilakukan oleh orang portugis sebelumnya. Mereka memberi nama dalam bahasa belanda *Zangvere*. Adapun tujuan mereka untuk melatih dan mengajar jemaat memuji Allah Sang Pencipta alam semesta, serta menjemaatkan mazmur, tahlil, Dua sahabat lama berupa kidung-kidung yang dalam jumlah yang masi sangat sedikit.

kegiatan ber *Zangvere* berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya kumpulan nyanyian jemaat tersebut sudah banyak dikuasai oleh kelompok *Zangvere* itu sendiri maupun warga jemaat. Sementara perubahan kata *masamper* berawal dari sulitnya jemaat mengucapkan kata *Zyangfere*, *Zangvere*, sehingga lebih mudah terucap *samper* atau *sampiri*. kata ini kemudian berkembang menjadi *masampere* (bahasa Sangir) yang berarti menyanyi bersama-sama. Karena pengaruh dialeg manado nama *Masampere* kemudian berubah menjadi *Masamper*.

kegemaran bernyanyi pada masyarakat Sangir dan Talaud pada akhirnya mendorong mereka mempelajari lagu-lagu kristiani seperti: Mazmur, Tahlil, Dua Sahabat Lama dan lainnya yang bernuansa kristiani. Lagu-lagu ini sampai saat ini dibawakan pada setiap aktifitas keagamaan seperti kematian, perkawinan Hari Ulang Tahun dan berbagai kegiatan lainnya termasuk pada setiap selesai pelaksanaan berbagai upacara.

Perkembangan tradisi *masamper* saat ini mulai diwarnai dengan perpaduan antara menyanyi dan menari. Bahkan sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga lebih menyemarakkan seni ini, misalnya para penari /penyanyi telah mengenakan kostum seragam dan kesenian ini telah diperlombakan/dipertunjukkan pada setiap event-event tertentu.

Sebagai akibat dari mulai ditampilkan kesenian ini pada berbagai acara-acara, kesenian ini pada saat ini mulai terorganisir, yang dihimpun dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Apabila diperhatikan *masamper* merupakan salah satu kesenian yang berkembang pesat, hingga kini tetap bertahan dan menjadi suatu kegemaran masyarakat setempat. Di samping itu pula kesenian *masamper* telah dipertunjukkan oleh masyarakat Sangihe dan Talaud yang berada diperantauan.

Selain kesenian yang bernafaskan agama Kristen, kesenian lain yang berkembang adalah kesenian mengisyaratkan seputaran mata pencaharian hidup seperti tari *Manee* yaitu tarian menangkap ikan secara bersama. Sebagaimana di katakan bahwa selain sebagai peteni mata pencaharian hidup lain dari masyarakat Talaud adalah menangkap ikan di laut. Hal ini tidaklah mengherankan, karena pada umumnya masyarakat tinggal di daerah pinggiran pantai. menangkap ikan



bersama (*Manee*) telah menjadi tradisi masyarakat Suku Bangsa Talaud. tarian ini biasanya ditarikan pada saat masyarakat melaksanakan upacara menangkap ikan bersama di tepi laut yang memang sudah menjadi lokasi penangkapan ikan. Penarinya gabungan kaum laki-laki dan perempuan, tidak terbatas usia. tetapi banyak kali yang mengambil bagian untuk mementaskan tarian ini adalah para pemuda atau anak-anak remaja ataupun anak-anak yang masih kecil. Para penari terlebih dahulu mendapat latihan dari para pelatih mereka sehingga ketika tampil membawakan taria-tarian, benar-benar menunjukkan keseriusan mereka.

Tarian menangkap ikan bersama menunjukkan bagaimana kemampuan masyarakat setempat dalam kebersamaan melakukan kegiatan bersama, bergotongroyong (*maaliu*) dalam melaksanakan pekerjaan. Di samping itu sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang diyakini telah memberi banyak berkat terutama melalui hasil laut yang bukan dikerjakan oleh tangan manusia melainkan tangan Tuhan.

Disamping kesenian yang bernafaskan agama dan bernuansa seputaran mata pencaharian hidup, ada pula kesenian yang memiliki fungsi sebagai hiburan. kesenian yang memiliki fungsi sebagai hiburan pada masyarakat suku bangsa Talaud berbagai jenis, tarian dan nyanyian dengan menggunakan alat yang dipentaskan pada saat kunjungan tamu, yaitu tari penjemput tamu. Selain itu ada tarian dalam bentuk hiburan yang diperagakan berbentuk keahlian/ keterampilan permainan bambu. kesenian ini dikenal dengan sebutan tari

Tarian penjemputan tamu ditampilkan pada saat adanya kunjungan tamu-tamu yang mengadakan kunjungan ke daerah berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan tertentu seperti membuka acara kesenian, menghadiri berbagai upacara, kegiatan olahraga dan sebagainya. Kehadiran mereka disambut dengan tarian penjemputan tamu yang memang telah dipersiapkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh lembaga-lembaga yang berkompentensi dalam bidang kesenian, ataupun organisasi-organisasi lain yang memiliki minat dalam kesenian.

Kesenian lain yang berkembang dalam masyarakat yaitu menyanyi dengan menggunakan alat musik yang dibuat sendiri oleh masyarakat seperti gitar. Pada awalnya kesenian ini hanya menggunakan alat musik yang sederhana seperti sebuah gitar dengan dengan satu atau dua orang penyanyi. Nyanyian yang didendangkan seputaran lagu-lagu daerah setempat, kesenian ini hanya merupakan hiburan semata. Terutama pada saat malam hari beberapa orang secara bergantian mendendangkan lagu-lagu hingga larut malam.

Tetapi saat ini pada kesenian ini telah mengalami perkembangan para penyanyi bukan hanya dua atau tiga orang tetapi antara 6 hingga 10 orang dan para penyanyipun bukan hanya kaum laki-laki tetapi gabungan kaum laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan peralatan yang dipergunakan sekarang tidak hanya menggunakan satu buah gitar tetapi telah ditambah dengan berbagai alat yang melengkapi peralatan

kesenian tersebut sehingga menghasilkan bunyi yang berirama dan merdu. Kesenian ini berbentuk kesenian hawaian. Lagu-lagu yang ditampilkan sudah bervariasi yaitu selain menampilkan lagu-lagu daerah juga menampilkan semua jenis lagu baik yang bernuansa keagamaan maupun lagu-lagu pop masa kini.

Kesenian ini apabila ditampilkan pada acara-acara berupa hari-hari raya nasional seperti memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kartini, Hari Pendidikan dan lain sebagainya, biasanya para penyanyi membawakan lagu-lagu yang berisikan pesan-pesan dan kritikan-kritikan untuk membangun yang diciptakan sendiri oleh para penyair lagu. Pesan-pesan dan kritikan yang disampaikan melalui dendangan lagu pada umumnya untuk membangun kebersamaan baik antara pemerintah maupun masyarakat agar secara bersama-sama dapat merasakan hidup damai, aman dan sejahtera. Selain itu pula kesenian ini banyak kali dipentaskan pada saat hari-hari raya atau hari-hari besar keagamaan kristiani. lagu-lagu yang didendangkan mengikuti hari irama raya-hari besar keagamaan tersebut.

Apabila diperhatikan, faktor yang membuat kesenian daerah masyarakat suku bangsa Talaud tetap bertahan dan digemari hingga kini, karena adanya dukungan dan perhatian yang baik dari pemerintah daerah, warga masyarakat desa, maupun dari pihak pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi kesenian yang bersangkutan. Khususnya kesenian-kesenian yang tumbuh atas kesadaran masyarakat desa seperti kesenian yang bernuansa hawaian, diantara para pelaku kesenian tersebut masih tergolong kerabat. Apabila si pemimpin kesenian tidak aktif lagi, maka digantikan oleh generasi berikutnya apakah itu anak atau kerabat yang lain yang mempunyai bakat dalam kesenian. Walaupun organisasi kesenian itu dalam wadah yang kecil (kaum kerabat) namun pemimpin dalam memajukan kesenian tersebut berusaha meningkatkan kedisiplinan terhadap para anggotanya, yaitu dengan mengadakan latihan-latihan dan memberi wejangan-wejangan atau nasehat-nasehat agar kesenian tersebut dapat memberi hiburan dan memberi makna bagi para penonton.

### 3.4. Sistem Religi

Dalam kamus istilah antropologi, kata religi diartikan sebagai: sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat, dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka yang melaksanakannya. Sistem ini mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan dan lingkungannya. Seluruh sistem dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kerabat oleh umat yang menganutnya.

Jauh sebelum agama Kristen dan agama-agama lainnya masuk dan dianut oleh warga masyarakat suku bangsa Talaud, mereka telah memiliki sistem kepercayaan yang memuja dan sangat mengagungkan roh para nenek moyang (*Gengholangi*). Masuknya agama kristen dan agama lainnya tidak serta merta menghapuskan sistem

kepercayaan lama mereka. Melainkan dalam hal ini terjadi sinkretisasi dimana unsur-unsur kepercayaan secara tradisional ini membaaur dengan unsur-unsur agama kristen dan melahirkan praktek-praktek keagamaan yang bersifat sinkrtis.

Pada umumnya masyarakat suku bangsa Talaud menganut atau memeluk agama kristen. Namun saat ini dalam praktek-praktek ritualnya, masih nampak adanya unsur-unsur adat-isriadat yang sangat kental mewarnai aktifitas kehidupan keagamaan mereka. Apabila diperhatikan, nampak bahwa antara agama dan tradisi berjalan seirama. Oleh karena itu sampai saat ini pada masyarakat kabupaten kepulauan Talaud masih banyak dijumpai upacara-upacara tradisional yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari budaya ritual yang telah dipadukan dengan aktifitas keagamaan. Upacara-upacara tradisional ini banyak mewarnai kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa alam, aktifitas pertanian, maupun upacara-upacara sepanjang lingkaran kehidupan (*life cycle*).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, masyarakat Kabupaten kepulauan Talaud dalam hal bercocok tanam selalu didahului dengan beberapa tahap upacara antara lain: *Malintukku Hallele*, *Malintukku Wualanna*, *Manawakka*. Upacara ini pada beberapa masyarakat kepulauan masih dilaksanakan. Namun pelaksanaannya telah dipadukan mengikuti tata cara agama kristen. Pelaksana upacara ini, selain pemimpin adat dalam hal ini *ratumbanua*, *inangnguwana*, *timadu ruanganna* atau kepala-kepala suku juga oleh para tokoh agama seperti pendeta, pastor, gembala, atau guru agama.

Selain upacara seputar mata pencaharian hidup dalam bidang pertanian, terdapat pula upacara yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup sebagai nelayan yang dikenal dengan upacara "*Mane'e*" yaitu upacara menangkap ikan bersama. Upacara *Mane'e* sebagaimana diperoleh keterangan dari beberapa responden, tidak dapat dilaksanakan disembarang tempat, melainkan hanya tempat-tempat yang ditetapkan secara adat. Upacara dilaksanakan pada setiap tahun, dan biasanya jatuh pada bulan Mei, bertepatan dengan pasang tertinggi dan surut terendah yang terjadi pada akhir bulan purnama atau awal bulan mati.

*Mane'e* sendiri berasal dari kata "*See*" atau "*Sasahara*" yang artinya pernyataan setuju. Kata ini juga dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama-sama secara serentak oleh semua warga masyarakat.

Satu minggu sebelum pelaksanaan acara *Mane'e*, para pimpinan adat yang diangkat sebagai penguasa tertinggi mengadakan upacara kecil dengan beberapa pimpinan adat dan tokoh-tokoh agama dengan maksud berdoa kepada Tuhan agar memberikan hasil yang berlimpah serta menghindarkan warga masyarakat dari malapetaka.

Kegiatan *Mane'e* dikoordinir oleh seorang pemimpin adat yang telah dipercayakan yaitu *ratumbanua*. Masing-masing tokoh adat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Upacara *Mane'e* melewati 9 tahap:

- a. *Maparuncing* (memotong tali hutan), tahapan ini diisi dengan mencari, memotong dan mengambil tali hutan (*pundangi*). Para petugas yang dipercayakan mengatur pembagian tugas mereka.
- b. *Mangalompapa*, (permohonan kepada Tuhan), Kegiatan ini pelaksanaannya dalam bentuk ibadah memohon kepada Tuhan agar diberi hasil yang banyak, cuaca yang baik dan dijauhkan dari malapetaka. Yang melaksanakan kegiatan ini adalah pendeta atau guru agama. Kegiatan ini dilaksanakan disuatu tempat yang sebelumnya telah dipersiapkan. Lokasi ini biasanya berjauhan dengan tempat pelaksanaan upacara
- c. *Matadu tampa paneea* (menuju lokasi upacara), Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua kaum pria (bapak-bapak/pemuda) dibawah pimpinan ratumbanua. mereka menuju lokasi dengan menggunakan perahu 8 – 10 buah perahu londe sebagai sarana untuk menyeberang. Setiap perahu memuat 2 atau 3 orang
- d. *Mamabi 'u Sammi* (membuat alat), Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum upacara *mane'e* yang dipimpin oleh ratumbanua dan anggotanya serta semua masyarakat. Alat yang digunakan adalah pedang, tali hutan, janur (Janur ini dilingkar pada talidinamakan sami)
- e. *Mamoto 'u Sammi* (menebarkan alat), Pelaksanaan dipilih pada saat pasang tertinggi, sedangkan pelepasanalat dilakukan pada pagi hari ketika air mulai surut. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh ratumbanua, dengan jumlah peserta kira-kira 60 orang . Mereka menggunakan perahu londe dan pambut yang memuat sami dan tuwo
- f. *Mamoleu ' Sammi* (menarik alat kedarat), Kegiatan ini dilaksanakan setelah selesai menebar sami, sami ditari oleh para bapa-bapak dan pemuda secara perlahan-lahan membentuk lingkaran.
- g. *Manganuina* (pengambilan hasil), Setelah sami ditari dan membentuk satu kolam, ikan-ikan terkumpul . *Ratumbanua* akan mengambil ikan yang pertama, diikuti tokoh agama dan pemerintah.
- h. *Matahia Ina* (membagi hasil), ikan yang terkumpul dikelompokkan menurut jenisnya dan dibagi oleh ratumbanua kepada masyarakat.
- i. *Manarimma Alama* (ucapan syukur). tahap terakhir berbentuk syukuran makan bersama dengan tuntunan doa oleh pendeta.

Hal yang penting sebelum pelaksanaan upacara *Mane'e* diawali dngan melakukan pelarangan/pantangan untuk mengambil ikan di lokasi *Mane'e*, yang disebut "Eha" Eha merupakan bagian yang penting dalam *mane'e*. Eha merupakan larangan untuk mengambil hasil laut di lokasi yang telah ditentukan, baik oleh penduduk setempat ataupun masyarakat luar. Lokasi eha telah ditentukan sesuai kesepakatan adat sebelumnya. Tradisi "Eha" (pantangan/larangan) mengambil sesuatu seseuai jangka waktu yang disepakati bersama berlaku juga dalam bidang pertanian.

#### IV. PENUTUP

1. Masyarakat kepulauan Talaud merupakan masyarakat adat ditandai dengan kuatnya peran institusi adat dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat.
2. Sebagai kawasan perbatasan, masyarakat Talaud telah mengalami interaksi budaya yang panjang dengan bangsa tetangga, namun identitas budaya masyarakat nyata dan terus dipertahankan.
3. Setelah mengalami pemekaran dari kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 2002, maka telah terbentuk berbagai organ pemerintahan Kabupaten di daerah ini, yang sekaligus hadirnya para birokrat baru dari luar daerah maupun dari dalam masyarakat Talaud, namun tradisi yang telah dianut turun temurun tetap dipegang bahkan dikembangkan oleh pemerintah menjadi kekuatan pembangunan daerah.
4. Sejak menjadi daerah otomom Kabupaten, maka secara perlahan-lahan telah terjadi pergeseran pola mata pencaharian yang homogen pertanian perikanan tradisional ke bentuk yang heterogen, namun semangat budaya kebersamaan dalam bidang pertanian masih terbawa hingga sekarang. Perubahan hanya akan berlangsung dalam aspek material.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. 1982. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kehidupan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Tangkilisan, M.E. dan Suoth, A. 2005. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Sangihe Talaud*. BKSNT Manado
- Tangkilisan, M.E. dan Rawis, J. 2004. *Memahami Fungsi Sosial Dalam Seni Masamper, Sebagai Salah Satu Ekspresi Seni Rakyat Etnis Sangihe Talaud Manado* BKSNT Manado.
- Tandi, R. 1973. *Masuknya Agama Kristen di Daerah Sangihe Talaud*. Manado Universitas Sam Ratulangi.
- Ulaen, A.J. 2003. *Nusa Utara, dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tumenggung, Zis. 1982. *Sistem Gotong-Royong Masyarakat Pedesaan Sulawesi Utara*. Depdikbud.

# PERANAN ELITE LOKAL DALAM KETERATURAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW

Pristiwanto

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah bangsa dan negara tidak terlepas dari sistem nilai budaya atau adat istiadat masing-masing pendukung kebudayaannya terutama bangsa Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan budaya. Koentjaraningrat merumuskan bahwa nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat.

Adanya sistem nilai budaya, setiap warga dari suatu suku bangsa telah memiliki norma. Norma ini muncul dari hasil kesepakatan antar warga yang disadari atau tidak disadari. Pada tingkat yang lebih kompleks dibentuk suatu lembaga adat dengan beberapa orang yang bertugas sebagai pengayom pelaksanaan adat tersebut baik yang bersifat permanen maupun tentatif. Lembaga adat yang terbentuk dalam suatu suku bangsa merupakan bagian dari organisasi sosial. Dalam konsep antropologi, organisasi sosial antara lain terdiri atas sistem kekerabata dan organisasi politik. Haviland menggambarkan organisasi politik dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Disebut bahwa organisasi politik merupakan sarana untuk memelihara tertib sosial dan mengurangi kesimpangsiuran. Organisasi politik tersebut terbagi dalam empat kategori, yaitu : 1) kelompok tidak menetap (*band*), 2) suku (*tribe*), 3) masyarakat berpemimpin (*chiefdom*), negara. *Band* dan *tribe* dikelompokkan pada sistem politik yang tidak berpusat, sedangkan *chiefdom* dan negara dikelompokkan pada sistem politik yang berpusat. Khusus organisasi kesukuan mempersatukan sejumlah gerombolan atau unit sosial lain karena adanya faktor-faktor yang meliputi seluruh suku itu, seperti persatuan antarkelompok kekerabatan seperti klen yang mempersatukan orang-orang dari gerombolan atau komunitas, atau kelompok umur, atau asosiasi yang terpisah-pisah dan yang menembus garis kekerabatan dan batas-batas daerah. Keputusan kelompok biasanya diambil atas dasar mufakat, dimana orang yang paling berpengaruh biasanya memikul tanggung jawab yang lebih besar atas keputusannya



dari pada orang-orang lain. Dalam banyak masyarakat kesukuan, unit organisasi dan pemegang kekuasaan adalah klen yaitu asosiasi orang-orang yang menganggap dirinya keturunan dari leluhur yang sama. Di dalam klen, para sesepuh/kepala bertanggung jawab atas pengaturan urusan para anggotanya dan mewakili klen dalam hubungan dengan klen lain. Sebagai kelompok, para sesepuh dari semua klen dapat merupakan sebuah dewan yang mengambil tindakan di dalam suku atau atas nama suku dalam hubungan dengan pihak luar.

Penjelasan Haviland tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan tradisional, umumnya lebih mengutamakan hubungan atau kedekatan pribadi (*personalized relationship*). Pemimpin melakukan kontak langsung dengan para warganya. Demikian pula dalam pengambilan keputusan adat dan pembuatan ketentuan adat lebih diutamakan kesepakatan bersama, yang dengan demikian para warga akan mematuhi ketentuan adat yang telah disepakati bersama. Penghormatan pemimpin didasarkan karisma serta kemampuan yang dimiliki.

Sebuah lembaga adat tidak terlepas dari kepemimpinan seorang pemimpin karena kepemimpinan merupakan suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial seorang pemimpin umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu (*local point*) pembuat keputusan. Untuk melihat posisi pemimpin tradisional dalam kehidupan masyarakat, Max Weber membedakan atas kekuasaan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno; kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (*legal*) yang didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan terhadap peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah; kekuasaan karismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak-corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya.

Tidak sedikit sistem pemerintahan tradisional yang pernah atau masih bertahan di Indonesia. Umumnya kekuasaan diperoleh oleh pewarisan, adanya keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima, dan adanya hubungan darah baik secara affinal maupun consanguinal.

Keberadaan pemimpin formal ataupun informal di Bolaang Mongondow diwarnai sistem nilai/ajaran agama dan adat setempat. Terpilihnya mereka sebagai pemimpin di masyarakat tidak terlepas dari sejarah, keahlian, pendidikan dan perilaku yang ditunjukkan demi menunjang tatanan kehidupan bermasyarakat di masa lampau dan sampai sekarang. Terlebih perkembangan masyarakat dan dinamika sosial bolaang mongondow dewasa ini dengan arus informasi, komunikasi yang semakin terbuka yang bisa membawa dampak ketidakaturan dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, aturan-aturan adat yang tercermin nilai-nilai luhur sudah pasti mengalami pergeseran sebagai akibat dari pengaruh dinamika sosial dan perubahan budaya, baik karena faktor ekstern maupun faktor intern, ramun



proses pewarisan budaya, tetap berprinsip untuk tidak membiarkan terjadinya pengaruh nilai-nilai budaya asing yang sama sekali bertentangan dengan kepribadian kita sebagai suatu bangsa yang memiliki etos dan pandangan hidup Pancasila, ajaran agama, dan adat istiadat.<sup>1</sup>

Adat istiadat Bolaang Mongondow yang sudah terpelihara sampai sekarang tidak terlepas dari peranan kaum elit lokal di masyarakat serta aturan-aturan yang mendukungnya. Kelompok elit di Bolaang Mongondow tersebut digolongkan a) pemimpin formal : Sangadi<sup>2</sup> dan perangkatnya, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan perangkatnya b) pemimpin informal : Jiow<sup>3</sup>, Guhanga<sup>4</sup>, Guranga<sup>5</sup>, elit pendidik (cendekiawan), elit birokrasi pemerintahan (PNS), elit ekonomi (pengusaha/petani berhasil).

Kelompok elit lokal yang merupakan tempaan pengalaman masa lampau yang telah berpola sedemikian rupa dalam masyarakat, seharusnya selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan yang selalu berubah-ubah. Akan tetapi individu atau kelompok elit tertentu merasa tenag jika ia bertindak sesuai dengan pola-pola yang telah dikenalnya selama ini, dan akan merasa tertekan jika ia tiba-tiba berhadapan dengan pola yang lain di luar kebiasaan.<sup>6</sup>

Pola-pola masyarakat bolaang mongondow selama ini yang masih terpelihara seperti : Pogogutat Pototolu adi<sup>7</sup>, Tonggolipu, Posad atau Mokodilu, upacara Mopuluai I Adi, Gonsingan, Pongandeagaan, Tonsingogon Haimbuloyan, Upacara Kematian<sup>7</sup>. Pola tersebut masih dianut masyarakat setempat tidak terlepas dari peran pemimpin lokal yang terus menerus menyuarakan untuk mempertahankan budaya luhur.

Kendala kebijakan sangadi dan pemimpin informal lainnya tidak selalu sejalan dengan kerjasama semua masyarakat. Bukanlah sikap masyarakat yang mau atau tidak mau menerima instruksi dan program pemerintah, tetapi sikap mereka apakah menerima atau menolak kekuasaan Sangadi.

<sup>1</sup> Dimingos Soares, "Aturan-aturan adat yang berkenanan dengan kekuasaan dan pemilikan", dalam makalah *Kongres Kebudayaan* 29 Oktober 1991 di Jakarta, hlm 32

<sup>2</sup> *Sangadi* adalah kepala desa yang dipilih oleh masyarakat atau pejabat pemerintah yang ada di Bolaang Mongondow

<sup>3</sup> *Jiow* adalah Imam yang menetap di salah satu masjid di Bolaang Mongondow

<sup>4</sup> *Guhanga* adalah perangkat adat yang membidangi masalah perkawinan di Bolaang Mongondow

<sup>5</sup> *Guranga* adalah orang yang dituakan mantan perangkat elit desa dalam masyarakat di Bolaang Mongondow

<sup>6</sup> Abdul Kappi. 1988 "Kelompok Elit di Pedesaan" dalam *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: hlm 65.

<sup>7</sup> *Pogogutat* berasal dari kata utat yang berarti saudara kandung atau sepupu. Pototolu adi<sup>7</sup> asal kata tolu adi<sup>7</sup> atau motolu adi<sup>7</sup> yang berarti ayah, ibu dan anak-anak. Pogogutat dilaksanakan bila ada keluarga yang akan melaksanakan pesta perkawinan. *Tonggolipu* Tonggolipu berasal dari kata *lipu* yang berarti desa, kampung, tempat kediaman. Tonggolipu ini dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan pembangunan dalam desa. *Posad* atau *Mokodilu* berarti saling membantu yang pada saat umumnya berbentuk organisasi. Organisasi posad ini terbentuk dari sejumlah anggota sesuai kebutuhan. *Mopuluai I Adi* artinya bayi dibawa ke luar atau turun tanah. *Gonsingan* artinya pengguntingan rambut bayi. *Pongondeagaan* berasal dari kata *deaga* yang diberi awalan pongon dan akhiran an. *Deaga* berarti kuning sedangkan pongon berarti jadi. Sehingga Pongondeagaan dapat berarti sudah menjadi kuning atau menyebut gadis yang sudah mulai dewasa dengan istilah Pongondeagaan. *Tonsingogon Haimbuloyan* salah satu daur hidup (life Cycle) yang dijalani oleh setiap manusia adalah perkawinan. *Upacara Kematian* pada masyarakat Bolaang Mongondow. Lihat Lily E.N Saud et al, 2004. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Manado Hlm 37-64

Kedudukan sangadi di pedesaan dalam pemerintahan terendah di Bolaang Mongondow masih tetap dipilih oleh penduduk desa dan tidak menerima gaji tetap. Sebaliknya sangadi yang berkedudukan di kelurahan sudah dipilih oleh pemerintah dalam hal ini dipilih oleh pemerintah daerah dan memperoleh gaji sebagai PNS. Hubungan resmi antara pemerintahan desa/ kelurahan dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, propinsi) dilakukan oleh sangadi, masa jabatanpun dipilih setiap lima tahun oleh semua penduduk desa yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah.<sup>8</sup> Meskipun keduanya di bedakan dengan sistem penggajian tidak berarti bahwa mereka memiliki kekuasaan yang tak terbatas di wilayah mereka.

Sementara itu kedudukan jiw, guhanga dan guranga sebagai pemimpin informal tidak istimewa selayaknya sangadi dalam hal kekuasaan melainkan terbatas pada peran mereka sesuai bidang yang dikuasai misal Jiow menangani masalah keagamaan, guhanga menangani masalah yang berkenaan adat istiadat perkawinan, guranga sebagai penasehat roda pemerintahan.

## 1.2. Permasalahan

Permasalahan difokuskan dengan mengkaji kelompok elit pemimpin yang ada ditingkat kelurahan yang meliputi Sangadi dan aparatnya, pengurus LKMD dan perangkatnya, pimpinan adat (guhanga), mantan tua-tua desa (guranga), pimpinan agama, kaum pendidik.

Dari kelompok-kelompok elit diatas yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sejauhmana peranannya dalam masyarakat maka permasalahan yang akan dilihat :

1. Bagaimana peran pemimpin formal maupun informal dalam menghadapi masuknya pola-pola yang tidak berkenaan dengan masyarakat ?
2. Bagaimana hubungan melalui interaksi yang dilakukan pemimpin formal maupun informal Bolaang Mongondow dengan masyarakat ?
3. Apa saja pengaruh dari peraturan yang diberlakukan oleh pemimpin desa dalam kehidupan masyarakat ?

## 1.3. Kerangka teori

Dilihat dari kajian penelitian historis pedesaan Jawa tentang struktur masyarakat pada akhir abad 18 yang masih berada dalam tahap awal kolonialisme, dan struktur masyarakatnya, secara kasar, terdiri dari tiga golongan : (a) lapisan atas, terdiri dari para pejabat desa yang karena jabatannya mendapat tanah yang luas (tanah *bengkok*) dan berhak mendapatkan tenaga kerja Cuma-Cuma (*pancen*) dari penduduk desa; (b) segolongan petani bebas (*sikep*) yang berhak mendapat pembagian tanah desa, tetapi diharuskan kerja – wajib; dan (c) golongan yang tidak

<sup>8</sup> Mieke Schouten. 1988 "Legitimasi Sementara : Pemerintahan Desa di Minahasa" dalam *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: hlm 87.

mempunyai tanah dan ‘anak semang’ (numpang, bujang) yang hidupnya tergantung dan terikat pada *sikep*.<sup>9</sup>

Merton menyebutkan yang dikutip oleh Abdul Kappi bahwa jika kita melihat suatu masyarakat secara struktural, maka yang kita lihat adalah status-status sosial dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan yang lain. Status sosial disini adalah kedudukan sosial seorang dalam kelompok serta dalam masyarakat aspek dinamis dari status sosial adalah peranan sosial yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Peranan tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah yang mewarnainya. Apabila sejumlah orang atau kelompok yang statusnya sama menurut penilaian sosial, akan menimbulkan suatu lapisan strata. Jika lapisan tersebut menunjukkan tinggi rendah (hirarkhis) maka akan menimbulkan stratifikasi sosial. Mereka yang berada pada lapisan yang tinggi merupakan golongan elit yang pada hakekatnya adalah sebagai pemegang kendali kepemimpinan. Pendapat, keputusan, dan tindakan mereka mempunyai akibat yang penting dan menentukan bagi masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan berakar pada struktur sosial yang tersusun berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status.<sup>10</sup>

#### 1.4. Ruang Lingkup

Perhatian kajian ini tentang peran elit lokal di Bolaang Mongondow dalam menjaga keteraturan sosial budaya masyarakat, produk-produk aturan yang berlaku pada masyarakat dalam pelestarian serta pengembangan yang disesuaikan dengan keadaan yang berlaku, serta hubungannya dengan masyarakat dan pembangunan desa.

Penelitian lokasi dipilih Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan di Kabupaten Bolaang Mongondow provinsi Sulawesi Utara; Lokasi tersebut diatas dipilih karena dianggap masih melestarikan adat istiadat budaya bolaang mongondow yang rentan akan masuknya tatanan pola/informasi karena status daerah masih termasuk desa meskipun dikategorikan dalam kota yang bisa disamakan dengan kelurahan.

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana perwujudan kelompok elit dalam masyarakat pedesaan; mengetahui sejauhmana kelompok elit pemimpin formal maupun informal mewarnai keseluruhan struktur sosial, ekonomi, budaya, tumbuh dan berkembang dengan membawa pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat; mengetahui hubungan sinergi antara kelompok elit pemimpin formal maupun informal dalam keteraturan sosial budaya masyarakat dan pembangunan desa.

<sup>9</sup> Frans Hüskén. 1998 Masyarakat Desa dalam perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980. Jakarta. hlm 45.

<sup>10</sup> Abdul Kappi. 1988 “Kelompok Elit di Pedesaan” dalam ..... hlm 64

## 1.6. Metode Penelitian

Untuk menjangkau data dan informasi tentang peran elit lokal masyarakat Bolaang Mongondow dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Pengumpulan data dan informasi tersebut berdasarkan pada Pedoman Pengumpulan Data yang telah disiapkan oleh Penulis.

Data dan informasi yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan, wawancara, maupun pengamatan dianalisis dan dideskripsikan serta disusun sesuai dengan kerangka laporan yang telah ditetapkan. Sejumlah deskripsi ditunjang dengan peta, dan tabel serta foto yang relevan.

### A) *Pengumpulan Data Di Lapangan*

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap sampel penelitian.

Wawancara terstruktur dituntun dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Data-data pendukung lainnya diperoleh dari sumber-sumber data pada instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan penelitian ini.

### B) *Analisis data*

Data-data yang terkumpul dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena hasil pengumpulan data maupun pengamatan data-data pendukung di lapangan.

## 1.7. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai alasan dan latar belakang serta salah satu contoh peran elit lokal yang mewarnai sistem kehidupan masyarakat di bolaang mongondow, kemudian memahami kelompok-kelompok elite lokal yang sudah ada dengan aturan-aturan yang mengikatnya. Hubungan elite lokal dengan masyarakat serta bertumbuhnya elite-elite baru yang tidak sejalan dengan tatanan kehidupan masyarakat setempat yang ditunjang dengan arus informasi dan perubahan ke arah yang modern.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang peran elite lokal dalam struktur kepemimpinan terendah sebagai salah satu kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan dengan mengedepankan unsur budaya yang masih dipertahankan dan dilestarikan. Melengkapi berbagai referensi kajian elite-elite yang ada di masyarakat melalui pendekatan sosial budaya.

## II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 2.1. Sejarah Desa

Pada tahun 1700-1715 berdiri sebuah perkampungan bernama Ibulu yang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Dadungkat. Kemudian kampung yang

dipindahkan kesebelah timur dan diganti namanya menjadi Ibongkudu. Pada tahun 1740 kampung itu dipindahkan kembali kesebelah Barat lalu diganti dengan nama Kobiyo.

Pada tahun 1815-1860 diganti pemimpin yang baru bernama Makasa. Beliau merubah perkampungan baru diganti dengan nama Holuwang dan pada tahun 1860-1870 pimpinan kepala suku dipimpin oleh kepala suku Ongking dan nama perkampungan berubah menjadi Itapa. Kemudian pada tahun 1870 – 1900 pimpinan kepala suku dipangku oleh seorang yang kuat bermental baik serta berani yang bernama Simbuludon.

Pada tahun 1900-1908 perkampungan semakin luas sehingga dibagi menjadi dua yakni kampung Kobiyo dan Kampung Panta. Dan pada tahun 1908-1910 kedua kampung tersebut digabung menjadi satu dan diberi nama “*Kope*” dibawah pemerintahan Sangadi Uyun Tungkagi dan diganti oleh Ali Olih yang memerintah dari tahun 1910-1911. Pada tahun 1911 Kampung Kope dirubah namanya menjadi kampung Kopandakan. Mantan nama-nama Kepala Desa (Sangadi) Kopandakan :

- Konompol Walang (1911-1912)
- Mobiling Gonibala (1912-1913)
- Bubuyungki Makalalag (1913-1914)
- Anggai Manoppo (1914-1915)
- Bobuyongki Makalalag (1915-1917)
- Mohama Mokoginta (1917-1918)
- Lauseng Lamaluta (1918-1923)
- Regen Manoppo (1923-1924)
- Bahansubu C. Manoppo (1924-1925)
- Losik Lobud (1925-1943)
- Pogopat U. Kombo (1944-1945)
- Ulod Pilis Manoppo (1945-1946)
- Saladin Herman Cornelin Manoppo (1947-1950)
- Lobu'Datundungon (Juli-September 1950)
- Sansak Tomponu (1950-1955)
- Tobuon Lobud (1955-1963)
- Dugian M. Dungalang (1963-1970)
- Kasim Otton (1970-1979)
- Ibrahim P. Sugeha (1979-23 Maret 1987)
- Puliung Donggalang (1987-1988)
- Djola T. Lobud (1988-1991)
- Okoli L. Dadea (1991-1993)
- Marsidi Kadengkang (1993-1996)

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa (Sangadi) Marsidi Kadengkang ini terjadi pemekaran desa Kopandakan menjadi desa Kopandakan I dan desa Kopandakan II (sebagai desa persiapan) dengan batas Kinoladungan, Kopandakan I tetap dipimpin Marsidi Kadengkang. Kepala Desa Marsidi Kadengkang terus

memimpin desa Kopandakan I sampai pada tahun 2003, kemudian digantikan oleh Sangadi terpilih pada waktu itu yaitu Tawakal Baluwo, kepala desa Tawakal Baluwo mulai memimpin desa Kopandakan I pada tanggal 16 Juni 2003 sampai saat ini.

## 2.2. Lokasi dan Lingkungan Alam

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara, terletak antara  $0^{\circ}30'$  –  $1^{\circ}0'$  Lintang Utara dan  $123^{\circ}$  –  $124^{\circ}$  Bujur Timur. Batas-batasnya meliputi : sebelah utara – laut Sulawesi, sebelah timur – kabupaten Minahasa, sebelah selatan – Teluk Tomini, sebelah barat – Propinsi Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan dan 278 desa/kelurahan. Pada tahun 2002, terdapat 3 buah kecamatan baru sebagai akibat dari pemekaran wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pinogaluman, Posigadan, dan Nuangan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah kecamatan Passi dengan ibukota Kecamatan Bilalang yang memiliki 22 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Sangkup dengan ibukota Kecamatan Sangkup I serta Kecamatan Kaidipang dengan ibukota Kecamatan Boroko kedua kecamatan yang memiliki 8 desa.

Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 8,358,04 KM<sup>2</sup>. Dengan luas sebesar itu, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Propinsi Sulawesi Utara, karena mencakup lebih dari separuh (54%) wilayah Sulawesi Utara setelah Gorontalo berdiri menjadi wilayah propinsi sendiri. (*Bolaang Mongondow Dalam Angka BPS Kab. Bolm:ong 2004-2005*)

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kabupaten definitif sesuai hukum. Ada 27 kecamatan dan 278 desa yang terletak di kabupaten Bolaang Mongondow. Nama-nama 27 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Bolaang Uki, Posigadan, Dumoga Barat, Dumoga Utara, Dumoga Timur, Pinolosian, Pinolosian Timur, Kotabunan, Nuangan, Modayag, Lolayan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Utara, Passi Barat, Passi Timur, Poigar, Bolaang, Lolak, Sang Tombolang, Sangkub, Bintauna, Bolang Itang Timur, Bolang Itang Barat, Kaidipang, Pinogaluman. (Sesuai Usulan Pemekaran Kota Kotamobagu dan Kotamobagu Utara yang sementara tahun 2006 baru Ampres).

Dengan topografi yang bervariasi Kabupaten Bolaang Mongondow dari pantai dengan ketinggian 1 meter dari permukaan laut sampai dengan ketinggian dari permukaan air laut 650 meter. Kecamatan yang berada dari pasang surut air laut adalah Kecamatan Bolang Uki, Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Timur, Kotabunan, Nuangan, Poigar, Bolaang, Bintauna, Bolang Itang Timur, Bolang Itang Barat, Kaidipang, Pinogaluman sementara Kecamatan Modayag dan Passi berada 650 meter dan 630 meter dari permukaan air laut keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow

| No     | Kecamatan          | Ibukota Kecamatan | Jumlah Desa | Tinggi (M) |
|--------|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| 1      | Bolaang Uki        | Molibagu          | 13          | 1          |
| 2      | Posigadan          | Momalia I         | 10          | 1          |
| 3      | Dumoga Barat       | Doloduo           | 11          | 150        |
| 4      | Dumoga Utara       | Mopuya Utara      | 12          | 150        |
| 5      | Dumoga Timur       | Imandi            | 15          | 150        |
| 6      | Pinolosian         | Pinolosian        | 11          | 1          |
| 7      | Pinolosian Timur   | Onggunoi          | 8           | 1          |
| 8      | Kotabunan          | Koabunan          | 11          | 1          |
| 9      | Nuangan            | Nuangan           | 9           | 1          |
| 10     | Modayag            | Modayag           | 14          | 650        |
| 11     | Lolayan            | Tungoi            | 13          | 350        |
| 12     | Kotamobagu Timur   | Kotabangon        | 8           | 337        |
| 13     | Kotamobagu Selatan | Poyowa Besar      | 9           | 257        |
| 14     | Kotamobagu Barat   | Mongkonai         | 5           | 225        |
| 15     | Kotamobagu Utara   | Bilalang I        | 7           | 368        |
| 16     | Passi Barat        | Passi             | 9           | 450        |
| 17     | Passi Timur        | Pangian           | 9           | 630        |
| 18     | Poigar             | Poigar            | 14          | 1          |
| 19     | Bolaang            | Inobonto          | 13          | 1          |
| 20     | Lolak              | Lolak             | 16          | 2          |
| 21     | Sang Tombolang     | Maelang           | 9           | 2          |
| 22     | Sangkub            | Sangkub I         | 8           | 10         |
| 23     | Bintauna           | Pimpi             | 10          | 1          |
| 24     | Bolang Itang Timur | Bohabak I         | 7           | 1          |
| 25     | Bolang Itang Barat | Bolang Itang      | 10          | 1          |
| 26     | Kaidipang          | Boroko            | 8           | 1          |
| 27     | Pinogaluman        | Buko              | 9           | 1          |
| Jumlah |                    |                   | 278         |            |

Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow 2004

Menurut hasil survey Dinas Pertanian dan Perkebunan jenis tanah di wilayah ini adalah latosol dan lempung berpasir. Kedalam tanah atau ketebalan kulit bumi/tanah banyak mengandung hara. Keadaan iklim di daerah ini umumnya hampir sama dengan daerah tropis lainnya yaitu mengalami musim kemarau dari bulan April hingga September dan musim hujan bulan Oktober hingga Maret.



Tabel 2. Nama-nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Bolaang Mongondow

| No | Nama Gunung   | Tinggi | Kecamatan      |
|----|---------------|--------|----------------|
| 1  | Batu Bulawan  | 1.790  | Bolang Uki     |
| 2  | Gambuta       | 1.954  | Bolang Itang   |
| 3  | Paniki        | 1.817  | Bolang Uki     |
| 4  | Paupau        | 1.815  | Kaidipang      |
| 5  | Moayat        | 1.780  | Modayag        |
| 6  | Sinandaka     | 1.770  | Bolang Uki     |
| 7  | Kabila        | 1.732  | Lolak          |
| 8  | Ambang        | 1.689  | Modayag        |
| 9  | Limibut       | 1.568  | Passi          |
| 10 | Simbalang     | 1.521  | Kotabunan      |
| 11 | Bumbungon I   | 1.496  | Passi          |
| 12 | Osing-Osing   | 1.461  | Kotabunan      |
| 13 | Bumbungon II  | 1.420  | Dumoga         |
| 14 | Ginolontungan | 1.420  | Sang Tombolang |
| 15 | Hulu Moat     | 1.370  | Modayag        |
| 16 | Kapaya        | 1.331  | Bolaang        |
| 17 | Mongaladia    | 1.325  | Bolaang Uki    |

Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow 2004

Dari tujuh belas gunung yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow mulai dengan ketinggian 1.954 Gunung Gambuta di Kecamatan Bolang itang sampai yang terendah dengan ketinggian 1.325 di Kecaamatan Bolang Uki. Terdapat juga delapan belas sungai yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow mulai dari yang terpanjang yaitu sungai Dumoga dengan panjang 87,2 Km sampai sungai Salongo 9,1 Km, sungai tersebut antara lain: Dumoga, Sangkub, Hanga, Ongkau Mongondow, Tuadaan, Ayong, Nuangan, Lobong, Milangodaa, Moayat, Pusian, Tobayagan, Kotulidan, Potule, Moyosiboi, Sonduk, Matabulu, Salongo. Sementara itu terdapat delapan danau mulai danau moat, bunong, iloloy, luok/buyat, moayat, tutuyan, paya-paya, sampai danau tondok terdapat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. (*Bolaang Mongondow dalam Angka tahun 2004*).

Jenis tanaman yang ditanam oleh penduduk yaitu tanaman hortikultura seperti tomat, cabe, kubis, kentang, daun bawang yang subur dipekarangan, serta tanaman Palawija seperti padi, jagung yang ditanam di sawah, tegalan dan perkebunan dengan tanaman tahunan seperti, cengkih, pala, kelapa dan buah-buahan pohon durian, mangga sampai pisang.

#### A) Letak Geografis Desa

Desa Kopandakan I merupakan suatu organisasi masy yang memiliki wilayah, kedudukan, dan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Desa Kopandakan I termasuk organisasi pemerintahan desa yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa (Sangadi) yang dibantu oleh staf aparatur pemerintahan desa, dan juga desa ini terdiri dari 5 (lima) dusun yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Dusun

Dari 278 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow desa Kopandakan I termasuk salah satu desa dari 6 desa dan 3 kelurahan dalam wilayah kecamatan Kotamobagu Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow. Desa ini terletak pada jarak + 4 km dari ibukota kecamatan (Desa Poyowa Besar I) dan jarak dari kotamobagu ibu kota kabupaten Bolaang Mongondow  $\pm$  5 km. Ketinggian dari permukaan laut  $\pm$  200 m dari atas permukaan laut.

**B) Batas Desa**

Adapun batas-batas wilayah desa Kopandakan I adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Poyowa Kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kopandakan II
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Ongkag
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Bungko

**C) Luas Wilayah**

Luas wilayah desa Kopandakan I yaitu 421,75 Ha yang dapat digambarkan dalam bentuk tabel menurut penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah Desa Kopandakan I Menurut Penggunaannya

| No | Penggunaan                       | Luas (ha) |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | Pemukiman umum                   | 81        |
| 2  | Perkantoran                      | 0,50      |
| 3  | Sekolah                          | 2,5       |
| 4  | Tempat peribadatan               | 0,25      |
| 5  | Kuburan/makam                    | 1,50      |
| 6  | Sawah pengairan teknis (irigasi) | 284       |
| 7  | Ladang/tegalan                   | 45,5      |
| 8  | Lapangan sepak bola              | 1         |
| 9  | Kolam                            | 5,5       |

Sumber : *Profil Desa Kopandakan I. 2003*

**D) Keadaan Tanah**

Keadaan tanah desa Kopandakan I tidak berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh desa-desa lain yang berada di kecamatan Kotamobagu Selatan yaitu banyak terdapat dataran rendah, dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, untuk tanah pertanian.

### E) Keadaan Iklim

Keadaan iklim desa Kopandakan I adalah iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim hujan, dengan keadaan suhu rata-rata 38-40°C.

### 2.3. Penduduk

Berdasarkan data terakhir (profil desa Kopandakan I 2003) penduduk desa Kopandakan I bertumbuh 3592, yang terdiri atas :

- Laki-laki 1780 jiwa
- Perempuan 1812 jiwa

Untuk lebih memperjelas tentang keadaan penduduk desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan secara keseluruhan, maka pada bagian ini akan dikemukakan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tabel berikut :

Tabel 4. Komposisi penduduk Desa Kopandakan I menurut umur jenis dan jenis kelamin

| No    | Golongan Umur       | Jenis kelamin |           | Jumlah |
|-------|---------------------|---------------|-----------|--------|
|       |                     | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1     | 0 – 12 bulan        | 57            | 64        | 121    |
| 2     | 13 bulan – 4 tahun  | 115           | 125       | 240    |
| 3     | 5 – 6 tahun         | 110           | 135       | 245    |
| 4     | 7 – 12 tahun        | 120           | 150       | 270    |
| 5     | 13 – 15 tahun       | 114           | 140       | 254    |
| 6     | 16 – 18 tahun       | 270           | 250       | 520    |
| 7     | 19 – 25 tahun       | 240           | 230       | 470    |
| 8     | 26 – 35 tahun       | 160           | 140       | 300    |
| 9     | 36 – 45 tahun       | 159           | 153       | 312    |
| 10    | 46 – 50 tahun       | 150           | 145       | 295    |
| 11    | 51 – 60 tahun       | 131           | 129       | 260    |
| 12    | 61 – 75 tahun       | 100           | 98        | 198    |
| 13    | lebih dari 76 tahun | 54            | 53        | 107    |
| Total |                     | 1780          | 1812      | 3592   |

Sumber : Profil Desa Kopandakan I 2003

Dari tabel diatas tersebut dapat kita lihat bahwa kelompok umur usia sekolah merupakan kelompok yang cukup besar (6-12 tahun) dimana kelompok ini terdiri dari pelajar sekolah dasar sampai mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai potensi vital dan strategis untuk mendapat perhatian dan bimbingan dalam pembangunan generasi muda untuk mengisi pembangunan.

#### 2.4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian dari sebagian besar penduduk di desa Kopandakan I adalah dibidang pertanian dan yang lainnya bekerja di bidang peternakan, perdagangan, jasa angkutan, pegawai negeri sipil dan lain-lain tabel berikut menggambarkan keadaan penduduk desa Kopandakan I berdasarkan mata pencahariannya.

Tabel 5. Komposisi penduduk Desa Kopandakan I menurut mata pencaharian

| No    | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-------|------------------|--------|
| 1     | Petani           | 1037   |
| 2     | Peternak         | 273    |
| 3     | Pedagang         | 30     |
| 4     | Jasa angkutan    | 190    |
| 5     | Pegawai          | 190    |
| 6     | Lain-lain        | 115    |
| Total |                  | 1835   |

Sumber : Profil Desa Kopandakan I 2003

Berdasarkan data diatas nampak bahwa sebagian besar penduduk di desa Kopandakan I adalah bermata pencaharian pokok dibidang pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan). Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah desa kopandakan I merupakan dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi yang sangat cocok untuk tanah pertanian

#### 2.5. Keadaan Sosial dan Ekonomi

##### A) Pendidikan

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diperlukan dengan menyediakan sarana pendidikan guna menunjang tercapainya tujuan tersebut. Untuk itu saat ini fasilitas-fasilitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah pertama sudah ada diwilayah kopandakan I.

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan maju mundurnya suatu bangsa. Kemajuan suatu masyarakat antara lain terlihat pada aspek pendidikan. Kemajuan suatu pendidikan akan sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, juga oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia dalam suatu masyarakat. Dilihat dari kedua aspek tersebut, pendidikan yang berada di desa Kopandakan I terus mengalami peningkatan terutama dengan dicanangkannya wajib belajar 9 tahun.

Guna menunjang pendidikan yang berada di desa Kopandakan I, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah cukup besar dan sangat menyentuh terutama pendidikan dasar dan menengah untuk membangun sarana

dan prasarana pendidikan. Dan sampai tahun 2003 sarana pendidikan yang ada di desa Kopandakan I dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6. Fasilitas (Sarana) Pendidikan di Desa Kopandakan I

| No    | Mata Pencapaian   | Jumlah |
|-------|-------------------|--------|
| 1     | Taman Kanak-Kanak | 1      |
| 2     | Sekolah Dasar     | 3      |
| 3     | Madrasah          | 1      |
| 4     | SLTP              | 1      |
| 5     | SMU               | -      |
| 6     | Perguruan Tinggi  | -      |
| Total |                   | 1835   |

Sumber : Profil Desa Kopandakan I 2003

### B) Agama

Sebagian besar penduduk Desa Kopandakan I memeluk agama Islam dan sebagian lainnya menganut agama Kristen. Pembinaan bidang keagamaan senantiasa dilaksanakan guna mewujudkan kerukunan hidup antara pemeluk agama. Disamping itu untuk meningkatkan peranan umat beragama dalam menunjang program pembangunan disegala bidang/ aspek kehidupan masyarakat, maka dilakukan usaha-usaha, antara lain melalui pembinaan-pembinaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari usaha-usaha pembinaan tersebut, melalui lembaga-lembaga/organisasi-organisasi kemasyarakatan/ keagamaan, dan salah satunya adalah telah dibentuknya BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama). Sampai saat ini kehidupan keagamaan di desa Kopandakan I berjalan lancar, baik melalui kegiatan intern umat beragama, antar umat beragama maupun umat beragama dengan pemerintah.

Adapun jumlah penduduk menurut golongan agama dan jumlah sarana peribadatan yang berada di desa Kopandakan I, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7. Keadaan dan jumlah Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah di Desa Kopandakan I

| No    | Golongan Agama    | Jumlah  |                      |        |
|-------|-------------------|---------|----------------------|--------|
|       |                   | Pemeluk | Sarana ibadah        | Jumlah |
| 1     | Kristen Protestan | 262     | Gereja Protestan dan | 3      |
| 2     | Katolik           | 38      | Katolik              |        |
| 3     | Islam             | 3292    | Masjid + Mushola     | 3      |
| Total |                   | 3592    |                      | 6      |

### C) Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah terus berupaya melakukan penyediaan sarana/ prasarana kesehatan yang memadai kepada masyarakat seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan.

Usaha kearah pelayanan kesehatan masyarakat di desa Kopandakan I terus diupayakan oleh pemerintah, terutama dengan memperbanyak kader-kader kesehatan, termasuk bidan kampung (Biang), pengelola Posyandu yang berada di beberapa lingkungan yang lokasinya berjauhan dengan pusat pemerintahan desa. Untuk mengetahui tentang sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di desa Kopandakan I hingga sekarang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Kopandakan I

| No | Sarana / Prasarana Kesehatan | Jumlah         |
|----|------------------------------|----------------|
| 1  | Poliklinik                   | 1 buah         |
| 2  | Posyandu                     | 1 buah         |
| 3  | Dokter Praktek               | 1 tempat/orang |
| 4  | Dokter Umum                  | 1 tempat/orang |
| 5  | Bidan                        | 5 orang        |
| 6  | Perawat                      | 3 orang        |
| 7  | Dukun Bayi terlatih          | 3 orang        |
| 8  | Pembina Posyandu             | 1 orang        |
| 9  | Kader Posyandu               | 6 orang        |

Sumber : Profil Desa Kopandakan I 2003

### D) Sistem Ekonomi

Usaha pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder melalui berbagai jenis mata pencaharian. Di desa Kopandakan I jenis mata pencaharian utama masyarakatnya adalah sebagai petani dengan berbagai jenis tanaman. Dalam mengolah tanah pertanian ada yang menggunakan teknologi modern seperti traktor di lain pihak ada juga yang tidak menggunakan teknologi modern karena dapat mengurangi tenaga kerja manusia. alat-alat pertanian seperti bajak yang ditarik dengan sapi, pacul, tugal. Parang, sabit dan kapak masih umum digunakan oleh masyarakat untuk membuka dan mengolah lahan pertanian.

Hasil komoditi pertanian dijual melalui KUD bahkan ada juga konsumen yang membeli secara langsung kepada petani. Harga komoditi tertentu seperti beras dijual mengikuti harga standar yang telah ditetapkan, tetapi pada musim paceklik atau kemarau harga dapat melebihi harga standar, sama halnya komoditi lainnya misalnya harga

komoditi sayuran : cabe, tomat, daun bawang bisa naik sewaktu-waktu terlebih menjelang hari hari besar misal Hari Raya Idul Raya Fitri, Qurban, Hari Natal dan Tahun Baru.

Kategori industri pengolahan adalah industri rumah tangga yang menghasilkan sumber pendapatan keluarga misal kacang goyang ataupun kue-kue yang dikemas sedemikian rupa dan dipasarkan di supermarket-supermarket.

### E) Organisasi Sosial

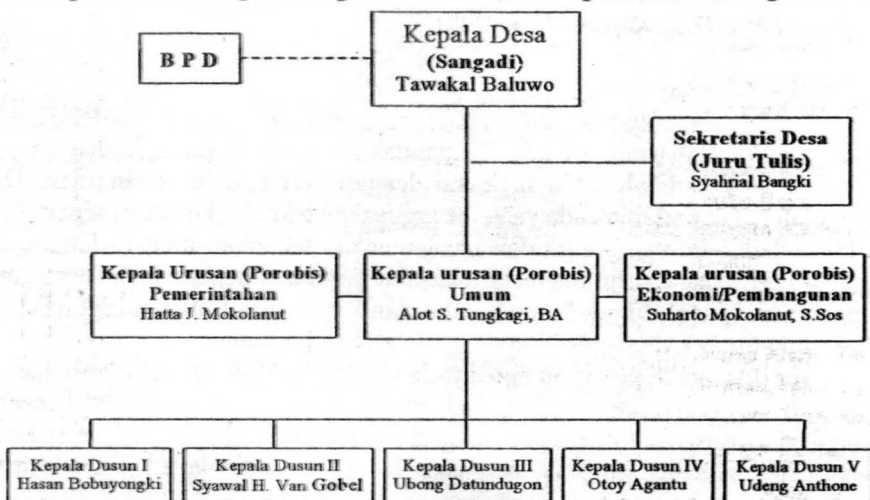
Lembaga dalam kemasyarakatan selain dibentuk oleh aparat pemerintah juga dibentuk oleh masyarakat sendiri. Bentuk-bentuk lembaga tersebut bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Lembaga tersebut misalnya BPD, LKMD, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), BKMT (Badan Kerohanian Majelis Taqlim) Kegiatan PKK dan BKMT bertujuan untuk menambah wawasan serta memberikan peran aktif bagi kaum wanita dalam pembangunan desa. Bertujuan pula meningkatkan kedudukan wanita melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

Pada bulan-bulan suci keagamaan bulan puasa Romadhon banyak diisi kegiatan-kegiatan pengajian dan keagamaan lainnya oleh anggota BKMT desa serta bazar-bazar murah yang menyediakan berbagai makanan lauk pauk ataupun makanan siap saji dan minuman yang beraneka ragam kelezatannya.

### 2.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Struktur merupakan kerangka kerjasama atas dasar pembagian kerja didalam suatu organisasi. Struktur Organisasi pemerintahan desa menggambarkan komponen-komponen yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa kopandakan I sebagai berikut :





### III. PEMBAHASAN

Berhasilnya pembangunan akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kelancaran pelaksanaan pembangunan desa adalah ditentukan oleh adanya peranan perangkat pemerintah desa. Sebab diakui bersama bahwa umumnya perangkat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya masih penuh dengan keterbatasan. Baik itu keterbatasan dalam pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang rendah disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang rendah dilain pihak dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan, sehingga hal ini dapat pula mempengaruhi kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Bagaimana mungkin setiap desa akan menjadi maju kalau aparat/ perangkat tidak memiliki bekal pengetahuan yang tinggi terhadap hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa kepala desa telah dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas maka harus perlu didukung dengan adanya perangkat-perangkat desa yang memiliki tingkat keahlian dan ketrampilan yang memadai agar dengan demikian akan tercipta sistem pemerintahan desa yang harmonis dan serasi.

Kemampuan pelaksanaan pemerintahan desa akan tergantung pula pada perangkat-perangkat desa terutama bagi seorang sekretaris desa harus punya keahlian dan ketrampilan yang tinggi dalam menguasai segala macam administrasi desa, kepala-kepala urusan harus dapat mengetahui bidang tugasnya masing-masing, serta kepala kepala dusun harus perlu pula memiliki bekal pengetahuan agar Ia mampu menciptakan suasana yang aman, serta dapat dipercaya oleh masyarakat dan mampu mengerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa juga akan sangat didukung oleh kemampuan aparat/perangkat desa itu sendiri. Karena majunya suatudes a akan mencerminkan pula kemajuan dari kepemimpinan kepala desa beserta perangkat-perangkatnya. Oleh karena begitu banyanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala desa selaku Pemerintah Desa, maka dalam pelaksanaannya perlu dibantu oleh perangkat desa. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1979. Peranan perangkat desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan bahwa perangkat desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang meliputi berbagai permasalahan yang ada.

Oleh sebab itu bagi perangkat desa akan dituntut kemampuan yang optimal, dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh

pemerintah tingkat atas dan mampu melihat hal-hal yang timbul di masyarakat sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat dipadukan secara serasi dan harmonis.

### 3.1. Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979

Yang dimaksud dengan pemerintahan desa menurut UU No. 5 tahun 1979 maka yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bertujuan tidak saja mengadakan tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan disegala bidang diseluruh Indonesia, guna mencapai cita-cita Nasional berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu memperkuat pemerintah desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Sejalan dengan digariskan dalam GBHN tersebut, maka sudah saatnya pula untuk membuat suatu UU Nasional yang mengatur Pemerintahan Desa sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 sesuai dengan perkembangan Orde Baru yang berniat untuk sungguh-sungguh melaksanakan dan mensukseskan pembangunan yang sudah dimulai sejak Pelita I sampai dengan Pelita VI.

Keadaan Pemerintahan Desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada, yang mengatur desa yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (Stbl, 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Stbl, 1938 No. 490 jo. Stbl. 1938, No. 681) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan diatas ini tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

Akibat Desa dan Pemerintahan Desa yang ada sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Undang-undang ini kepada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Sebagai landasan yang dipakai untuk menyusun Undang-undang No. 5 tahun 1979 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi : Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar-Kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam Daerah yang bersifat Istimewa dan Ketetapan MPR No. IV tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menegaskan perlu memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya untuk pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Selain itu, juga Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok pemerintahan di daerah pada ketentuan pasal 88 menyatakan bahwa pengaturan tentang pemerintah desa ditetapkan dengan Undang-Undang. UU ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya. UU ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintahan desa dalam UU ini adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa telah dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Disamping itu juga kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya bebas tugas kepala desa, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut diatas diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas ke bawah. Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan desa terlihat dari adanya Lembaga Musyarah desa yang merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat didesa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tersebut adalah merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

### A) Kepala desa (Sangadi)

Kepala desa (Sangadi) adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Dalam membuat peraturan desa, maka kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa, urusan yang sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih kepala desa dan orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka.

Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa misalnya pembagian tanah desa, dinas desa pemeliharaan mesjid, jalan desa, dan pekerjaan umum lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, seringkali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama atau lembaga lain.

Kepala desa mewakili desa didalam dan diluar hukum. Ia dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, maka tanggung jawabnya ada pada pihak tersebut.

Kepala desa membangun dan memelihara pekerjaan umum seperti jembatan, dam jalan, saluran air, pasar, got, mesjid, lapangan olahraga, taman dsb. Ia wajib mengurusnya agar pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Tugas lain dalam bidang pemerintahan dapat kiranya dirangkum dalam istilah *bestuur-zorg* (urusan pemerintahan) yang bersangkutan tidak saja dengan pemerintahan tetapi juga kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk desa, lahir maupun batin. Misalnya mengurus bidang pertanian, membangun sekolah dasar, mendirikan langgar dan sebagainya.

Kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan bagi desa. Disamping mempunyai wewenang untuk memperoleh hukum, juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukum oleh desa antara lain :

1. Meminjam uang
2. Mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah pihak
3. Mengadakan tuntutan hukum
4. Menerima tuntutan pihak lain terhadap desa

Pasal 10 UU No. 5 tahun 1979 berbunyi :

1. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan

merupakan penyelenggara rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yang dimaksudkan ayat (1), kepala desa :
  - a. Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat.
  - b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 5 tahun 1979 tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa hak, wewenang dan kewajiban kepala desa adalah memimpin urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan desa ialah urusan yang menyangkut masalah rumah tangga desa (otonomi). Hanya saja dalam UU No. 5 tahun 1979 tidak disebut urusan apa yang termasuk urusan rumah tangga desa.

Tetapi secara garis besar dapat dikemukakan bahwa urusan rumah tangga desa mencakup macam-macam urusan yang berkaitan dengan kepentingan desa dan masyarakat desa yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan rumah tangga Daerah. Urusan Rumah tangga daerah ini berasal dari urusan pemerintah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. Berhubung ada dua tingkat daerah, maka ada urusan Pemerintah Daerah Tingkat I dan urusan Pemerintah Daerah Tingkat II mengingat perangkat daerah khususnya daerah tingkat II seperti penarikan pajak dilakukan oleh desa.

Kemudian yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum dalam pasal 1 (j) UU No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah memberikan rumusan sebagai berikut : Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

Wewenang dan kewajiban kepala desa mencakup urusan rumah tangga desa dan urusan pemerintah (pusat) maka kedudukan kepala desa merupakan alat pemerintah pusat, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Dari apa yang menjadi hak, wewenang dan kewajiban kepala desa tersebut, maka tugas dan fungsi kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam PerMendagri No. I tahun 1981 adalah sebagai berikut :



a. Tugas Kepala Desa meliputi :

- Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri,
- Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketenraman, ketertiban di wilayah desanya.

b. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa berfungsi :

- Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya,
- Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya,
- Melaksanakan tugas dari pemerinah dan pemerintah daerah,
- Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
- Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat didesa,
- Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Oleh karena itu jika berbicara tentang efektifitas dari peranan kepala desa selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selalu dikaitkan dengan suatu penilaian atau evaluasi hasil yang dicapai dari suatu proses kegiatan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Emerson dalam Drs. Soewarno Handayani (1980 : 16) menjelaskan : Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini dapat dikemukakan contoh secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja dari kepala desa berarti penyelesaian sesuatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Salah satu faktor penentu dari keberhasilan adalah efektifitas namun demikian, salah satu kriteria pengukuran yang sangat menentukan dalam rangka terwujudnya efektifitas suatu pekerjaan adalah efisiensi yaitu perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang dipergunakan. Contohnya dari segi hasil suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa dengan usaha tertentu memberikan hasil yang maksimal, dengan berapa banyak pengorbanan dan biaya dikeluarkan.

### B) Perangkat Desa

Sesuai dengan UU. No.5 Tahun 1979 dikatakan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun. Syarat-syarat untuk jabatan sekretaris, Kepala Urusan dan

Kepala Dusun pada dasarnya sama dengan syarat-syarat kepala desa, hanya ada sedikit perbedaan mengenai lama menetap didesa dan batas umur. Kalau calon kepala desa sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut tinggal di desa yang bersangkutan dan umur minimal 25 tahun maksimal 60 tahun maka untuk calon sekretaris desa, kepala urusan maupun kepala dusun sekurang-kurangnya 1 tahun secara berturut-turut tinggal didesa yang bersangkutan dan umur minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun.

Berbeda dengan kepala desa yang setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri, maka untuk jabatan sekretaris, kepala urusan dan kepala dusun menurut peraturan Mendagri No. 8 tahun 1981 tentang persyaratan sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun dicalonkan dan diajukan oleh kepala desa kepada pejabat yang berwenang mengangkat setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan Lembaga Musyawarah Desa. Jumlah calon yang diusulkan sedikit-sedikitnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang.

Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II dari para calon yang diusulkan oleh kepala desa setelah mendengar pertimbangan Camat. Sedangkan Kepala Urusan dan kepala dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati/walikota kepala daerah tingkat II dari para calon yang diusulkan kepala desa.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan lain sebagainya, maka sebelum diangkat, para calon sekretaris kepala urusan dan kepala dusun diseleksi lebih dulu dalam bentuk ujian penyingkiran.

Mengenai berapa jumlah kepala urusan yang harus ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah desa dan perangkat desa ditentukan bahwa jumlah kepala urusan sedikit-dikitnya ada tiga yang terdiri dari kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan dan kepala urusan pembangunan, dan sebanyak-banyaknya lima yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala urusan keuangan.

## • Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

### a. Sekretaris Desa

Sebagai unsur staf/pembantu, maka tugas sekretaris adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan kepada kepala desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 1 tahun 1981 mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat
- b) Melaksanakan urusan keuangan
- c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan



## **b. Kepala Urusan**

Kepala urusan sebagai unsur pembantu sekretaris desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan desa sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu kepala urusan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan umum sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta melaksanakan pelayanan administrasi kepala desa.

## **c. Kepala Dusun**

Kepala dusun merupakan unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. Tugas pokoknya ialah menjalankan kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya. Untuk itu kepala dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, kepala dusun bertanggung jawab kepada kepala desa.

## **C) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa**

### **a. Pengertian**

Pasal 17 UU No. 5 tahun 1979 menegaskan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bersama-sama kepala desa disebut pemerintah desa (pasal 3 ayat 1). Kalau boleh meminjam istilah legislatif, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ini mirip dan berfungsi sebagai lembaga legislatif.

### **b. Tujuan Pembentukan**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1981 tentang pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai peraturan pelaksanaan pasal 17 UU No. 5 tahun 1979 dikemukakan bahwa pembentukan Lembaga Musyawarah desa bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa serta mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di desa.

Pembentukan lembaga ini dan dalam menentukan keanggotaannya harus dimusyawarahkan dan dimufakatkan antara kepala desa dan pemuka-pemuka masyarakat yang ada. Hasil mufakat oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

### c. Keanggotaan dan Kepengurusan

Dalam Permendagri No.2 tahun 1981 tersebut di kemukakan bahwa jumlah anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sedikit-dikitnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang tidak termasuk ketua dan sekretaris yang terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat.

Sedangkan kepengurusannya terdiri dari Ketua yang dijabat kepala desa karena jabatannya dan sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dijabat oleh Sekretaris desa karena jabatannya.

### d. Tugas dan Fungsi

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat didesa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan kepala desa sebelum menjadi keputusan desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan keputusan desa.

### e. Hak, Wewenang dan kewajiban Anggota

Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menjalankan hak wewenang dan kewajiban yang sama yaitu memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa serta menyalurkan keinginan/aspirasi masyarakat dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Perlu diketahui bahwa pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tersebut hendaknya diambil dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal didesa. Dengan demikian kelompok/ golongan masyarakat mempunyai wakil di Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

## 3.2. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Munculnya konsep konsep pemberdayaan/peningkatan partisipasi politik pada awalnya, menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Selanjutnya pemberdayaan organisasi dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (pemberian wewenang, sehingga diharapkan organisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi, yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat), Nisjar (1995: 11).

Dengan pemberdayaan, dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelektual, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dalam pemberdayaan, setiap individu dapat bebas memutuskan sesuatu tanpa harus melapor terlebih dahulu atau merasa khawatir akan reaksi dari pimpinan mereka. Dalam lingkungan yang telah menerapkan pemberdayaan, setiap individu akan dihormati karena peranan penting mereka dalam menunjang keberhasilan organisasi. Individu memiliki wewenang dan fleksibilitas guna memastikan adanya hasil akhir yang berkualitas. Organisasi yang mengupayakan pemberdayaan, pada dasarnya mudah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dan mampu mendayagunakan modal intelektual, karena seluruh pola kerjanya diarahkan pada sikap penuh tanggungjawab.

Peranan masyarakat dalam menciptakan tatanan masyarakat sangat ditentukan oleh efektivitas partisipasi politik. Namun demikian tentu tidak semua anggota masyarakat mampu memberi peranannya itu. Dapat dikatakan bahwa penyebabnya adalah karena tidak ada peluang untuk itu, karena keterbatasan kemampuannya sehingga harus didorong atau ditingkatkan/ diberdayakan. Atau karena tidak memahaminya, padahal sesungguhnya berkemampuan untuk melakukan partisipasi aktifnya. Terkendala pada tingkat menggunakan kemampuannya. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan dalam melihat negaranya. Pemberdayaan/ peningkatan dalam sudut pandang ini, membenarkan pendapat bahwa pemberdayaan tergantung kekuatan yang dari atas sedang subsidiaritas "keberdayaan" memang telah dimiliki.

Bagi Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semangat reformasi, bertekad untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat melalui peranan partisipasi politiknya. Dalam ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok reformasi pembangunan. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara (selanjutnya dalam karya ini disebutkan TAP MPR tentang haluan Negara) BAB III, dinyatakan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.

Seterusnya dalam bagian kebijakan reformasi pembangunan dibidang politik telah termuat aspek pemberdayaan masyarakat diantaranya manyangkut membangun kehidupan politik yang demokratis, pembuatan undang-undang politik yang mendukung proses demokratisasi, penegakan kedaulatan rakyat dan menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi dan program organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan pancasila. Negara demokrasi adalah pilihan bangsa dan pemerintahan di daerahpun dijalankan sesuai asas-asas demokrasi.

Menurut Almond dan Easton dalam Maswadi Rauf (1991: 6), partisipasi politik adalah kewajiban setiap warga negara karena keputusan yang dihasilkan

oleh penguasa politik harus dipatuhi oleh setiap orang. Untuk mencegah dirugikannya seseorang oleh sebuah keputusan politik yang mengikat dan memaksa itu, orang tersebut harus menyampaikan kepentingan dan aspirasinya sehingga dapat diperhatikan oleh si pembuat keputusan.

Miriam Budiardjo (1998 : 161) partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam penilaian pemimpin-pemimpin secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan-badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya (kebalikan dari partisipasi adalah apatis, seseorang dinamakan apatis (secara politik) jikadia tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut diatas).

Menurut Sumuel Phuntington dan Joan M. Nelson, (1994 : 16-18) partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk :

1. Kegiatan Pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying mencakup upaya-upaya individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai persoalan yang menyangkut semulah pesan orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa, ada manfaatnya untuk mendefinisikan satu kategori tersendiri : artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditunjukkan untuk mengubah pimpinan politik kudeta, pembunuhan), atau mengubah sefuruh sistem politik (Revolusi). Tujuan-tujuan itu masing-masing dapat dikejar dengan menggunakan cara-cara damai. Sebab itu, maka suatu persoalan yang sentral adalah : dalam kondisi-kondisi yang bagaimana orang-orang menggunakan kekerasan dan bukan partisipasi yang lebih umum.

Menurut Milbrath (dalam Rafael Raja Maran, 2001 : 156 – 157), faktor-faktor pendukung partisipasi politik masyarakat adalah :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi misalnya oleh melalui diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi informal.
2. Karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
3. Faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Sementara itu Frank Lindenfeld dalam buku yang sama, menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas dapat disebutkan pula faktor-faktor lain seperti syarat legal bagi suatu sistem pemilihan, sifat dari sistem partai, dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Faktor inipun mempengaruhi partisipasi orang dalam kehidupan politik. Syarat legal yang bermacam-macam akan membuat orang enggan untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas politik. Didalam masyarakat yang menerapkan sistem pembagian kelas yang cenderung kaku akan timbul partai-partai berdasarkan kelas. Lantas ciri kepemimpinan yang demokratis dan manusiawi lebih didukung oleh berbagai halangan ketimbang ciri kepemimpinan yang otoriter.

Sehubungan dengan ini, diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peranan dan fungsi partai sangat penting, yakni sebagai komunikator politik. Peran partai politik dimaksud sebagai penerang, perjas, himbuan, penyerap dan penyebar informasi kepada masyarakat. Disamping itu partai politik juga berperan sebagai sosialisator politik/pendidikan



politik bagi pembentukan sikap politik masyarakat, melaksanakan rekrutmen politik/penjarigan dan pelatihan/pendidikan kader, serta melaksanakan peran menyelesaikan kesimpangsiuran/ perbedaan pendapat dalam masyarakat.

#### **IV. PERANGKAT PEMERINTAH DESA DAN PERANANNYA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

##### **4.1. Peranan Perangkat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.**

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Berhasilnya pembangunan desa akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar dapat memberikan hasil nyata, dalam arti adanya peningkatan taraf hidup masyarakat disatu pihak dan pada pihak lain munculnya semangat atau gairah membangun dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan jelas tersurat dan tersirat bahwa pembangunan desa pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya adalah merupakan imbalan kewajiban antara pemerintah disatu pihak dan masyarakat dilain pihak. Bahkan didalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan secara harmonis dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok kegiatan utama. Itulah sebabnya maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1981 telah diatur bahwa didalam proses perencanaan pembangunan desa kita menganut sistem perencanaan dari bahwa atau biasa dikenal dengan istilah *bottom up planning*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pentingnya partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan khususnya Pembangunan Desa. Pertama oleh karena aspirasinya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan kedua oleh karena merupakan potensi pelaksana dari pada kegiatan pembangunan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan adanya pelaksanaan pemerintahan desa, maka partisipas masyarakat akan sangat menentukan sebab kita ketahui bersama masyarakat desa penuh dengan keterbatasan, yaitu keterbatasan akan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya, baik itu menyangkut peningkatan taraf hidup maupun pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan desa. Sebab

bagaimana mungkin setiap desa akan menjadi maju kalau aparat/perangkatnya tidak memiliki bekal pengetahuan yang tinggi terhadap hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh perangkat pemerintahan desa perlu ditingkatkan dimana masih banyak yang berlatar belakang pendidikan sekolah dasar, sehingga pengetahuan yang menyangkut penguasaan bidang tugas masing-masing bagi kepala urusan. Hal tersebut tanpa adanya pembekalan pengetahuan tentang hal-hal menyangkut penguasaan bidang tugas, maka akan dapat mempengaruhi adanya pelaksanaan tugas khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa juga peranan sekretaris sangat menentukan, sebab apabila sekretaris yang tidak menguasai bidang tugas administrasi maka kegiatan pembangunan desa tidak akan berjalan dengan baik. Disamping peranan kepala-kepala urusan dan sekretaris desa, maka yang paling menentukan pula dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah tergantung dari setiap kepala-kepala dusun. Sebab kepala dusun sebagai motivator utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan desa terutama kemampuannya untuk mengerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat memberikan partisipasinya sangat bervariasi, baik itu partisipasi dalam bentuk harta benda, tenaga, ide-ide/gagasan, materi dan uang. Dari pengamatan diperoleh data bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan ketrampilan serta pendidikan para perangkat desa, maka semakin dapat mempengaruhi adanya peningkatan pelaksanaan pembangunan desa.

#### 4.2. Hubungan antara Perangkat Pemerintah Desa dengan LKMD dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa maka kepala-kepala desa (Sangadi) telah dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang yang pertama mengemban tugas, maka harus perlu didukung dengan adanya perangkat-perangkat desa yang memiliki tingkat keahlian dan ketrampilan yang memadai agar dengan demikian akan tercipta sistem pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang harmonis dan serasi.

Kemampuan pelaksanaannya akan tergantung pula pada perangkat-perangkat pemerintah desa terutama bagi seorang sekretaris desa harus punya keahlian dan ketrampilan yang tinggi dalam menguasai bidang tugasnya, yaitu tugas administratif, sebab seorang sekretaris harus perlu memahami betul tentang masalah-masalah yang menyangkut administrasi desa. Penguasaan bidang administrasi bagi seorang sekretaris desa adalah sangat penting, sebab kemajuan desa juga akan sangat ditentukan oleh kelengkapan administrasinya. Disamping itu juga peranan kepala-kepala urusan serta kepala kepala dusun akan sangat menentukan adanya keberhasilan



pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ada didesa.

Menyangkut hubungannya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka ternyata juga bahwa perangkat pemerintah desa adalah merupakan salah satu anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yaitu kepala-kepala dusun. Dalam Undang-undang No.5 tahun 1979 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan kepala desa adalah disebut pemerintah desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981, tentang pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai peraturan pelaksanaan pasal 17 UU. No.5 tahun 1979, dikemukakan bahwa pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi pancasila di desa.

Pembentukan lembaga ini dan dalam menentukan keanggotaannya harus dimusyawarahkan dan dimufakatkan antara kepala desa dan pemuka-pemuka masyarakat yang ada. Dalam hubungannya dengan perangkat pemerintah desa ternyata pula bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka kepala desa tidak dibenarkan menjabat sebagai ketua dan sekretaris desa adalah merangkap sebagai sekretaris Lembaga desa karena jabatannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsinya yaitu menyalurkan pendapat masyarakat yang ada didesa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala desa sebelum menjadi keputusan desa. Untuk menjalankan tugas tersebut maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi pula yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan keputusan desa. Didesa biasanya kepala desa sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan maka terlebih dahulu kepala desa mengadakan rapat desa bersama-sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bersama-sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk menentukan tujuan-tujuan/program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kepala desa biasanya dalam menetapkan keputusan desa harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Dalam rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa biasanya dibahas secara musyawarah mengenai rancangan keputusan desa yang disusun oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan LKMD.

Dalam melaksanakan rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dapat dilangsungkan/dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempat. Dan ternyata hasil-hasil Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang menjadi keputusan desa diantaranya adalah Penetapan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, penetapan hasil keuangan desa yaitu didapati dari pengurusan administratif desa, keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan desa seperti pembuatan jalan, selokan/gorong-gorong, sangsi bagi siapa yang

membuat keonaran dan lain sebagainya. Jadi ternyata juga perangkat pemerintah desa memegang peranan yang cukup penting untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa.

#### 4.3. Masalah-masalah yang dihadapi oleh perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perana perangkat pemerintah desa sudah saatnya diupayakan dengan meningkatkan peran serta mereka dalam berbagai bidang termasuk bidang tugasnya masing-masing. Sebab kalau perangkat pemerintah desa tidak ditingkatkan keahlian dan kemampuannya maka sudah barang tentu akan mempengaruhi adanya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh para perangkat pemerintah desa adalah menyangkut rendahnya tingkat pendidikan sebab umumnya tingkat pendidikan masyarakat adalah berlatar belakang pendidikan sekolah dasar sehingga penguasaan terhadap bidang tugasnya masing sangat rendah.

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi perangkat pemerintah desa maka harus diupayakan peningkatan dibidang pendidikan yaitu pendidikan non formal seperti peningkatan penguasaan bidang tugas mereka masing-masing, peningkatan tingkat ketrampilan, peningkatan keahlian agar dengan demikian aparat atau perangkat pemerintah desa akan mampu untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Disamping itu perlu diberikan penyuluhan serta diberikan motivasi untuk membangkitkan gairah kerja mereka sehingga nantinya mereka akan memiliki pengabdian yang tinggi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Penguasaan bidang tugas seperti sekretaris desa harus perlu dibekali dengan keahliannya dalam bidang penguasaan administrasi desa, kepala urusan harus dibekali dengan penguasaan bidangnya, serta kepala-kepala dusun harus perlu diberikan arahan dalam hal memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Apabila hal ini dapat tercipta, maka dengan sendirinya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa khususnya didesa Kopandakan I akan berjalan dengan baik. Masalah kedua adalah kekurangan biaya atau tingkat pendapatan bagi para perangkat pemerintah desa sebab umumnya hasil pendapatan mereka masih jauh dari apa yang diharapkan, karena kadang-kadang perangkat pemerintah hanya mengharapkan hasil kekayaan desa. Kalau seandainya kekayaan desa/pendapatan desa tersebut sangat mini maka sudah barang tentu hasil pendapatan mereka pula sangat rendah. Oleh sebab itu demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan maka harus perlu diupayakan dorongan kepada mereka untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya serta perlu dipikirkan adanya

motivasi lain yang dapat merangsang aparat pemerintah desa tersebut.

Masalah ketiga adalah masalah sikap mental sebab umumnya bangsa kita masih memiliki sikap mental yang lemah dalam membangun. Oleh sebab itu pembentukan sikap mental bagi aparat pemerintah desa adalah sangat penting, sebab sikap mental juga akan dapat menentukan adanya kemajuan pembangunan.

Masalah keempat adalah kelemahan dalam bidang disiplin khususnya disiplin dalam bekerja. Kita perlu ketahui masalah ini sering dihadapi oleh kita semua khususnya bagi masyarakat desa kadang-kadang penghargaan terhadap waktu baik di kantor, maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya umumnya masih sangat lemah sehingga faktor disiplin bagi perangkat pemerintah desa akan sangat menentukan adanya kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sehingga apabila masalah-masalah yang sudah disebutkan diatas dapat dipahami oleh aparat/perangkat pemerintah desa, maka dengan sendirinya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa Kopandakan I akan berjalan dengan baik dan lancar.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan. Berhasilnya pembangunan desa akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar dapat memberikan hasil nyata dalam arti adanya peningkatan taraf hidup masyarakat disatu pihak dan pada pihak lain munculnya semangat atau gairah membangun dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa pada dasarnya adalah merupakan imbalan kewajiban antara pemerintah disatu pihak dan masyarakat dilain pihak. Pentingnya partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, oleh karena aspirasinya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan juga merupakan salah satu potensi pembangunan. Demikian pula halnya dengan adanya pelaksanaan pemerintahan desa, maka partisipasi masyarakat akan sangat menentukan sebab umumnya masyarakat desa penuh dengan keterbatasan, yaitu keterbatasan akan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya, baik itu menyangkut peningkatan taraf hidup maupun pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan desa. Sebab bagaimana mungkin setiap desa akan menjadi maju kalau aparat/perangkat pemerintah desa tidak memiliki bekal pengetahuan yang memadai yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Perangkat pemerintah desa adalah anggota pemerintahan desa yang merupakan tenaga pelaksana bagi pemerintahan dan pembangunan yaitu terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan serta kepala-kepala dusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perangkat pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa cukup besar hal ini dibuktikan dari adanya pelaksanaan tugas mereka sehari-hari dimana mereka selalu melaksanakan tugas/kegiatannya.

Hal ini juga didukung oleh adanya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa ternyata masih rendah sebab sebagian besar perangkat pemerintah desa berlatar belakang pendidikan SD sehingga dapat mempengaruhi adanya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Fungsi sekretaris desa merupakan faktor penentu bagi kelancaran pelaksanaan administrasi desa, sebab seorang sekretaris yang baik maka dia harus mampu menguasai bidang tugas administrasi tersebut.

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa juga akan tergantung dari kemampuan kepala-kepala dusun sebab kepala dusun juga dapat dianggap oleh masyarakat sebagai pola anutan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka dapat pula mempengaruhi adanya hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa adalah rendahnya tingkat keahlian dan kemampuan mereka dalam penguasaan bidang tugas masing-masing, sehingga mempengaruhi adanya kelancaran pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa. Masalah lain adalah menyangkut rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya penguasaan tugas, lemahnya sikap mental dan rendahnya tingkat disiplin kerja. Kesemua tersebut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas bagi perangkat pemerintah desa, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

## 5.2. Saran

Untuk menjamin kelancaran pengelolaan administrasi pemerintahan desa maka pembinaan secara berencana terhadap pemerintah desa dan perangkat pemerintah desa dalam segi administrasi dan management pemerintah desa harus perlu ditingkatkan.

Mengingat tugas dari perangkat pemerintah desa adalah merupakan tugas pokok yang harus ditangani secara serius maka disarankan perlunya peningkatan keahlian dan ketrampilannya, sehingga dapat menguasai bidang tugasnya masing-masing terutama bagi sekretaris desa bersama kepala-kepala urusan.

Didalam pelaksanaan tugas khususnya menyangkut hubungan antara pemerintah desa dalam hal ini perangkat pemerintah desa dengan LMD dan LKMD ataupun BPD harus berjalan secara sinkronisasi, terintegrasi dan terkoordinasi agar dengan demikian akan dapat menciptakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan telah tercipta supaya tetap dipelihara bahkan perlu ditingkatkan, sehingga hubungan yang serasi tetap ada.

Masyarakat harus lebih meningkatkan frekuensi keikutsertaannya secara sukarela dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan desa dan juga harus lebih meningkatkan partisipasinya baik dalam bentuk ide-ide/pemikiran, uang maupun dalam bentuk bahan-bahan material, agar supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Surjadi. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Domingos Soares. "Aturan-aturan Adat yang berkenaan dengan kekuasaan dan Pemilikan" dalam *Makalah*. Kongres Kebudayaan di Jakarta, 29 Oktober - 3 November 1991.
- Frans Hüsken. 1998 *Masyarakat Desa dalam perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 - 1980*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru
- Lily E.N Saud at al. 2004 *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bolaang Mongondow Di Sulawesi Utara*. Manado : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- M. Mansyur Amin, at al. 1988 *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Mieke Schouten 1988, "Legitimasi Sementara : Pemerintahan Desa di Minahasa" dalam *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Philip Quarles van Ufford, (ed). Jakarta: PT Gramedia.

## Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah*.
- Tap MPR. No.2 Tahun 1988 dan 1993 tentang GBHN*
- Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat desa*.
- Peraturan Mendagri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan penyatuan dan penghapusan desa*.
- Profil Desa Kopandakan I Tahun 2003*.



*Bolaang Mongondow dalam Angka 2004/2005* Badan Pusat Statistik Kabupaten  
Bolaang Mongondow & Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bolaang  
Mongondow.

**DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Abdullah Kango, S.Si  
Umur : 32 tahun  
Alamat : Kel. Biga Kotamobagu  
Jabatan/Status : PNS
2. Nama : Estefanus Mokodompit  
Umur : 46 tahun  
Alamat : Pontodon  
Jabatan/Status : PNS
3. Nama : A. Paputungan  
Umur : 68 tahun  
Alamat : Kel. Mongkonai  
Jabatan/Status : Pensiunan PNS
4. Nama : Lutfi Limbanadi, SH  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Pasi  
Jabatan/Status : PNS
5. Nama : Irianto Boroma  
Umur : 44 tahun  
Alamat : Kel. Mongkonai  
Jabatan/Status : PNS
6. Nama : Tanti Limpaton  
Umur : 27  
Alamat : Komangan  
Jabatan/Status : Petani
7. Nama : Hani Potabuga  
Umur : 40 tahun  
Alamat : Komangaan  
Jabatan/Status : Petani
8. Nama : Suharto Mokolanut  
Umur : 41 tahun  
Alamat : Kopandakan  
Jabatan/Status : Kepala Urusan Ekonomi
9. Nama : Tawakal Baluwo  
Umur : 50 tahun  
Alamat : Kopandakan  
Jabatan/Status : Sangadi
10. Nama : Syahrial Bangki  
Umur : 45 tahun  
Alamat : Kopandakan  
Jabatan/Status : Sekretaris



# PEMEKARAN WILAYAH: Kabupaten Gorontalo-Bolaemo Di Provinsi Gorontalo (Suatu Tinjauan Sejarah)

Yoran Lamangida

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan pemerintahan di Jakarta dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 menandai awal masa peralihan dari negara otoriter ke demokrasi. Sementara itu sebagian besar elite kota di Indonesia berbicara tentang reformasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum maupun keamanan (Ikrrar Nusa Bhakti, 2005: 242). Memasuki periode Reformasi yang salah satunya bertujuan untuk penghapusan desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memicu meningkatnya pembentukan daerah-daerah otonom yang baru.

Kondisi ini dapat dilihat hingga 2004 telah terjadi lima gelombang pemekaran wilayah yang utamanya berlangsung di luar Jawa. Gelombang pertama, sejak 1998 hingga 2001, terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota dari 292 daerah menjadi 336 daerah. Jumlah ini kemudian meningkat pada gelombang kedua menjadi 348 dalam tahun 2002. Pada tahun 2003 (gelombang ketiga) meningkat lagi menjadi 370 dan bertambah menjadi 434 pada 2004 (gelombang keempat dan kelima). Jumlah ini dihitung berdasarkan undang-undang pemekaran wilayah yang disetujui oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR (Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng, 2005: 60).

Dalam periode Reformasi telah memberi angin segar akan tercetusnya pemekaran wilayah di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai luas wilayah cukup besar 12.150,65 Km<sup>2</sup>, jika dibandingkan dengan Kota Gorontalo yang hanya 64,79 Km<sup>2</sup>. Persoalan pemekaran wilayah Kabupaten Gorontalo untuk pembentukan Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari adanya aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak tahun 1985 (Paris Yusuf, 2000: 77) dan selanjutnya secara formal dibentuk Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang No. 50 tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 178, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3899). Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut maka Kabupaten Boalemo sebagai wilayah otonom dalam Provinsi Sulawesi Utara.

Kemudian halnya setelah terbentuknya Kabupaten Boalemo disusul terbentuknya Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato—hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 tahun 2003 (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 26)—mempunyai hubungan erat dengan pembentukan Provinsi Gorontalo.

Beberapa gambaran diatas menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Gorontalo mencerminkan pembagian wilayah kekuasaan dalam persekutuan lima kerajaan atau dikenal dengan *Limo lo pahalaga* terdiri dari Kerajaan Gorontalo (Hulontalo); Limboto (Limuttu); Bone-Suwawa-Bintauna; Bolango selanjutnya digantikan oleh Boalemo (Baolemo); dan terakhir Atinggola (Andagile). Hal ini juga diperkuat sekarang ini yang masih dalam proses tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara yang meliputi Kwandang dan Attinggola.

Kenyataan-kenyataan demikian merangsang munculnya pertanyaan-pertanyaan antara lain seperti dalam batasan masalah pada penelitian ini.

## 1.2. Batasan Masalah

Penelitian tentang pemekaran daerah-daerah di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo, Bone Bolango dan Pohuwato ini dipusatkan perhatian pada proses pemekaran daerah-daerah tersebut melalui pendekatan sejarahnya.

Uraian diatas berfokus pada permasalahan dengan mengungkap beberapa masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini :

1. Apakah penentuan wilayah Kabupaten Gorontalo yang dimekarkan dengan Kabupaten Bone Bolango punya pertimbangan kesejarahan ?
2. Apakah wilayah tersebut mempunyai akar kerajaan tradisional masa lalu ?
3. Apakah elite politik sebagai motor penggerak pemekaran adalah elite-elite tradisional seperti periode kerajaan tradisional ?

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi Kabupaten Gorontalo—sebagai kabupaten induk—dan Kabupaten Bone Bolango. Lokasi tersebut dipilih karena dianggap sebagai wilayah proses pembentukan Kabupaten Bone Bolango.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk merekonstruksi pembentukan Kabupaten Bone Bolango yang seringkali mengalami kemajuan atau kemunduran melalui proses sejarahnya. Dalam konteks ini, perkembangan sejarahlah yang mampu menunjukkan bagaimana sistem kemasyarakatan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik tumbuh dan berkembang dengan membawa dampak sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Di lihat dari proses perkembangan sejarah, maka penting untuk mengkaji pembentukan Kabupaten Bone Bolango yang dapat memberi arti dalam wawasan kesejarahan. Dengan menelusuri serta mengungkapkan pengalaman kesejarahannya dijadikan pertimbangan dan sekaligus dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam permasalahan.

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian kesejarahan menggunakan metode yang ditentukan oleh pokok permasalahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci atas permasalahan yang dibahas.

Dalam rangkaian penelitian tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango digunakan metode kerja dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang berhubungan dengan masalah di atas, baik sumber primer maupun sekunder.

Dalam penelitian sejarah adalah mengenal penggunaan sumber tertulis maupun lisan. Sumber tertulis diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan melakukan pencarian, pengumpulan dan mempelajari dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang berkaitan erat dengan pembentukan daerah Kabupaten Boalemo, Bone Bolango dan Pohuwato. Demikian pula digunakan sumber lisan (*interview*) diperoleh melalui para informan sebagai pelaku sejarah, ini dilaksanakan untuk mengetahui aktivitas dan peranannya dengan wawancara yang sifatnya terbuka, agar hasil yang dicapai dapat semaksimal mungkin.

Sumber-sumber menyangkut pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Boalemo, Bone Bolango dan Pohuwato dianalisis, dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagian untuk memahami pembentukan Kabupaten Bone Bolango. Pada tingkat teoritis yang menggunakan metode kritis-historis, sumber-sumber yang telah dianalisis kemudian dihubungkan dan menerangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penulisan yang dikaji, sehingga dapat menjadi sebuah kisah sejarah (Sartono Kartodirdjo, 1992: hlm. 18-19).

Bertolak dari metode yang dipakai di atas, maka penyusunan ini dapat memberikan titik terang kepada permasalahan. Dengan sendirinya dapat memberikan sebuah pengertian tentang penelitian kesejarahan sebagai suatu proses, aktivitas dan peranan masyarakat Kabupaten Bone Bolango dapat diungkapkan.

### 1.6. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dari latar belakang pendorong yang menyebabkan proses pembentukan Kabupaten Bone Bolango yang kemungkinan besar memberi arti akan pembentukan Provinsi Gorontalo melalui pendekatan sejarah.

## II. SEJARAH SINGKAT BOALEMO

### 2.1. Asal-Usul Raja Boalemo

Boalemo adalah keturunan dari "RAJA MALANGO" yang menurunkan anak jadi "RAJA BILATULA" kemudian lagi menurunkan anak yang menjadi raja yakni Raja ANDI IS MAPPANYUKKI (OLONGIA MATO) bersaudara di Sulawesi Selatan, mereka adalah keturunan dari "KERAJAAN BONE" dari Sulawesi Selatan, kemudian menurunkan lagi "RAJA IDRUS" tiga bersaudara yaitu dua putra dan satu putri kesemuanya dilahirkan di Sulawesi Selatan masing-masing: IDRUS, ABDULLAH dan NITA RAWE.

Anaknya yang tertua pernah memerintah sebagai raja di Pulau Peling bagian timur yaitu pada “KERAJAAN BONGGANAN” pada tahun 1583 Masehi, pada saat ini Pulau Peling adalah bagian wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sebelum beliau memerintah di Pulau Peling terlebih dulu dinikahkan oleh ayahnya ANDI IS MAPPANYUKKI dengan seorang putri dari Ternate yaitu putri raja dari SULTAN BAULLAH yang bernama ZAENAB SULTAN BABULLAH. Dari perkawinannya dengan putri Ternate ini melahirkan 4 (empat) orang putra masing-masing:

1. Hurudji lahir 1578 masehi
2. Mauhe lahir 1579 masehi
3. Humonggio lahir 1580 masehi
4. Hutudji lahir 1582 masehi

Keempat putranya ini dilahirkan dan dibesarkan di Sulawesi Selatan, mulai menginjak dewasa putra-putranya ini mulai diajak oleh ayahnya untuk ikut bersama pergi berlayar dan berdagang.

## 2.2. Raja Hurudji dan Perjuangannya

Anak yang tertua dari IDRUS ANDI IS MAPPANYUKKI bernama Hurudji pada usia 27 tahun diajak oleh ayahnya untuk ikut berlayar dan berdagang bersama dengan rombongan perahu Bugis dari Bone pada tahun 1604 masehi dengan tujuan Ternate. Dalam perjalanan menuju Ternate perahu dari para rombongan ini dihantam oleh badai dan angin kencang sehingga mereka terdampar pada suatu pulau yang pantainya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon lemon/jeruk semanggi (*sewanggi*) yang buahnya sangat lebat, oleh ayahnya tempat ini diberi nama BOALEMO (buah *lemon* dalam bahasa Bugis) dimana buah dan daunnya sangat lebat. Karena tempat ini ditemukan oleh Suku Bugis Bone sehingga Boalemo dapat diartikan Bone yang sakti.

Sejak saat itu Boalemo sudah mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai macam suku tetapi yang paling menonjol adalah suku Bugis, Ternate dan Gorontalo, setelah Boalemo terbuka dan menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh berbagai suku, maka sering terjadi gangguan malam yaitu munculnya makhluk halus yang berbentuk postur tubuh manusia yang menurut pendapat orang tua-tua dulu dinamakan Pulohuta (mahluk penguasa wilayah), mahluk berperawakan besar, berbulu lebat dan berambut panjang yang kemudian dinamakan oleh masyarakat dahulu “TALAMBUTA” atau “TALAMUTA” dan akhirnya menjadi “TILAMUTA” yang merupakan pusat dari wilayah kerajaan Boalemo dan terbukanya wilayah itu ada di wilayah Talamuta. Adapun wilayah kerajaan Boalemo sebelah utara berbatasan dengan Sungai Tanggobu di Paguyaman dan sebelah barat dengan sungai Molosipat.

Raja Hurudji dinobatkan menjadi raja oleh Sultan Babullah dari Ternate sekitar tahun 1607 sebagai raja pertama di Boalemo karena kesaktiannya menentang kekuasaan Portugis, pada masa pemerintahannya diperkirakan selama 3 tahun

bangsa Portugis berada di Boalemo/Tilamuta, dengan kesaktiannya bangsa Portugis dapat diusir dari kerajaan Boalemo dan banyak yang mati terbunuh, mayat-mayat dari orang-orang Portugis ini dibuang di depan pantai Boalemo/Tilamuta yang diberi nama A-siangi (pulau tempat pengasingan dari mayat orang-orang penjajah).

Pada tahun 1639 raja Hurudji dipanggil oleh Sultan Babullah yaitu Sultan Ternate, dan diberikan pusaka berupa harna buah, keris serta simbol kerajaan lengkap dengan tongkatnya. Raja Hurudji memerintah di kerajaan Boalemo sekitar 82 tahun, dan masyarakat Boalemo memberikan gelar "OLONGIA MATOMELA".

Semasa hidupnya raja Hurudji tiga kali menunaikan ibadah haji bersama isterinya dan untuk yang ketiga kalinya membawa putranya yang pertama "I JAWA HURUDJI" untuk menunaikan ibadah haji Kemakkatullah Mukarramah dengan menaiki perahu/jarangga buatan mereka bersaudara. Raja Hurudji selain sebagai raja beliau juga sebagai seorang ulama/kyai yang menyebarkan agama Islam di Boalemo/Tilamuta, bahkan sampai ke Pulau Peling, Banggai, Samaku, Longkoga Timur dan Barat.

Dalam perjalannya menyebarkan agama Islam raja Hurudji bermukim sampai beberapa bulan di sebuah gunung yang bernama Tompotika. Di Gunung Tompotika inilah raja Hurudji bertapa/bersemadi mengharapkan akan mendapat mimpi-mimpi, anugrah/petunjuk dari Allah SWT. Setelah kembali dari pertapaannya di Gunung Tompotika raja Hurudji menceritakan kepada istri dan ke tiga adiknya Mauhe, Humonggio dan Hutudji bahkan diumumkan kepada seluruh keluarganya bahwa di Laut Banggai ada sebuah gunung yang kramat yang bernama "Tompotika" Otakiki dan Otadaa" disitu beliau menerima petunjuk melalui mimpi, mendengar hal ini sebagian besar keluarganya ingin berangkat untuk bertapa/bersemadi, pada bulan berikutnya rombongan ini berangkat menuju Gunung Tompotika dan bertepatan pada bulan Zulhijah. Menurut pendapat mereka bahwa bulan Zulhijah adalah bulan yang penuh dengan berkah (*hulalo petuhuta*) sehingga mereka sekeluarga siap untuk berangkat.

Pada keberangkatan keluarga raja Hurudji ini masyarakat Boalemo/Tilamuta mengadakan "doa", upacara adat mohon keselamatan dalam perjalanan, karena perjalanan ini memerlukan waktu yang cukup lama diperkirakan selama 45 hari perjalanan melalui lautan dan melewati beberapa pulau/tanjung. Dalam perjalanan ini mereka memakai perahu besar (*jarangga*) yang penumpangnya sekitar 55 orang, saat keberangkatan ini cukup banyak dihadiri oleh rakyat Boalemo untuk melepaskan kepergian keluarga raja untuk berlayar.

Setelah beberapa tahun kebiasaan pergi ziarah ke Boalemo maka rakyat dari beberapa kelompok/*linula* mulai berdatangan ke Tilamuta Pantai Boalemo yang paling menonjol adalah masyarakat Limboto Gorontalo dan khususnya yang berasal dari Biluhu, Ayuhulalo Kecamatan Batudaa Pantai sekarang ini, bahkan ada sebahagian masyarakat yang telah pindah dan menetap di Tilamuta dan berpisah dari Batudaa,



yang sekarang ini sudah menjadi desa di Kecamatan Batudaa yaitu "Bua" tempat berpisahanya keturunan raja Panipi yang pindah ke Boalemo/Tilamuta dan sebahagian menuju Gunung Tompotika, sebagian singgah di Lobu, Pagimana, di Samaku,, Luwuk, Longkaga Timur dan Barat, inilah gambaran masyarakat Boalemo di Pagimana yang merupakan keturunan dari masyarakat Boalemo/Tilamuta.

Pada akhirnya raja Hurudji dan istrinya Tawila wafat pada tahun 1686 Masehi pada hari jumat yang sama hanya waktunya yang berbeda. Raja Hurudji dimakamkan diatas sebuah gunung yang kecil menuju Pelabuhan Tilamuta (Pantai Boalemo) yang lokasinya disebut Wohuto Gunung Potong di desa Modelomo Kecamatan Tilamuta sekarang ini.

Sekarang ini makam tersebut dianggap keramat oleh sebagian masyarakat/penduduk di Tilamuta. Hal ini dibuktikan oleh perilaku sebagian masyarakat yang sering berziarah, berdoa demi kesembuhan sesuatu penyakit, berdoa untuk mendapatkan keturunan dan kegiatan lain yang sifatnya religius.

### 2.3. Raja-raja yang Memerintah di Kerajaan Boalemo

Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Boalemo di Tilamuta sekitar tahun 1604–1862 dari raja pertama hingga raja yang ke delapan adalah sebagai berikut:

1. Raja Hurudji memerintah tahun 1604–1686 Masehi
2. Raja Mauhe memerintah tahun 1687–1721 Masehi
3. Raja Humonggio memerintah tahun 1721–1744 Masehi
4. Raja Hisana memerintah tahun 1744–1759 Masehi
5. Raja I Djawa memerintah tahun 1759–1773 Masehi
6. Raja Ntonga memerintah tahun 1773–1789 Masehi
7. Raja Mustapa memerintah tahun 1789–1855 Masehi
8. Raja Potutu memerintah tahun 1856–1882 Masehi (raja Limboto merangkap raja Boalemo terakhir).

Pada masa pemerintahan raja pertama hingga raja yang ke enam di Kerajaan Boalemo dalam status "POHALAA LUAR" yang langsung dalam ikatan dengan Kerajaan Ternate yang lamanya sekitar 2 abad, kemudian pada tahun 1790 Kerajaan Boalemo memisahkan diri dengan kerajaan Ternate dan berdiri sendiri dan saat itu yang memerintah adalah "Raja Mustapa" sebagai raja di kerajaan Boalemo. Adapun raja Mustapa adalah keturunan yang ke tiga dari raja Hurudji/raja pertama di kerajaan Boalemo dan beliau adalah cucu yang tertua.

Pada tahun 1855 Masehi "Raja Mustapa" dipecat oleh pemerintah Hindia Belanda karena tidak mentaati pelaksanaan kontrak membayar pajak yang setiap tahunnya 200 real. Akhirnya beliau diasingkan ke Ternate dan sampai meninggal dunia disana dan tidak dipulangkan ke Boalemo daerah asalnya, dan mulai saat itu (akhir tahun 1855 Masehi) berakhir kekuasaan raja-raja di kerajaan Boalemo,



dan yang berkuasa adalah pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu dimulailah pemerintahan kolonialisme Belanda, raja Mustapa dipecat dan diturunkan dari tahtanya sehingga terjadilah kekosongan pemerintahan, peristiwa itu digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan menggantikan kedudukan raja dengan pemerintahan kolonial Belanda, namun saat itu rakyat Boalemo tetap bersih keras menentang kekuasaan kolonial Belanda dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan, sehingga saat itu terjadilah pertumpahan darah antara rakyat Boalemo dengan pemerintah kolonial Belanda. Banyak tentara kolonial Belanda yang tewas terbunuh oleh rakyat Boalemo yang bersenjatakan tombak dan bambu runcing untuk melawan kaum penjajah.

Pertempuran rakyat Boalemo melawan kaum penjajah kolonial Belanda mengakibatkan dari pihak penjajah banyak yang terbunuh dan mayat-mayat mereka dibuang di suatu pulau di depan pantai Boalemo yaitu Pulau A-siangi artinya pulau tempat pengasingan dari mayat-mayat para penjajah.

Pertumpahan darah yang terus-menerus di kerajaan Boalemo mendapat simpati dari Abdurrahman raja Limboto membela rakyat Boalemo yang tertindas oleh kaum penjajah, akhirnya beliau ditangkap oleh kolonial Belanda dan diasingkan ke Ambon.

Atas usul raja Arus Bone I dari kerajaan Suwawa kepada rakyat Limboto untuk mengangkat seorang raja dari keturunan raja Limboto untuk menjadi raja, pada pertengahan awal tahun 1855 Masehi ada 3 bersaudara putra keturunan Limboto yang diangkat "Bate" yaitu, Bate Potutu, Bate Abuna, Bate Hulongge dan yang dinobatkan adalah putra yang tertua yaitu Bate Potutu yang menjadi raja/*olongia* Limboto dan sekaligus merangkap memerintah di kerajaan Boalemo selama 7 tahun dan wilayah kerajaan Boalemo pada saat itu sampai perbatasan Sungai Popayato.

Pada masa pemerintahan raja Potutu kerajaan Boalemo dimasukkan dalam ikatan "U DULUWO LIMO LOPOHALAA" Gorontalo, sejak saat itu wilayah kerajaan Boalemo sudah masuk dalam wilayah "POHALAA DALAM" untuk menggantikan POHALAA BOLANGO yang dihapuskan pada tahun 1860 Masehi.

#### 2.4. Peralihan Pemerintahan Kerajaan Pada Pemerintahan Distrik

Sejak kerajaan Boalemo dipegang oleh raja keturunan dari Limboto dan dimasukkannya dalam ikatan "U DULUWO LIMO LOPOHALAA" Gorontalo oleh raja Potutu hingga akhir pemerintahannya, berakhir pula bentuk pemerintahan kerajaan pada kerajaan Boalemo dan beralih pada pemerintahan distrik pada tahun 1862.

Pada pemerintahan distrik inilah Boalemo dipegang oleh JOGUGU, sejak saat itulah Boalemo sudah tergabung dalam ikatan "U DULUWO LIMO LOPOHALAA" hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1911 terjadi lagi

perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah LIMO LOPOHALAA terbagi lagi atas 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu:

1. Onder Afdeling Kwandang
2. Onder Afdeling Gorontalo
3. Onder Afdeling Boalemo

Onder Afdeling Boalemo dilebur menjadi distrik yang membawahi:

1. Onder Distrik Boalemo Talamuta
2. Onder Distrik Paguyaman
3. Onder Distrik Paguat

Distrik ini dikepalai oleh Jogugu, seorang Jogugu kedudukan setingkat dengan wedana (bupati atau walikota) sekarang ini, sedangkan untuk onder distrik dikepalai oleh seorang *marsaoleh* setingkat dengan kedudukan seorang camat. Adapun yang menjadi jogugu/wedana di Boalemo adalah sebagai berikut:

1. Saidi memerintah tahun 1862-1878
2. Kamumu memerintah 1878-1891
3. Nihe memerintah tahun 1891-1891
4. Ahmad Saidi memerintah tahun 1901-1905
5. S. Uno memerintah tahun 1905-1911
6. S. Ambo memerintah tahun 1911-1918
7. H. P. Olii memerintah tahun 1918-1920
8. R. P. J. Monoarfa memerintah tahun 1920-1929
9. A. Wartabone memerintah tahun 1929-1939
10. Jon Yasin memerintah tahun 1939-1940
11. D.S. Monoarfa memerintah tahun 1940-1942
12. M. Hipi memerintah tahun 1942-1946
13. A. Ilahude memerintah tahun 1946-1949
14. J. N. Olii memerintah tahun 1949-1950
15. A. A. Wahab memerintah tahun 1950-1953
16. Z. Wartabone memerintah tahun 1953-1955
17. A. Nalole memerintah tahun 1955-1956
18. B. Niode memerintah tahun 1956-1958
19. Nontji Van Gobel memerintah tahun 1958-1959
20. J. A. Nento memerintah tahun 1959-1960
21. Dj. Bahua memerintah 1960-1961
22. Mohamad Van Gobel memerintah 1961-1964 jogugu terakhir di Boalemo.

#### 2.5. Beberapa Pusaka Peninggalan/Pusaka Kerajaan Boalemo

Setiap kerajaan mempunyai benda pusaka yang merupakan lambang kekuasaan kerajaan dan sangat dihormati oleh masyarakat pendukungnya secara turun temurun demikian juga halnya dengan Kerajaan Boalemo memiliki benda-

benda pusaka dari raja Hurudji sebagai raja yang pertama pada kerajaan Boalemo. Benda-benda pusaka ini diturunkan kepada keturunannya yang memangku jabatan sebagai *Olongia lo Lipu* atau para pejabat yang dipercayakan memerintah di Balemo/Tilamuta.

Menurut kepercayaan masyarakat bahwa semestinya benda-benda pusaka itu diamankan pada rumah jabatan (rumah dinas) *Olongia lo Lipu* agar tetap terpelihara keampuhannya ataupun kesaktiannya.

Adapun pusaka/peninggalan kerajaan Boalemo adalah sebagai berikut:

1. Simbol Kerajaan/Batanga Raja pemberian Sultan Ternate pada Raja Hurudji saat dinobatkan menjadi raja di kerajaan Boalemo oleh Sultan Babullah pada tahun 1607 Maschi.
2. Keris Bugis Pusaka Raja Bone 1 (satu) buah khusus pinggang kanan yang diberikan ayahnya "Idrus Andi Is Mappanyukki" sebagai pengawalnya pada saat penyerbuan bangsa Portugis pada tahun 1606.
3. Sebuah buku "Tua" yang menyangkut silsilah keturunan lelaki Bone dan gadis Ternate yang ditulis dengan bahasa Bugis "Lontara".
4. Keris dari Raja Ternate yang berukuran dua hasta khusus penjaga istana raja, diberikan saat dipanggil Sultan Ternate pada saat menghadiri persiapan untuk pertemuan mengatur serangan Bangsa Belanda/Komponi VOC pada tahun 1639 Maschi. Selain itu diberikan juga sebuah tongkat yang berukuran 3 jengkal tangan yang ujungnya runcing dan ditutup dengan emas, serta satu buah Harna Buah (*Binitholo*/ikat pinggang) berukuran satu jengkal tangan besarnya seperti telapak kaki dan berlapis lima dengan lima macam warna dan kodenya/sandinya bila ada sesuatu musibah/bahaya ada kode burung hantu (*Maluo Moluluwola*).
5. Beberapa harta karun yang tersimpan di tempat yang khusus, pusaka tersebut terbuka disaat cucunya yang ke tujuh (*to janjia de opitu lowombuliyo*) lahir sesuai dengan janjinya Raja Hurudji menyimpan pusaka tersebut.

Adapun pusaka/peninggalan dari Raja Hurudji raja dari kerajaan Boalemo ini tersimpan pada keturunannya, dan ada juga yang ingin mewarisi dan menyimpannya sebagai benda koleksi, sesepuh dari keluarga keturunan raja Boalemo berharap agar benda pusaka tersebut disimpan dan dijaga dengan baik.

## 2.6. Tradisi Kerajaan Boalemo

Kerajaan Boalemopun memiliki tradisi budaya hingga saat ini budaya tersebut masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat pendukungnya, tradisi kerajaan tersebut masih dapat kita jumpai pada perayaan peringatan upacara keagamaan, upacara serah terima camat (*wuleya lo lipu*), adat penyambutan tamu (*motombulu lo lipu*)

## III. PEMEKARAN KABUPATEN BOALEMO

### 3.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Boalemo

Boalemo adalah sebuah nama kerajaan sekitar abad 17 yang mempunyai wilayah kekuasaan di bagian barat Gorontalo. Pada zaman Belanda beberapa kali

terjadi perubahan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1925 Nomor 262, dimana Resident Gorontalo dibagi dalam 2 wilayah pemerintahan yaitu:

1. Onder Afdeling Gorontalo dengan onder distiknya yakni Atinggola, Kwandang, Sumalata, Batudaa,, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabila, Suwawa dan Bone Pantai.
2. Onder Afdeling Boalemo dengan onder distriknya yakni Paguyaman, Tilamuta dan Paguat.

Pada tahun 1946 terbentuklah Negara Indonesia Timur dimana status Keswaprajaan diperkuat sebagai mana terdapat pada UU No. 44/1946, sehingga daerah swapraja tidak lagi dimasukkan Balemo dan daerah Swapraja terjadi dari daerah: Gorontalo, Buol dan gabungan Bolaang Mongondow. Dengan keluarnya UU No. 29/1959 tentang Pembentukan Dati II se-Sulawesi, wilayah Boalemo menjadi salah satu Kewedanaan di Kabupaten Gorontalo. Status Kewedanaan Boalemo berlaku sampai keluarnya UU No. 5/1974 tentang yang selanjutnya dengan Permendagri No. 132/1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pembantu Bupati/Walikota/madya maka eks kewedanaan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati wilayah kerja Paguat yang meliputi 5 kecamatan yaitu Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa dan Popayato. Kecamatan Paguyaman selanjutnya dimekarkan menjadi Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Boliyohoto.

Memperhatikan aspirasi masyarakat sejak tahun 1964 maka Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (L.N. RI No. 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899). Kabupaten Boalemo adalah kabupaten termuda di Provinsi terbaru yakni Provinsi Gorontalo. Terbentuk berdasarkan UU No. 50 Tahun 1999. Pemekaran Kabupaten Boalemo sangat menarik, status kabupaten induk semestinya yang menjadi kabupaten induk adalah Boalemo dengan ibukota Marisa, tetapi karena daerah pemekaran tetap mempertahankan nama Boalemo, maka kabupaten induk mengalah dengan mengubah nama daerahnya menjadi Kabupaten Pohuwato. Karena Marisa dan 4 (empat) kecamatan lainnya yang ada di kabupaten induk memilih untuk mengalah, maka persoalan pemekaran di Boalemo untuk langkah pertama telah selesai (Gorontalo Post, 28 Mei 2002). Hal tersebut juga didukung oleh sikap masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada pemerintah pusat karena panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo tidak memiliki keputusan final atas permasalahan tersebut.

Namun demikian kesepakatan pada 24 Mei 2002 dan beberapa unsur elemen masyarakat Boalemo di rumah dinas bupati yang disaksikan oleh Tim Komisi II DPR RI, Gubernur Provinsi Gorontalo, Ketua DPR Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Boalemo serta Bupati Boalemo telah menetapkan 4 point kesepakatan adalah: (1) disepakati Kabupaten Boalemo dimekarkan menjadi dua

kabupaten yakni Boalemo dan Pohuwato. (2) wilayah Kabupaten Boalemo meliputi Kecamatan Paguyaman, Wonosari,, Dulupi, Tilmuta dan Manunggu. Sedangkan Kabupaten Pohuwato meliputi Kecamatan Paguat, Marisa, Randangan, Lemito dan Popayato. (3) selama belum dilaksanakan pemekaran, maka ibukota Kabupaten Boalemo tetap mengacu pada Pasal 7 Undang-undang No. 50 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ibukota Boalemo berada di Tilamuta (4) setelah pemekaran, Kabupaten Boalemo disetujui dan berubah nama menjadi Pohuwato.

Dalam proses pemekaran Kabupaten Boalemo, terdapat 2 (dua) instansi yang dibentuk untuk memperjuangkan terbentuknya kabupaten baru, yaitu Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKB) dan Komite Pelaksana Penyambutan Kabupaten Pohuwato (KP2KP). Maksud dan tujuan pendirian panitia tersebut adalah mempercepat proses pemekaran. Agenda kegiatan dari im tersebut selain berjuang melalui jalur pemerintahan juga mengadakan sosialisasi pada masyarakat, serta mengupayakan pemberian pelayanan sebaik-baiknya kepada Tim Pusat (Jakarta) yang akan turun ke Boalemo merealisasikan pemekaran.

Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Boalemo (P2DKB) mengadakan sosialisasi pada tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Boalemo yang meliputi Kecamatan Wonosari, Paguyaman, Dulupi, Tilamuta dan Manunggu. Sedangkan untuk wilayah rencana pemekaran Kabupaten Pohuwato sosialisasi dilakukan oleh Komite Pelaksana Penyambutan Kabupaten Pohuwato (KP2KP) yang meliputi wilayah Kecamatan Paguat, Marisa, Randangan, Lemito dan Kecamatan Popayato. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat Boalemo maupun Pohuwato tentang pemekaran yang sedang diperjuangkan. Pemahaman ini diperlukan karena pemekaran menurut anggapan sebahagian masyarakat hanya menjadi konsumsi segelitir kalangan saja, para elit-politik dan pemerintah (Gorontalo Post, 1 Agustus 2002). Dengan terbentuknya panitia pemekaran dan komite penyambutan sebenarnya sudah membuktikan kalau pemekaran telah tumbuh dari bawah, bukan keinginan elit politik belaka (Gorontalo Post, 29 Agustus 2002).

Setelah melalui beberapa tahapan antara lain usulan pemekaran Kabupaten Boalemo, kajian Tim Komisi II DPR RI dan Dewan Pertimbangan Otonom Daerah (DPOD) Departemen Dalam Negeri, serta pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI maka perjuangan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi Kabupaten Boalemo dan Pohuwato pada akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2003, satu paket undang-undang dengan Pembentukan Kabupaten Bone Boango.

Secara nasional pembahasan pada tingkat DPR RI tentang pemekaran Kabupaten Boalemo, dilakukan bersama dengan pemekaran dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Satu daerah di Jawa Barat dan 14 daerah di Irian Jaya merupakan usul dari eksekutif. Sedangkan yang termasuk usul legislatif sebanyak 8 daerah



diantaranya Pohnuato, Bone Bolango, Kotamobagu, Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan 2 daerah di Sulawesi Tenggara dan 1 daerah di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan Kabupaten Boalemo telah dimekarkan menjadi yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohnuato, sesuai UU No. 6 Tahun 2003, pemekaran tersebut dimaksudkan, guna menghindari polemik Ibukota Kabupaten Boalemo yang tertuang dalam pasal 7, bahwa ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta, selanjutnya pada pasal 8 disebutkan paling lambat 5 tahun kemudian ibukota dapat dipindahkan ke Marisa.

Pada awal perjalanannya setelah dilantiknya pejabat Bupati Boalemo (Ir. Iwan Bokings) pada tanggal 12 Oktober 1999 dan Sekertaris Daerah (Drs. Idris Rahim, MM) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, banyak hal-hal sulit yang telah dilalui dan akan menjadi pengalaman berharga bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Boalemo antara lain sebagai berikut:

1. Mobil oprasional Pemda hanya mobil bekas, yang dipinjamkan dari Pemda Kabupaten Gorontalo sebanyak 2 buah masing-masing untuk pejabat Bupati dan Sekda.
2. Dana operasional dari kabupaten induk sebesar 50 juta.
3. Menempati rumah-rumah penduduk, sebagai tempat kantor untuk dinas dan instansi.

Pada bulan Mei 2000, telah dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Utara, karena didukung semangat dan dibantu secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat, Alhamdulillah penyelenggaraan tersebut sangat berhasil bahkan dinilai merupakan penyelenggaraan yang sangat sukses.

Kemudian pada tahun 2003, telah mendapat dana dukungan perimbangan pusat, DAU serta hasil dari pendapatan daerah. Karena mulai tahun ini unsur legislatif telah terbentuk dan telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur legislasi, bugeting dan controlling.

Kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan antara lain penataan kelembagaan baik eksekutif maupun legislatif yang pada akhirnya pada tanggal 20 Juni 2001, dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati yang definitif dengan masa jabatan 2001–2006 yakni: Ir. Iwan Bokings dan M.K Dalanggo, BSc.

Kabupaten Boalemo adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2003 pada dimekarkan lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohnuato.

Adapun yang menjadi Visi dari Kabupaten Boalemo adalah terwujudnya Boalemo yang mandiri dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini maka pemerintah Kabupaten Boalemo dan masyarakat misi sebagai berikut:



1. Penyiapan aparatur pemerintah yang berkualitas.
2. Penyeleksian aparatur untuk pengisian format jabatan.
3. Mendorong semangat kerja aparatur melalui Reward and Punishment.
4. Pengembangan organisasi pemerintahan sesuai kebutuhan.
5. Pengelolaan administrasi pemerintahan secara kompeten.
6. Percepatan proses pemekaran wilayah.
7. Pertemuan berkala dengan lembaga legislatif.
8. Merumuskan standar pelayanan kepada masyarakat bagi dinas tertentu.
9. Menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan pengkajian pola dasar yang dilaksanakan oleh Pemda dan komponen-komponen masyarakat.
10. Menyusun kembali mekanisme perencanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
11. Menyiapkan mekanisme yang memberikan kepastian hukum bagi investor untuk pengembangan usahanya dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan masyarakat, PAD, kelestarian lingkungan dan HAM.
12. Membentuk BUMD dan membuka peluang keikut sertaannya bersama komponen masyarakat dalam menanamkan sahamnya.
13. Memberikan kesempatan pada pengusaha lokal untuk mendapatkan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan.
14. Meningkatkan penerimaan daerah sesuai potensi daerah.
15. Mengendalikan penggunaan keuangan untuk anggaran pembangunan dan rutin secara ketat dan efisien.
16. Melaksanakan pendataan secara terpadu tentang kemiskinan.
17. Mendorong dan membantu keikut sertaan dan insitusi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
18. Menyiapkan dana untuk pemberdayaan masyarakat dengan metode pelaksanaan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
19. Melibatkan masyarakat miskin secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan.

### 3.2. Gambaran Umum Kabupaten Boalemo

#### A) Lokasi

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo. Namun demikian, Kabupaten Boalemo lebih dulu terbentuk dari pada terbentuknya Provinsi Gorontalo.

Secara astronomis Kabupaten Boalemo terletak pada  $0^{\circ}24'04''$  -  $01^{\circ}02'30''$  LU dan  $121^{\circ}08'04''$  -  $123^{\circ}32'09''$  BT dan memiliki luas 2.510.40 km<sup>2</sup> atau 20,55% dari luas Provinsi Gorontalo. Wilayah-wilayah Kabupaten Boalemo memiliki ketinggian 0–1000 dari permukaan laut.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Boalemo setelah terpecah

kembali menjadi 2 kabupaten yaitu Boalemo dan Pohuwato adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 kecamatan dan 67 desa dengan ibukotanya Tilamuta. Adapun ke-7 kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Wonosari
2. Kecamatan Paguyaman
3. Kecamatan Paguyaman Pantai
4. Kecamatan Dulupi
5. Kecamatan Tilamuta
6. Kecamatan Botumoito
7. Kecamatan Mananggu

Dari seluas 2.510,40 km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Boalemo, wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Botumoito yaitu 762,60 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Paguyaman yakni 108,58 km<sup>2</sup>. Secara rinci luas wilayah pada masing-masing kecamatan adalah:

Tabel 1. Luas dan Jumlah Desa Pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Boalemo

| Kecamatan        | DPL<br>(meter) | Luas Daerah<br>(km <sup>2</sup> ) | % luas        | Jumlah<br>Desa |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Mananggung       | 21,0           | 551,60                            | 21,97         | 8              |
| Botumoito        | 8,0            | 762,60                            | 30,38         | 8              |
| Tilamuta         | 38,0           | 444,60                            | 17,71         | 11             |
| Dulupi           | 29,0           | 313,20                            | 12,48         | 8              |
| Paguyaman        | 41,0           | 108,58                            | 108,58        | 14             |
| Paguyaman Pantai | 18,0           | 153,80                            | 153,80        | 5              |
| Wonosari         | 56,0           | 176,02                            | 176,02        | 13             |
| <b>Jumlah</b>    |                | <b>2.510,40</b>                   | <b>100,00</b> | <b>67</b>      |

Sumber: BPS, Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2004.

### B) Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Boalemo pada tahun 2003 sebanyak 106.442 jiwa yang terdiri atas 53.813 laki-laki dan 52.629 perempuan. Dengan luas 2510,40 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Kabupaten Boalemo sebesar 43 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Paguyaman yaitu 233 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Boliyohuto yaitu 16 jiwa per km<sup>2</sup>. Rasio jenis kelamin penduduk Boalemo adalah 103. Ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2004 yakni menjadi sebanyak 109.434 jiwa. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Walaupun Kabupaten Boalemo menyimpan banyak potensi sumberdaya alam, namun sekitar 11.189 KK atau 33,67 % dari 29.735 KK penduduk Kabupaten Boalemo tergolong miskin. Karena itu pemerintah daerah Kabupaten Boalemo menaruh perhatian besar terhadap pengentasan kemiskinan. Berbagai upaya terobosan telah dilakukan dan hasilnya tingkat kemiskinan semakin menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2003 di Kabupaten Boalemo terdapat 156.492 jiwa penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut penduduk yang aktif secara ekonomi sebanyak 80.814 orang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Boalemo Selang Tahun 2001–2004

| Kecamatan        | Jumlah Penduduk |               |                |                |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 2001            | 2002          | 2003           | 2004           |
| Manunggu         | 10.579          | 9.515         | 10.318         | 10.856         |
| Tilamuta         | 32.052          | 31.112        | 21.218         | 22.314         |
| Botumoito        | -               | -             | 11.895         | 12.286         |
| Dulupi           | 12.782          | 12.506        | 13.249         | 13.644         |
| Paguyaman        | 29.892          | 27.617        | 25.192         | 24.168         |
| Paguyaman Pantai | -               | -             | 6.116          | 6.344          |
| Wonosari         | 18.100          | 16.384        | 18.454         | 19.826         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>103.365</b>  | <b>97.134</b> | <b>106.442</b> | <b>109.434</b> |

Sumber: BPS, Kabupaten Boalemo dan BKBPP 2005.

### C) *Kondisi Sosial Ekonomi*

Diukur dari indikator ekonomi selama kurun waktu lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Boalemo pada awal tahun 2000 sebesar 5,27 % berkat usaha pembangunan dan pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat Boalemo, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup pesat menjadi 7,44% pada tahun 2001, kemudian naik kembali menjadi 7,57 % pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 mengalami penurunan namun masih tetap di atas 5% yaitu 5,51 %. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi meningkat kembali sebesar 5,95%.

PDRB sebagai salah satu indikator daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp 49,542 M meningkat menjadi 573,234 M pada tahun 2001, selanjutnya meningkat kembali menjadi Rp 633,677 M pada tahun 2002, selanjutnya

pada tahun 2003 mengalami perubahan menjadi Rp 276,556 M. Perubahan ini disebabkan adanya pemekaran wilayah sehingga jumlah potensi yang menjadi indikator mengalami penurunan dari segi kuantitasnya. Demikian halnya dengan pendapatan perkapita masyarakat sebagai parameter kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2000 jumlah pendapatan per kapita masyarakat Boalemo sebesar Rp 2.503.290, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.857.784 pada tahun 2001, kemudian mengalami peningkatan kembali padatahun 2002 menjadi Rp 3.089.015 kemudian pada tahun 2003 mengalami perubahan menjadi Rp 2.532.684. Perubahan ini penyebabnya sama yaitu pemekaran wilayah yang menyebabkan indikator potensi dan jumlah penduduk mengalami perubahan.

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2000 PAD hanya sebesar 1.9 M pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 4M, selanjutnya pada tahun 2002 meningkat kembali menjadi 5,3 M yang selanjutnya pada tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi Rp 12,3 M.

Tabel 3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2000–2004

| Tahun | PDRB                        |                             | Pend<br>Perkapita<br>(Rp.) | Pertmbhn<br>Ekonomi<br>(%) | PAD<br>(Rp.) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|       | Harga<br>Berlaku<br>(Rp. M) | Harga<br>Konstan<br>(Rp. M) |                            |                            |              |
| 2000  | 493.542                     | 232.752                     | 2.593.903                  | 5.27                       | 1,3          |
| 2001  | 554.281                     | 250.065                     | 2.857.784                  | 7.44                       | 4,0          |
| 2002  | 633.677                     | 268.996                     | 3.089.015                  | 7.57                       | 5,3          |
| 2003  | 280.047                     | 114.464                     | 2.532.684                  | 5.51                       | 11,3         |
| 2004  | 312.053                     | 121.214                     | 2.869.018                  | 5.90                       | 4,3          |

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2004.

Kontribusi lima sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2001–2003 sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dimana sektor ini memberikan kontribusi diatas 3,7 % terhadap PDRB Kabupaten Boalemo terus menerus berupaya untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ke-5 sektor unggulan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4. Kontribusi 5 Sektor Unggulan Terhadap PDRB Kabupaten Boalemo Tahun 2001-2003

| No. | Sektor       | Tahun (%) |       |       |
|-----|--------------|-----------|-------|-------|
|     |              | 2001      | 2002  | 2003  |
| 1.  | Pertanian    | 37.64     | 38.42 | 38.75 |
| 2.  | Perikanan    | 8.59      | 10.48 | 10.68 |
| 3.  | Kehutanan    | 9.81      | 11.00 | 8.81  |
| 4.  | Pariwisata   | 7.06      | 6.09  | 6.15  |
| 5.  | Pertambangan | 2.01      | 2.01  | 2.49  |

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2004.

#### D) Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Kabupaten Boalemo selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik, salah satu indikatornya antara lain penurunan angka tingkat kemiskinan dari 53,35 % pada tahun 2001 menjadi 37,63 % pada tahun 2004. Hal ini juga merupakan indikator besarnya keberpihakan Pemda terhadap masyarakat yang diaktualisasikan melalui program pemberdayaan masyarakat baik melalui investasi langsung maupun tidak langsung.

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kabupaten Boalemo Tahun 2001-2004

| Tahun | Jumlah    |                        | Keterangan  |
|-------|-----------|------------------------|---|
|       | Penduduk  | Penduduk Miskin        |   |
| 2001  | 25.375 KK | 13.538 KK<br>(53,35%)  | Turun 7.15 % (1.032 KK)<br>Turun 2,65 % (298 KK)<br>Turun 6.61 % (1.019 KK) |
| 2002  | 27.070 KK | 12.506 KK<br>(46,20 %) |   |
| 2003  | 27.974 KK | 12.208 KK<br>(43,64%)  |   |
| 2004  | 29.735 KK | 11.189 KK<br>(37.63%)  |   |

Sumber: BKB-PP Kabupaten Boalemo, 2005.

Indikator lainnya yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Boalemo dapat diukur dari penurunan angka kematian bayi dari 66/1000 kelahiran hidup menjadi 53/1000 kelahiran hidup pada tahun 2004. Demikian juga untuk angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2002 sebesar 490/100.000 kelahiran hidup menurun menjadi 443/100.000 kelahiran hidup. Aspek lainnya adalah peningkatan

angka harapan hidup masyarakat Boalemo dari 61,07 tahun hingga pada tahun 2003 menjadi 66,1 tahun. Hal ini merupakan dampak semakin meningkatnya sarana prasarana kesehatan serta meningkatnya ketersediaan gizi yang dibutuhkan.

Tabel 6. Tingkat Kematian Ibu dan Anak serta Angka Harapan Hidup Kabupaten Boalemo tahun 2002–2004

| No. | Uraian              | Tahun      |             |             |
|-----|---------------------|------------|-------------|-------------|
|     |                     | 2002       | 2003        | 2004        |
| 1.  | Angka Kematian      | 66/1000    | 63/1000     | 53/1000     |
| 2.  | Kasus Kematian      | 490/100.00 | 475/100.000 | 443/100.000 |
| 3.  | Angka Harapan Hidup | 61,07 TH   | 63,0 TH     | 66,1 TH     |

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Boalemo, 2005.

#### E) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana fisik yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga tahun 2004 antara lain, pembangunan sarana prasarana transportasi dimana pada tahun 2001 telah jalan ATB sepanjang 36.320 m dan Awces sepanjang 29.250 m, pada tahun 2002 dibangun kembali jalan ATB sepanjang 18.820 m dan Awces sepanjang 12.580 m, pada tahun 2003 dibangun kembali jalan ATB sepanjang dibangun kembali jalan ATB sepanjang 17.720 m, Lapen sepanjang 14.780 m dan Awces sepanjang 26.740 m. Sementara untuk tahun 2004 ATB sepanjang 4500 m, Lapen sepanjang 27.780 m dan Awces sepanjang 8.500 m. Sehingga total sarana sarana transporasi jalan yang dibangun selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2004 untuk ATB sepanjang 77.360 m, Lapen sepanjang 32.560 m dan Awces sepanjang 77.070 m.

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Sarana Transportasi tahun 2001–2004

| No. | Jalan    | Tahun    |          |          |          | Total    |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |          | 2001     | 2002     | 2003     | 2004     |          |
| 1.  | ATB      | 36.320 m | 18.820 m | 17.720 m | 4.500 m  | 77.360 m |
| 2.  | Lapen    | -        | -        | 14.780 m | 17.780 m | 33.560 m |
| 3.  | Awcas    | 29.250 m | 12.580 m | 26.740 m | 8.500 m  | 77.070 m |
| 4.  | Jembatan | 373 m    | 79 m     | 5 m      | 21 m     | 478 m    |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo, 2005.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendidikan sejak tahun 2001 telah dibangun dan direhabilitasi TK/TPA seanyak 2 unit dan SD/MI sebanyak 17 unit. Pada tahun 2003 mengalami peningkatan jumlah saran pendidikan yang dibangun dan yang direhabilitasi TK/TPA sebanyak 6 unit, SD/MI 28 unit, SLTP 2 unit, SMK Kelautan 1 unit, sedangkan pada tahun 2004 dibangun antara lain TK/TPA 1 unit, SD/MI 25 unit, SLTP 3 unit serta SMK 3 unit. Selain infrastruktur jalan



dan pendidikan pemerintah daerah sejak tahun 2001 hingga tahun 2004 telah berupaya membangun dan melengkapi infrastruktur pemerintahan dan pelayanan umum masyarakat yaitu antara lain Pembangunan Kantor Bupati, Rumah Dinas, Kantor DPR, beserta rumah dinas dan mess DPRD, Kantor Pelayanan Bersama I, II dan III, pembangunan Kantor Camat di 7 kecamatan Pembangunan gedung BIPP, Pembangunan Kantor PMI, Pembangunan Stadion Olah Raga, Kolam Renang serta infrastruktur lainnya.

Tabel 8. Indikator APM dan APK Kabupaten Boalemo Tahun 2004

| Indikator | SD      | SLTP   | SLTA   |
|-----------|---------|--------|--------|
| APM       | 98,07%  | 60,17% | 40,16% |
| APK       | 100,21% | 68,31% | 43,19% |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, 2005.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Fisik Sekolah Yang Telah Dibangun 2001-2004

| No. | Sekolah         | Tahun |      |      |      |
|-----|-----------------|-------|------|------|------|
|     |                 | 2001  | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1.  | TK/TPA          | 2     | 3    | 6    | 1    |
| 2.  | SD/MI           | 17    | 28   | 19   | 25   |
|     | SLB             | -     | -    | 1    | -    |
| 3.  | SLTP            | 1     | 1    | 2    | 3    |
| 4.  | SMK KELAUTAN    | -     | -    | 1    | -    |
|     | SMK OTOMOTIF    | -     | -    | -    | 1    |
| 5.  | SMK WONOSARI    | -     | -    | -    | -    |
|     | SMU WONOSARI    | -     | -    | 1    | 1    |
|     | SMK PAG. PANTAI | -     | -    | -    | 1    |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, 2005.

#### F) Program Prioritas

Dalam rangka memacu pembangunan di Kabupaten Boalemo agar dapat sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih dulu terbentuk. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menerapkan Lima Program Unggulan (*Lipuu* Boalemo) *main stream* arah pembangunan yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Penunjang sektor unggulan

## 5. Peningkatan pelayanan masyarakat

Sejak awal berdirinya Kabupaten Boalemo menetapkan arah dan kebijakan pembangunan melalui langkah strategi dan prioritas APBD yang dijabarkan melalui lima program unggulan utama tersebut dengan alokasi anggaran yang selalu berpihak pada masyarakat miskin.

Tabel 10. Alokasi APBD Kab. Boalemo Berdasarkan Lima Program Unggulan Tahun 2001–2004

| No. | Program Unggulan                         | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Pemberdayaan Masyarakat                  | 3,8 % | 7,8 % | 13,8% | 8,04% |
| 2.  | Peningkatan Kualitas SDM                 | 31,6% | 43,0% | 68,1% | 37,0% |
| 3.  | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | 4,7%  | 8,7%  | 7,9%  | 2,7%  |
| 4.  | Penunjang Sektor Unggulan                | 28,1% | 29,9% | 37,6% | 43,6% |
| 5.  | Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat    | 29,2% | 41,8% | 42,0% | 19,4% |

Sumber: Bappeda Kabupaten Boalemo, 2005.

### g) Pemerintahan

#### a. SKPD

Berdasarkan organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Boalemo sekarang ini terdiri dari 2 Sekretariat, 5 badan, 10 dinas dan 5 kantor sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan
3. Insektorat Daerah
4. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD)
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Kepegawaian Diklat dan Litbang
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Pekerjaan Umum
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10. Dinas Perkebunan
11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi

14. Dinas Perikanan dan Kelautan
15. Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
16. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup
17. Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
18. Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan
19. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas)
21. Kantor satuan Polisi Pamong Praja (Sarpol PP)
22. OTK Kecamatan

**b. Aparatur**

Jumlah pegawai negeri yang bekerja di Kabupaten Boalemo pada tahun 2003 sebanyak 1.143 pegawai yang terdiri atas 96 pegawai golongan IV, 541 pegawai golongan III, 451 pegawai golongan II dan 55 pegawai golongan I. Secara rinci, jumlah pegawai negeri di Kabupaten Boalemo menurut golongan dan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Jumlah Pegawai Negeri di Kabupaten Boalemo Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2002 dan 2003

| Golongan              | 2002       | 2003         |
|-----------------------|------------|--------------|
| Gol IV                | 57         | 96           |
| Gol III               | 273        | 541          |
| Gol II                | 288        | 451          |
| Gol I                 | 31         | 55           |
| <b>TK. Pendidikan</b> |            |              |
| SD                    | 15         | 15           |
| SMP                   | 20         | 28           |
| SMU/SMK               | 269        | 498          |
| Diploma I/II          | 161        | 283          |
| Diploma III           | 54         | 96           |
| Sarjana               | 125        | 218          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>649</b> | <b>1.143</b> |

Sumber: BKD Diklat/Litbang Kabupaten Boalemo, 2004.

**c. Tenaga Kontrak**

Selain pegawai negeri di Kabupaten Boalemo terdapat juga tenaga honorer. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 12. Jumlah Tenaga Honor di Kabupaten Boalemo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2004

| Tingkat Pendidikan | Jumlah       |
|--------------------|--------------|
| SD                 | 56           |
| SMP                | 369          |
| SMA                | 867          |
| SMK                | —            |
| Diploma I / II     | 49           |
| Diploma III        | 35           |
| Sarjana            | 49           |
| <b>Jumlah</b>      | <b>1.468</b> |

Sumber: BKD, Diklat / Litbang Kabupaten Boalemo, 2005.

Pada tahun 2004 jumlah tenaga honorer tersebut sebanyak 1.486 orang dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 56 orang, SMP sebanyak 369 orang, SMA sebanyak 867, Diploma I dan II sebanyak 40 orang, Diploma III sebanyak 35 orang, Sarjana (S-1) 48 orang dan (S-2) 1 orang.

### H) Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Boalemo banyak memiliki sumber daya alam, yang terdiri atas sumber daya laut, hutan, lahan pertanian, dan pertambangan yang belum dikelola secara optimal.

#### a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang yang terbesar PDRB Kabupaten. Sektor ini menyangkut pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pada sektor ini pula sebahagian rakyat Kabupaten Boalemo menggantungkan hidupnya. Adapun potensi lahan pertanian di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Potensi Lahan Sawah dan Lahan Kering di Wilayah Kabupaten Boalemo

| No. | Kecamatan        | Lahan Sawah (Ha) |                 | Lahan Kering (Ha) |               |
|-----|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|     |                  | Potensi          | Diolah          | Potensi           | Diolah        |
| 1.  | Mananggu         | 455              | 301,5           | 4.5405            | 3.482,5       |
| 2.  | Tilamuta         | —                | —               | 7.962             | 6.130         |
| 3.  | Botumoito        | 115              | 22              | 2.581             | 2.270         |
| 4.  | Dulupi           | —                | —               | 7.962             | 6.130         |
| 5.  | Paguyaman        | 2.953            | 915,87          | 17.809            | 9.412         |
| 6.  | Paguyaman Pantai | —                | —               | 12.195            | 3.163         |
| 7.  | Wonosari         | 4.215            | 2.078           | 16.878            | 5.286         |
|     | <b>Jumlah</b>    | <b>7.738</b>     | <b>3.317,37</b> | <b>64.427</b>     | <b>31.715</b> |

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab. Boalemo, 2005.

## b. Potensi Perikanan dan Kelautan

Sumberdaya pesisir dan kelautan dewasa ini menjadi salah satu modal dasar pembangunan Indonesia yang sangat penting mengingat kontribusi dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan ini terhadap Produk Domestik Bruto. Selain memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, wilayah pesisir juga merupakan kawasan utama dari beberapa sektor industri serta lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal dikawasan ini. Secara Bio-Ekologi sumberdaya pesisir dan kelautan di Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman yang sangat tinggi sehingga perlu dijaga kelestariaannya.

Implikasi dari keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk Provinsi dan 4 mil untuk kabupaten serta diberikan kekuasaan untuk membuat dan mengembangkan aturan lokal dan membuka peluang yang luas bagi pengembangan model desentralisasi berbasis masyarakat bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan.

Melihat pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Boalemo, hal ini sangat menguntungkan karena Kabupaten Boalemo juga memiliki pulau-pulau kecil yang berjumlah 13 serta secara geografis langsung dengan Teluk Tomini dengan panjang garis pantai 320 km. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Boalemo menyimpan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan baik dari usaha perikanan tangkap maupun dari usaha perikanan budidaya. Perairan Teluk Tomini merupakan daerah yang kaya dengan jenis-jenis ikan pelagis besar yang bernilai ekonomis serta perairan ini relatif aman dan kondusif ditinjau dari segi iklim dan cuaca yang mendukung dan didiami oleh berbagai jenis ikan yang beragam seperti: tuna, cakalang, layang, tenggiri, ikan karang dan lain-lain.

Selain potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya laut juga sangat potensial di bidang perikanan air payau serta memiliki 37 desa pesisir. Potensi yang demikian besar ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian dari masyarakat, sehingga dalam kebijaksanaan pembangunan yang dirumuskan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Boalemo (Perda No. 2 Tahun 2001), sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah selain empat sektor unggulan lainnya yakni pertanian, dalam arti umum (tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan), kehutanan, pariwisata dan pertambangan.

Upaya peningkatan partisipasi otonomi dari pemerintah daerah yang merupakan substansi pokok UU No. 22 memberikan kesempatan yang baik bagi upaya penerapan model-model berbasis masyarakat di desa-desa pesisir.

Tabel 14. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

| Uraian              | Potensi        | Pemanfaatan     |
|---------------------|----------------|-----------------|
| Perikanan Tangkap   | 10.320 ton/thn | 5,447,7 ton/thn |
| Perikanan Budidaya  | 2.300 Ha       | 72 Ha           |
| Perikanan Air Payau | 165 Ha         | 34 Ha           |

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, 2005.

Perikanan tangkap sebesar 10.320 ton/tahun (ikan tuna, cakalang, layang dan lain-lain), yang telah dimanfaatkan baru 5.447,7 ton/tahun, ternyata pemanfaatannya masih rendah sehingga masih sangat terbuka luas peluang dalam kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan. Terbatasnya tingkat kemampuan serta masih minimnya teknologi dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan sehingga jarak jangkauan lokasi jangkauan eksploitasinya terbatas disekitar daerah perairan pantai saja. Untuk itu sangat dibutuhkan pengembangan struktur armada penangkapan yang dibagi atas kategori 30 GT ke atas untuk perairan dalam, kapal 10 GT – 30 GT untuk perairan 4 mil serta motorisasi perahu dayung/layar yang ada, melalui penembangan usaha dengan pola kemitraan usaha. Selain itu bila struktur armada penangkapan sudah dikembangkan maka harus diimbangi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti dermaga, pabrik es dan *cool storage*. Daerah-daerah yang dapat dikembangkan adalah kecamatan, Dulupi, Tilmuta, Paguyaman Pantai dan Manunggu.

Tabel 15. Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Boalemo tahun 2004

| No. | Jenis Ikan    | Produksi (ton) |
|-----|---------------|----------------|
| 1.  | Layang        | 331,30         |
| 2.  | Cakalang      | 827,60         |
| 3.  | Selar         | 93,40          |
| 4.  | Tenggiri      | 17,70          |
| 5.  | Tuna          | 412,50         |
| 6.  | Kembung       | 128,60         |
| 7.  | Udang         | —              |
| 8.  | Teri          | 1.553,80       |
| 9.  | Tongkol       | 382,70         |
| 10. | Lamuru        | —              |
| 11. | Bawal         | 243,30         |
| 12. | Suglir        | 1,30           |
| 13. | Tembang       | 45,8           |
| 14. | Kerapu        | 166,40         |
| 15. | Terbang       | 129,10         |
| 16. | Ekor Kuning   | 135,30         |
| 17. | Kuwe          | 179,80         |
| 18. | Bambangan     | 51,30          |
| 19. | Belanak       | 15,80          |
| 20. | Cumi-Cumi     | 291,90         |
| 21. | Lencam        | 103,40         |
| 22. | Cendana       | 30,10          |
| 23. | Cendro        | 30,80          |
| 24. | Julung-Julung | 34,30          |
| 25. | Alu-Alu       | 39,50          |
| 26. | Tetengkeh     | 25,80          |
| 27. | Baronang      | 119,70         |
| 28. | Hiu           | 2,1            |
| 29. | Lainnya       | 16,40          |
|     | Jumlah        | 5.447,3        |

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, 2005.



Tabel 16. Nilai Produksi Ikan di Kabupaten Boalemo tahun 2003–2004

| No. | Lokasi       | 2003 (Rp)     | 2004 (Rp)     |
|-----|--------------|---------------|---------------|
| 1.  | TPI Tabula   | 298.366.900   | 322.699.000   |
| 2.  | TPI Tutulo   | 174.194.000   | 220.856.000   |
| 3.  | TPI Tilamuta | 2.074.690.000 | 1.745.191.500 |
| 4.  | TPI Dulupi   | 60.521.000    | 168.064.500   |
|     | Jumlah       | 2.607.772.000 | 2.456.811.000 |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, 2005.

Tabel 17. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Boalemo tahun 2003–2004

| No. | Uraian                 | 2003 (unit) | 2004 (unit) |
|-----|------------------------|-------------|-------------|
| 1.  | Tempat Pelelangan Ikan | 5           | 5           |
| 2.  | Cold Storage           | 1           | 1           |
| 3.  | Hatchery               | 3           | 2           |
| 4.  | Perahu Motor Tempel    | 1.027       | 550         |
| 5.  | Perahu Tanpa Motor     | 509         | 289         |
| 6.  | Purse Seine            | 8           | 5           |
| 7.  | Pole and Line          | 11          | 15          |
| 8.  | Gillnet                | 301         | 108         |
| 9.  | Handline               | 931         | 285         |
| 10. | Bagan                  | 93          | 60          |
| 11. | Bubu                   | 84          | 554         |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, 2005.

Perikanan budidaya laut dengan potensi 2300 ha, tapi yang dimanfaatkan baru 72 ha, pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga masih terbuka lebar peluang untuk pengembangan usaha budidaya laut, yang sangat potensial adalah budidaya rumput laut yang tersebar disemua kecamatan, dan budidaya kerang mutiara (P.T Maria Southsea Pearls Ind). Sedang untuk budidaya ikan karapu yang intensif baru 1 (satu) perusahaan yakni UD Surya Lestari, sedangkan jenis ikan Karapu yang mempunyai nilai ekonomis penting adalah: Napoleon (*Cheilinus Undulatus*), Karapu Tikus (*Cromileptes Atevelis*) dan Karapu Sunu (*Plectropomus Leopardus*), untuk lobster masih terbatas dalam kegiatan pembesaran karena masih mengandalkan benih dari alam. Secara keseluruhan dari kondisi perairan yang

relatif tenang, masih tersedia lahan yang dapat dimanfaatkan dan menyebar merata di semua kecamatan.

Saat ini peluang pengembangan usaha budidaya rumput laut sangat terbuka lebar karena dari luas lahan ada belum dimanfaatkan secara maksimal, metode budidaya yang relatif sederhana dan mudah serta permintaan rumput laut yang terus meningkat dan harganya cukup tinggi. Produksi tersebut dipasarkan di wilayah Kabupaten Boalemo, Gorontalo dan antar pulau (ekspor).

Tabel 18. Volume Produksi Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Boalemo tahun 2002–2003

| Uraian              | Tahun 2002      | Tahun 2003    |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Jumlah Kelompok     | 67              | 52            |
| Produksi (ton)      | 300             | 240           |
| Nilai Produksi (Rp) | 1.050.000.000,- | 720.000.000,- |

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo, 2005.

Perikanan air payau/tambak yang seluas 2.046 ha yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya udang windu, bandeng, kepiting bakau serta teripang yang baru bisa dimanfaatkan baru sekitar 165 ha dan yang berproduksi sekitar 34 ha. Daerah yang dapat dikembangkan untuk budidaya tambak adalah Kecamatan Tilmuta dan Mananggu. Dalam membuka dan memanfaatkan lahan yang ada selalu memperhatikan dan mengembangkan adanya kawasan *Green Belt* hutan bakau serta pengelolaan yang ramah lingkungan.

### c. Potensi Kehutanan

#### 1. Luas Areal Hutan

Luas hutan Kabupaten Boalemo adalah 127.484 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Hutan Lindung : 8.925 Ha
- Hutan Produksi terbatas : 80.416 Ha
- Hutan Produksi Tetap : 8.575 Ha
- Hutan Suaka Alam : 7.568 Ha
- Hutan yang dapat dikonversi : 12.000 Ha

#### 2. Potensi Tegakan

Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2000 potensi tegakan hutan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

- Potensi Tegakan d = 20 – 49 cm
- Potensi Tegakan c = 50 cm

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| b. Nyateh    | 1.912 m <sup>3</sup> - a |
| c. Bintangur | 1.257 m <sup>3</sup> - a |
| d. Palapi    | 920 m <sup>3</sup> - a   |
| e. Rap       | 322 m <sup>3</sup> - a   |
| f. Batungale | 1.744 m <sup>3</sup> - a |
| g. Bayur     | 679 m <sup>3</sup> - a   |
| h. Meranti   | 1.813 m <sup>3</sup> - a |
| i. Cempaka   | 848 m <sup>3</sup> - a   |
| j. Motoduto  | 421 m <sup>3</sup> - a   |

### 3. Potensi Organisme endemik

Potensi suaka alam marga satwa Nantu sangat kaya akan organisme endemik, utamanya babi rusa, anoa, monyet hitam Sulawesi, tarsius, burung alo dan babi hutan Sulawesi. Beberapa jenis diantaranya tergolong langka dan hampir punah. Jika tidak segera dilindungi maka dikuatirkan akan punah.

### 4. Potensi Hutan Lainnya

Hasil hutan yang lain di Kabupaten Boalemo berupa rotan yang mencapai 25 ton/ha pada luas 15.000 ha. Selain itu juga berupa damar yang mencapai 967kg/ha pada luas lahan 2000 ha.

### 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dari luas hutan produksi 88.991 ha yang sedang dikelola dalam bentuk HPH seluas 55.000 ha oleh PT Taiwi Unit III berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 929/KPTS-II/1991, namun pada tahun 2004 PT Taiwi sudah tidak aktif lagi.

### 6. Produksi Hasil Hutan

Produksi hasil hutan Kabupaten Boalemo dari tahun 2001–2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Boalemo tahun 2001–2004

| Jenis                            | 2001     | 2002   | 2003     | 2004    |
|----------------------------------|----------|--------|----------|---------|
| Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )     | 5.120,67 | 5.8313 | 3.638,66 | 150,93  |
| Kayu Gergajian (m <sup>3</sup> ) | 211,20   | 8.184  | 8.090,06 | 5.416,9 |
| Rotan (ton)                      | 2.165    | 3.400  | 2.100    | 910     |

### 7. Industri RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu gergajian di Kabupaten Boalemo terdapat perusahaan Pemegang Ijin Rencana Pemenuhan bahan Baku Industri (RPBI) yaitu:

- CV. Wahana Citra Lestari (tidak aktif)
- PT. Zen Rimba Raya
- UD. Cemara Hijau
- CV. Sinar Jaya
- CV. Akar Indah
- UD. Mahoni Pratama

#### d. Potensi Pertambangan

Pertambangan Bahan Galian kategori C merupakan pertambangan skala kecil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Potensi bahan galian C di Kabupaten Boalemo tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 20. Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Boalemo

| No. | Jenis                | Lokasi           | Volume Cadg (m <sup>3</sup> ) |
|-----|----------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.  | Granit               | Mananggu         | 78.514.923,9                  |
| 2.  | Granit               | Wonosari         | 58.638.743                    |
| 3.  | Ganit                | Paguyaman        | 3.920.428.713                 |
| 4.  | Dasit                | Dulupi           | 144.094.728                   |
| 5.  | Dasit                | Botumoito        | 1.393.426.664                 |
| 6.  | Dasit                | Tilamuta         | 581.772.199                   |
| 7.  | Basal                | Tilamuta         | 9.935.662.308                 |
| 8.  | Sirtu                | Wonosari         | 9.381.600                     |
| 9.  | Sirtu                | Tilamuta         | 482.700                       |
| 10. | Sirtu                | Wonosari         | 32.276.488                    |
| 11. | Lempung              | Paguyaman        | 218.70.080                    |
| 12. | Lempung              | Dulupi           | 16.099.470                    |
| 13. | Lempung              | Wonosari         | 87.084.000                    |
| 14. | Urugan               | Wonosari         | 32.276.488                    |
| 15. | Batugamping Terumbuh | Paguyaman Pantai | 1.108.966.666                 |

Sumber : Final Report Potensi Pertambangan Bahan Galian C dan Energi Kabupaten Boalemo, 2005.

#### e. Potensi Pariwisata

Kabupaten Boalemo memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai daerah wisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam lima program unggulan utama *Lipuu* Boalemo. Adapun potensi pariwisata yang dapat dijadikan obyek wisata di Kabupaten Boalemo antara lain:

Tabel 21. Potensi Wisata di Kabupaten Boalemo

| No. | Nama Aset  | Lokasi                           | Keterangan   |
|-----|--|----------------------------------|--|
| 1.  | Wisata Budaya                                    | Kec. Mananggu                    | Tarian Maengket (Suku Minahasa)  |
| 2.  | Wisata Alam: Danau Teratai                       | Kec. Mananggu                    | Dekat Jl. Trans Sulawesi   |
| 3.  | Wisata Bahari: Dermaga Etalase Tabulo            | Kec. Tamanggu                    | Pemandangan Alam/gunung sekitar dermaga  |
| 4.  | Wisata pantai: Boalemo Indah                     | Kec. Botumoito<br>Desa Bolihutuo | Pasir putih sepanjang pantai dengan pohon pinus yang tertata rapi sepanjang 2.5 km |
| 5.  | Wisata bahari: Pulau Bitila                      | Kec. Mananggu                    | Pulau dengan terumbu karang yang sangat indah                                      |
| 6.  | Wisata alam: Sumber Mata air panas               | Kec. Botumoito                   | Direncanakan dibuat kolam renang air panas   |
| 7.  | Wisata Budaya: Tarian di atas Bara Api (Dayango) | Desa Ayuhulalo<br>Kec. Tilamuta  | Tarian ini ditampilkan untuk tolak bala/mengusir roh jahat                         |
| 8.  | Wisata alam Air Terjun                           | Desa Ayuhulalo<br>Kec. Tilamuta  |  |
| 9.  | Wisata alam: Kolam Renang                        | Desa Ayuhulalo<br>Kec. Tilamuta  | Sebagai sarana olahraga dan rekreasi (sementara dlm Proses)                        |
| 10. | Wisata Budaya: Tarian Tradisional Dana-Dana      | Desa Ayuhulalo<br>Kec. Tilamuta  | Diiring alat-alat tradisional  |
| 11. | Wisata Alam: Pulau Pasir                         | Desa Bajo Kec.<br>Tilamuta       | Seutuhnya pulau ini terdiri dari pasir putih                                       |
| 12. | Wisata Alam: Pulau Mohupompa                     | Kec. Tilamuta                    | Habitat burung dan kelelawar   |
| 13. | Wisata Alam: Pulau Asiangi                       | Kec. Tilamuta                    | Pulau pasir putih yang mempunyai nilai sejarah                                     |
| 14. | Wisata Adat: Pemukiman Suku Bajo                 | Kec. Tilamuta                    | Keunikan pemukiman terapung suku bajo yang unik                                    |
| 15. | Wisata Alam: Puncak Dulupi                       | Kec. Dulupi                      | Pemandangan yang indah di atas bukit Desa Dulupi                                   |
| 17. | Pura dan Tarian Bali                             | Kec. Wonosari                    | Ramai dikunjungi saat upacara keagamaan  |
| 18. | Wisat Alam: Teluk Bubaa, Teluk Limbatihu         | Kec. Paguyaman<br>pantai         | Teluk yang jernih dengan pantai pasir putih  |
| 19. | Wisata Tirta: sepanjang Sungai Paguyaman         | Kec. Paguyaman                   | Sungai pemisah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo                                     |

Sumber : Fakta dan Analisis Kajian Kabupaten Boalemo 2003.

Pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari tersedianya sarana penunjang pariwisata yang sangat berpengaruh seperti hotel, penginapan dan restoran, rumah makan dan kafe. Hampir setiap rumah makan dan kafe menyediakan menu *sea food* dan *dabu-dabu sambal* khas Gorontalo. Fasilitas penginapan terdapat di Kota Tilamuta.

Tabel 22. Daftar nama Restoran/Rumah Makan/Kafe dan Hotel/ Restoran di Kabupaten Boalemo

| No. | Kecamatan | Nama Restoran/RM/Kafe   | Hotel/Penginapan                              |
|-----|-----------|---|---|
| 1.  | Paguyaman | RM Sederhana<br>RM Miranti<br>RM Tapal Batas<br>RM Ridwan<br>RM Pumama<br>RM Mawar Elsa<br>RM Kawanua<br>RM Kita<br>RM Fatimah  |   |
| 2.  | Wonosari  | —   | —   |
| 3.  | Dulupi    | —   | —   |
| 4.  | Tilamuta  | Kafe Boalemo Indah<br>RM Kairo<br>RM Mesir<br>RM Ahlan<br>RM Fitri<br>RM Jampang<br>RM Ceria<br>RM Surya Indah<br>RM Sederhana<br>RM Ancol Mini<br>RM Proklamasi<br>Kafe Seruni<br>RM Lestari | Penginapan<br>Indraloka<br>Penginapan Pratama |
| 5.  | Mananggu  | RM Steval<br>RM Alven<br>RM Panorama  |   |

Sumber : Fakta dan Analisis Kajian Kabupaten Boalemo 2003.



## IV. PENUTUP

### 4.1. Simpulan

Sebelum masa penjajahan Belanda daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo antara lain "Kerajaan Boalemo" di Tilamuta, kerajaan itu telah bergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohalaa". Pembagian pohalaa pun terbagi atas dua bagian yakni "pohalaa luar" dan "pohala dalam".

Kerajaan Boalemo Tilamuta saat pertama terbentuk dan berdiri termasuk dalam ikatan langsung dengan Kerajaan Ternate yang berlangsung 2 abad lamanya. Hal ini dibuktikan dengan orang tua (ibu) dari raja Boalemo pertama (Raja Hurudji) adalah putri dari keturunan Sultan Babullah dari Ternate yang bernama Zaenab Sultan Babullah yang menikah dengan putra bangsawan dari Bone (Sulawesi Selatan) yang bernama IDRUS ANDI IS MAPANYUKKI yang semasih hidupnya pernah memerintah menjadi raja di Pulau Peling bagian timur Kerajaan Bonggawan sekitar tahun 1583. Dari perkawinan putra dari Bone dengan putri dari Kerajaan Ternate ini melahirkan 4 orang putra dan putranya yang tertua bernama "Hurudji" menjadi raja pertama pada Kerajaan Boalemo.

Pada masa pemerintahan raja pertama hingga raja ke enam Kerajaan Boalemo masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Ternate dalam status "Pohalaa Luar" yang berlangsung 2 abad lamanya. Pada tahun 1793 Kerajaan Boalemo memisahkan diri dengan Kerajaan Ternate dan mulai berdiri sendiri dan diperintah oleh Raja Mustapa sebagai raja yang ketujuh pada Kerajaan Boalemo, beliau adalah keturunan ke tiga dari "Raja Hurudji" dan merupakan cucu yang pertama.

Pada tahun 1855 raja Mustapa dipecat oleh pemerintah kolonial Belanda karena tidak mentaati pelaksanaan kontrak yang setiap tahunnya upoti yang dibayarkan sebesar 200 real kepada pemerintah kolonial Belanda dan beliau ditangkap dan diasingkan ke Ternate hingga meninggal dunia tidak dipulangkan ke daerah asalnya.

Sependinggal raja Mustapa pemerintah kolonial Belanda mengganti kedudukan raja dengan bentuk pemerintahannya sendiri dan rakyat Boalemo pada saat itu berusaha keras menentang para penjajah kolonial Belanda dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, perlawanan yang tidak berimbang maka terjadilah pertempuran dan mengakibatkan banyak tentara kolonial Belanda yang mati terbunuh oleh rakyat yang bersenjatakan bambu runcing, mayat-mayat dari tentara kolonial Belanda ini dibuang pada satu pulau yang bernama Pulau A-Siangi yang artinya pulau tempat pengasingan mayat-mayat dari penjajah.

Pertumpahan darah yang terus-menerus di Kerajaan Boalemo maka raja Abdurrahman dari Kerajaan Limboto membantu rakyat Boalemo dan akhirnya ditangkap oleh kolonial Belanda dan diasingkan ke Ambon.

Atas usul raja Suwawa Arus Bone I kepada rakyat Limboto untuk mengangkat seorang keturunan Limboto untuk menjadi raja, pada saat itu ada 3 bersaudara keturunan Limboto yang diangkat *bate* (pemangku adat) yaitu *bate* Potutu, *bate* Abuna dan *bate* Hulongge, maka yang dinobatkan menjadi raja adalah yang tertua yakni *bate* Potutu menjadi *olongia* (raja) Limboto dan sekaligus merangkap memerintah wilayah Boalemo sampai perbatasan Sungai Popayato yang berlangsung lebih kurang selama 7 tahun. Sehingga dalam sejarah Limboto disentil Limboto/Limitutu berbuah sampai Boalemo/Tilamuta yang berarti buahnya Limututu sampai ke Boalemo Tilamuta, ucapan ini menggambarkan bahwa perjalanan sejarah Boalemo mempunyai ikatan dan hubungannya dengan Kerajaan Limboto, Suwawa dan Gorontalo.

Pada pertengahan tahun 1862 wilayah Kerajaan Boalemo dimasukkan dalam ikatan “*U DULUWO LIMO LOPOHALAA*” Gorontalo oleh raja Potutu menggantikan “*POHALAA BOLANGO*” yang dihapuskan pada tahun 1860 dan masuk dalam status pahalaa dalam.

Berdasarkan hal dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang lebih berkembang sejak tahun 1964 yakni pembentukan Kabupaten Boalemo maka atas dukungan Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo serta Gubernur dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara maka Presiden RI dan DPR RI menetapkan UU No. 50 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899). Kabupaten Boalemo adalah kabupaten termuda di propinsi terbaru yakni Propinsi Gorontalo. Terbentuk berdasarkan UU No. 50 tahun 1999, selanjutnya dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan Kabupaten Boalemo telah di mekarkan menjadi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan UU No. 6 tahun 2003, pemekaran tersebut dimaksudkan guna menghindari polemik Ibukota Kabupaten Boalemon yang tertuang dalam pasal 7, bahwa ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta, selanjutnya pada pasal 8 disebutkan paling lambat 5 tahun ibukota dapat dipindahkan ke Marisa.

Pemberian nama kabupaten/kota pada daerah yang dimekarkan ada hubungan yang erat mengikuti nama kerajaan dulu yang tergabung dalam Limo Lo Pahalaa Gorontalo. Pusat kota/kabupaten juga mengikuti pusat kerajaan dulu, demikian pula wilayahnya dan batas-batasnya terlihat pada Kabupaten Boalemo diambil dari nama Kerajaan Boalemo. Pusat kota, wilayahnya dan batas-batas wilayahnya tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Boalemo dulu.

#### 4.2. Saran

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Boalemo dari Kabupaten Gorontalo (induk) diharapkan dapat lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Karena dalam hal pengangkatan dan pemilihan pemimpin/ketua serta perekrutan pegawai, mulai nampak adanya

dominasi keluarga dan golongan tertentu. Dalam hal perekrutan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu serta pengangkatan pegawai baru mulai mengarah kepada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Demikian pula sifat fanatisme dan sukuisme mulai nampak, dimana yang menduduki jabatan dan rekrutmen pegawai harus berasal dari putra daerah walaupun tidak memenuhi kriteria persyaratan serta menolak putra daerah lain walaupun punya kemampuan dan keahlian di bidangnya. Lahirnya kabupaten baru tidak menimbulkan egoisme dan fanatisme serta sukuisme atau etnis sentris yang berlebihan karena akan merusak pembangunan di daerah serta jangan sampai terjebak dalam persoalan primordial sempit.

Diharapkan kabupaten yang baru dimekarkan untuk membuka diri dalam menerima kehadiran putra-putra luar yang dianggap mampu membangun dan memajukan daerah baru tersebut agar dapat memajukan pemerataan pertumbuhan kehidupan demokrasi serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex J. Ulaen, 2003. "Pemekaran Wilayah: Haruskah Ke Akar Etnis?", dalam *Makalah. Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi, 19-22 Oktober 2003*.
- Hasanuddin, 2004. *Gorontalo: Tantangan dan Kebijakan Sosial, Politik & Ekonomi Kolonial Belanda*. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado kerjasama Pemerintah Kota Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ dkk, 2004. *Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pemekaran Wilayah Serta menguatnya Kesadaran Etnis di Propinsi Gorontalo*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado. Proyek pemanfaatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara.
- Ikrar Nusa Bhakti, 2005. "Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi", dalam Dewi Fortuna Anwar (Eds). *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS & KITLV-Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Boalemo, 2004. *Profil Kabupaten Boalemo*. Pemerintah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo
- \_\_\_\_\_, 2005. *Profil Kabupaten Boalemo Boalemo Bertasbih*.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Profil Desa Pesisir Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo*. Tilamuta.
- Sartono Kartodirdjo, 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng, 2005. "Meninjau Kebijakan Pemekaran Wilayah", dalam *Jurnal Hukum Jentera Legislasi*. Jakarta: Jentera.

